



JACS MFM
FINANCE



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasional, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan JACCS MPM Finance Indonesia, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi JACCS MPM Finance Indonesia pada masa mendatang serta lingkungan bisnis di mana JACCS MPM Finance Indonesia menjalankan kegiatan usaha. JACCS MPM Finance Indonesia tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "JACCS MPM Finance Indonesia" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp", atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam Bahasa Inggris dengan informasi dalam Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

This Annual Report contains statements regarding the financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of JACCS MPM Finance Indonesia, which are categorized as forward-looking statements in accordance with applicable laws and regulations, except for matters of a historical nature. These statements involve risks and uncertainties and may cause actual developments to differ materially from those reported. The forward-looking statements in this Annual Report are based on various assumptions about current conditions, the future condition of JACCS MPM Finance Indonesia, and the business environment in which JACCS MPM Finance Indonesia operates. JACCS MPM Finance Indonesia does not guarantee that these verified documents will achieve the expected results.

This Annual Report uses the terms "JACCS MPM Finance Indonesia" and "the Company," which are defined as PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, operating in the financing business sector. The references to the currency "Rupiah," "Rp," or "IDR" refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

This report is presented in both Indonesian and English, using fonts and sizes that are easy to read and of good print quality. In the event of any discrepancy or differing interpretation between the English and Indonesian versions, the information in the Indonesian version shall prevail.

Tentang Tema

About the Theme

Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari upaya PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (“Perseroan”) dalam memperkuat fondasi bisnis dan meningkatkan ketahanan jangka panjang di tengah dinamika ekonomi dan industri pembiayaan yang terus berkembang. Dengan mengusung tema “RISE Together,” Perseroan menegaskan komitmennya untuk bertumbuh secara berkelanjutan melalui kolaborasi dan keselarasan langkah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Tema “RISE Together” mencerminkan empat pilar utama strategi Perseroan, yaitu *Resilience*, *Innovation*, *Strength*, dan *Excellence*. *Resilience* diwujudkan melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas aset, serta disiplin operasional yang konsisten. *Innovation* terus didorong melalui optimalisasi digitalisasi dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan kualitas layanan. Sementara itu, *Strength* tercermin dari fokus pada segmen pembiayaan bermargin tinggi, perluasan pasar yang terukur, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan *Excellence*, Perseroan menempatkan standar tinggi dalam aspek kinerja, tata kelola, dan kepatuhan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan fondasi yang kuat, inovasi yang relevan, serta komitmen bersama untuk terus meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

The year 2025 marks the continuation of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia’s (“the Company”) efforts to strengthen its business foundation and enhance long-term resilience amid the evolving economic landscape and dynamic financial services industry. Under the theme “RISE Together,” the Company reaffirms its commitment to sustainable growth through collaboration and alignment with all stakeholders.

The “RISE Together” theme embodies four key strategic pillars of the Company: Resilience, Innovation, Strength, and Excellence. Resilience is realized through strengthened risk management, improved asset quality, and consistent operational discipline. Innovation is continuously driven by optimizing digitalization and leveraging data to enhance business process efficiency and service quality. Meanwhile, Strength is reflected in the focus on high-margin financing segments, measured market expansion, and the sustained implementation of good corporate governance.

In pursuing Excellence, the Company upholds high standards in performance, governance, and compliance as an integral elements of its corporate culture. By consistently applying these principles, the Company believes that healthy and sustainable growth can only be achieved on the basis of a strong foundation, relevant innovation, and a shared commitment to continuously enhancing value for all stakeholders.



Daftar Isi

Contents

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

Tentang Tema
About the Theme

Daftar Isi
Contents

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	6
Pelibatan Pihak Lokal yang Berkaitan dengan Proses Bisnis Berkelanjutan Local Stakeholder Involvement in the Sustainable Business Processes	8
Ikhtisar Kinerja Saham dan Aksi Korporasi Overview of Share Performance and Corporate Actions	8
Ikhtisar Obligasi Bonds Highlights	9
Ikhtisar Kinerja Lingkungan Environmental Performance Highlights	10
Ikhtisar Kinerja Sosial Social Performance Highlights	10
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	11
Peristiwa Penting Highlighted Events	11

Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	16
Laporan Direksi Board of Directors' Report	22

Profil Perseroan Company Profile

Identitas Umum Perseroan General Identity of the Company	32
Informasi Perubahan Nama Information on Name Change	33
Sekilas Perseroan Company Overview	34
Jejak Langkah Milestone	36
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perseroan Vision, Mission, and Values of the Company	38
Skala Usaha Business Scale	40
Wilayah Operasional Operational Areas	40
Kegiatan Usaha Business Activities	41
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	43
Perubahan yang Bersifat Signifikan Significant Changes	43
Struktur Organisasi Organizational Structure	44
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	46
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Statement of Independence by the Independent Commissioners	49

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in the Composition of the Board of Commissioners	49
Profil Direksi Board of Directors' Profile	50
Perubahan Komposisi Direksi Changes in the Composition of the Board of Directors	53
Keberagaman Manajemen Management Diversity	54
Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	54
Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure	56
Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders	58
Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures Companies	58
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	59
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	59
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	60
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and/or Professions	60
Sumber Daya Manusia Human Resources	61
Teknologi Informasi (TI) Information Technology (IT)	68
Informasi pada Situs Web Perseroan Information on the Company's Website	70

Analisis dan Diskusi Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional Global and National Macroeconomic Overview	74
Tinjauan Industri Otomotif dan Pembiayaan Automotive and Financing Industry Overview	75
Tinjauan Per Segmen Usaha Business Review by Segment	78
Tinjauan Keuangan Financial Review	83
Kemampuan Membayar Utang Debt Paying Ability	91
Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility Level	92
Struktur Modal Capital Structure	93
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Expenditures	94
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	94
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025 Comparison Between Target and Realization in 2025	94
Proyeksi Tahun 2026 2026 Projections	96
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan Material Information and Facts Subsequent to the Financial Reporting Date	96
Prospek Usaha Business Outlook	97
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	98

Kebijakan Dividen Dividend Policy	100	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Employee or Management Share Ownership Program	193
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	100	Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Policy on Disclosure of Share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors	193
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Affiliated Transactions, and Transactions Containing Conflict of Interest	101	Kebijakan untuk Mencegah Terjadinya Insider Trading Policy to Prevent Insider Trading	194
Perubahan Peraturan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perseroan Regulatory Changes that Significantly Affect the Company	101	Kode Etik Code of Conduct	194
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	101	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	196
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance		Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	197
		Kebijakan Pengendalian Fraud Fraud Control Policy	199
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Berkelanjutan Implementation of Good and Sustainable Corporate Governance	104	Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction Policy	200
Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance	105	Sistem Informasi Manajemen Management Information System	202
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Principles of Corporate Governance	106	Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Human Resources and Training	203
Penilaian Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Assessment	108	Kebijakan Pengadaan Procurement Policy	204
Struktur Tata Kelola Perusahaan Principles Corporate Governance Structure	109	Pemangku Kepentingan Stakeholders	205
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	110	Permasalahan yang Dihadapi dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues Encountered in the Implementation of Sustainable Finance	207
Dewan Komisaris Board of Commissioners	113	Akses Informasi Perseroan Access to Company Information	207
Direksi Board of Directors	125	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	
Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors	137	Strategi dan Pendekatan Keberlanjutan Sustainability Strategy and Approach	210
Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors	140	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Overview of Sustainability Performance	212
Kebijakan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi Conflict of Interest Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors	144	Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	215
Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama Affiliation Relationships Between Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, and Major Shareholders	145	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	219
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners	146	Memberikan Pelayanan yang Setara kepada Konsumen Providing Equal Service to Customers	234
Komite Audit Audit Committee	146	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification by an Independent Party	238
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	154	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 Response to Feedback on The 2024 Sustainability Report	238
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	161	Referensi Silang POJK No. 51/POJK.03/2017 POJK No. 51/POJK.03/2017 Cross Reference	239
Komite-Komite di Bawah Direksi Committees Under the Board of Directors	167	Lembar Umpan Balik Feedback Form	243
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	169	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	244
Audit Internal Internal Audit	172	Laporan Keuangan Financial Statements	
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	180		
Auditor Eksternal External Auditor	183		
Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation	184		
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	185		
Perkara Penting Material Litigation	192		
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	193		





Ikhtisar Kinerja

Performance
Highlights





Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights [B.1]

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian | Description

2025

2024

2023

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Jumlah Pendapatan Total Income	1.022.951	1.416.531	1.604.504
Laba Bruto Gross Profit	680.041	939.411	1.081.059
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Loss) Income Before Income Tax	(370.774)	(343.097)	3.224
(Rugi) Laba Bersih Net (Loss) Income	(436.585)	(284.814)	424
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive (Loss) Income	(438.897)	(272.629)	(3.467)
(Rugi) Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) (Loss) Earnings per Share (in full Rupiah)	(356.547)	(232.600)	346

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

Jumlah Aset Total Assets	4.040.380	6.857.317	8.158.042
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.044.843	5.422.883	6.450.979
Jumlah Ekuitas Total Equity	995.537	1.434.434	1.707.063

Rasio Keuangan Financial Ratios

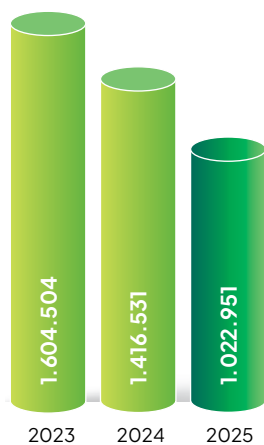
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	66,48%	66,32%	67,38%
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	(33,12%)	(24,22%)	0,20%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	(42,68%)	(20,11%)	0,03%
Rasio Laba terhadap Total Aset Return on Assets	(6,70%)	(4,55%)	0,04%
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas Return on Equity	(33,55%)	(17,90%)	0,02%
Rasio Lancar Current Ratio	1,26x	1,48x	1,48x
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Assets Ratio	0,75x	0,79x	0,79x
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas Debt to Equity Ratio	3,06x	3,78x	3,78x
Tingkat Perputaran Jumlah Aset Total Assets Turnover	0,46x	0,46x	0,57x
Rasio Gearing Gearing Ratio	2,89x	3,61x	3,61x

Kuantitas Produksi/Jasa yang Dijual Quantity of Sold Products/Services

Pembiayaan Konsumen Consumer Finance	1.183.194	2.968.450	4.218.097
Sewa Pembiayaan Finance Lease	0	174.296	509.493

Jumlah Pendapatan Total Income

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



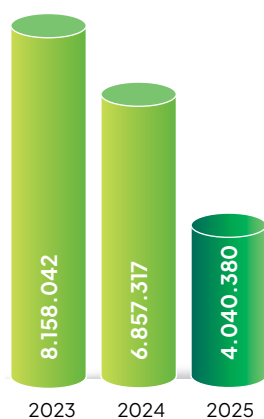
(Rugi) Laba Bersih Net (Loss) Income

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



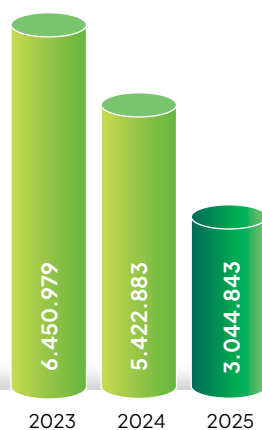
Jumlah Aset Total Assets

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



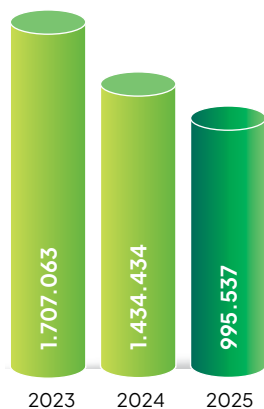
Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



Jumlah Ekuitas Total Equity

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah





Pelibatan Pihak Lokal yang Berkaitan dengan Proses Bisnis Berkelanjutan

Local Stakeholder Involvement in the Sustainable Business Processes

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan terus mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal, khususnya yang berdomisili di sekitar kantor cabang. Kebijakan ini menegaskan komitmen Perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setempat serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan komunitas di sekitarnya.

Use of Local Workforce

As of the end of 2025, the Company continued to prioritize the recruitment of employees from the local community, particularly those residing near branch offices. This policy underscores the Company's commitment to promoting local economic growth and strengthening harmonious relationships with the communities it serves.

Ikhtisar Kinerja Saham dan Aksi Korporasi

Overview of Share Performance and Corporate Actions

Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) maupun mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan ikhtisar kinerja saham maupun aksi korporasi, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, atau penambahan dan pengurangan modal dalam Laporan Tahunan 2025.

The Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO) nor listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Therefore, the Company is not required to disclose a summary of share performance or corporate actions, including stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, changes in par value, issuance of convertible securities, or capital increase and reduction in the 2025 Annual Report.

Informasi mengenai komposisi pemegang saham Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan, subbab Komposisi Pemegang Saham.

Information regarding the Company's shareholder composition can be found in the Company Profile chapter, under the Shareholder Composition subchapter.

Ikhtisar Obligasi

Bonds Highlights

No.	Nama Obligasi Bond Name	Nilai Nominal (Rp) Par Value (IDR)	Tingkat Bunga (%) Interest Rate (%)	Peringkat Obligasi Bond Rating	Waktu Pembayaran Payment Schedule	Jatuh Tempo Maturity Date
1	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 Seri A MPM Finance Bonds I Year 2019 Series A	Rp616 miliar IDR616 billion	9,25%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 24 September 2022 Has been fully paid as of September 24, 2022
2	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 Seri B MPM Finance Bonds I Year 2019 Series B	Rp30 miliar IDR30 billion	9,50%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 24 September 2023 Has been fully paid as of September 24, 2023
3	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 Seri C MPM Finance Bonds I Year 2019 Series C	Rp18 miliar IDR18 billion	9,75%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 24 September 2024 Has been fully paid as of September 24, 2024
4	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2022 Series A	Rp100 miliar IDR100 billion	4,75%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2023 Has been fully paid as of August 20, 2023
5	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2022 Series B	Rp500 miliar IDR500 billion	7,40%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 10 Agustus 2025 Has been fully paid as of August 10, 2025
6	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri A JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2023 Series A	Rp170 miliar IDR170 billion	6,25%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 21 Agustus 2024 Has been fully paid as of August 21, 2024
7	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2023 Series B	Rp230 miliar IDR230 billion	7,00%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	11 Agustus 2026 August 11, 2026
8	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2024 Series A	Rp150 miliar IDR150 billion	6,70%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	Telah dilunasi pada tanggal 29 April 2025 Has been fully paid as of April 29, 2025
9	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2024 Series B	Rp350 miliar IDR350 billion	7,25%	AA (idn)	Triwulan Quarterly	19 April 2027 April 19, 2027



Ikhtisar Kinerja Lingkungan

Environmental Performance Highlights [B.2]

Pemakaian Listrik

Electricity Usage

Giga Joule



6.261,9

2024: 10.088,8
2023: 10.116,6

Pemakaian Air

Water Usage

M³



8,381

2024: 9,007
2023: 12,020

Pemakaian BBM

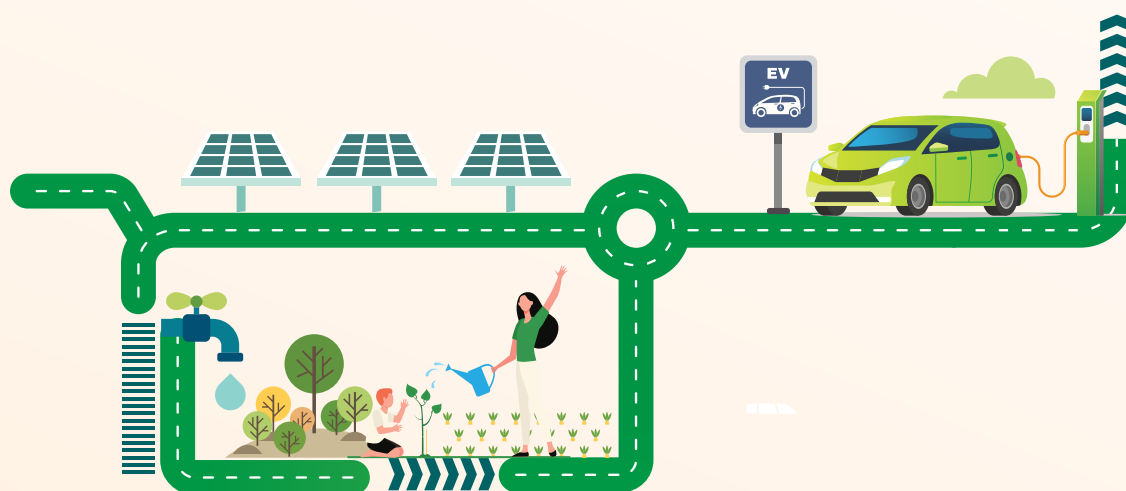
Fuel Usage

Giga Joule



864,0

2024: 1.553,9
2023: 1.724,2



Ikhtisar Kinerja Sosial

Social Performance Highlights [B.3]



Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Costs

Rp/IDR



Rp7.725.473.557

2024: Rp7.618.070.260
2023: Rp7.569.443.508

Peserta Pelatihan Karyawan

Employee Training Participant

Peserta/Participant



2.019

2024: 2.711
2023: 2.375

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Sertifikasi Information Security Management Systems (ISMS)

JACCS MPM Finance Indonesia melakukan *renewal* Sertifikasi Information Security Management Systems (ISMS) ISO/IEC 27001:2022 yang dikeluarkan oleh CBQA Global. Sertifikat ini menunjukkan Perseroan telah memenuhi standar Internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk proses pelayanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

JACCS MPM Finance Indonesia renewed ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems (ISMS) certification issued by CBQA Global. This certificate confirms that the Company has met the international standards of Information Security Management Systems for information technology based financial service processes.

Peristiwa Penting

Highlighted Events



16 JANUARI JANUARY

Budget Kick Off

Perseroan mengadakan acara *Budget Kick Off* 2025 yang dihadiri oleh Direksi dan perwakilan dari cabang dan regional Perseroan. Acara ini mengusung Tema "Rise Together" dengan harapan untuk membangun perusahaan yang tangguh menghadapi perubahan, berani berinovasi, kuat dalam eksekusi, serta unggul dalam memberikan nilai terbaik bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

The Company held the Budget Kick Off 2025 event, which was attended by the Board of Directors and representatives from the Company's branches and regions. The event carried the theme 'Rise Together' with the objective of building a resilient company that is ready to face change, courageous in innovation, strong in execution, and excellent in delivering the best value to customers and all stakeholders.



6-8 FEBRUARI FEBRUARY

Branch Operational Workshop

Perseroan menyelenggarakan kegiatan *workshop* bagi Branch Operations Supervisor untuk memperkuat kemampuan teknis, kepemimpinan, dan pola pikir bertumbuh agar lebih siap dan efektif menghadapi tantangan operasional. Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas perubahan organisasi yang membawa tantangan baru.

The Company conducted a workshop program for Branch Operations Supervisors to enhance technical competencies, leadership skills, and growth mindset in response to organizational changes. This program was designed to support supervisors in managing operational challenges and maintaining productivity amid evolving business conditions.



6–9 FEBRUARI FEBRUARY

Pelatihan untuk Collection Supervisor Training for Collection Supervisors

Perseroan mengadakan Pelatihan untuk *Collection Supervisor* yang dilaksanakan di DIVIF 1 KOSTRAD Cilodong Depok. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan kedisiplinan *Collection Supervisor* dalam mengelola tim secara profesional. Selain itu, program ini membekali keterampilan praktis kepemimpinan di lapangan serta memperkuat motivasi *Collection Supervisor* agar mampu mengambil keputusan tepat dan mendorong kinerja tim secara optimal.

The Company conducted a training program for Collection Supervisors, held at DIVIF 1 KOSTRAD, Cilodong, Depok. The training aimed to enhance the effectiveness and discipline of Collection Supervisors in managing their teams professionally. In addition, the program equipped participants with practical on-site leadership skills and strengthened their motivation to make sound decisions and drive optimal team performance.



11 SEPTEMBER

Coaching for Performance

Perseroan menyelenggarakan *Coaching for Performance* untuk membekali para pimpinan dengan kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai tingkat kompetensi dan komitmen karyawan, melalui pendekatan *Situational Leadership® II* (SLII). Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kemampuan komunikasi, teknik *coaching*, serta penerapan kepemimpinan yang efektif, dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja tim secara berkelanjutan.

The Company conducted Coaching for Performance to equip leaders with the ability to adapt their leadership style according to employees' competency and commitment levels, using the Situational Leadership® II (SLII) approach. This program focused on strengthening communication skills, coaching techniques, and the effective application of leadership, aiming to drive sustainable team performance improvement.



24 JUNI JUNE

Program Employee Volunteering “MPM Builds”

Sebanyak 30 karyawan MPMX dan Perseroan berpartisipasi dalam program *Employee Volunteering* “MPM Builds” yang diselenggarakan pada 24 Juni 2025 bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Kegiatan ini berfokus pada pembangunan fasilitas sanitasi individu di Desa Daon, Rajeg, Tangerang, guna meningkatkan akses sanitasi bagi keluarga penerima manfaat serta memberikan pengalaman kegiatan sosial bagi karyawan.

A total of 30 employees from MPMX and the Company participated in the Employee Volunteering Program “MPM Builds,” organized in collaboration with Habitat for Humanity Indonesia. The program focused on the construction of individual sanitation facilities in Desa Daon, Rajeg, Tangerang, aiming to improve access to proper sanitation for beneficiary families while also providing employees with hands-on social engagement experience.



2–3 OKTOBER OCTOBER

Strategic Initiative Management Office (SIMO) 2025

Perseroan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan *Annual Planning Cycle* 2026. FGD ini melibatkan seluruh pimpinan unit kerja untuk membahas kondisi internal dan eksternal perusahaan serta merumuskan inisiatif strategis melalui pendekatan TOWS Matrix. Hasil FGD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan arah strategi, Peta Strategi, dan penetapan inisiatif serta KPI Perseroan untuk tahun 2026.

The Company conducted a Focus Group Discussion (FGD) as part of the Annual Planning Cycle 2026. The FGD involved all heads of business units to discuss the Company's internal and external conditions and to formulate strategic initiatives using the TOWS Matrix approach. The outcomes of the FGD served as the basis for defining the Company's strategic direction, developing the Strategic Map, and establishing strategic initiatives and KPIs for 2026.



5 NOVEMBER

Afirmasi Peringkat oleh Fitch Ratings Indonesia Rating Affirmation by Fitch Ratings Indonesia

Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan di 'AA(idn)'. Peringkat Nasional Jangka Pendek dan peringkat obligasi juga telah diafirmasi masing-masing di 'F1+(idn)' dan 'AA(idn)'. Outlook Stabil.

Fitch Ratings Indonesia affirmed the Company's National Long-Term Rating at 'AA(idn)'. The Short-Term National Ratings and bond rating have also been confirmed at 'F1+(idn)' and 'AA(idn)', respectively. The Outlook is stable.



6-7 DAN/AND 13-14 NOVEMBER

Pelatihan Customer Handling Customer Handling Training

Perseroan menyelenggarakan program pelatihan di Surabaya dan Jakarta bagi tim Customer Care dan Cashier untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen. Pelatihan ini berfokus pada keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, prosedur layanan, serta kepatuhan terhadap regulasi Pelindungan Konsumen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna meningkatkan pengalaman dan kepuasan konsumen.

The Company conducted training programs in Surabaya and Jakarta for Customer Care and Cashier teams to strengthen service quality and customer complaint handling. The training focused on communication skills, emotional management, service procedures, and compliance with Consumer Protection regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), aiming to improve customer experience and satisfaction.



4 DESEMBER DECEMBER

MPM Christmas Charity 2025

Perseroan berpartisipasi dalam *Employee Volunteering MPM Christmas Charity 2025* yang diadakan oleh MPM Group yang berlokasi di Rumah Kerang, Cilincing. Rangkaian kegiatan difokuskan pada dukungan sosial dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Relawan mendampingi anak-anak TK dalam pembuatan prakarya, mengelola penjualan sembako murah bagi warga, serta mendistribusikan makanan tambahan bagi lansia dan keluarga pra-sejahtera.

The Company participated in the MPM Employee Volunteering Christmas Charity 2025 program organized by MPM Group, held at Rumah Kerang, Cilincing. The series of activities focused on providing social and health support for the local community. Volunteers assisted kindergarten children in creating handicrafts, managed the distribution of affordable basic necessities for residents, and distributed supplementary food to the elderly and underprivileged families.



18 DESEMBER DECEMBER

Innovation Day 2nd Winner

Perseroan melalui tim CRESPO turut berpartisipasi dalam acara MPM *Innovation Day 2025* dengan tema #bergerakberinovasi yang diselenggarakan oleh MPM Group dan berhasil meraih juara ke 2 di acara *Grand Final Innovation Day 2025*.

The Company, through the CRESPO team, participated in the MPM Innovation Day 2025 event with the theme #BergerakBerinovasi organized by MPM Group and successfully achieved 2nd place at the Grand Final of Innovation Day 2025.





Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Dewan Komisaris menilai bahwa tahun ini menjadi titik balik penting. Berbagai langkah strategis yang diterapkan telah meletakkan fondasi yang krusial bagi pemulihan kinerja mulai tahun 2026 dan seterusnya.

The Board of Commissioners considers that the year represents a pivotal turning point. The various strategic measures implemented have established an essential foundation for performance recovery from 2026 onward.



TAKESHI KOBAYASHI
Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2025 merupakan periode konsolidasi yang berkelanjutan bagi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ("Perseroan") di tengah dinamika perekonomian serta perkembangan industri pembiayaan yang terus berubah. Pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39%, yang terutama didorong oleh konsumsi domestik dan investasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11%. Sejalan dengan hal tersebut, industri kendaraan roda dua menunjukkan tren positif, dengan penjualan sepeda motor nasional mencapai sekitar 6.412 juta unit atau tumbuh sebesar 1,3% secara tahunan, mencerminkan peningkatan permintaan pada akhir tahun.

Dear Valued Shareholders and Other Stakeholders,

The Board of Commissioners observes that 2025 was a year of continued consolidation for PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (the "Company") amid a dynamic economic environment and evolving multifinance industry. Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth in the fourth quarter of 2025 was recorded at 5.39%, primarily driven by domestic consumption and investment. Overall, Indonesia's economic growth for the full year 2025 reached 5.11%. In parallel, the two-wheeler industry showed positive momentum, with national motorcycle sales reaching approximately 6,412 million units, reflecting 1.3% growth year on year and improving demand toward the end of the year.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemegang saham Perseroan, JACCS Co., Ltd. dan MPM, atas dukungan yang berkelanjutan dan sangat berarti sepanjang tahun 2025. Arah strategis yang diberikan, antara lain terkait restrukturisasi organisasi, peningkatan kinerja cabang, serta penguatan proses analisis kredit termasuk implementasi *credit scoring model* yang baru, telah memberikan kontribusi penting dalam membantu Perseroan menghadapi berbagai tantangan serta mencapai prioritas operasional dan strategis.

Dalam konteks tersebut, Perseroan terus melaksanakan berbagai langkah strategis yang difokuskan pada penguatan fundamental bisnis serta peningkatan ketahanan jangka panjang. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang disiplin dalam menghadapi tantangan industri, sekaligus membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan dan terarah.

Dewan Komisaris menilai bahwa tahun 2025 merupakan fase penting dalam mempersiapkan pemulihan Perseroan. Sejalan dengan semangat “*RISE Together*”, Perseroan terus mendorong keselarasan di seluruh lini organisasi serta memperkuat budaya kerja yang berlandaskan pada nilai ketahanan, inovasi, kekuatan, dan keunggulan.

Dewan Komisaris meyakini bahwa melalui pelaksanaan strategi yang konsisten serta kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menyadari bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, ditandai dengan penyesuaian signifikan pada arah bisnis dan model operasionalnya. Dalam kondisi ini, volume pembiayaan baru Perseroan mengalami penurunan sebesar 60,4% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan keputusan yang dipilih secara strategis untuk menata ulang bisnis menuju segmen dengan potensi profitabilitas lebih tinggi serta pengendalian biaya kredit dan operasional yang lebih ketat.

Sebagai bagian dari pergeseran strategis tersebut, Perseroan menghentikan pembiayaan baru untuk kendaraan roda empat baru maupun bekas mulai Oktober 2024, sepenuhnya menutup bisnis Sewa Pembiayaan pada Januari 2025, serta menghentikan penanganan pembiayaan motor bekas sepanjang tahun. Selain itu, sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, penerimaan aplikasi baru untuk bisnis MyCash juga dihentikan sementara pada tahun 2025. Dewan Komisaris memandang langkah-langkah ini sebagai upaya yang diperlukan untuk memperkuat fokus bisnis Perseroan serta profil risikonya.

Dalam hal manajemen risiko, Direksi telah mengembangkan dan menerapkan *credit scoring model* baru, yang berkontribusi pada perbaikan bertahap indikator tunggakan pembayaran tahap awal menjelang akhir tahun. Meski demikian, kualitas aset secara keseluruhan tetap menjadi perhatian utama, tercermin dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu, pengendalian biaya kredit tetap menjadi prioritas penting bagi Perseroan.

The Board of Commissioners would like to express sincere gratitude to the Company’s shareholders, JACCS Co., Ltd. and MPM, for their continued and invaluable support throughout 2025. Their strategic guidance on organizational restructuring, branch performance improvement, and enhancements to the Company’s credit screening processes—including the implementation of the new credit scoring model—was instrumental in enabling the Company to navigate challenges and achieve operational and strategic priorities.

Within this context, the Company continued to undertake strategic measures aimed at strengthening its business fundamentals and enhancing long-term resilience. These efforts reflect a disciplined approach in navigating industry challenges while building a more sustainable and focused business model.

The Board of Commissioners views 2025 as an important phase in preparing the Company for recovery. In line with the spirit of “*RISE Together*,” the Company continued to foster alignment across its organization and reinforce a culture defined by resilience, innovation, strength, and excellence.

The Board of Commissioners believes that through consistent execution of strategies and strong collaboration with all stakeholders, the Company is on the right track to achieve sustainable growth in the future.

Assessment of the Board of Directors’ Performance

The Board of Commissioners recognizes that 2025 was a challenging year for the Company, marked by significant adjustments in its business direction and operating model. In this environment, the Company’s new booking volume declined by 60.4% year on year, reflecting deliberate strategic decisions to realign the business toward segments with higher profitability potential and stronger control over credit cost and operating expenses.

As part of this strategic shift, the Company discontinued new bookings for new and used four-wheel vehicles financing starting October 2024, fully closed its Finance Lease business in January 2025, and ceased the handling of used motorcycle financing during the year. In addition, in line with regulatory requirements, new application acquisition for the MyCash business were suspended in 2025. The Board of Commissioners views these actions as necessary measures to strengthen the Company’s business focus and risk profile.

In terms of risk management, the Board of Directors developed and implemented a new credit scoring model, which contributed to gradual improvements in early-stage delinquency indicators toward the end of the year. Nevertheless, overall asset quality remains a key concern, as reflected in the Non-Performing Financing (NPF) ratio. Accordingly, controlling credit costs continues to be a critical priority for the Company.



BENNY REDJO SETYONO
Komisaris
Commissioner

TAKESHI KOBAYASHI
Komisaris Utama
President Commissioner

ALIP
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi juga melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk restrukturisasi jaringan cabang dan optimisasi tenaga kerja. Upaya peningkatan efektivitas penagihan juga berhasil menurunkan jumlah piutang bermasalah secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025.

Meskipun Perseroan mencatat kerugian bersih pada tahun 2025, yang menandai tahun kedua berturut-turut dengan kinerja negatif, Dewan Komisaris menilai bahwa tahun ini menjadi titik balik penting. Berbagai langkah yang diterapkan dalam penjualan, manajemen risiko, efisiensi biaya, dan penagihan telah meletakkan fondasi yang krusial bagi pemulihan kinerja mulai tahun 2026 dan seterusnya.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen dan pertanggungjawaban dalam menghadapi tantangan Perseroan serta melaksanakan inisiatif strategis yang diperlukan. Pada saat yang sama, Dewan Komisaris berpendapat bahwa manajemen perlu terus membangun kemajuan yang telah dicapai dengan memperkuat konsistensi dan disiplin pelaksanaan, sekaligus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan rutin dan ketat terhadap indikator kinerja utama, identifikasi dini potensi masalah, serta pelaksanaan tindakan korektif secara tepat waktu akan menjadi faktor kunci untuk menjaga momentum. Dewan Komisaris mendorong manajemen untuk mengambil langkah-langkah yang tegas namun terkoordinasi dalam menangani area yang memerlukan

The Board of Directors also undertook various initiatives to improve operational efficiency, including branch network restructuring and workforce optimization. Furthermore, efforts to enhance collection effectiveness resulted in a gradual decline in delinquent receivables during the second half of the year.

Although the Company recorded a net loss in 2025, marking the second consecutive year of negative performance, the Board of Commissioners considers that the year represents a pivotal turning point. The various measures implemented across sales, risk management, cost efficiency, and collections have established an essential foundation for performance recovery from 2026 onward.

From an overall assessment, the Board of Commissioners views that the Board of Directors has demonstrated commitment and responsibilities in addressing the Company's challenges and executing the necessary strategic initiatives. At the same time, the Board of Commissioners is of the opinion that management should continue to build on the progress achieved by strengthening the consistency and discipline of execution, while ensuring full compliance with applicable laws and regulations.

Regular and rigorous monitoring of key performance indicators, early identification of potential issues, and timely implementation of corrective actions will be critical to sustaining momentum. The Board of Commissioners encourages management to take decisive yet well-coordinated actions in addressing areas requiring

perbaikan, sehingga inisiatif strategis yang telah dijalankan dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Pengawasan Strategi oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah secara aktif menjalankan peran pengawasannya untuk memastikan bahwa arah strategis Perseroan dirumuskan dengan tepat dan dilaksanakan secara efektif. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris mengadakan rapat internal setiap dua bulan sekali, dengan total enam sesi, dan mengadakan rapat gabungan triwulanan dengan Direksi, yang menyediakan forum terstruktur untuk meninjau strategi, kinerja operasional, dan inisiatif utama perusahaan.

Selain itu, kecuali para Komisaris Independen, para anggota Dewan Komisaris secara rutin menghadiri rapat bulanan Direksi sebagai pengamat. Praktik ini memungkinkan dilakukannya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan bisnis, pemantauan tepat waktu terhadap kinerja dan realisasi anggaran, serta dialog terbuka mengenai isu-isu yang muncul. Melalui interaksi-interaksi ini, Dewan Komisaris dapat memberikan arahan yang konstruktif, mengajukan pertanyaan kritis jika diperlukan, dan memastikan bahwa Perseroan tetap selaras dengan tujuan strategis serta harapan regulator.

Melalui interaksi terstruktur dan keterlibatan berkelanjutan ini, Dewan Komisaris telah membangun komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang erat dengan Direksi, sehingga memastikan pengawasan yang optimal dan proses pengambilan keputusan yang terkoordinasi dengan baik.

Dewan Komisaris memantau secara ketat implementasi inisiatif terkait penyesuaian bisnis, efisiensi biaya, dan manajemen risiko, serta memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan dan mempertahankan disiplin operasional.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa pengawasan yang dilakukannya telah berkontribusi pada pelaksanaan inisiatif strategis yang disiplin serta memperkuat keselarasan antara kegiatan operasional Perseroan dan tujuan jangka panjangnya. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus melakukan pengawasan secara aktif, memastikan akuntabilitas, dan mendukung Direksi dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek Bisnis Perseroan

Dewan Komisaris mencatat bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi Perseroan dalam upayanya memulihkan profitabilitas dan semakin memperkuat ketahanan organisasi. Menurut proyeksi pemerintah, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5,4%, sementara meningkatnya risiko geopolitik dan ketidakpastian eksternal lainnya dapat terus mempengaruhi kondisi ekonomi dan bisnis secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Direksi telah merumuskan serangkaian inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendukung pemulihan operasional sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Area fokus utama mencakup:

1. Perluasan bisnis pembiayaan sepeda motor baru, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, guna menangkap peluang dengan margin lebih tinggi serta memperkuat pangsa pasar.

improvement, in order to ensure that the strategic initiatives undertaken can deliver their intended results.

Oversight of Strategy by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has actively performed its supervisory role to ensure that the Company's strategic direction is properly formulated and effectively executed. Throughout 2025, the Board of Commissioners convened internal meetings on a bi-monthly basis, totalling six sessions, and held quarterly joint meetings with the Board of Directors, providing structured forums for reviewing strategy, operational performance, and key corporate initiatives.

In addition, except for Independent Commissioners, members of the Board of Commissioners regularly attended the monthly Board of Directors' meetings as observers. This practice allowed for continuous oversight of business execution, timely visibility into performance and budget realization, and open dialogue on emerging issues. Through these interactions, the Board of Commissioners was able to offer constructive guidance, provide challenge where necessary, and ensure that the Company remained aligned with both strategic objectives and regulatory expectations.

Through these structured interactions and continuous engagement, the Board of Commissioners has fostered effective communication and close collaboration with the Board of Directors, thereby ensuring optimal supervision and well-coordinated decision-making processes.

The Board of Commissioners closely monitored the implementation of initiatives related to business realignment, cost efficiency, and risk management, providing feedback and recommendations to enhance consistency in execution and maintain operational discipline.

Overall, the Board of Commissioners considers that its supervision has contributed to disciplined execution of strategic initiatives and reinforced alignment between the Company's operational activities and its long-term objectives. Moving forward, the Board of Commissioners will continue to provide active oversight, ensure accountability, and support the Board of Directors in achieving sustainable recovery and growth.

Outlook on the Company's Business Prospects

The Board of Commissioners notes that 2026 will be a pivotal year for the Company as it seeks to restore profitability and further strengthen organizational resilience. According to government projections, Indonesia's economy is expected to grow by approximately 5.4%, while heightened geopolitical risks and other external uncertainties may continue to influence overall economic and business conditions.

In this context, the Board of Directors has formulated strategic initiatives aimed at sustaining recovery and driving long-term growth. Key areas of focus include:

1. Expansion of the new motorcycle financing business, particularly in East Java, Bali and the Nusa Tenggara regions, to capture higher-margin opportunities and strengthen market presence.



2. Peningkatan manajemen risiko kredit, termasuk penerapan praktik seleksi kredit yang ketat dan terukur, untuk memperbaiki kualitas aset sekaligus mengendalikan biaya kredit.
3. Peningkatan efisiensi operasional, mencakup restrukturisasi jaringan cabang, optimalisasi tenaga kerja, dan penyempurnaan proses bisnis guna mendukung pelaksanaan strategi secara disiplin.

Dalam menerapkan strategi-strategi ini, Perseroan juga harus mengantisipasi beberapa tantangan utama, termasuk menjaga kualitas aset di tengah profil risiko nasabah yang terus berubah, mengelola tekanan margin, serta menghadapi persaingan yang ketat di industri *multifinance*. Selain itu, faktor eksternal seperti volatilitas makroekonomi dan ketidakpastian geopolitik dapat terus memengaruhi kinerja bisnis. Tantangan-tantangan ini menuntut manajemen risiko yang bijaksana, pelaksanaan yang disiplin, serta strategi bisnis yang adaptif.

Dewan Komisaris menekankan bahwa implementasi inisiatif-inisiatif ini secara konsisten dan disiplin akan menjadi kunci untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keuangan dan daya saing jangka panjang. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Direksi dalam menghadapi tantangan ini, serta tetap menjaga manajemen risiko dengan hati-hati dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris akan terus memberikan pengawasan aktif, arahan konstruktif, serta memastikan keselarasan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Melalui upaya yang terkoordinasi, pelaksanaan yang disiplin, serta kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan diharapkan dapat memperkuat ketahanan usahanya dan berada pada posisi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan pada tahun 2026 dan seterusnya.

Memperkuat Tata Kelola dan Pengawasan

Dewan Komisaris terus memberikan dukungan penuh kepada Direksi dalam mempertahankan komitmen yang kuat terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sepanjang tahun 2025. Dalam menjalankan peran pengawasannya, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa seluruh organ Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman internal.

Untuk memperkuat praktik tata kelola, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite khusus, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Setiap komite telah menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memberikan rekomendasi dan pengawasan di bidangnya masing-masing, sehingga mendukung Dewan Komisaris dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang efektif. Sebagai contoh, Komite Pemantauan Risiko mengeluarkan rekomendasi formal untuk meningkatkan kerangka kerja kepatuhan dan manajemen risiko, sementara Komite Audit memberikan panduan mengenai tindakan korektif yang timbul dari audit internal dan pemeriksaan regulasi oleh OJK.

2. Enhanced credit risk management, including rigorous and appropriately calibrated credit screening practices to improve asset quality and control credit costs.
3. Operational efficiency improvements, including continued branch network restructuring, workforce optimization, and process enhancements to support disciplined execution.

In implementing these strategies, the Company must also anticipate several key challenges, including maintaining asset quality amid evolving customer risk profiles, managing margin pressures, and navigating intense competition in the multifinance industry. In addition, external factors such as macroeconomic volatility and geopolitical uncertainties may continue to affect business performance. These challenges require prudent risk management, disciplined execution, and adaptive business strategies.

The Board of Commissioners emphasizes that consistent and disciplined implementation of these initiatives will be critical to achieving sustainable improvement in financial performance and long-term competitiveness. The Board of Commissioners appreciates the strong commitment expressed by the Board of Directors to navigate these challenges while maintaining prudent risk management and sound governance practices.

The Board of Commissioners will continue to provide active oversight, constructive guidance, and ensure alignment with applicable regulations and Good Corporate Governance principles. Through coordinated efforts, disciplined execution, and close collaboration with all stakeholders, the Company is expected to strengthen its resilience and be well-positioned for sustainable growth in 2026 and beyond.

Strengthening Governance and Oversight

The Board of Commissioners continues to fully support the Board of Directors in maintaining a strong commitment to Good Corporate Governance (GCG) throughout 2025. In carrying out its supervisory role, the Board of Commissioners has ensured that all Company organs perform their respective duties and responsibilities in accordance with applicable laws, regulations, and internal guidelines.

To strengthen governance practices, the Board of Commissioners is assisted by specialized committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. Each committee has demonstrated strong capability in providing recommendations and oversight within their respective areas, thereby supporting the Board of Commissioners in maintaining transparency, accountability, and effective risk management. For instance, the Risk Monitoring Committee issued formal recommendations to enhance compliance and risk management frameworks, while the Audit Committee provided guidance on corrective actions arising from internal audits and regulatory audit by OJK.

Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, implementasi GCG di Perseroan sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pada tingkat yang baik dan efektif. Meskipun demikian, Dewan Komisaris menyadari perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi, meningkatkan integrasi praktik manajemen risiko, serta memastikan tindak lanjut yang tepat waktu dan konsisten terhadap temuan audit dan rekomendasi regulator.

Melalui upaya-upaya ini, Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis yang bijaksana dan memastikan keberlanjutan jangka panjang Perseroan.

Komitmen terhadap Keberlanjutan

Dewan Komisaris mengakui komitmen kuat Perseroan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam bisnis intinya sepanjang tahun 2025. Kami mencatat bahwa keberlanjutan telah tertanam dalam praktik tata kelola, manajemen risiko, dan operasional, yang mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap bisnis yang bertanggung jawab.

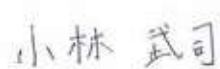
Dewan Komisaris mengamati bahwa inisiatif di berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dilaksanakan secara efektif. Upaya untuk mendorong pembiayaan inklusif, pengembangan kompetensi karyawan, keterlibatan masyarakat, serta operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan menunjukkan keselarasan yang jelas dengan tujuan keberlanjutan Perseroan.

Risiko keberlanjutan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, telah dipantau dan dikelola secara aktif dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan melalui Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat, pelaksanaan kebijakan yang efektif, serta responsif terhadap tantangan keberlanjutan yang muncul.

Apresiasi

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, kreditor, mitra bisnis, serta otoritas keuangan, atas kepercayaan dan dukungan mereka yang berkelanjutan. Keterlibatan dan kepercayaan mereka menjadi faktor krusial yang memungkinkan Perseroan mempertahankan ketahanan, menavigasi tahun 2025 dengan baik, dan mencapai pemulihan yang kuat, sekaligus meletakkan fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



Takeshi Kobayashi
Komisaris Utama
President Commissioner

Based on the Board of Commissioners' assessment, the implementation of GCG within the Company throughout 2025 has been carried out at a sound and effective level. Nevertheless, the Board of Commissioners acknowledges the need for continuous improvement, particularly in strengthening compliance culture across all organizational levels, enhancing the integration of risk management practices, and ensuring the timely and consistent follow-up of audit findings and regulatory recommendations.

Through these efforts, the Board of Commissioners remains committed to promoting prudent business practices and ensuring the Company's long-term sustainability.

Commitment to Sustainability

The Board of Commissioners recognizes the Company's strong commitment to integrating sustainability into its core business throughout 2025. We note that sustainability has been embedded in governance, risk management, and operational practices, reflecting a comprehensive approach to responsible business.

The Board of Commissioners observes that initiatives across economic, social, and environmental aspects have been implemented effectively. Efforts to promote inclusive financing, employee development, community engagement, and environmentally responsible operations demonstrate a clear alignment with the Company's sustainability objectives.

Sustainability risks, including economic, social, and environmental aspects, have been actively monitored and managed within the overall risk framework through the Risk Management Committee. The Board of Commissioners considers that the Company has shown strong leadership commitment, effective policy execution, and responsiveness to emerging sustainability challenges.

Appreciation

Finally, we wish to express our sincere appreciation to all stakeholders, including employees, customers, creditors, business partners, and financial authorities, for their continued trust and support. Their engagement and confidence have been essential in enabling the Company to maintain its resilience, navigate 2025 successfully, and achieve a strong recovery, while laying the foundation for sustainable growth in the years ahead.



Laporan Direksi

Board of Directors' Report

“

Dalam merespons kondisi operasional yang menantang, Perseroan menerapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas operasional serta memitigasi risiko.

To address the challenging operational condition, the Company implemented a range of measures to stabilize operations and mitigate risks.

”

KAZUHIRO INOUE
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang terhormat,

Tahun 2025 merupakan periode di mana kami menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan industri yang terus berlanjut, sekaligus terus memperkuat fondasi operasional dan ketahanan usaha. Di tengah lanskap jasa keuangan yang dinamis, PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (“Perseroan”) tetap berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, menerapkan manajemen risiko yang bijaksana, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di tengah tekanan yang berasal dari ketentuan regulasi, keterbatasan pasar, serta fluktuasi permintaan konsumen, Perseroan tetap berfokus pada peningkatan kualitas aset, menjaga disiplin operasional, serta menjalankan

Dear valued Shareholders and Other Stakeholders,

The year 2025 has been a period of navigating ongoing economic and industry challenges while continuing to strengthen our operational foundation and resilience. Amid a dynamic financial services landscape, PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (“the Company”) remains committed to achieving sustainable growth, implementing prudent risk management, and delivering value to all stakeholders.

Despite pressures from regulatory requirements, market constraints, and fluctuating consumer demand, the Company has focused on enhancing asset quality, maintaining operational discipline, and pursuing initiatives that

berbagai inisiatif yang mendukung stabilitas dan efisiensi jangka panjang. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi, sekaligus mempersiapkan landasan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Tinjauan Makroekonomi dan Industri Tahun 2025

Pada tahun 2025, perekonomian global tumbuh secara moderat sekitar 3,3%, di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut. Amerika Serikat menunjukkan perbaikan yang didukung oleh investasi di sektor teknologi dan stimulus fiskal, sementara Jepang, Tiongkok, dan India mengalami pertumbuhan yang lebih lambat akibat lemahnya permintaan domestik dan tantangan ekspor. Pasar keuangan global tetap bergejolak, ditandai dengan tingginya imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS yang mempercepat arus keluar modal dari pasar negara berkembang.¹

Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,11%, yang didorong oleh sektor Jasa Lainnya (+9,93%), Jasa Perusahaan (+9,10%), serta Transportasi dan Pergudangan (+8,78%). Sektor Industri Pengolahan (+5,30%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (+5,49%) juga memberikan kontribusi signifikan. Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi kontributor utama pertumbuhan sebesar 56,93%, diikuti oleh Sumatra (22,22%), Kalimantan (8,12%), Sulawesi (7,22%), Bali dan Nusa Tenggara (2,82%), serta Maluku dan Papua (2,69%).

Sektor otomotif menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kendaraan dan terbatasnya daya beli konsumen. Penjualan mobil secara *wholesale* turun 7,2% menjadi 803.687 unit, dan penjualan mobil secara ritel turun 6,3% menjadi 833.692 unit², sementara penjualan sepeda motor tumbuh sedikit sebesar 1,3% menjadi 6.412.769 unit, yang didukung oleh pembiayaan kredit yang mencakup sekitar 65% dari total transaksi.³

Industri pembiayaan mengalami pertumbuhan yang terbatas. Total aset industri pembiayaan relatif stagnan, dengan pertumbuhan piutang hanya sebesar 0,61%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mencapai 2,51% atau sebesar Rp14,41 triliun, sementara total pencadangan dan hapus buku mencapai Rp58 triliun atau sekitar 10% dari total aset industri. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan perbankan (sekitar 85%) serta konsentrasi pembiayaan pada kendaraan bermotor (74%) turut meningkatkan kerentanan sektor. Di sisi lain, efisiensi operasional juga menghadapi tekanan, tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang meningkat menjadi 82,92%.⁴ Terlepas dari tantangan-tantangan ini, permintaan pembiayaan kendaraan roda dua tetap stabil, yang menyoroti peran penting sektor ini dalam mendukung konsumsi dan mobilitas domestik.

Peran Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi

Pada tahun 2025, Direksi memegang peran sentral dalam menetapkan arah strategis Perseroan serta merumuskan kebijakan-kebijakan utama guna menghadapi

support long-term stability and efficiency. These efforts reflect our steadfast commitment to adapting to evolving conditions while preparing for sustainable growth in the years ahead.

Macroeconomic and Industry Overview 2025

In 2025, the global economy grew moderately at around 3.3%, amid continued uncertainties. The United States showed improvement supported by technology investment and fiscal stimulus, while Japan, China, and India experienced slower growth due to weak domestic demand and export challenges. Financial markets remained volatile, with high US bond yields and stronger U.S. dollar accelerated capital outflows from emerging markets.¹

Indonesia's economy remained resilient, with GDP growth of 5.11%, led by Other Services (+9.93%), Corporate Services (+9.10%), and Transportation and Warehousing (+8.78%). Manufacturing (+5.30%) and Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (+5.49%) also contributed significantly. From a spatial perspective, Java contributed 56.93% of growth, followed by Sumatra (22.22%), Kalimantan (8.12%), Sulawesi (7.22%), Bali & Nusa Tenggara (2.82%), and Maluku-Papua (2.69%).

The automotive sector faced pressure from rising vehicle prices and constrained consumer purchasing power. Wholesale car sales fell 7.2% to 803,687 units, and retail car sales declined 6.3% to 833,692 units², while motorcycle sales grew slightly by 1.3% to 6,412,769 units, supported by credit financing covering ~65% of transactions.³

The financing industry experienced limited growth. Total assets were nearly stagnant, receivables grew 0.61%, the Non-Performing Financing (NPF) ratio reached 2.51%, equivalent to IDR 14.41 trillion, and provisions and write-offs totalled IDR 58 trillion, representing approximately 10% of industry assets. High reliance on bank funding (~85%) and concentrated exposure to motor vehicle financing (74%) added to sector vulnerabilities, while operational efficiency was pressured with Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO) rising to 82.92%.⁴ Despite these challenges, demand for two-wheeler financing remained stable, highlighting the sector's key role in supporting domestic consumption and mobility.

Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Implementation

In 2025, the Board of Directors played a central role in defining the Company's strategic direction and establishing key policies to navigate a challenging economic and industry

1. Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2025

2. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)/Association of Indonesian Automotive Industries (GAIKINDO)

3. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII)/Indonesian Motorcycle Industry Association (AISII)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Financial Services Authority (OJK)



tantangan ekonomi dan industri yang dinamis. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pasar kendaraan roda dua dan roda empat yang masih moderat serta dinamika regulasi yang berlaku, Direksi memfokuskan upaya pada penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan manajemen risiko, serta penerapan disiplin keuangan guna menjaga ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang Perseroan.

Keputusan strategis yang diambil Direksi diarahkan pada optimalisasi segmen pembiayaan dengan margin yang lebih tinggi, khususnya melalui peningkatan profitabilitas pembiayaan roda dua, penghentian sementara produk yang kurang menguntungkan, serta penyempurnaan kriteria analisis kredit. Selain itu, penyesuaian operasional, termasuk optimalisasi jaringan kantor cabang dan sumber daya manusia, dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tanpa mengesampingkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.

Dalam rangka memastikan implementasi strategi berjalan secara efektif, Direksi menerapkan mekanisme pengawasan yang terstruktur, antara lain melalui evaluasi kinerja secara berkala, pemantauan indikator utama operasional dan keuangan, serta koordinasi yang intensif dengan otoritas regulator terkait. Pemanfaatan teknologi digital juga terus dikembangkan, khususnya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penagihan serta memperkuat fungsi audit internal. Di sisi lain, inisiatif pengembangan sumber daya manusia, seperti penerapan sistem pelatihan karyawan yang baru, program evaluasi, serta penilaian talenta, dilakukan guna memperkuat kapabilitas organisasi agar selaras dengan arah strategis Perseroan.

Direksi juga mengoptimalkan kemitraan strategis, khususnya dengan MSO sebagai distributor sepeda motor Honda, serta entitas afiliasi dalam kelompok usaha MPM, guna memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pelaksanaan inisiatif strategis Perseroan. Melalui sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan tersebut, Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan strategis tidak hanya dirumuskan secara tepat, tetapi juga diimplementasikan secara efektif, sehingga memperkuat fondasi Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, disiplin operasional, serta ketahanan jangka panjang.

Pencapaian Kinerja dan Tantangan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi kondisi operasional yang menantang, ditandai dengan pertumbuhan yang terbatas pada pasar kendaraan roda dua dan roda empat serta kenaikan harga kendaraan yang turut memengaruhi tingkat permintaan secara keseluruhan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kinerja pada seluruh indikator keuangan utama dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran pembiayaan baru tercatat sebesar 1.183.194 atau sekitar 66,89% dari target sebesar Rp1.768.860 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, pengetatan proses analisis pembiayaan, serta penghentian sementara produk yang kurang menguntungkan. Pembiayaan roda dua relatif stabil, sementara pembiayaan roda empat mengalami penurunan sejalan dengan penghentian pembiayaan sementara (stop booking) sejak Oktober 2024.

environment. Recognizing the continued moderate growth of the two- and four-wheeler markets and the prevailing regulatory landscape, the Board of Directors focused on strengthening corporate governance, enhancing risk management, and ensuring financial discipline to maintain the Company's resilience and long-term sustainability.

The Board of Directors' strategic decisions emphasized the optimization of high-margin financing segments, particularly improving two-wheeler profitability, the temporary suspension of non-profitable products, and the enhancement of credit screening criteria. Operational adjustments, including branch network and workforce optimization, were undertaken to support strategic objectives while maintaining service quality and operational efficiency.

To ensure effective implementation of these strategies, the Board of Directors established structured oversight mechanisms, including regular performance reviews, monitoring of key operational and financial metrics, and close coordination with relevant regulatory authorities. Digital tools were explored to enhance collection activities and internal audit responses, while human capital initiatives, such as the introduction of a new employee training system, evaluation programs, and talent assessments, were implemented to strengthen organizational capability in line with strategic goals.

The Board of Directors also leveraged strategic partnerships, particularly with MSO, Honda's motorcycle distributor, and sister companies within the MPM Group, to strengthen market presence, improve operational efficiency, and support the execution of strategic initiatives. Through these coordinated efforts, the Board of Directors ensured that strategic policies were not only well-formulated but also effectively executed, reinforcing the Company's foundation for sustainable growth, operational discipline, and long-term resilience.

Performance Achievements and Challenges in 2025

In 2025, the Company faced a challenging operating environment, with limited growth in both the two- and four-wheeler markets and increasing vehicle prices affecting overall demand. These conditions contributed to declines across all key financial indicators compared to the previous year.

New financing reached 1,183,194 representing approximately 66.89% of the target of IDR1,768,860 million. This decrease was driven by prudent lending, stricter credit screening, and the temporary suspension of non-profitable products. Two-wheeler financing remained relatively stable, while four-wheeler financing has declined in line with the temporary suspension of new applications (stop booking) since October 2024.

Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp1.022.951 juta atau sekitar 76,42% dari target sebesar Rp1.338.599 juta. Penurunan volume pembiayaan serta peningkatan beban terkait risiko kredit memberikan tekanan terhadap pendapatan secara keseluruhan. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp436.585 juta atau sebesar 268,21% dari proyeksi rugi bersih sebesar Rp162.776 juta.

Total aset Perseroan tercatat sebesar Rp4.040.380 juta atau mencapai 87,45% dari target sebesar Rp4.620.458 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penyaluran pembiayaan. Liabilitas tercatat sebesar Rp3.044.843 juta atau 91,33% dari target sebesar Rp3.333.717 juta, yang mencerminkan pengelolaan pendanaan perbankan secara hati-hati. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar Rp995.537 juta atau 77,37% dari target sebesar Rp1.286.741 juta, yang terdampak oleh penurunan pendapatan serta rugi bersih yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam merespons berbagai tantangan tersebut, Perseroan menerapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas operasional serta memitigasi risiko. Langkah-langkah tersebut meliputi optimalisasi jaringan cabang dan tenaga kerja, penyempurnaan kriteria analisis kredit, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses penagihan dan audit internal. Selain itu, Perseroan juga memperkuat program pengembangan kompetensi karyawan guna memastikan kesiapan organisasi dan meningkatkan ketahanan usaha.

Meskipun realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025, berbagai inisiatif yang telah dijalankan menjadi fondasi penting dalam membangun operasional yang lebih berkelanjutan dan tangguh, serta memposisikan Perseroan untuk lebih siap menghadapi dinamika pasar di masa mendatang.

Menavigasi Tahun 2026: Membangun Ketahanan dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Memasuki tahun 2026, Perseroan mengantisipasi fokus berkelanjutan pada penguatan fondasi bisnis dengan tetap berhati-hati dalam menghadapi dinamika pasar yang ada. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada pada kisaran 3,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan global, serta volatilitas nilai tukar. Di Indonesia, ketahanan ekonomi diproyeksikan tetap terjaga, dengan pertumbuhan PDB berkisar antara 4,9% hingga 5,7% serta tingkat inflasi yang tetap berada dalam kisaran target 2,5% $\pm$ 1%.⁵

Sektor otomotif diperkirakan masih menghadapi tantangan yang serupa, khususnya pada segmen kendaraan roda empat, seiring dengan keterbatasan daya beli masyarakat serta kebutuhan akan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Namun demikian, pengembangan produksi kendaraan listrik di dalam negeri membuka peluang jangka menengah yang menjanjikan. Sementara itu, pasar sepeda motor diproyeksikan tetap stabil pada kisaran 6,4 hingga 6,7 juta unit⁶, yang didukung oleh pembiayaan kredit yang berkelanjutan, terutama di luar pulau Jawa.

Revenue reached IDR1,022,951 million, approximately 76.42% of the planned IDR1,338.599 million, as lower financing volumes and increased credit costs constrained overall income. The Company recorded a net loss of IDR436,585 million, representing 268.21% of the projected net loss of IDR162,776 million.

Total assets stood at IDR4,040,380 million, achieving 87.45% of the target of IDR4,620.458 million. The contraction was mainly due to lower financing disbursements. Liabilities amounted to IDR3,044,843 million, or 91.33% of the target of IDR3,333.717 million, reflecting careful management of bank funding reliance. Equity was recorded at IDR995,537 million, corresponding to 77.37% of the target of IDR1,286,741 million, impacted by lower revenue and the net loss incurred during the year.

To address these challenges, the Company implemented a range of measures to stabilize operations and mitigate risks. These included optimizing branch networks and workforce, enhancing credit screening criteria, and introducing digital tools for collection and internal audit processes. Employee capacity-building initiatives were also strengthened to ensure organizational readiness and resilience.

Despite the shortfall against 2025 targets, these efforts have laid the groundwork for more sustainable and resilient operations, positioning the Company to better navigate future market dynamics.

Navigating 2026: Building Resilience and Sustainable Growth

Looking ahead to 2026, the Company anticipates a continued focus on consolidating its business foundation while cautiously navigating the prevailing market conditions. Global economic growth is projected at around 3.2%, slightly lower than the previous year, amid ongoing geopolitical uncertainties, global trade fragmentation, and currency volatility. In Indonesia, economic resilience is expected to persist, with GDP growth projected between 4.9% and 5.7% and inflation remaining within the target range of 2.5% $\pm$ 1%.⁵

The automotive sector is expected to face similar challenges, particularly in the four-wheeler market, due to purchasing power constraints and the need for consistent, long-term policy support. Nevertheless, the local production of electric vehicles presents medium-term opportunities, while the motorcycle market is projected to remain stable at approximately 6.4 to 6.7 million units⁶, supported by continued credit financing, especially outside Java.

5. Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2025/Bank Indonesia, Indonesian Economic Report 2025

6. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AIS)/Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI)



HAJIMU YUKIMOTO
Direktur Keuangan
Finance Director

KAZUHIRO INOUE
Direktur Utama
President Director

HANDOKO
Direktur
Director

Dalam konteks tersebut, Perseroan akan memprioritaskan pemulihan dan penguatan fundamental bisnis dibandingkan dengan ekspansi aset secara agresif. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sumber pendapatan baru yang mampu menghasilkan profitabilitas berkelanjutan, optimalisasi pengendalian biaya serta efisiensi operasional, serta peningkatan kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia. Kemitraan strategis, termasuk dengan MSO dan entitas afiliasi dalam grup usaha, akan terus dioptimalkan guna menjaga keberadaan Perseroan di pasar serta mendukung penjualan pada segmen dengan margin yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, Perseroan menyambut tahun 2026 dengan pendekatan yang berhati-hati namun tetap proaktif, dengan memanfaatkan pembelajaran dari tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan usaha, menjaga stabilitas keuangan, serta menangkap peluang pertumbuhan secara selektif dan bijaksana.

Memperkuat Tata Kelola Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Direksi memastikan bahwa praktik tata kelola yang dijalankan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendukung upaya Perseroan dalam memperkuat profil risiko serta menjaga integritas operasional.

Within this context, the Company will prioritize rebuilding and strengthening its business fundamentals rather than expanding assets aggressively. Key focus areas include developing new revenue streams capable of generating sustainable profits, optimizing cost control and operational efficiency, and enhancing organizational and human resource capabilities. Strategic partnerships, such as those with MSO and sister companies, will continue to play a role in maintaining market presence and supporting sales in high-margin segments.

Overall, the Company approaches 2026 with a cautious yet proactive mindset, leveraging lessons learned from 2025 to reinforce resilience, maintain financial stability, and capture growth opportunities in a selective and prudent manner.

Strengthening Corporate Governance

In 2025, the Company continued to reinforce its commitment to the consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across all levels of the organization. The Board of Directors ensured that governance practices were aligned with prevailing regulations, while also supporting the Company's efforts to strengthen its risk profile and maintain operational integrity.

Selama periode pelaporan, Perseroan menitikberatkan pada kepatuhan yang tepat waktu terhadap ketentuan regulator, khususnya dalam aspek penanganan pengaduan pelanggan dan perlindungan data pribadi. Kedua aspek tersebut menjadi prioritas utama sebagai wujud komitmen Perseroan dalam melindungi kepentingan pelanggan serta menjaga kepercayaan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran risiko dan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Setiap unit bisnis dan pimpinan didorong untuk secara aktif mengelola risiko di area tanggung jawab masing-masing, sehingga mendukung terbentuknya kerangka manajemen risiko yang lebih kuat dan terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan tata kelola tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga terinternalisasi dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, Perseroan menyadari bahwa praktik tata kelola perlu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan regulasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat. Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat kerangka tata kelola, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan akuntabilitas guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Strategi dan Komitmen Keberlanjutan

Perseroan mengintegrasikan keberlanjutan sebagai landasan strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan, dengan memastikan bahwa pertumbuhan usaha berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Sebagai penyedia jasa keuangan yang terpercaya, Perseroan turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui pembiayaan yang inklusif, tata kelola yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Perseroan menginternalisasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam seluruh kegiatan operasional dan proses pengambilan keputusan, sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Inovasi digital dan operasional terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta tanggung jawab lingkungan, termasuk melalui penerapan proses tanpa kertas (*paperless*) dan efisiensi penggunaan energi.

Pelaksanaan inisiatif keberlanjutan Perseroan mengacu pada empat pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi (Sahabat Rakyat), pendidikan (Sahabat Cerdas), kesehatan (Sahabat Sehat), dan tanggung jawab lingkungan (Sahabat Hijau). Keempat pilar ini menjadi dasar dalam mendorong pembiayaan inklusif bagi UMKM, peningkatan literasi keuangan, penguatan kesejahteraan masyarakat dan karyawan, serta pelaksanaan berbagai inisiatif ramah lingkungan guna menciptakan nilai berkelanjutan.

Dengan berlandaskan pada pilar-pilar tersebut serta didukung oleh struktur tata kelola yang memadai, Direksi memastikan bahwa aspek keberlanjutan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Risiko keberlanjutan dikelola sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan.

Sejalan dengan fondasi tersebut, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah melaksanakan inisiatif keuangan berkelanjutan secara efektif. Berbagai tantangan yang berkembang, seperti

Throughout the year, the Company emphasized timely compliance with regulatory requirements, particularly in areas related to customer complaint handling and personal data protection. These aspects remained key priorities, reflecting the Company's commitment to safeguarding customer interests and maintaining public trust.

In parallel, continuous efforts were made to enhance risk awareness and accountability across all divisions. Each business unit and leader was encouraged to actively manage risks within their respective areas, contributing to a more robust and integrated risk management framework. This approach aimed to ensure that governance practices were not only implemented at the policy level but also embedded in day-to-day operations.

Despite the progress achieved, the Company recognizes the need for ongoing improvements in governance practices to address evolving regulatory expectations and business complexities. Going forward, the Company remains committed to further strengthening its governance framework, enhancing internal controls, and fostering a culture of compliance and accountability to support sustainable business growth.

Sustainability Strategy and Commitment

The Company integrates sustainability as a strategic foundation to create long-term stakeholder value, ensuring business growth aligns with social welfare and environmental preservation. As a trusted financial services provider, the Company supports the Sustainable Development Goals (SDGs) through inclusive financing, strong governance, and competent human resources.

The Company embeds Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across its operations and decision-making, in line with applicable regulations. Digital and operational innovations enhance efficiency, service quality, and environmental responsibility, including paperless processes and energy efficiency.

Sustainability initiatives are guided by four pillars—economic empowerment (Sahabat Rakyat), education (Sahabat Cerdas), health (Sahabat Sehat), and environmental responsibility (Sahabat Hijau). These pillars drive inclusive MSME financing, financial literacy, community and employee well-being, and green initiatives to deliver sustainable value.

Guided by these pillars and governance structures, the Board of Directors ensures sustainability is embedded in decision-making and risk management, with sustainability risks managed within the overall risk framework.

Building on this foundation, throughout 2025 the Company implemented sustainable finance initiatives effectively. It addressed evolving challenges—such as increasing



peningkatan ekspektasi regulator, integrasi ESG, pengukuran data, serta keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan aspek lingkungan dan sosial, direspons melalui kebijakan yang adaptif serta penguatan tata kelola, tanpa hambatan signifikan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan membuat kemajuan yang signifikan dalam implementasi keuangan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Meskipun sebagian besar inisiatif telah mencapai target yang direncanakan, beberapa target pada aspek ekonomi mengalami penyesuaian akibat kondisi pasar, yang mencerminkan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan keberlanjutan.

Dalam aspek ekonomi, Perseroan terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dengan berfokus pada penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembiayaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan serta pengelolaan rantai pasok dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Peningkatan efisiensi operasional dan kapasitas internal juga dilakukan melalui digitalisasi, pengembangan kompetensi karyawan, serta penguatan praktik tata kelola, guna mendukung ketahanan usahadankeselarasandenganprinsipkeberlanjutan. Meskipun terdapat tekanan dari kondisi pasar, langkah-langkah tersebut memungkinkan Perseroan untuk merealisasikan sebagian besar target kinerja ekonomi pada tahun 2025.

Inisiatif lingkungan terus dilakukan untuk mengurangi dampak operasional sekaligus meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan. Proses kerja tanpa kertas (*paperless*) dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan efisiensi energi dan air. Konsumsi listrik menurun menjadi Rp2.512.934.310 (dari Rp4.048.680.339 pada tahun 2024), penggunaan bahan bakar menurun menjadi Rp320.591.400 (dari Rp590.685.010), serta konsumsi air menurun menjadi Rp105.185.566 (dari Rp113.034.365), yang didukung oleh penggunaan air perpipaan serta kampanye peningkatan kesadaran. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pengaduan terkait aspek lingkungan.

Dari aspek sosial, Perseroan terus membangun lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memberikan layanan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pelanggan. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 9 insiden keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan sebesar 18,4%, serta pelaksanaan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Keterlibatan dengan masyarakat diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 99,7% serta pemeliharaan saluran komunikasi yang terbuka, tanpa adanya pengaduan sosial maupun sanksi yang diterima. Layanan pelanggan tetap dijalankan secara adil dan responsif, dengan 121 pengaduan yang diterima dan seluruhnya telah diselesaikan. Program literasi keuangan juga terus dijalankan untuk meningkatkan pemahaman pelanggan dan masyarakat secara luas. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai 87%, mendukung upaya berkelanjutan Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan.

regulatory expectations, ESG integration, data measurement, and balancing growth with environmental and social considerations—through adaptive policies and strengthened governance, without significant obstacles to achieving its targets.

Sustainability Performance Achievements

In 2025, the Company made significant progress in implementing sustainable finance across economic, environmental, and social aspects. While most initiatives met planned targets, some economic goals were partially affected by market conditions, reflecting both achievements and ongoing challenges in pursuing sustainability.

The Company pursued sustainable economic growth, focusing on creating value for stakeholders while contributing positively to social and economic development. Efforts included environmentally friendly vehicle financing and supply chain management with social, environmental, and governance considerations. Operational efficiency and internal capacity were enhanced through digitalization, employee development, and governance practices, supporting resilience and alignment with sustainability principles. Despite some market pressures, these measures allowed the Company to achieve a substantial portion of its economic targets for 2025.

Environmental initiatives continued to reduce operational impacts and promote sustainability awareness. Paperless processes and reduced single-use plastics complemented improved energy and water efficiency. Electricity consumption decreased to IDR2,512,934,310 (from IDR4,048,680,339 in 2024), fuel to IDR320,591,400 (from IDR590,685,010), and water to IDR105,185,566 (from IDR113,034,365), supported by piped water and awareness campaigns. No environmental complaints were received in 2025.

From the social aspect, the Company fostered an inclusive workplace, employee well-being, and responsible community and customer services. In 2025, 9 workplace incidents were recorded, employee turnover was 18.4%, and training programs continued to build competencies. Community engagement included hiring 99.7% local employees and maintaining open communication channels, with no social complaints or sanctions reported. Customer service remained fair and responsive, with 121 complaints received and fully resolved, and financial literacy initiatives continued to educate customers and the public. Customer satisfaction reached 87%, supporting ongoing service improvements.

Strategi untuk Mencapai Target Keberlanjutan

Perseroan menerapkan pendekatan terintegrasi untuk mencapai target keberlanjutannya dengan menyelaraskan manajemen risiko, peluang bisnis, dan pertimbangan eksternal.

Risiko terkait keberlanjutan di seluruh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola sebagai bagian dari kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan, dengan pemantauan dan mitigasi rutin yang dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko untuk memastikan kelangsungan bisnis.

Di saat yang sama, Perseroan memanfaatkan peluang dan prospek bisnis yang muncul dari keuangan berkelanjutan dengan memperluas pembiayaan untuk produk-produk tahan lama dan ramah lingkungan, memperkuat kapabilitas digital, serta meningkatkan sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam menjalankan strateginya, Perseroan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan eksternal, termasuk ketidakpastian global, daya beli domestik, dan perkembangan regulasi, yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasinya.

Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya untuk mencapai target keberlanjutannya serta mempertahankan ketahanan dan penciptaan nilai jangka panjang.

Penutup

Sejalan dengan refleksi atas perjalanan Perseroan sepanjang tahun 2025 dengan tema “RISE Together”, Perseroan menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Berlandaskan pilar *Resilience*, *Innovation*, *Strength*, dan *Excellence*, Perseroan terus memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan nilai berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kepercayaan, dukungan, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam mendorong agenda keberlanjutan Perseroan.

Menutup laporan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra usaha, serta regulator atas dukungan yang berkelanjutan, sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh bersama menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



Kazuhiro Inoue
Direktur Utama
President Director

Strategy for Achieving Sustainability Targets

The Company implements an integrated approach to achieve its sustainability targets by aligning risk management, business opportunities, and external considerations.

Sustainability-related risks across economic, social, and environmental aspects are managed as part of the overall risk management framework, with regular monitoring and mitigation conducted through the Risk Management Committee to ensure business continuity.

At the same time, the Company leverages opportunities and business prospects arising from sustainable finance by expanding financing for durable and environmentally friendly products, strengthening digital capabilities, and enhancing human capital to support sustainable growth.

In executing its strategy, the Company also takes into account external economic, social, and environmental conditions, including global uncertainty, domestic purchasing power, and regulatory developments, which may influence the sustainability of its operations.

Through this approach, the Company aims to achieve its sustainability targets while maintaining resilience and long-term value creation.

Closing Remarks

As we reflect on 2025 under the theme “RISE Together”, the Company reaffirms its commitment to sustainable growth through collaboration with all stakeholders. Guided by our pillars of Resilience, Innovation, Strength, and Excellence, we continue to strengthen our business foundation, enhance operational efficiency, and deliver lasting value across economic, social, and environmental dimensions. These achievements are made possible through the trust, support, and active participation of all stakeholders, who play a key role in advancing our sustainable agenda.

To conclude this report, we would like to extend our heartfelt gratitude to our shareholders, employees, customers, partners, and regulators for their continued support, which enables us to rise together toward a resilient and sustainable future.

JACCSMM
FINANCE

WELCOME TO
JM CARE
+ + + +



Profil Perseroan

Company Profile





Identitas Umum Perseroan

General Identity of the Company [OJK C.2]

Nama Perseroan Company Name PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia)	Alamat Address Kantor Pusat/Head Office Lippo Kuningan, Lantai/Floor 23 & 25 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan Jakarta 12940 Indonesia	Tanggal Pendirian Date of Establishment 3 Mei 1990 May 3, 1990
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment Akta Pendirian Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 26 telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melalui Surat Keputusan No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juli 1990 dan telah dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1996, Tambahan Berita Negara No. 8963. Akta Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Mitra Pinasthika Mustika Finance menjadi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia No. 37 tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 2019 No. AHU-0103193.AH.01.02 TAHUN 2019. Deed of Establishment Notarial Deed of Rachmat Santoso, S.H., No. 26 has been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (now the Minister of Law and Human Rights) through Decree No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 dated July 16, 1990 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated October 22, 1996, Supplement to State Gazette No. 8963. Latest Amendment Deed Deed of Shareholder Resolutions Statement Amendment to the Articles of Association on Change of Name of PT Mitra Pinasthika Mustika Finance to PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia No. 37 dated December 6, 2019, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights based on Decree dated December 10, 2019 No. AHU-0103193.AH.01.02 YEAR 2019.		
Modal Dasar Authorized Capital Rp1.224.475.000.000 (1.224.475 lembar saham) Rp1,224,475,000,000 (1,224,475 shares)	Layanan Konsumen Customer Care Hotline: (021) 30927200 Email: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com	Situs Web Website www.jaccs-mpmfinance.com
Kepemilikan Saham Share Ownership JACCS Co., Ltd. (60%) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (40%)	Telepon Telephone (021) 29710100	Faksimile Fax (021) 29110313
Email corporate.secretary@jaccs-mpmfinance.com	Media Sosial Social Media @jaccs_mpmfinance JACCS MPM Finance Indonesia JACCS MPM Finance Indonesia	Data Jaringan Kantor * Office Network Data 1 Kantor Pusat/Head Office 67 Kantor Cabang/Branch Offices 1 Kantor Pemasaran/Marketing Office

* Catatan: Per 1 Februari 2026

* Note: As of February 1, 2026

Informasi Perubahan Nama

Information on Name Change

Perseroan telah melakukan perubahan nama seiring dengan perkembangan usaha di industri pembiayaan. Riwayat perubahan nama Perseroan disajikan pada tabel berikut:

The Company has changed its name in line with the growth of its business in the financing industry. The history of the Company's name changes is presented in the following table:

Tahun Perubahan Nama Perseroan Year of Change of the Company Name





Sekilas Perseroan

Company Overview

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Perseroan) berdiri pada tanggal 3 Mei 1990, dengan nama PT Elbatama Securindo. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 3 Mei 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki oleh Akta No. 327 tanggal 30 Juni 1990, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 16 Juli 1990 Perseroan memperoleh status hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-4110.HT.01.01.Th.90. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 1990, Perseroan telah didaftarkan pada buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1583/1990, dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 85 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) No. 8963 pada tanggal 22 Oktober 1996.

Pada tahun 1993, Perseroan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan pembiayaan, yang diikuti dengan perubahan nama menjadi PT Elbatama Finance. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, PT Elbatama Finance diambil alih oleh PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) pada tahun 2000, dan kemudian mengubah namanya menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF) pada tahun 2003. Melalui PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJR) yang merupakan entitas anaknya, ANJ mengambil alih ANJF dengan kepemilikan saham sebesar 94% pada tahun 2010. Pada tahun 2012, ANJR melakukan divestasi saham ANJF kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) yang diikuti dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance). Porsi kepemilikan MPM atas saham Perseroan semakin bertambah dari 64,9% menjadi 99,9% di tahun 2013.

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (the Company) was established on May 3, 1990, under the name PT Elbatama Securindo. The Company was established based on Deed of Establishment No. 26 dated May 3, 1990, executed before Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta, as amended by Deed No. 327 dated June 30, 1990, executed before Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta, and on July 16, 1990, the Company obtained legal status from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia pursuant to Minister of Justice Decree No. C2-4110.HT.01.01.Th.90. Subsequently, on July 26, 1990, the Company was registered in the Central Jakarta District Court register No. 1583/1990, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) No. 85 and the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia (TBNRI) No. 8963 on October 22, 1996.

In 1993, the Company changed its line of business to a financing company, followed by a change of name to PT Elbatama Finance. In line with its business development, PT Elbatama Finance was acquired by PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) in 2000 and subsequently changed its name to PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF) in 2003. Through its subsidiary, PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJR), ANJ acquired a 94% stake in ANJF in 2010. In 2012, ANJR divested its shares in ANJF to PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM), followed by a change in the Company's name to PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance). MPM's ownership stake in the Company increased from 64.9% to 99.9% in 2013.

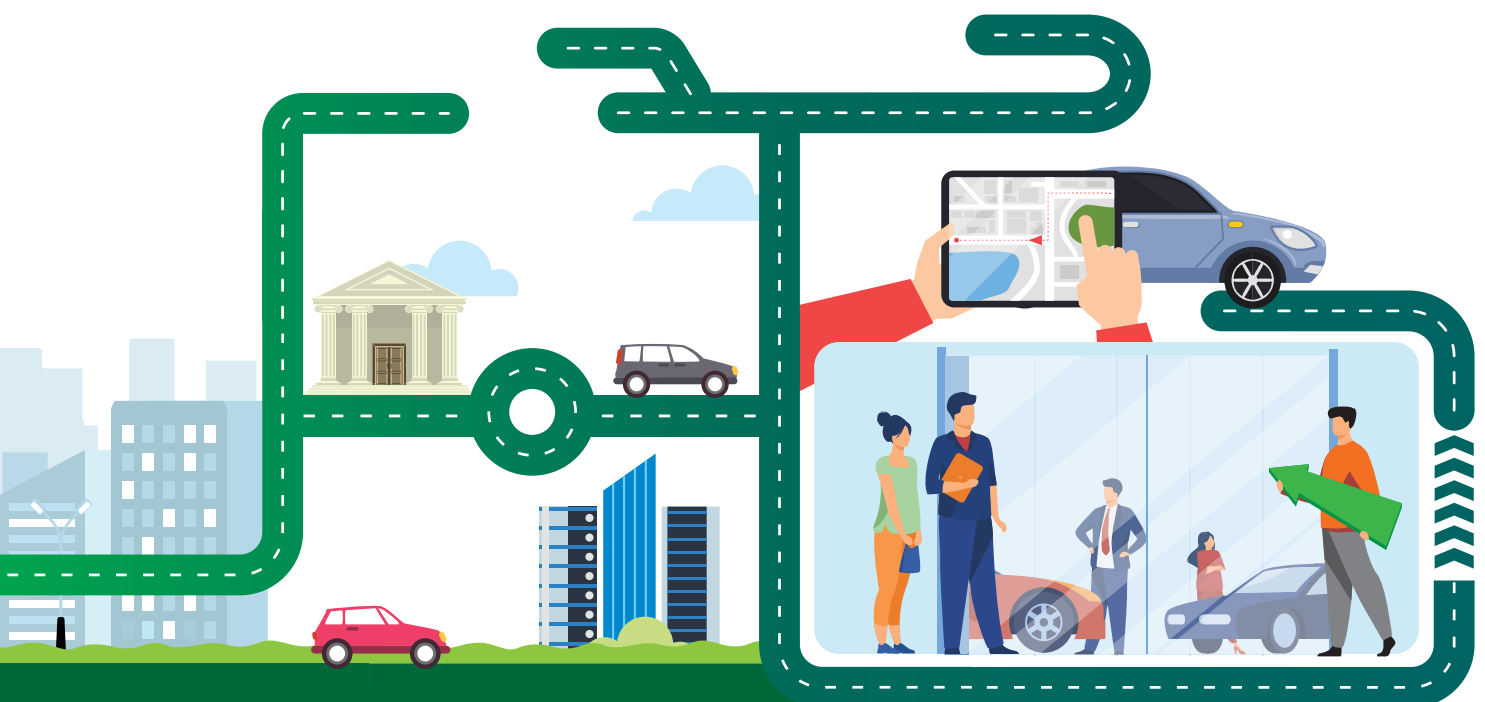


Pada tahun 2014, MPM melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha (merger) 2 (dua) entitas anaknya, yaitu MPM Finance dan PT Sasana Artha Finance (SAF). Dalam merger ini, Perseroan menjadi penerima penggabungan (*surviving entity*). Selanjutnya, JACCS Co., Ltd. (JACCS) yang merupakan pemegang 40% saham dari modal disetor SAF, menambah modal disetor pada Perseroan sehingga kepemilikannya menjadi 40%.

Pada tanggal 17 Mei 2017, MPM mengalihkan 20% kepemilikan saham di Perseroan kepada JACCS. Dengan demikian, JACCS secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 60% dan MPM dengan kepemilikan 40%. Langkah strategis ini diikuti dengan perubahan nama Perseroan untuk yang keempat kalinya menjadi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia) sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103193AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019. Selain melakukan perubahan nama, Perseroan juga memperkenalkan logo baru pada tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal 3 Mei 2024, Perseroan mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 *Information Security Management Systems* (ISMS) yang menunjukkan bahwa Perseroan telah memenuhi standar Internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk proses pelayanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

In 2014, MPM undertook a corporate action in the form of a merger of its two subsidiaries, namely MPM Finance and PT Sasana Artha Finance (SAF), with the Company acting as the surviving entity. Subsequently, JACCS Co., Ltd. (JACCS), which held 40% of SAF's paid-up capital, injected capital into the Company, resulting in a 40% ownership stake.

On May 17, 2017, MPM transferred 20% of its shareholding in the Company to JACCS. As a result, JACCS officially became the majority shareholder with a 60% ownership stake, while MPM held the remaining 40%. This strategic step was followed by the fourth change of the Company's name to PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia) in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0103193.AH.01.02. Tahun 2019 dated December 10, 2019. In addition to the name change, the Company introduced a new logo on January 1, 2021. On May 3, 2024, the Company obtained ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System (ISMS) certification, demonstrating that the Company has complied with international standards for information security management systems in delivering technology-based financial services.





Jejak Langkah

Milestone

Pendirian Perseroan dengan nama PT Elbatama Securindo.

Establishment of a corporation under the name PT Elbatama Securindo.

1990

Perubahan nama dari PT Elbatama Securindo menjadi PT Elbatama Finance yang diikuti dengan perubahan haluan bisnis menjadi perusahaan pembiayaan.

The name change from PT Elbatama Securindo to PT Elbatama Finance, followed by a shift in business focus to become a financing company.

1993

Perseroan telah memperoleh lisensi dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan dari Kementerian Keuangan.

The Company obtained a license to operate as a financing institution from the Ministry of Finance.

1994

PT Elbatama Finance diakuisisi oleh PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ).

PT Elbatama Finance was acquired by PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ).

2000

Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF).

The Company changed its name to PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF).

2003

Memperkenalkan logo baru Perseroan.

Introducing the Company's new logo.

2021

- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD250 juta.
- Perseroan menerbitkan Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 sebesar Rp664 miliar.
- Perseroan berganti nama menjadi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia).

- The Company secured a USD250 million overseas syndicated loan facility.
- The Company issued the MPM Finance I 2019 Bonds in the amount of IDR664 billion.
- The Company changed its name to PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia).

2019

- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD333 juta.
- Perseroan memperoleh peringkat AA dari Fitch.
- Total aset Perseroan mencapai Rp10 triliun.

- The Company secured a USD333 million overseas syndicated loan facility.
- The Company received an AA rating from Fitch.
- The Company's total assets reached IDR10 trillion.

2018

- Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp600 miliar.
- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD250 juta.
- Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) senilai Rp300 miliar.

- The Company issued the JACCS MPM Finance Indonesia Series I 2022 Continuous Bonds, Phase I, in the amount of IDR600 billion.
- The Company secured a USD250 million overseas syndicated loan facility.
- The Company issued Medium Term Notes (MTN) worth IDR300 billion.

2022

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 senilai Rp400 miliar yang terdiri dari seri A sebesar Rp170 miliar dan seri B sebesar Rp230 miliar.

The Company issued JACCS MPM Finance Indonesia 2023 Series I Continuous Bonds, Phase II, worth IDR400 billion, consisting of Series A in the amount of IDR170 billion and Series B in the amount of IDR230 billion.

2023

ANJ mengakuisisi 94% saham ANJF melalui PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJR), menjadikan Perseroan menjadi salah satu anak perusahaan ANJ.

ANJ acquired a 94% stake in ANJF through PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJR), making the Company a subsidiary of ANJ.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) mengakuisisi saham ANJF yang dimiliki ANJR serta mengubah namanya menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance).

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) acquired the shares of ANJF held by ANJR and subsequently changed its name to PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance).

Persentase kepemilikan saham Perseroan oleh MPM bertambah dari 64,9% menjadi 99,9%.

MPM's ownership in the Company increased from 64.9% to 99.9%.

- Perseroan melakukan merger dengan PT Sasana Artha Finance (SAF) dan menjadi penerima penggabungan atau *surviving entity*.
- JACCS Co., Ltd., sebagai pemegang saham dengan kepemilikan 40% dari modal disetor SAF, melakukan peningkatan modal disetor Perseroan sehingga kepemilikannya menjadi 40%.
- The Company merged with PT Sasana Artha Finance (SAF) and became the surviving entity.
- JACCS Co., Ltd., a shareholder holding 40% of SAF's paid-up capital, participated in an increase of the Company's paid-up capital, thereby maintaining its ownership at 40%.

2010

2012

2013

2014

- JACCS mengakuisisi 20% kepemilikan saham Perseroan dari MPM dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 60%, sedangkan MPM memegang 40% saham Perseroan.
- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD190 juta.
- Perseroan memperoleh peringkat AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

- JACCS acquired a 20% stake in the Company from MPM, becoming the majority shareholder with a 60% ownership, while MPM retained a 40% stake.
- The Company secured a USD190 million foreign syndicated loan facility.
- The Company received an AA- rating from PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

2017

- Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) senilai Rp300 miliar.
- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD133 juta.

- The Company issued Medium-Term Notes (MTN) worth IDR300 billion.
- The Company secured a foreign syndicated loan facility of USD133 million.

2016

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri sebesar USD150 juta.

The Company secured a USD150 million syndicated loan facility from overseas lenders.

2015

- Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 senilai Rp500 miliar yang terdiri dari seri A sebesar Rp150 miliar dan seri B sebesar Rp350 miliar.
- Perseroan meraih sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 *Information Security Management Systems* (ISMS), dan memenuhi standar internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk proses pelayanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

- The Company issued JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2024 worth IDR500 billion consisting of series A amounting to IDR150 billion and series B amounting to IDR350 billion.
- The Company obtained ISO/IEC 27001:2022 certification for Information Security Management Systems (ISMS), and met international standards for information security management in technology-based financial services.

Perseroan berfokus pada pengembangan pembiayaan ritel, khususnya pembiayaan kendaraan roda dua.

The Company focuses on developing retail financing, especially two-wheeled vehicle financing

2024

2025



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perseroan

Vision, Mission, and Values of the Company [OJK C.1]



Visi Vision

Menjadi perusahaan pembiayaan terpercaya yang memberikan pelayanan terbaik dengan inovasi berkesinambungan bagi seluruh masyarakat.



Misi Mission

Memberikan solusi produk-produk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kreatif, inovatif, penuh integritas serta melayani dengan hormat dan rendah hati.

Berorientasi terhadap kemajuan dan perkembangan masa depan yang dinamis melalui keunggulan teknologi untuk memberikan keuntungan terbaik bagi seluruh *stakeholder*.

Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau visi dan misi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut masih relevan serta sesuai dengan kondisi Perseroan saat ini.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission for the 2025 fiscal year and have stated that these remain relevant and aligned with the Company's current conditions.

Nilai-Nilai Perseroan

Company Values

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi serta mengimplementasikan nilai dan budaya kerja yang tercermin dalam nilai-nilai Perseroan *FAST FRIENDLY*.

The Company consistently upholds and implements the values and work culture reflected in its *FAST FRIENDLY* values.

 FOCUS Fokus pada kebutuhan konsumen Focus on customers needs	 ACCURATE Menyediakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan konsumen Providing the right solutions tailored to customer needs	 SPEED Memberikan pelayanan yang cepat Providing fast service
 TRUST Menjadi mitra yang dapat dipercaya Becoming a trusted partner	 FAIR Menjaga terlaksananya hak dan kewajiban konsumen & Perseroan Ensuring the fulfillment of the rights and obligations of customers and the Company	 RESPECT Menghormati konsumen Respecting customers
 INTEGRITY Bertindak sesuai dengan ketentuan dan tanpa pamrih Act in accordance with the rules and selflessly	 EMPATHY Dapat merasakan perasaan konsumen namun tidak hanyut dalam suasananya Be able to empathize with customers without being carried away by the atmosphere	 NURTURANCE Peduli kepada kebutuhan konsumen Committed to meeting customer needs
 DYNAMIC Selalu bersemangat dalam melayani konsumen Always enthusiastic about serving customers	 LISTEN Menjadi pendengar yang baik untuk konsumen Be a good listener for customers	 YES, WE CAN! Kita PASTI Bisa We CAN DO IT



Skala Usaha

Business Scale [OJK C.3]

Gambaran skala usaha Perseroan per 31 Desember 2025 berdasarkan perbandingan tiga (3) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company's business scale as of December 31, 2025, based on a comparison of the last three (3) years, is as follows:

Jumlah Aset dan Liabilitas Perseroan

Dalam jutaan Rupiah

Total Assets and Liabilities of the Company

In million Rupiah

Keterangan	2025	2024	2023	Description
Laporan Posisi Keuangan		Statement of Financial Position		
Jumlah Aset	4.040.380	6.857.317	8.158.042	Total Assets
Jumlah Liabilitas	3.044.843	5.422.883	6.450.979	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	995.537	1.434.434	1.707.063	Total Equity

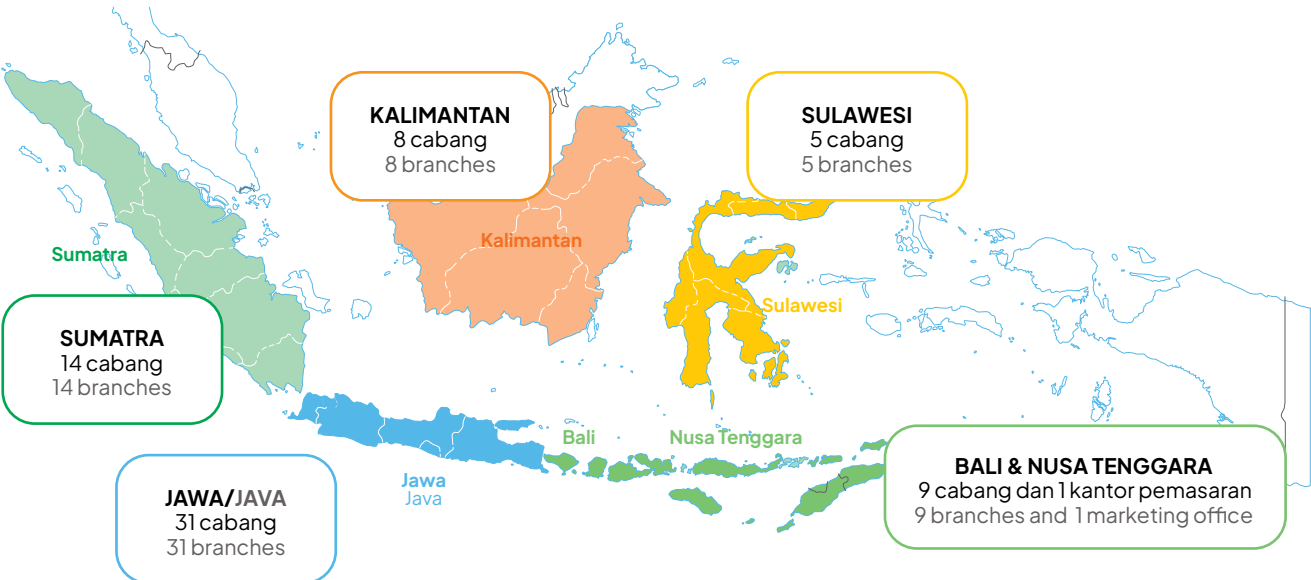
Wilayah Operasional

Operational Areas [OJK C.3]

per 1 February 2026 | As of February 1, 2026

Berikut lokasi kantor cabang dan kantor pemasaran berdasarkan wilayah operasionalnya:

The following is the location of branch offices and marketing offices based on their operational areas:



Hingga per 1 February 2026, Perseroan memiliki 67 kantor cabang dan 1 kantor pemasaran.

As of February 1st, 2026, the Company had 67 branch offices and 1 marketing office.

Kegiatan Usaha

Business Activities [OJK C.4]

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Pembiayaan Investasi
2. Pembiayaan Modal Kerja
3. Pembiayaan Multiguna
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 68/KMK.017/1994 tanggal 5 Maret 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-421/KM.6/2003 tanggal 1 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-143/KM.10/2012 tanggal 16 Maret 2012, Perseroan memiliki izin untuk menjalankan usaha sebagai lembaga pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan Perseroan pada tahun 2025 di antaranya:

In accordance with the provisions of the Articles of Association, the Company conducts business activities that include:

1. Investment Financing
2. Working Capital Financing
3. Multi-Purpose Financing
4. Other financing business activities subject to OJK approval

Based on the Ministry of Finance Decree No. 68/KMK.017/1994 dated March 5, 1994, as amended by Ministry of Finance Decree No. Kep-421/KM.6/2003 dated December 1, 2003, and Ministry of Finance Decree No. Kep-143/KM.10/2012 dated March 16, 2012, the Company is licensed to operate as a financing institution. The financing products offered by the Company in 2025 include:

Pembiayaan Kendaraan Roda Dua

Perseroan menyediakan fasilitas pembiayaan sepeda motor baru yang didukung oleh jaringan *authorized dealer* Honda di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pembiayaan ditawarkan dengan struktur yang kompetitif dan pilihan tenor angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen, serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi, jaringan pembayaran angsuran yang luas melalui *mitra channel payment*, dan sistem penyimpanan BPKB kendaraan yang aman.



Two-wheeled Vehicle Financing

The Company provides financing facilities for new motorcycles, supported by an extensive network of Honda authorized dealers across East Java, Bali, and Nusa Tenggara. The financing is offered with competitive structures and flexible tenor options tailored to the customer's repayment capacity. Additional features include insurance coverage, a wide payment network through partner payment channels, and secure storage of the vehicle registration certificate (BPKB).

Fasilitas Dana

Pembiayaan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi debitur dengan beragam tujuan/multiguna, misal untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya rumah sakit hingga renovasi rumah, dan lain-lain.



Funding Facility

Financing designed to meet the customer's various personal needs, including school tuition, medical expenses, home renovation, and other purposes.



Keanggotaan Asosiasi

Association Memberships [OJK C.5]

Dalam rangka memperkuat jaringan bisnis dan meningkatkan reputasi, Perseroan secara aktif mengikuti keanggotaan asosiasi. Per 31 Desember 2025, keanggotaan asosiasi yang diikuti Perseroan meliputi:

To strengthen its business network and enhance its reputation, the Company actively participates in association memberships. As of December 31, 2025, the Company's association memberships include:

Nama Asosiasi Association Name	Kedudukan dalam Asosiasi Position in the Association	Lingkup Nasional/Internasional National/International Scope
APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) APPI (Indonesian Financial Services Association)	Anggota Member	Nasional National
BMPPVI (Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia) BMPPVI (Indonesian Financing, Pawnshop and Venture Mediation Board)	Anggota Member	Nasional National

Perubahan yang Bersifat Signifikan

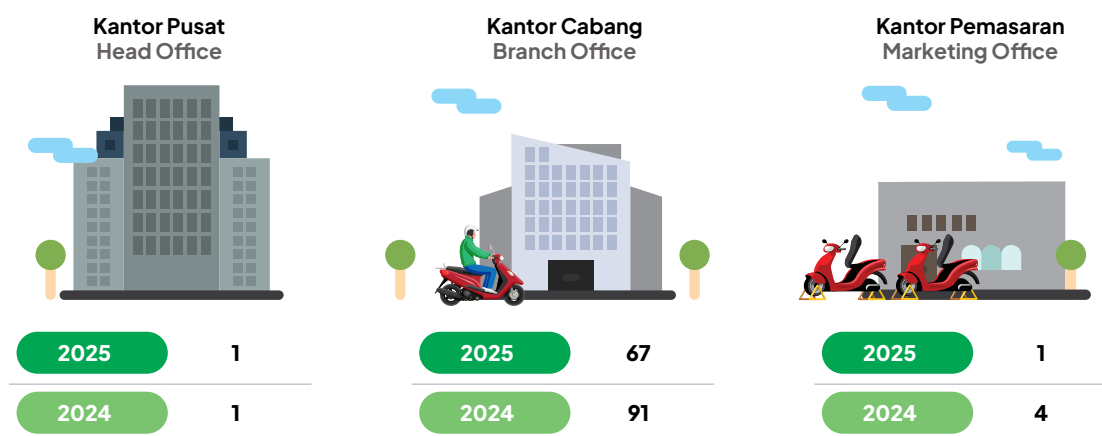
Significant Changes [OJK C.6]

Perseroan menutup sepenuhnya kegiatan bisnis pembiayaan sewa pembiayaan dan/atau jual dan sewa balik kepada badan usaha (pembiayaan korporasi) per 1 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memastikan fokus pada kegiatan bisnis utama, yaitu pembiayaan ritel.

The Company fully discontinued finance lease and / or sales and leaseback financing for business entities (corporate financing) effective from January 1, 2025. This step was taken as part of the Company's strategy to focus on its core business, namely retail financing. In addition,

Pada tahun 2025, terjadi adanya perubahan pada jumlah jaringan kantor Perseroan sebagai berikut:

In 2025, changes also occurred in the number of the Company's branch offices, as follows:



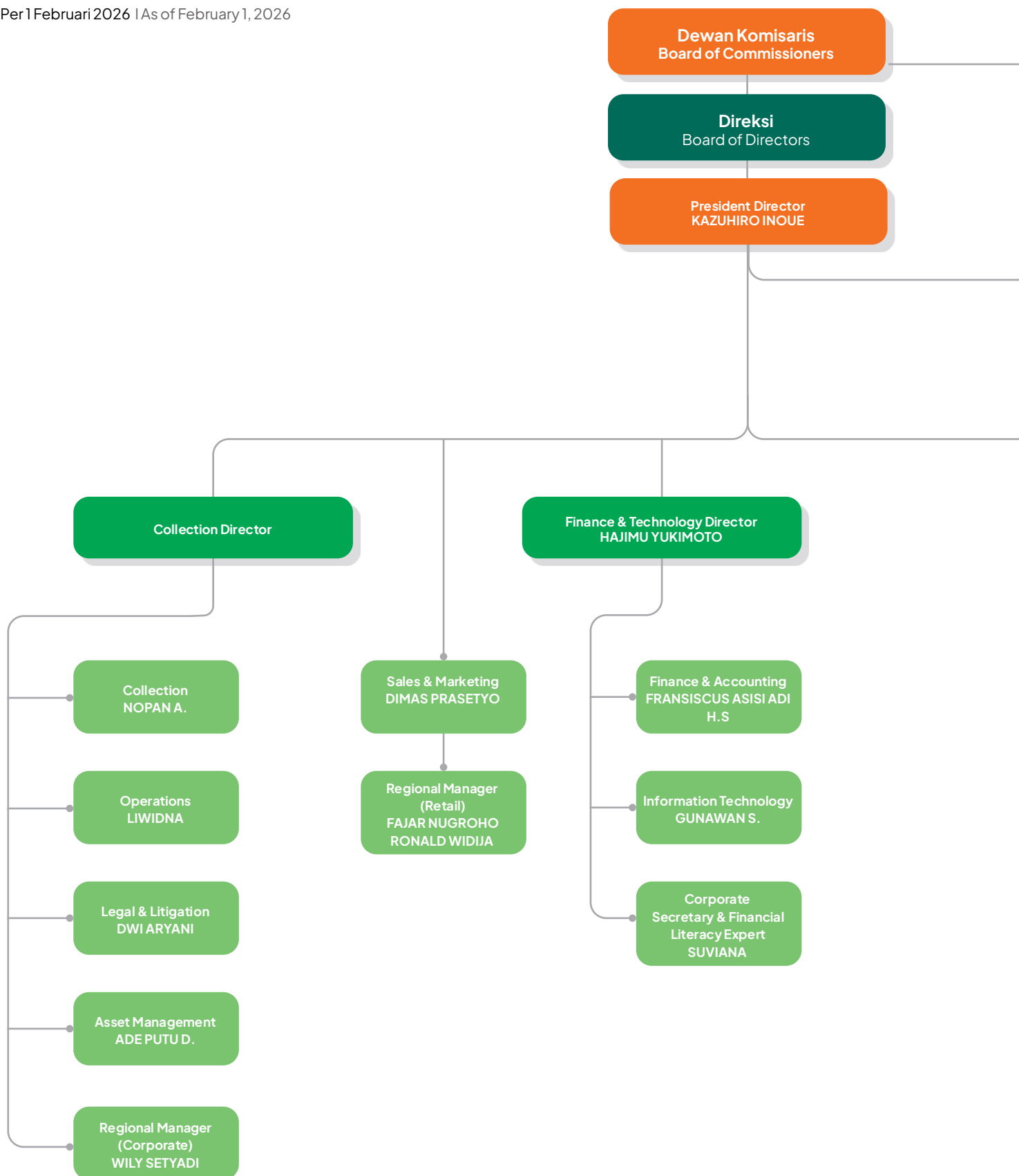
Catatan: Per 1 Februari 2026
Note: As of February 1, 2026

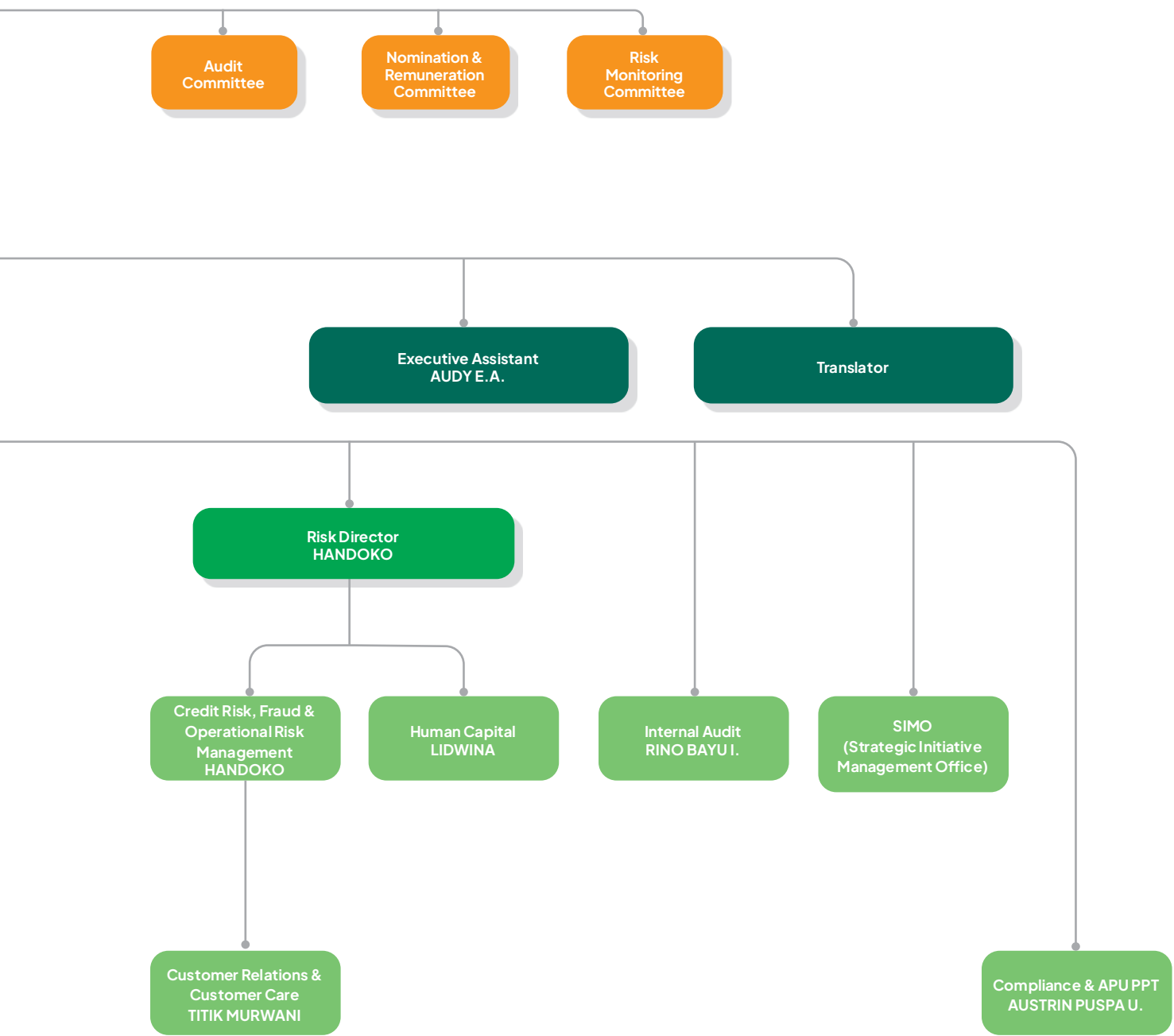


Struktur Organisasi

Organizational Structure

Per 1 Februari 2026 | As of February 1, 2026







Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



TAKESHI KOBAYASHI

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Jepang
Citizenship Japanese

Domisili Jakarta
Domicile

Usia 55 tahun
Age 55 years old

Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Juni, 2024.

Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 26, 2024.

Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Hukum dari Keio University (1993).

Riwayat Jabatan

- International Business Division General Manager, JACCS Co., Ltd (2023–2024).
- Management Consulting Manager, Panin Internasional (2022–2023).
- International Corporate Relations Manager, Dai-ichi Life Insurance Company, Limited. (2013–2022).
- Group Pension Assistant Manager, Dai-ichi Life Insurance Company, Limited. (2010–2013)
- International Credit Section Assistant Manager, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2007–2010).
- Capital Market Dept Assistant Manager, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2002–2007).
- Assistant Manager Representative Office in Frankfurt Germany, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2000–2002).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2024–sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko (2026 – sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Educational Background

Bachelor's Degree in Laws from Keio University (1993).

Employment History

- International Business Division General Manager, JACCS Co., Ltd (2023–2024).
- Management Consulting Manager, Panin Internasional (2022–2023).
- International Corporate Relations Manager, Dai-ichi Life Insurance Company, Limited. (2013–2022).
- Group Pension Assistant Manager, Dai-ichi Life Insurance Company, Limited. (2010–2013).
- International Credit Section Assistant Manager, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2007–2010).
- Capital Market Dept Assistant Manager, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2002–2007).
- Assistant Manager Representative Office in Frankfurt Germany, Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (2000–2002).

Concurrent Positions

- Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2024–present).
- Member of the Risk Monitoring Committee (2026 – present)

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.



BENNY REDJO SETYONO

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian

Domisili Jakarta
Domicile

Usia 65 tahun
Age 65 years old

Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Januari 2025.

Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 27, 2025.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (1985).
- Master of Business Administration, University of Southern California (1991).
- Master of Accounting, University of Southern California (1992).

Riwayat Jabatan

- Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko, PT Astra Aviva Life Insurance (2014–2019).
- Direktur Utama, PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2014–2018).
- Komisaris di PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2012–2014).
- Direktur di PT Toyota Astra Motor (2003–2011).
- Direktur di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000–2002).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2020–2025).
- Anggota Komite Audit di PT XL Axiata Tbk (2019–2025).

Rangkap Jabatan

- Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, PT Asuransi Jiwa Astra (2020–sekarang).
- Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan GCG di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019–sekarang).
- Direktur Utama di PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2022–sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Educational Background

- Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (1985).
- Master of Business Administration, University of Southern California (1991).
- Master of Accounting, University of Southern California (1992).

Employment History

- Independent Commissioner and Chairman of Risk Monitoring Committee, PT Astra Aviva Life Insurance (2014–2019).
- President Director, PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2014–2018).
- Commissioner at PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2012–2014).
- Director at PT Toyota Astra Motor (2003–2011).
- Director at PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000–2002).
- Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2020–2025).
- Member of Audit Committee, PT XL Axiata Tbk (2019–2025).

Concurrent Positions

- Independent Commissioner, Chairman of Audit Committee and member of Risk Monitoring Committee, PT Asuransi Jiwa Astra (2020–present).
- Independent Commissioner, Chairman of Audit Committee and member of GCG Committee, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019–present).
- President Director, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2022–present).

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.



ALIP

Komisaris Independen Independent Commissioner

Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian

Domisili Jakarta
Domicile

Usia 50 tahun
Age 50 years old

Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Sirkuler Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Januari 2024.

Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (1998).
- Master of Business Administration (MBA), Kellogg School of Management, Northwestern University dan The Hong Kong University of Science and Technology (2013).

Riwayat Jabatan

- Anggota Komite Audit, PT Baramulti Suksessarana Tbk (2018–2024).
- Principal Arghajata Consulting (2007–2010).
- Senior Manager, Ernst & Young (1999–2007).
- Komisaris Independen, PT Menteng Heritage Realty Tbk (2019–2025).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024–sekarang).
- Ketua Komite Audit Perseroan (2025–sekarang).
- Direktur & Partner, PT AJ Capital Advisory (2011–sekarang).
- Anggota Komite Audit, PT Intiland Development Tbk (2021–sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Educational Background

- Bachelor of Economics, Trisakti University (1998).
- Master of Business Administration (MBA), Kellogg School of Management, Northwestern University and The Hong Kong University of Science and Technology (2013).

Employment History

- Member of Audit Committee, PT Baramulti Suksessarana Tbk (2018–2024).
- Principal Arghajata Consulting (2007–2010).
- Senior Manager, Ernst & Young (1999–2007).
- Independent Commissioner, PT Menteng Heritage Realty Tbk (2019–2025).

Concurrent Positions

- Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee (2024–present).
- Chairman of the Company's Audit Committee (2025–present).
- Director & Partner, PT AJ Capital Advisory (2011–present).
- Member of Audit Committee, PT Intiland Development Tbk (2021–present).

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Statement of Independence by the Independent Commissioners

Pernyataan Komisaris Independen Statement of Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Has not worked for or held any authority or responsibility for planning, leading, controlling, or supervising the Company's activities within the past 6 (six) months.	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan Does not hold any shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no business relationship, either direct or indirect, related to the Company's business activities.	✓

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025	
Nama Name	Jabatan Position
Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama President Commissioner
Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioner
Chihiro Ushigome*	Komisaris Commissioner
Josaphat Budisatyawira**	Komisaris Independen Independent Commissioner
Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 26 Januari 2026, berlaku efektif per 28 Februari 2026. /Tendered his resignation on January 26, 2026, effective February 28, 2026.

** Masa jabatan berakhir per 9 Februari 2026. /Term of office ended on February 9, 2026.

Setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan 2025 ini, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Februari 2026. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

After the end of the fiscal year and up to the submission of this 2025 Annual Report, there has been a change in the composition of the Company's Board of Commissioners pursuant to Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 18, 2026. The composition of the Company's Board of Commissioners after this change is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama President Commissioner
Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioner
Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner



Profil Direksi

Board of Directors' Profile



KAZUHIRO INOUE

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Jepang
Citizenship Japanese

Domisili Jakarta
Domicile

Usia 51 tahun
Age 51 years old

Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Januari 2024.

Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Pendidikan, Universitas Gakugei Tokyo (1998).

Educational Background

Bachelor's Degree in Education, Tokyo Gakugei University (1998).

Riwayat Jabatan

- Direktur Perseroan (2023–2024).
- Chief Manager – International Business Division, JACCS Co., Ltd. (2015–2022).
- Executive Manager of Sales Management Division, JACCS International Vietnam Finance Co., Ltd. (2013–2015).
- West-Japan Shopping Credit Promotion Division, JACCS Co., Ltd. (2008–2013).
- Credit Card Promotion Division, JACCS Co., Ltd. (2003–2008).

Employment History

- Director of the Company (2023–2024).
- Chief Manager – International Business Division, JACCS Co., Ltd. (2015–2022).
- Executive Manager of Sales Management Division, JACCS International Vietnam Finance Co., Ltd. (2013–2015).
- West-Japan Shopping Credit Promotion Division, JACCS Co., Ltd. (2008–2013).
- Credit Card Promotion Division, JACCS Co., Ltd. (2003–2008).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions at other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.

**HAJIMU YUKIMOTO****Direktur Keuangan**
Finance Director**Kewarganegaraan** Jepang
Citizenship Japanese**Domisili** Jakarta
Domicile**Usia** 61 tahun
Age 61 years old**Dasar Hukum Pengangkatan** Surat Keputusan Sirkuler pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Mei 2023.
Legal Basis of Appointment Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 4, 2023.**Riwayat Pendidikan**

Sarjana Bahasa Asing, Universitas Osaka, Jepang (1987).

Educational Background

Bachelor's Degree in Foreign Language, Osaka University, Japan (1987).

Riwayat Jabatan

- Direktur Utama Perseroan (2013–2014).
- Direktur Keuangan Perseroan (2010–2013).
- Chief Manager Divisi Corporate Business Solution, Resona Bank, Ltd (2010–2010).
- Wakil Presiden Direktur, PT Bank Resona Perdania (2005–2010).
- Direktur, PT Bank Daiwa Perdania (PT Bank Resona Perdania) (2003–2005).
- Senior Manager Divisi Corporate Business, Daiwa Bank Holding, Inc. (2002–2003).
- Senior Manager Divisi International di The Daiwa Bank Limited (2000–2002).
- General Manager Business Department Kantor Pusat di PT Bank Daiwa Perdania (PT Bank Resona Perdania) (1993–2000).
- Chief Officer of Business Promotion Section di The Daiwa Bank Limited, Cabang Sakuragawa (1992–1993).
- Overseas Trainee di The Daiwa Bank Limited (1991–1992).

Employment History

- President Director of the Company (2013–2014).
- Finance Director of the Company (2010–2013).
- Chief Manager of Corporate Business Solution Division at Resona Bank, Ltd (2010–2010).
- Vice President Director, PT Bank Resona Perdania (2005–2010).
- Director, PT Bank Daiwa Perdania (PT Bank Resona Perdania) (2003–2005).
- Senior Manager of Corporate Business Division at Daiwa Bank Holding, Inc. (2002–2003).
- Senior Manager of International Division at Daiwa Bank Limited (2000–2002).
- General Manager of Business Department – Head Office at PT Bank Daiwa Perdania (PT Bank Resona Perdania) (1993–2000).
- Chief Officer of Business Promotion Section at The Daiwa Bank Limited, Sakuragawa Branch (1992–1993).
- Overseas Trainee at Daiwa Bank Limited (1991–1992).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions at other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.



HANDOKO

Direktur
Director

Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian

Domisili Jakarta
Domicile

Usia 52 tahun
Age 52 years old

Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 November 2024.

Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 8, 2024.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jayabaya (1997).
- Gelar Magister Manajemen dari Universitas Tarumanagara (2000).

Educational Background

- Bachelor of Civil Engineering from Jayabaya University (1997).
- Master of Management Degree from Tarumanagara University (2000).

Riwayat Jabatan

- Credit Risk, Fraud and Operation Risk Management Division Head Perseroan (2021–2024).
- Credit General Manager, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (2016–2021).
- Head of Credit Operation, PT UAF Jaminan Kredit (2015–2016).
- Credit & Risk Management Division Head, PT Kencana Internusa Artha Finance (2012–2015).
- Credit Control Department Head, PT Dipo Star Finance (2011–2012).
- Senior Credit Manager, PT Adira Quantum Multifinance (2010–2011).
- Business Analyst Manager – U Finance Indonesia (2006–2010).
- Credit Risk Management Supervisor, PT Bank Buana Indonesia (2005–2006).

Employment History

- Credit Risk, Fraud and Operation Risk Management Division Head of the Company (2021–2024).
- Credit General Manager, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (2016–2021).
- Head of Credit Operation, PT UAF Jaminan Kredit (2015–2016).
- Credit & Risk Management Division Head, PT Kencana Internusa Artha Finance (2012–2015).
- Credit Control Department Head, PT Dipo Star Finance (2011–2012).
- Senior Credit Manager, PT Adira Quantum Multifinance (2010–2011).
- Business Analyst Manager – U Finance Indonesia (2006–2010).
- Credit Risk Management Supervisor, PT Bank Buana Indonesia (2005–2006).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions at other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Affiliation

Not affiliated with the Board of Commissioners member(s), Board of Directors member(s), or the Majority Shareholder.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Composition of the Board of Directors

Sepanjang tahun 2025 hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan 2025 ini, terdapat sejumlah perubahan dalam susunan Direksi sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Direksi Perseroan yang terbaru didasarkan pada Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Februari 2026.

Throughout the year 2025 and up to the submission of this 2025 Annual Report, there have been several changes in the composition of the Board of Directors as part of the implementation of Good Corporate Governance and compliance with the prevailing laws and regulations. The latest composition of the Company's Board of Directors is based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 18, 2026

Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025		Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025		Per 18 Februari 2026 As of February 18, 2026	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director
Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director
Gestik Dwi Puji M*	Direktur Director	Supriyanto	Direktur Director	Handoko	Direktur Director
Supriyanto**	Direktur Director	Kazunori Inoue**	Direktur Director		
Kazunori Inoue	Direktur Director	Handoko	Direktur Director		
Handoko	Direktur Director	Yimmy Weddianto***	Direktur Director		

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 23 April 2025, berlaku efektif per tanggal 31 Mei 2025./Tendered her resignation on April 23, 2025, effective May 31, 2025.

** Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 6 Januari 2026, berlaku efektif per tanggal 31 Maret 2026./Tendered his resignation on January 6, 2026, effective March 31, 2026.

*** Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 4 November 2025, kemudian mengundurkan diri pada tanggal 26 Januari 2026, berlaku efektif per tanggal 28 Februari 2026./Appointed as Director of the Company on November 4, 2025, and tendered his resignation on January 26, 2026, effective February 28, 2026.



Keberagaman Manajemen

Management Diversity [IDX G-01][R1.1]

Perseroan telah menerapkan prinsip keberagaman gender dalam manajemen perusahaan, yang tercermin dari adanya keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi selama periode pelaporan, meskipun pada akhir periode pelaporan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Dewan Komisaris juga didukung oleh keberadaan Komisaris Independen yang berperan memperkuat fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. Perseroan terus berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip keberagaman dan kesetaraan kesempatan dalam pengembangan kepemimpinan di masa mendatang.

The Company has implemented the principle of gender diversity in corporate management, as reflected in the representation of women in the Board of Directors during the reporting period, although by the end of the reporting period the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors was entirely male. The Board of Commissioners is also supported by Independent Commissioners, who play a role in strengthening the supervisory function in an objective and professional manner. The Company remains committed to promoting the principles of diversity and equal opportunity in leadership development in the future.

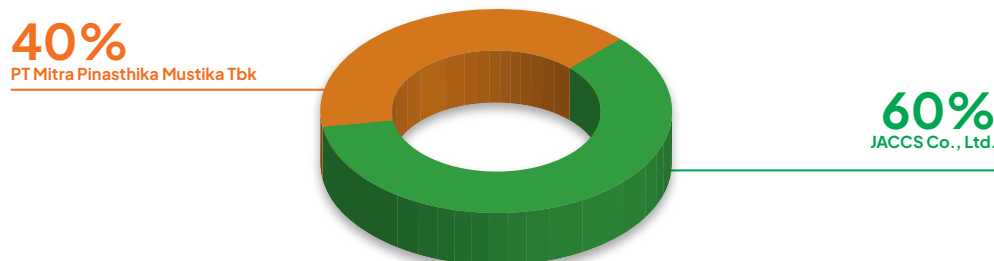
Manajemen Management	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Pihak Independen Number of Independent Parties
Dewan Komisaris Board of Commissioners	5	-	2
Direksi Board of Directors	6	-	-

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition [OJK C.3]

Perseroan tidak berstatus sebagai perusahaan publik yang menawarkan saham kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai kepemilikan saham oleh publik, baik kepemilikan di bawah 5%, maupun daftar 20 pemegang saham terbesar, tidak relevan untuk diungkapkan dalam Laporan ini.

The Company is not a publicly listed entity offering shares to the public. Accordingly, information regarding public share ownership—whether based on institutional classification, holdings below 5%, or a list of the 20 largest shareholders—is not relevant for disclosure in this Report.



Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Par Value (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
JACCS Co., Ltd	734.685	734.685.000.000	60
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	489.790	489.790.000.000	40
Jumlah Total	1.224.475	1.224.475.000.000	100

Data Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Pemegang Saham

Per 31 Desember 2025, struktur pemegang saham Perseroan terdiri dari 1 (satu) institusi asing dan 1 (satu) institusi lokal. Perseroan tidak memiliki pemegang saham individu, baik asing maupun lokal.

Shareholder Data by Shareholder Classification

As of December 31, 2025, the Company's shareholder structure comprises one foreign institution and one local institution. The Company does not have any individual shareholders, whether foreign or local.

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares			Nilai Nominal (Rp) Par Value (Rp)		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	(%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	(%)
Pemodal Nasional Domestic Shareholders						
Perorangan Individual	-	-	-	-	-	-
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	1	489.790	40	1	489.790	40
Pemodal Asing Foreign Shareholders						
Perorangan Individual	-	-	-	-	-	-
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	1	734.685	60	1	734.685	60
Jumlah Total	2	1.224.475	100	2	1.224.475	100

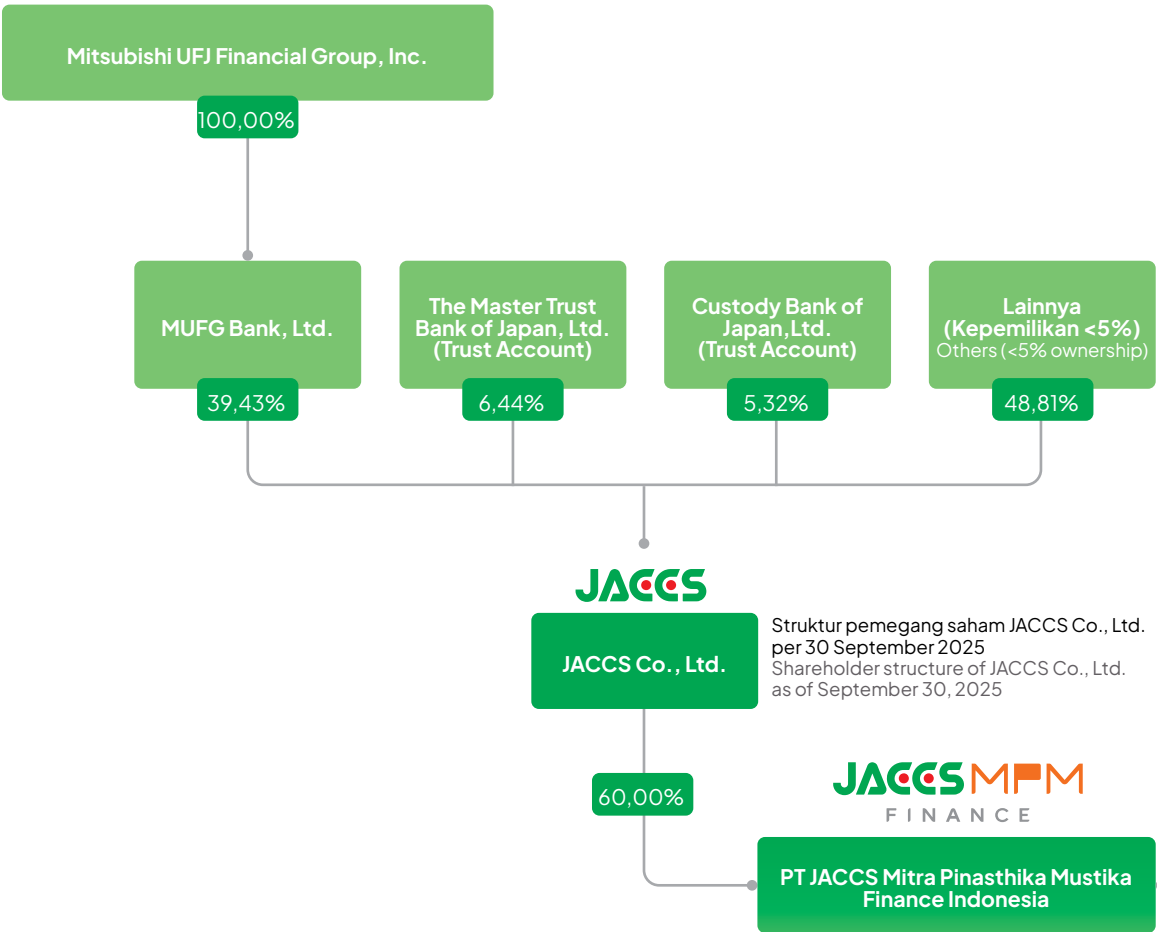


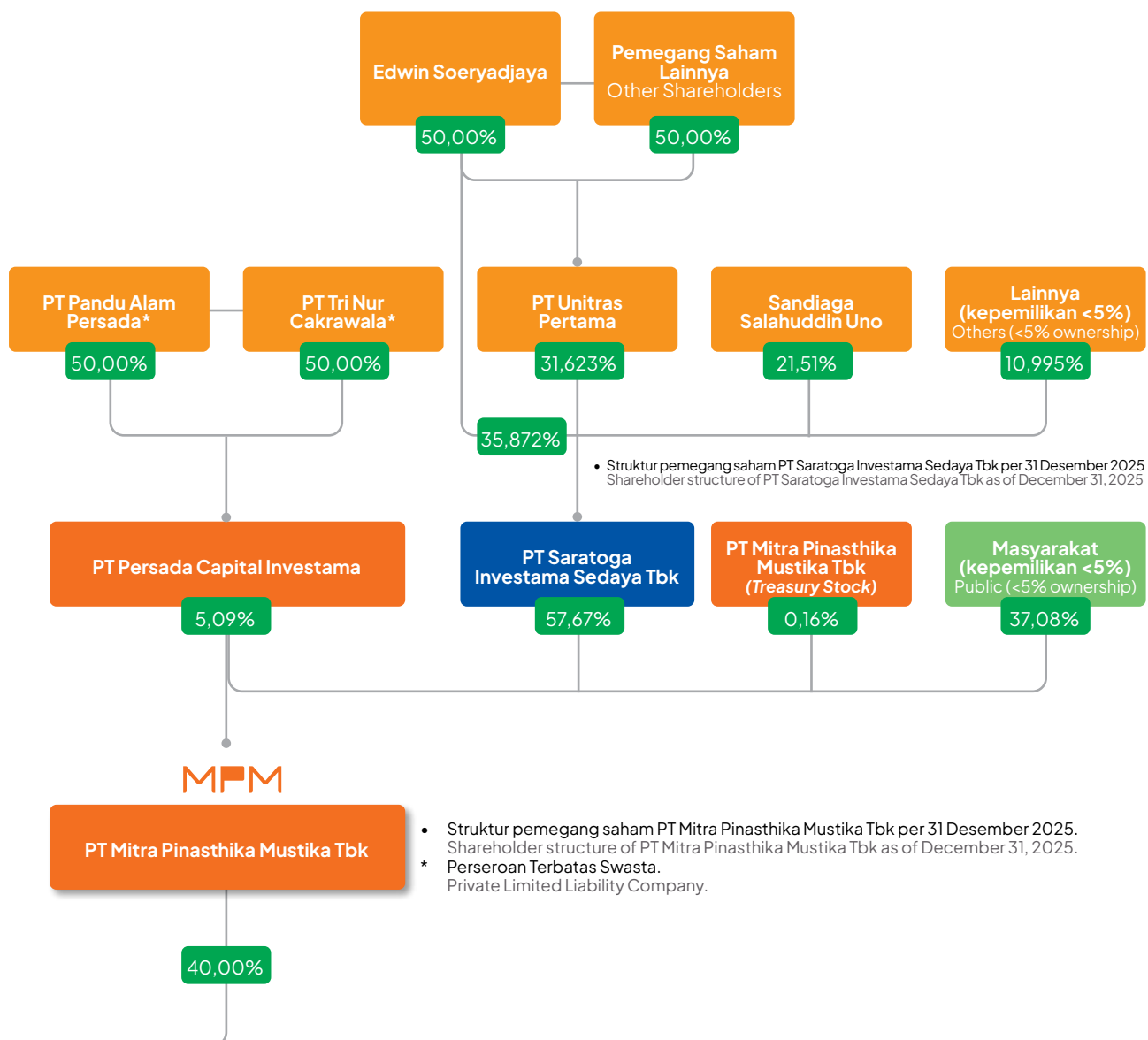
Struktur Kepemilikan Saham

Shareholding Structure [KR1.1][S2.1]

Per 31 Desember 2025, struktur grup Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company's group structure is as follows:





Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi.

Shareholding by the Board of Commissioners and the Board of Directors

As of December 31, 2025, there is no shareholding by the Board of Commissioners or the Board of Directors.



Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders

JACCS Co., Ltd.

JACCS Co., Ltd. (JACCS) merupakan pemegang saham utama sekaligus pengendali Perseroan yang didirikan pada tanggal 29 Juni 1954 di Hakodate, Hokkaido, Jepang. JACCS Co., Ltd. adalah sebuah perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Tokyo dan merupakan anggota dari Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG), institusi keuangan terbesar di Jepang. Saat ini JACCS menjalankan kegiatan usaha di bidang kredit konsumen khususnya pada pasar domestik Jepang. JACCS menawarkan sejumlah layanan di antaranya adalah kredit pembelian barang konsumtif, kartu kredit, penjaminan kredit untuk pinjaman personal dari bank, jasa pembayaran, dan lainnya.

JACCS Co., Ltd.

JACCS Co., Ltd. (JACCS) is the major and controlling shareholder of the Company, established on 29 June 1954 in Hakodate, Hokkaido, Japan. JACCS is a publicly listed company on the Tokyo Stock Exchange and is a member of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), the largest financial institution in Japan. Currently, JACCS operates in the consumer credit sector, primarily in the domestic Japanese market. Its services include consumer goods credit, credit cards, credit guarantees for personal bank loans, payment services, and others.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM)

Didirikan di Jakarta, Indonesia pada 2 November 1987 oleh William Soeryadjaya, MPM pada awalnya menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor sepeda motor. Sejak memperoleh status Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 1988, MPM kemudian memperluas bisnisnya ke bidang penjualan ritel sepeda motor dan suku cadang. MPM secara aktif memperluas jangkauan bisnisnya dengan berdirinya Federal Karyatama (FKT) pada tahun 1988, dan mendirikan PT Mitra Pinasthika Mulia pada tahun 2010 untuk mengambil alih bisnis distribusi sepeda motor. MPM melakukan diversifikasi usaha ke sektor lain yang meliputi asuransi, pembiayaan, serta penyewaan mobil.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM)

Founded in Jakarta, Indonesia on 2 November 1987 by William Soeryadjaya, MPM initially operated as a motorcycle distributor. After obtaining Limited Company (PT) status in 1988, MPM expanded its business to retail motorcycle and spare parts sales. MPM further extended its business reach with the establishment of Federal Karyatama (FKT) in 1988 and PT Mitra Pinasthika Mulia in 2010 to take over the motorcycle distribution business. MPM has diversified into other sectors including insurance, financing, and car rental.

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama

Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama serta tidak melakukan akuisisi perusahaan, dan informasi tersebut tidak dicantumkan dalam Laporan ini.

As of 31 December 2025, the Company does not have any subsidiaries, associates, or joint ventures, nor has it made any corporate acquisitions. Therefore, this information is not included in this Report.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Perseroan tidak melakukan penawaran umum maupun pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau bursa lainnya hingga 31 Desember 2025. Perubahan kepemilikan saham Perseroan dilakukan melalui aksi korporasi berupa akuisisi, bukan melalui penawaran umum perdana.

The Company has not conducted any public offering or listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange or any other exchange as of 31 December 2025. Changes in the Company's shareholding structure have been carried out through corporate actions such as acquisitions, rather than through an initial public offering (IPO).

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, berikut informasi mengenai obligasi Perseroan yang masih beredar dan belum jatuh tempo pada akhir tahun 2025, yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia:

In the spirit of transparency and compliance with applicable regulations, the following provides information on the Company's outstanding bonds that remain listed on the Indonesia Stock Exchange and have not yet matured as of the end of 2025:

Nama Obligasi Bonds Name	Tahun Penerbitan Year Issued	Nilai Nominal (miliar Rp) Nominal Amount (billion Rp)	Tingkat Suku Bunga Tetap Setahun Fixed Interest Rates per Annum	Skedul Pembayaran Bung Interest Payment Schedule	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2023 Series B	2023	230.000	7,00%	Triwulan I Quarterly	11 Agustus August 2026
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2024 Series B	2024	350.000	7,25%	Triwulan I Quarterly	19 April April 2027

Pada 2025, obligasi Perseroan memperoleh peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

In 2025, the Company received a credit rating of AA from PT Fitch Ratings Indonesia.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh peringkat AA dari Fitch serta mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022, yang mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan komitmen terhadap standar keamanan informasi.

In 2025, the Company received an AA rating from Fitch and maintained its ISO/IEC 27001:2022 certification, reflecting solid financial performance and a commitment to information security standards.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and/or Professions

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

KAP Siddharta Widjaja & Rekan (member of KPMG)

Akuntan Publik/Public Accountant
Novie, S.E., CPA

Mori Tower Lantai 35/35th Floor, 40–41
Jl. Jend. Sudirman Jakarta
10210, Indonesia
Tel. : (+62)21 5742333
Fax. : (+62)21 5742888

Jasa yang Diberikan Service Rendered

Melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (Periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025).
Conducting audit on the Company's financial statements for the 2025 fiscal year (Period of January 1 to December 31, 2025)

Biaya

Fee
Rp1.905.000.000

Jasa Lainnya Other Services

Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK).
To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing.

Biaya

Fee
Rp83.406.510

Periode Penugasan
Assignment Period
2025

Notaris Notary

Kantor (Office) Notaris Aulia Taufani, S.H.

Menara Sudirman Lantai 18/18th floor
Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Tel. : 5204778
Fax : 5204780

Periode Penugasan
Assignment Period
2025

Konsultan Hukum Legal Consultant

Imran Muntaz & Co Law Firm

Office 8 Building Lantai 35 Zona G/
35th Floor G Zone
Sudirman Central Business District
Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
Jakarta 12190

Periode Penugasan
Assignment Period
2025

Wali Amanat Trustee

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, Lantai 30/30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44–46 Jakarta
10210 – Indonesia

Periode Penugasan
Assignment Period
2025

Lembaga Pemeringkat Rating Agency

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 24/24th Floor,
Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3–5 Jakarta
12940

Periode Penugasan
Assignment Period
2025

Sumber Daya Manusia

Human Resources [OJK C.3] [F.18]

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis bagi Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha. Perseroan berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan SDM yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan kompetensi dan peningkatan keterampilan, guna memastikan kesiapan SDM dalam menjawab kebutuhan bisnis Perseroan yang terus berkembang.

Demografi Karyawan

Jumlah karyawan Perseroan per Desember 2025 adalah 1.679 karyawan, mengalami penurunan 11,12% dibandingkan jumlah karyawan per Desember 2024 yang sebesar 1.889 karyawan. Penurunan ini dikarenakan langkah Perseroan untuk mengurangi biaya sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan perampingan jumlah karyawan. Realisasi pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Berdasarkan Jenis Kelamin By Gender	Desember December 2025	%	Desember December 2024	%
Pria Male	1.308	77,90%	1.455	77,02%
Wanita Female	371	22,10%	434	22,98%
Jumlah Total	1.679	100,00%	1.889	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Employee Composition by Employment Status

Berdasarkan Status Karyawan By Employment Status	Desember December 2025	%	Desember December 2024	%
Tetap Permanent	951	56,64%	1.035	54,79%
Kontrak Contract	728	43,36%	854	45,21%
Jumlah Total	1.679	100,00%	1.889	100,00%

Human Resources (HR) represent a strategic asset for the Company in supporting the achievement of its objectives and the sustainability of its business. The Company is committed to building and maintaining a competent, professional, and highly competitive workforce through sustainable human capital management. This commitment is reflected in continuous support for competency development and skills enhancement, ensuring that the Company's workforce remains well-equipped to meet the evolving needs of the business.

Employee Demographics

As of December 2025, the Company employed a total of 1,679 employees, representing a decrease of 11.12% compared to 1,889 employees as of December 2024. This decline was attributable to the Company's initiative to optimize human resource costs through workforce rationalization. The realization of Human Resources fulfillment as of December 2025 is as follows:



Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition by Age Group

Berdasarkan Kelompok Usia By Age Group	Desember December 2025	%	Desember December 2024	%
18–25 tahun years old	71	4,23%	68	3,60%
26–35 tahun years old	617	36,75%	780	41,29%
36–45 tahun years old	732	43,60%	788	41,72%
>46 tahun years old	259	15,43%	253	13,39%
Jumlah Total	1.679	100,00%	1.889	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education Level

Berdasarkan Tingkat Pendidikan By Education Level	Desember December 2025	%	Desember December 2024	%
Sarjana S2 Master's Degree	13	0,77%	11	0,58%
Sarjana S1 Bachelor's Degree	991	59,02%	1.130	59,82%
Diploma Diploma Degree	176	10,48%	210	11,12%
SMA High School	499	29,72%	538	28,48%
Jumlah Total	1.679	100,00%	1.889	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position Level

Berdasarkan Level Jabatan By Position Level	Desember December 2025	%	Desember December 2024	%
Direksi Board of Directors	6	0,36%	6	0,26%
Manajer Umum General Manager	8	0,48%	7	0,42%
Manajer Senior Senior Manager	12	0,71%	13	0,69%
Manajer Manager	41	2,44%	49	2,59%
Petugas/Pengawas/Asisten Manajer Officer/Supervisor/Assistant Manager	417	24,84%	449	23,77%
Staf Staff	1.195	71,17%	1.365	72,26%
Jumlah Total	1.679	100,00%	1.889	100,00%

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM [OJKF.22]

Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab karyawan, serta secara berkelanjutan menyediakan pengembangan kompetensi bagi seluruh jenjang jabatan melalui program internal dan eksternal guna meningkatkan profesionalitas, keahlian, dan kinerja karyawan.

Human Resources Training and Competency Development Program [OJKF.22]

The Company conducts education and training programs tailored to employees' duties and responsibilities, and continuously provides competency development for all position levels through internal and external programs to enhance employees' professionalism, expertise, and performance.

Sepanjang tahun 2025, realisasi Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi (Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia) yang telah diikuti oleh para karyawan adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, the implementation of the Organizational, Human Resources, and/or Information Technology Development Plan (Human Resources Education and Training Plan) participated in by employees is as follows:

No	Materi Diklat Training Materials	Narasumber Instructor	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Learning Module Development & Learning Management System (LMS) Enhancement Program	Eksternal	1
2	Sertifikasi <i>Managerial</i> dan Profesi Penagihan Managerial and Professional Collections Certification	SPPI	511
3	OJT Karyawan magang On-the-Job Training for Interns	Internal	1
4	Management Assistant Program (MAP)	Internal	6
5	Hukum Profesional Professional Law	Eksternal	7
6	Sosialisasi SKEP dan Ketentuan Perusahaan Dissemination on the SKEP and Company Policies	Internal	511
7	Strategi bisnis dan Q&A permasalahan di cabang Business Strategies and Q&A on Branch Issues	Internal	215
8	New Employee Orientation Program (NEOP)	Internal	195
9	NEOP Collection	Internal	64
10	Seminar Nasional Arah Kebijakan OJK 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru National Seminar on the OJK's 2025 Policy Direction and the New Government's Economic Growth Strategy	APPI	3
11	Assertive Communication & Effective Presentation Skills	Kemal Mochtar	4
12	Critical Thinking: Analyze Problem and Make Decision	Dale Carnegie	3
13	Performance Improvement Session	Internal	114
14	Product Knowledge 2W MyCash Branch Manager	Internal	31
15	Training Marketing Supervisor 2025 Product Knowledge & Business Process 2W-MyCash and How to Handling Dealer (Batch 1&2)	Edysen (Ace Learning) & Internal	62
16	Workshop Branch Operations Supervisor (BOS) 2025: Rise Together with A Growth Mindset	Internal	75
17	Leading Team with Positivity for BOS	Setyo Adhi Wicaksono (Asia Leader)	75
18	Training Collection 2025: Rise Together for Effective Collection Supervision	Divif 1 Kostrad Cilodong	126
19	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 2025 Annual Financial Services Industry Conference	OJK	2
20	Branch Improvement Development Program	Internal	186
21	NEOP Admin Collection	Internal	2
22	NEOP Custodian	Internal	2



No	Materi Diklat Training Materials	Narasumber Instructor	Jumlah Peserta Number of Participants
23	NEOP Marketing	Internal	23
24	Strengthening Resilience in Tough Times	Analisa Widianingrum	141
25	Business Knowledge - JACCS Japan	JACCS Japan	4
26	NEOP Cashier	Internal	3
27	Manajemen Kepatuhan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dan Tanggung Jawab Korporasi Jasa Keuangan Compliance Management for the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction Regulations, and Corporate Responsibility in the Financial Services Sector	Hukum Online	2
28	Membership Internal Audit	IIA	2
29	Integritas Integrity	Internal	1.824
30	CO Talks: Cerdas Menilai Kredit, Efektif Mengelola Risiko CO Talks: Making Smart Credit Decisions, Managing Risk Effectively	Internal	127
31	Collection Talks: Kupas Tuntas Tantangan dan Strategi di Lapangan Collection Talks: A Deep Dive into Challenges and Strategies in the Field	Internal	348
32	Delivering Service Excellence	Muhammad Iqbal	200
33	Pelatihan Legal Drafting & Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak Legal Drafting Training & Contract Drafting Specialist Certification	Jimly School of Law and Government (JSLG)	1
34	Job Evaluation	MPMX	3
35	National Seminar: Will Trade War Create Financial Turmoil Seminar Nasional: Akankah Perang Dagang Memicu Gejolak Keuangan	APPI	3
36	Managing Project Like a Pro	Momenta	2
37	LEAD 2 - Building Business Acumen & CSI Mode 1-2	Momenta	5
38	Collaboration Essentials	Maxima (Omar Danishwara)	131
39	Marketing Talks - Seluk Beluk Sales & Marketing di Dunia Multifinance Marketing Talks - An Overview of Sales & Marketing in the Multifinance Industry	Internal	96
40	Basic Credit Analyst	Internal	2
41	SQL Server Query for End User	Executrain	10
42	Basic Safety Riding	Mohamad Abdillah	19
43	LEAD 2 - CSI Mode 3-4 & Conversational Capacity	Momenta	5
44	Workshop Collection 2025	Internal	14
45	Workshop Anti-Fraud Strategy & Awareness	APPI	1
46	Persuasive Communication	Katadaya (Qodrisyah Siregar)	119
47	Code of Conduct (Kode Etik)	Internal	1.973

No	Materi Diklat Training Materials	Narasumber Instructor	Jumlah Peserta Number of Participants
48	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing	Internal	1.966
49	Assessment	First Asia	6
50	Membership Associate ACFE	Eksternal	1
51	Keuangan Berkelanjutan dan Penerapannya di Perusahaan Pembiayaan Sustainable Finance and Its Application in Financing Companies	APPI	3
52	International Seminar Global, ASEAN and Indonesia Challenges to Indonesia Economy	APPI	3
53	Taxation 2025 - Batch 1-6	Internal	168
54	Marketing & Product Retail	Internal	324
55	Proses Credit Officer & Panduan JM Order Credit Officer Process & JM Order Guide	Internal	160
56	Moodle moot Indonesia 2025	PCMan (Moodle, PCMan, University, Corporate)	1
57	LEAD 2: Workshop 3 (Blanchard Management Essentials & Legendary Service)	Momenta	5
58	Data Storytelling	Bengkelsilde (Fajri Ma'rifatullah)	233
59	Credit Scoring Model	IdScore (PT PEFINDO Biro Kredit)	12
60	Coaching for Performance and Development Your Team Refreshment Training for Manager	Momenta	3
61	Collection Overview	Internal	799
62	Coaching for Performance and Development Your Team Refreshment Training for General Manage	Momenta	6
63	Internal culture & Team Engagement development	Internal	167
64	Dasar Analisis Kredit Basics of Credit Analysis	Internal	158
65	Panduan JM Order for Marketing Officer JM Order Guide for Marketing Officers	Internal	287
66	Admin Collection Overview	Internal	47
67	Masterclass Perlindungan Data Pribadi Masterclass on Personal Data Protection	Hukum Online	2
68	Collection Talks Part 2: Menjaga Profesionalisme dan Semangat untuk Mencapai Target Collection Talks Part 2: Maintaining Professionalism and Enthusiasm to Achieve Goals	Internal	267
69	Workshop Operational Risk Person (ORP) 2025	Internal	25
70	Data Driven Decision Making	Momenta (Bambang S)	25
71	Proses Kerja & Kode Etik Collection Work Process & Code of Ethics for the Collection	Internal	795



No	Materi Diklat Training Materials	Narasumber Instructor	Jumlah Peserta Number of Participants
72	<i>Effective Teamwork</i>	Internal	373
73	<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>	IKAI	1
74	<i>Collection Study Case 1–3</i>	Internal	793
75	Verifikasi Dokumen Kredit Credit Document Verification	Internal	161
76	Seminar Nasional <i>Economic Outlook 2026</i> National Seminar on the 2026 Economic Outlook	Aviliani	5
77	<i>Webinar JMFI Level Up! Kerja Produktif dengan AI</i> JMFI Level Up! Webinar: Working Productively with AI	Jagoprompt (Putu Hadi Purnama Jati, M.Sc.)	254
78	<i>Industrial Relations Certification Program</i>	Apindo Training Center	1
79	Kopdar Sales 2025: Daya Beli Lemah, Jualan Harus Gimana? Sales Meeting 2025: Weak Purchasing Power—How Should We Sell?	MarkPlus Institute	3
80	Penanganan Pengaduan Debitur Handling of Debtor Complaints	Internal	174
81	<i>Coaching for Performance (SLII & Coaching Essentials)</i>	Momenta (Roy Sangkilawang)	28
82	Teknik Validasi Dokumen <i>Credit Officer</i> Document Validation Techniques for Credit Officers	Internal	154
83	Proses Kerja <i>Custodian</i> Custodian Work Process	Internal	145
84	<i>Collection Study Case 4–5</i>	Internal	792
85	<i>JMFI Talks: Menjaga Optimisme di Tengah Tantangan</i> JMFI Talks: Staying Optimistic Amid Challenges	Internal	440
86	<i>Certified Information Systems Security Professional</i>	Course-Net Indonesia	1
87	<i>Administering a SQL Database</i>	ExecuTrain of Jakarta	2
88	<i>Out of The Box Thinking of Credit Analyst</i>	Mahaka Institute	1
89	SIMO (<i>Strategic Initiative Management Office</i>)	Internal	42
90	<i>Managing Change in Developing a Winning Collection Strategy</i>	IPDC (Fidina Sari)	28
91	<i>Collection Transformation</i>	Internal	26
92	<i>Recording Marketing Talks 1</i>	Internal	267
93	<i>Recording Collection Talks 1</i>	Internal	791
94	<i>Case Study for Credit Officer 1</i>	Internal	152
95	<i>Balance Scorecard Masterclass Training</i>	QuBisa/One GML	2
96	<i>Webinar JMFI Level Up! Mengatasi Generation Gap di Tempat Kerja</i> JMFI Level Up! Webinar: Bridging the Generation Gap in the Workplace	SPCcollective (Ni Putu Mayda Anggraini Artana, M.Psi)	345
97	<i>Membership Internal Audit</i>	IIA	3

No	Materi Diklat Training Materials	Narasumber Instructor	Jumlah Peserta Number of Participants
98	Case Study for Credit Officer 2	Internal	155
99	Recording Collection Talks 2	Internal	798
100	Agility with Scrum Framework	Aria Hadi Wardhana	27
101	Proses Operasional, JM Care & Penanganan Pengaduan Debitur - Batch 1-3 Operational Processes, JM Care, and Debtor Complaint Handling - Batch 1-3	Internal	83
102	Training Customer Handling - Batch 1 sd 3	Katadaya (Qodrisyah)	83
103	Professional Forensic Auditor Training Certification	Revolution Mind Indonesia (Andrew Catur Dinanto)	1
104	Memahami Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Understanding the Legal Aspects of Good Corporate Governance (GCG)	Hukum Online	1
105	ISO Awareness 27001:2022	Internal	1.541
106	Masterclass Perlindungan Data Pribadi: ROPA-DPIA, Data Flow, dan Data Transfer Personal Data Protection Masterclass: ROPA, DPIA, Data Flow, and Data Transfer	Hukum Online	2
107	Impactful Presentation	Crepa (Daniel Aditya)	2
108	Resilience and turn around	APPI	3
109	Analytical Thinking: 5 Whys	Internal	1.658
110	Risk Awareness terhadap Kejahatan TPPU terkait Cyber Crime melalui Identifikasi LTKM, LTKT, dan LTKL Risk Awareness on Money Laundering Crimes Related to Cybercrime through Identification of Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transaction Reports, and Other Financial Transaction Reports	Genesis Inti Utama	1
111	Webinar Moodle 5.1 & Enhancing Teaching Productivity with AI	PCMan	3
112	4 Disciplines of Execution (4DX)	Internal	14
113	Team Work	Biru Langit Abadi	393



Teknologi Informasi (TI)

Information Technology (IT)

Sektor pembiayaan yang terus berkembang dengan dinamis menuntut Perseroan untuk meningkatkan fasilitas TI yang dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan bisnis, dan tetap memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai elemen penunjang bisnis yang sangat penting, keberadaan Teknologi Informasi (TI) terkini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pemantauan, serta mempercepat aktivitas manajemen risiko Perseroan.

Penerapan transformasi digital di Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- JM Care
 - › Mengimplementasikan fitur E-Contract di Juli 2025, dengan fitur ini debitur bisa mengunduh copy perjanjian langsung dari JM Care.
 - › Mengimplementasikan fitur E-Claim di Juli 2025, dengan fitur ini debitur bisa melakukan klaim asuransi Total Loss Only (TLO) secara langsung dari JM Care.
- Penggantian server dikarenakan habis masa pakai.
- Pemenuhan SQL Server License.
- Pemeliharaan jaringan di Data Center dilakukan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran para karyawan akan Teknologi Informasi, Perseroan secara berkala mempublikasikan artikel melalui situs MyPortal dan email sebagai berikut:

The dynamically growing financing sector requires the Company to continuously enhance its IT facilities to support business growth and maintain a high level of competitiveness. As a critical business enabler, the implementation of up-to-date Information Technology (IT) is expected to improve operational efficiency, facilitate monitoring, and accelerate the Company's risk management activities.

The digital transformation initiatives undertaken by the Company in 2025 are as follows:

- JM Care
 - › Implemented the E-Contract feature in July 2025, allowing debtors to directly download a copy of their agreement via JM Care.
 - › Implemented the E-Claim feature in July 2025, enabling debtors to submit Total Loss Only (TLO) insurance claims directly through JM Care.
- Server Replacement due to end-of-life.
- SQL Server License Fulfillment.
- Data Center Network Maintenance conducted periodically.

To enhance employees' understanding and awareness of Information Technology, the Company periodically publishes articles through the MyPortal site and email communications, as follows:

Pemberitahuan Penting Instalasi Multi Factor Authentication (RSA-ID)

Important Notice: Multi-Factor Authentication (RSA-ID) Implementation



Doxing Ancaman Yang Tak Terlihat

Doxing: The Invisible Threat



Visual Hacking



DeepFakes Ancaman Manipulasi Di Era Digital

DeepFakes: A Threat of Manipulation in the Digital Age



Scam Gambar Di Whatsapp

Image Scam on WhatsApp



Bahaya Malvertising Bukan Sekedar Pop-Up

The Dangers of Malvertising Go Beyond Pop-Ups



Voice Cloning: A Modern Cyberattack



Mengapa Harus Ganti Password?

Why do I need to change my password?



Waspada Infostealer!

Beware of infostealers!



Lindungi Privasi Anda dari Doxing dan Pretexting

Protect Your Privacy from Doxing and Pretexting



Serangan Tanpa Teknologi Dampaknya Mematikan

Attacks Without Technology: Deadly Consequences



Keamanan Email Tanggung Jawab Kita Bersama

Email Security Is Our Shared Responsibility Amankan Data Digital dari Serangan Ransomware





Informasi pada Situs Web Perseroan

Information on the Company's Website

Di era digital modern saat ini, keberadaan situs resmi perusahaan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan situs web resmi yaitu www.jaccs-mpmfinance.com yang dapat diakses oleh publik. Hal ini untuk menjamin ketersediaan informasi yang transparan dan relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In today's modern digital age, having an official company website is increasingly essential. Therefore, the Company provides an official website, www.jaccs-mpmfinance.com, which is accessible to the public. This is to ensure the availability of transparent and relevant information to shareholders and other stakeholders.

Situs Perseroan memuat informasi sebagai berikut:

The Company's website contains the following information:

Menu	Ketersediaan di Situs Web Availability on the Website	Keterangan Description
Korporasi Corporate	✓	Terdapat sub menu: Contains the sub menu of: - Tentang Kami/About Us - Profil Perusahaan/Company Profile - Visi, Misi, & Nilai/Vision, Mission, & Values - Struktur Pemegang Saham/Shareholder Structure - Struktur Organisasi/Organizational Structure - Investor/Investor - Prospektus/Prospectus - Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights - Laporan Tahunan/Annual Report - Laporan Keuangan/Financial Statements - Tata Kelola Perusahaan/Corporate Governance - Anggaran Dasar/Articles of Association - Pedoman Kerja/Work Guidelines - Piagam Audit Internal/Internal Audit Charter - Kode Etik/Code of Ethics - Struktur Manajemen/Management Structure - Lembaga Manajemen/Supporting Institutions - Penghargaan/Awards - Informasi Obligasi/Bonds Information - Keterbukaan Informasi/Information Disclosure - Manajemen Risiko/Risk Management - Sistem & Kebijakan/System & Policy - Tanggung Jawab Sosial/Social Responsibility
Pelanggan Customer	✓	Terdapat sub menu: Contains the sub menu of: - Produk Pembiayaan/Financing Products - Promo/Promo - Simulasi Kredit/Credit Simulation - Berita/News - Artikel/Articles - Informasi Pelanggan/Customer Information - Kebijakan Perlindungan Data Pribadi/Personal Data Protection Policy



Menu	Ketersediaan di Situs Web Availability on the Website	Keterangan Description
Bantuan Support	✓	Terdapat sub menu: Contains the sub menu of: • Tinggalkan Pesan/Leave us a message • Hubungi Kami/Contact Us • Tanya Jawab/FAQ • Cara Pembayaran/Payment Method
Karier Career	✓	Memuat informasi tentang lowongan pekerjaan. Contains information on job vacancy

Perseroan secara berkala memperbarui situs web resminya, sehingga publik selalu mendapatkan informasi yang terkini.

The Company regularly updates its official website to ensure that the public has access to the most current information.





Analisis dan Diskusi Manajemen

Management
Discussion
and Analysis





Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional

Global and National Macroeconomic Overview

Kinerja ekonomi global sepanjang 2025 menunjukkan tren melambat di tengah ketidakpastian yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sekitar 3,3%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih menghadapi risiko dari tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, dan fluktuasi harga komoditas. Di sisi positif, perekonomian AS mulai menunjukkan perbaikan didorong oleh investasi di sektor teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), serta stimulus fiskal berupa pengurangan pajak. Sementara itu, ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India mengalami perlambatan akibat melemahnya permintaan domestik dan ekspor, meski investasi AI meningkat. Kondisi pasar keuangan global tetap *volatile*, dengan *yield* obligasi AS yang tinggi dan penguatan indeks dolar AS, sehingga aliran modal ke pasar negara berkembang cenderung tertahan.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (c-to-c) pada 2025. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 0,66%. Sektor yang mencatat pertumbuhan signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 9,93%, diikuti Jasa Perusahaan 9,10%, serta Transportasi dan Pergudangan 8,78%. Sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian, yakni Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing tumbuh sebesar 5,30% dan 5,49%, menegaskan peran dominan sektor-sektor tersebut dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara spasial, Pulau Jawa tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 56,93%, diikuti Pulau Sumatra 22,22%, Kalimantan 8,12%, Sulawesi 7,22%, Bali dan Nusa Tenggara 2,82%, serta Maluku dan Papua 2,69%. Pertumbuhan ekonomi antarwilayah juga bervariasi, dengan Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi 6,23%, disusul Jawa 5,30%, Bali dan Nusa Tenggara 4,87%, Sumatra 4,81%, Kalimantan 4,79%, dan Maluku-Papua 1,44%. Data ini menunjukkan adanya distribusi pertumbuhan yang positif di hampir seluruh wilayah, meskipun disparitas antarwilayah masih terlihat.

Global economic performance throughout 2025 exhibited a moderating trend amid persistently elevated uncertainty. Global economic growth was estimated at approximately 3.3%, reflecting a slight increase compared to the previous year, notwithstanding ongoing risks arising from United States (U.S.) reciprocal tariffs, vulnerabilities in global supply chains, and fluctuations in commodity prices. On a positive note, the U.S. economy began to show signs of improvement, supported by increased investment in the technology sector, particularly in Artificial Intelligence (AI), as well as fiscal stimulus measures in the form of tax reductions. Meanwhile, the economies of Japan, China, and India experienced a slowdown due to weakening domestic demand and exports, despite continued growth in AI-related investments. Global financial market conditions remained volatile, characterized by elevated U.S. Treasury yields and a strengthening U.S. dollar index, which constrained capital flows to emerging markets.

Amid these global dynamics, Indonesia's economy continued to demonstrate resilience. Based on the latest data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy expanded by 5.11% (cumulative-to-cumulative) in 2025. Growth was recorded across nearly all sectors, with the exception of the Mining and Quarrying sector, which contracted by 0.66%. Sectors that recorded notable growth included Other Services at 9.93%, Business Services at 9.10%, and Transportation and Warehousing at 8.78%. Key sectors with significant contributions to the economy, namely Manufacturing, as well as Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, recorded growth of 5.30% and 5.49%, respectively, reaffirming their dominant roles in the structure of Gross Domestic Product (GDP).

From a regional perspective, Java remained the primary driver of the national economy, contributing 56.93%, followed by Sumatra at 22.22%, Kalimantan at 8.12%, Sulawesi at 7.22%, Bali and Nusa Tenggara at 2.82%, and Maluku and Papua at 2.69%. Regional economic growth also varied, with Sulawesi recording the highest growth at 6.23%, followed by Java at 5.30%, Bali and Nusa Tenggara at 4.87%, Sumatra at 4.81%, Kalimantan at 4.79%, and Maluku-Papua at 1.44%. These figures indicate a broadly positive distribution of economic growth across most regions, although regional disparities remain evident.

Tinjauan Industri Otomotif dan Pembiayaan

Automotive and Financing Industry Overview

Industri otomotif nasional pada 2025 menghadapi tekanan akibat turunnya daya beli masyarakat dan kenaikan harga kendaraan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan penjualan mobil *wholesale* sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 803.687 unit, turun 7,2% dibandingkan 2024, sementara penjualan retail tercatat 833.692 unit, turun 6,3%. Kenaikan harga mobil rata-rata 7,5% per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang hanya 3%, sehingga menimbulkan kesenjangan daya beli.

Sementara itu, pasar sepeda motor relatif stabil. Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII), penjualan domestik sepanjang 2025 tercatat 6.412.769 unit, tumbuh 1,3% dibandingkan 2024. Stabilitas ini didorong oleh permintaan tinggi di luar Pulau Jawa, dukungan pembiayaan, serta peluncuran produk baru dan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS). Sekitar 65% penjualan sepeda motor dilakukan melalui kredit, menunjukkan peran penting pembiayaan dalam menjaga laju permintaan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kinerja industri pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan tekanan di tahun 2025. Total aset industri pembiayaan tercatat hampir stagnan dengan kontraksi 0,01%, sementara pertumbuhan piutang hanya 0,61%, dipicu lesunya penjualan kendaraan bermotor. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mencapai 2,51% atau setara Rp14,41 triliun, sementara total pencadangan dan hapus buku melonjak hingga Rp58 triliun, hampir 10% dari total aset industri.

Ketergantungan perusahaan pembiayaan terhadap pendanaan perbankan tinggi, yakni sekitar 85%, menjadikan sektor ini berpotensi menimbulkan risiko sistemik bagi perbankan. Sekitar 74% portofolio pembiayaan berasal dari sektor kendaraan bermotor, termasuk mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Tekanan ini menyebabkan kenaikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) industri dari 80,9% pada November menjadi 82,92% pada Desember 2025.

Rencana Bisnis dan Realisasi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan periode konsolidasi strategis bagi Perseroan setelah langkah penyesuaian portofolio produk yang telah diimplementasikan sejak tahun sebelumnya. Fokus utama manajemen diarahkan pada penguatan kualitas aset, stabilisasi kinerja operasional, serta pembentukan struktur bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

The national automotive industry in 2025 faced pressures arising from declining consumer purchasing power and rising vehicle prices. Data from the Indonesian Automotive Industry Association (GAIKINDO) indicated that wholesale car sales for the January–December 2025 period reached 803,687 units, representing a decrease of 7.2% compared to 2024, while retail sales amounted to 833,692 units, down 6.3%. The average annual increase in car prices of approximately 7.5% outpaced income growth, which stood at only around 3%, thereby creating a purchasing power gap.

Meanwhile, the motorcycle market remained relatively stable. According to the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISII), domestic motorcycle sales in 2025 reached 6,412,769 units, growing 1.3% compared to 2024. This stability was supported by strong demand outside Java, financing support, as well as the introduction of new products and the Indonesia Motorcycle Show (IMOS). Approximately 65% of motorcycle sales were conducted through financing schemes, underscoring the critical role of financing in sustaining demand.

According to the Financial Services Authority (OJK), the overall performance of the financing industry experienced pressures in 2025. Total industry assets remained nearly stagnant, recording a slight contraction of 0.01%, while financing receivables grew by only 0.61%, primarily driven by subdued motor vehicle sales. The *Non-Performing Financing* (NPF) ratio reached 2.51%, equivalent to IDR14.41 trillion, while total provisioning and write-offs surged to IDR58 trillion, nearly 10% of total industry assets.

The financing industry's high dependence on bank funding, accounting for approximately 85% of total funding sources, poses potential systemic risks to the banking sector. Around 74% of financing portfolios are concentrated in the motor vehicle segment, including both new and used cars and motorcycles. These pressures led to an increase in the industry's Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio, rising from 80.9% in November to 82.92% in December 2025.

Business Plan and Realization in 2025

The year 2025 marked a period of strategic consolidation for the Company following the product portfolio adjustment initiatives implemented since the previous year. Management's primary focus was directed toward strengthening asset quality, stabilizing operational performance, and establishing a healthier and more sustainable business structure.



Dalam konteks tersebut, Perseroan tidak lagi menitikberatkan pada pertumbuhan volume pembiayaan, melainkan membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, meningkatkan kinerja keuangan dan manajemen risiko yang lebih disiplin.

1. Fokus pada Portofolio Produk yang Lebih Menguntungkan

Sejak Oktober 2024, Perseroan sementara waktu menghentikan pembiayaan baru (*stop booking*) untuk mobil baru/bekas dan multi produk, dan fokus pada peningkatan kualitas aset. Menghentikan pembiayaan baru untuk mengurangi potensi kerugian dengan mempertimbangkan kualitas aset yang memburuk saat ini. Memasuki tahun 2025, Perseroan secara permanen menutup kegiatan bisnis Sewa Pembiayaan (Pembiayaan Korporasi) mulai Januari 2025, dan mengelola portofolio yang ada hingga jatuh tempo.

Perseroan melanjutkan konsolidasi atas kebijakan tersebut dengan:

- Fokus pada pengembangan produk pembiayaan motor baru.
- Menjaga kolaborasi bisnis dengan MPM Mulia dalam pembiayaan motor baru terutama di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Seiring dengan berjalannya konsolidasi ini, komposisi portofolio menjadi lebih terkendali, dengan eksposur yang lebih besar pada segmen yang memiliki profil risiko lebih terukur dan kontribusi margin yang lebih optimal.

Untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan juga melakukan langkah-langkah berikut:

- Meningkatkan pembiayaan motor terutama di area Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dengan terus mengembangkan pangsa pasar dengan memperkuat kemitraan strategis. Meningkatkan pangsa pasar pembiayaan motor baru di MPM Mulia.
- Perseroan secara terus menerus memperkuat sinergi, relasi dan kolaborasi dengan MPM Group melalui kerja sama dengan MPM Insurance, MPM Mulia, MSO, dan AUKSI (lelang mobil).
- Meningkatkan *closing rate telesales* dengan menerapkan program *privilege* untuk pelanggan kategori *good book* dengan proses yang cepat.
- Meningkatkan *retention rate*.
- Meningkatkan *Service Level Agreement (SLA)* proses aplikasi pembiayaan dengan:
 - Menerapkan parameter *instant approval*, dan penyederhanaan proses *credit screening* untuk pelanggan *repeat order* kategori *good book*.
 - Memperkenalkan program *fast approval* untuk pelanggan kategori *good book*.

Strategi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pertumbuhan agresif menuju pertumbuhan yang berkualitas.

In this context, the Company no longer emphasized growth in financing volumes, but strengthening its business foundation, improving financial performance and disciplined risk management.

1. Focus on a More Profitable Product Portfolio

Since October 2024, the Company has temporarily suspended new financing (*stop booking*) for new and used cars as well as multi-purpose financing products, and has focused on improving asset quality. The suspension of new financing was implemented to reduce potential losses, taking into account the current deterioration in asset quality. Entering 2025, the Company permanently ceased its Finance Lease (Corporate Financing) business starting in January 2025 and continues to manage the existing portfolio until maturity.

The Company continued to consolidate these policies through the following initiatives:

- Focus on the development of new motorcycle financing products.
- Maintaining business collaboration with MPM Mulia in new motorcycle financing, particularly in the East Java, Bali, and Nusa Tenggara regions.

As this consolidation progressed, the portfolio composition became more controlled, with greater exposure to segments characterized by more measurable risk profiles and more optimal margin contributions.

To support this strategy, the Company also undertook the following measures:

- Expand motorcycle financing, particularly in the East Java, Bali, and Nusa Tenggara regions, by continuously growing market share through the strengthening of strategic partnerships. Increase the market share of new motorcycle financing at MPM Mulia.
- The Company continuously strengthens synergy, relationships, and collaboration within MPM Group through partnerships with MPM Insurance, MPM Mulia, MSO, and AUKSI (vehicle auction services).
- Improve telesales closing rates by implementing privilege programs for "good book" customers, supported by an accelerated process.
- Enhance customer retention rates.
- Improve the Service Level Agreement (SLA) of the financing application process by:
 - Implementing instant approval parameters and simplifying credit screening processes for repeat order customers within the "good book" category.
 - Introducing fast approval programs for "good book" customers.

This strategy reflects a paradigm shift from aggressive growth toward quality-driven growth.

2. Penguatan Manajemen Risiko dan Perbaikan Kualitas Aset

Sepanjang 2025, Perseroan memprioritaskan perbaikan kualitas aset guna menekan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) serta mengendalikan beban pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Mengembangkan Satuan Tugas Peningkatan Kinerja Cabang, yang terdiri dari divisi-divisi yang ada di Perseroan.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *scorecard* (*scoring model*) untuk aplikasi baru, berkolaborasi dengan PEFINDO Biro Kredit untuk produk mobil dan motor. *Scorecard* terbaru telah diimplementasikan mulai Maret 2025
- Secara berkesinambungan melakukan peningkatan proses persetujuan kredit dengan prinsip "Ketat, Cepat, Fleksibel, dan Sederhana".
- Mengoptimalkan indikator *early warning* untuk mendeteksi penurunan kualitas aset di tahap awal.
- Mempercepat penjualan unit tarikan.
- Melakukan reorganisasi Divisi Collection dalam rangka mengelola portofolio dan proses penanganan kredit bermasalah yang lebih baik dan efektif.
- Menekankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan arus kas untuk memitigasi risiko likuiditas.

Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya membangun portofolio yang lebih resilien serta menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

3. Transformasi Proses dan Efisiensi Operasional

Selain fokus pada kualitas aset, Perseroan juga melakukan penyesuaian struktur biaya dan transformasi proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas.

Inisiatif yang dijalankan meliputi:

- Efisiensi biaya dengan memperbaiki setiap kebijakan operasional, dan penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan produktivitas melalui digitalisasi dan otomatisasi proses.
- Optimalisasi jaringan cabang sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional Perseroan. Langkah tersebut difokuskan pada penguatan fungsi penagihan dan penyesuaian struktur organisasi cabang dengan tingkat aktivitas bisnis sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien.

Langkah-langkah tersebut menghasilkan model operasional yang lebih *lean* dan adaptif, sekaligus memperkuat daya tahan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan yang masih menantang.

2. Strengthening Risk Management and Improving Asset Quality

Throughout 2025, the Company prioritized the improvement of asset quality in order to reduce the Non-Performing Financing (NPF) ratio and control the provision for impairment losses.

The measures undertaken included:

- Establishing the Branch Performance Improvement Task Force comprising various divisions within the Company.
- Developing and implementing a credit scoring model for new applications in collaboration with PEFINDO Credit Rating Agency for car and motorcycle financing products. The updated scorecard has been implemented since March 2025.
- Continuously enhancing the credit approval process based on the principles of "Strict, Fast, Flexible, and Simple".
- Optimizing early warning indicators to detect early signs of asset quality deterioration.
- Accelerating the disposal of repossessed units.
- Reorganizing the Collection Division in order to manage portfolios and handle credit issues better and more effectively.
- Emphasizing prudence and efficiency in cash flow management to mitigate liquidity risk.

Through this approach, the Company aims to build a more resilient portfolio and establish a stronger foundation for sustainable growth.

3. Process Transformation and Operational Efficiency

In addition to focusing on asset quality, the Company also undertook cost structure adjustments and business process transformation to enhance productivity.

The initiatives implemented included:

- Cost efficiency through the refinement of operational policies, simplification of business processes, and productivity enhancement through digitalization and process automation.
- Optimization of the branch network as part of the Company's operational efficiency initiatives. This initiative focuses on strengthening collection functions and aligning branch organizational structures with business activity levels to ensure more efficient resource utilization.

These measures resulted in a leaner and more adaptive operating model, while strengthening the Company's resilience in navigating the still-challenging dynamics of the financing industry.



Tinjauan Per Segmen Usaha

Business Segment Review

Sepanjang tahun 2025, kegiatan usaha Perseroan tetap mengacu pada ruang lingkup perizinan sebagai perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang meliputi :

1. Pembiayaan investasi;
2. Pembiayaan modal kerja;
3. Pembiayaan multiguna; dan
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Rincian kinerja dan kontribusi masing-masing segmen usaha pada tahun 2025 disajikan pada bagian berikut:

Pembiayaan Konsumen

Pada tahun 2025, Perseroan menyalurkan pembiayaan konsumen sebesar Rp1.183 miliar turun 60,14% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp2.968 miliar, sejalan dengan konsolidasi portofolio dan strategi selektif untuk menjaga kualitas aset.

Pembiayaan kendaraan roda empat (4W) tercatat Rp143 miliar, turun 90,35% dari Rp1.484 miliar pada tahun sebelumnya, sementara pembiayaan roda dua (2W) mencapai Rp1.040 miliar, turun 29,10% dari Rp1.467 miliar di tahun 2024.

Komposisi pembiayaan 2025 semakin didominasi segmen 2W, mencerminkan fokus Perseroan pada portofolio yang lebih berkualitas dan profitabel.

Total Piutang Pembiayaan Konsumen

Total Consumer Financing Receivables

Produk Product	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
4W	2.057.754	3.846.082	(1.788.328)	(46,50%)
2W	1.693.619	2.011.556	(317.937)	(15,81%)
Lain-lain* Other*	11.815	22.359	(10.544)	(47,16%)
Jumlah Total	3.763.188	5.879.998	(2.116.809)	(36,00%)

*) Lain-lain: multi produk dan barang elektronik. | Others: multi-products and electronics.

Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Produk

Pada tahun 2025, total piutang pembiayaan kendaraan roda empat (4W) tercatat sebesar Rp2.057 miliar, turun 46,50% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp3.846 miliar.

Throughout 2025, the Company's business activities remained aligned with its licensed scope as a financing company, as regulated and supervised by the Financial Services Authority (OJK), namely:

1. Investment financing;
2. Working capital financing;
3. Multipurpose financing; and
4. Other financing business activities as approved by the OJK.

The detailed performance and contribution of each business segment in 2025 are presented as follows:

Consumer Financing

In 2025, the Company disbursed consumer financing amounting to IDR1,183 billion, representing a decrease of 60.14% compared to IDR2,968 billion in 2024, in line with portfolio consolidation and a selective strategy aimed at maintaining asset quality.

Four-wheeled (4W) vehicle financing amounted to IDR143 billion, a significant decline of 90.35% from IDR1,484 billion in the previous year, while two-wheeled (2W) financing reached IDR1,040 billion, down 29.10% from IDR1,467 billion in 2024.

The 2025 financing composition was increasingly dominated by the 2W segment, reflecting the Company's focus on a more quality-driven and profitable portfolio.

Consumer Financing Receivables by Product

In 2025, total receivables from four-wheeled (4W) vehicle financing amounted to IDR2,057 billion, representing a decrease of 46.50% compared to IDR3,846 billion in 2024.

Piutang pembiayaan mobil baru dan mobil bekas masing-masing mencapai Rp497 miliar dan Rp1.560 miliar, dengan perubahan 50,04% dan 45,26% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, total piutang pembiayaan kendaraan roda dua (2W) mencapai Rp1.693 miliar, turun 15,81% dari Rp2.011 miliar pada 2024. Penurunan ini mencerminkan komposisi piutang pembiayaan motor baru sebesar Rp1.480 miliar dan motor bekas sebesar Rp213 miliar.

Adapun piutang pembiayaan lain-lain tercatat sebesar Rp11 miliar, turun 47,16% dibandingkan Rp22 miliar pada 2024.

Receivables from new car and used car financing amounted to IDR497 billion and IDR1,560 billion, respectively, reflecting changes of 50.04% and 45.26% from the previous year.

Meanwhile, total receivables from two-wheeled (2W) vehicle financing reached IDR1,693 billion, declining by 15.81% from IDR2,011 billion in 2024. This decrease reflects composition receivables from new motorcycle financing of IDR1,480 billion and used motorcycle financing of IDR213 billion.

Other financing receivables amounted to IDR11 billion, representing a decrease of 47.16% compared to IDR22 billion in 2024.

Pembiayaan 4W

4W Financing

Produk Product	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Baru New	497.455	995.670	(498.215)	(50,04%)
Bekas Used	1.560.299	2.850.412	(1.290.113)	(45,26%)
Jumlah Total	2.057.754	3.846.082	(1.788.328)	(46,50%)

Pembiayaan 2W

2W Financing

Produk Product	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Baru New	1.480.432	1.555.641	(75.209)	(4,83%)
Bekas Used	213.187	455.915	(242.728)	(53,24%)
Jumlah Total	1.693.619	2.011.556	(317.937)	(15,81%)

Pembiayaan Lain-Lain

Other Financing

Produk Product	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Baru New	400	2.026	(1.626)	(80,25%)
Bekas Used	11.414	20.333	(8.919)	(43,86%)
Jumlah Total	11.815	22.359	(10.544)	(47,16%)

Piutang Pembiayaan Konsumen berdasarkan Tipe Aset

Berdasarkan tipe asetnya, piutang pembiayaan konsumen terbesar tetap berasal dari motor (*Motorcycle*) sebesar Rp1.705 miliar, diikuti MPV sebesar Rp1.309 miliar, *Hatchback* sebesar Rp230 miliar, SUV sebesar Rp212 miliar, dan *Pick-up* sebesar Rp112 miliar.

Distribusi ini mencerminkan fokus Perseroan pada segmen dengan permintaan stabil dan kontribusi margin yang lebih optimal, sejalan dengan strategi portofolio yang lebih selektif dan berkualitas.

Consumer Financing Receivables by Asset Type

Based on asset type, the largest portion of consumer financing receivables continued to be derived from the motorcycle segment, amounting IDR1,705 billion, followed by MPV at IDR1,309 billion, followed by hatchbacks at IDR230 billion, SUVs at IDR212 billion, and pick-up vehicles at IDR112 billion.

This distribution reflects the Company's focus on segments with stable demand and more optimal margin contributions, in line with its selective and quality-driven portfolio strategy.



Tipe Aset Asset Type	2025		2024		Perubahan Change	
	Unit	Rp (Juta) IDR (Million)	Unit	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
MPV	17.180	1.309.122	25.637	2.452.951	(1.143.829)	(46,63%)
Motor Motorcycle	119.119	1.705.434	136.924	2.033.915	(328.481)	(16,15%)
Light Truck	504	63.769	913	145.074	(81.305)	(56,04%)
Heavy Truck	454	95.424	800	171.075	(75.652)	(44,22%)
Pick Up	1.904	112.028	3.416	250.419	(138.390)	(55,26%)
Hatchback	3.489	230.427	5.128	416.261	(185.835)	(44,64%)
SUV	1.686	212.443	2.368	341.313	(128.870)	(37,76%)
Sedan	238	16.584	442	36.088	(19.504)	(54,05%)
Bus	32	4.612	38	5.740	(1.128)	(19,66%)
Double Cabin	101	11.337	177	23.698	(12.362)	(52,16%)
Tractor	5	2.008	5	3.371	(1.363)	(40,42%)
Lainnya Others	-	-	2	91	(91)	(100,00%)
Jumlah Total	144.712	3.763.188	175.850	5.879.998	(2.116.809)	(36,00%)

Piutang Pembiayaan Konsumen berdasarkan Wilayah

Pada 2025, portofolio pembiayaan kendaraan roda empat (4W) terbesar tetap berada di Sumatra sebesar Rp636 miliar, diikuti Kalimantan Rp360 miliar. Untuk pembiayaan kendaraan roda dua (2W), portofolio terbesar berada di Jawa Timur sebesar Rp1.324 miliar, diikuti Nusa Tenggara Rp197 miliar.

Distribusi ini mencerminkan fokus Perseroan pada wilayah dengan potensi permintaan stabil dan profitabilitas lebih tinggi, sejalan dengan strategi ekspansi yang selektif dan penguatan kualitas aset.

Pembiayaan 4W 4W Financing

Wilayah Region	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Sumatra	636.207	1.164.458	(528.251)	(45,36%)
Jabodetabek Greater Jakarta	247.274	488.718	(241.444)	(49,40%)
Sulawesi	256.026	457.721	(201.695)	(44,07%)
Jawa Barat West Java	96.240	203.044	(106.804)	(52,60%)
Kalimantan	360.822	682.409	(321.587)	(47,13%)
Jawa Timur East Java	215.917	391.679	(175.762)	(44,87%)

Consumer Financing Receivables by Region

In 2025, the largest portfolio of four-wheeled (4W) vehicle financing remained concentrated in Sumatra, amounting to IDR636 billion, followed by Kalimantan at IDR360 billion. For two-wheeled (2W) financing, the largest portfolio was concentrated in East Java at IDR1,324 billion, followed by Nusa Tenggara at IDR197 billion.

This distribution reflects the Company's focus on regions with stable demand potential and higher profitability, in line with its selective expansion strategy and commitment to strengthening asset quality.

Wilayah Region	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Jawa Tengah Central Java	67.826	148.382	(80.556)	(54,29%)
Bali	148.142	258.984	(110.842)	(42,80%)
Nusa Tenggara	29.300	50.687	(21.387)	(42,19%)
Jumlah Total	2.057.754	3.846.082	(1.788.328)	(46,50%)

Pembiayaan 2W

2W Financing

Wilayah Region	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Sumatra	28.017	39.150	(11.132)	(28,44%)
Jabodetabek Greater Jakarta	15.995	41.595	(25.600)	(61,55%)
Sulawesi	6.010	8.548	(2.538)	(29,69%)
Jawa Barat West Java	4.238	17.717	(13.479)	(76,08%)
Kalimantan	34.334	58.095	(23.761)	(40,90%)
Jawa Timur East Java	1.324.421	1.524.760	(200.339)	(13,14%)
Jawa Tengah Central Java	19.564	42.476	(22.912)	(53,94%)
Bali	63.645	60.821	2.824	4,64%
Nusa Tenggara	197.395	218.394	(20.999)	(9,62%)
Jumlah Total	1.693.619	2.011.556	(317.937)	(15,81%)

Pembiayaan Lain-lain

Other Financing

Wilayah Region	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Jabodetabek Greater Jakarta	973	1.232	(259)	(21,05%)
Jawa Tengah Central Java	10.839	19.690	(8.851)	(44,95%)
Nusa Tenggara	3	1.437	(1.434)	(99,76%)
Jumlah Total	11.815	22.359	(10.544)	(47,16%)



Sewa Pembiayaan

Aset yang dibiayai mencakup alat berat, kendaraan, mesin, dan properti.

Berdasarkan sektor industri, piutang sewa pembiayaan terbesar berada di Konstruksi sebesar Rp29 miliar, diikuti Pertambangan Rp28 miliar, dan Manufaktur Rp25 miliar. Sebagian besar portofolio tersebar di Sulawesi, Sumatra, dan Jabodetabek, mencerminkan fokus Perseroan pada wilayah dan sektor dengan permintaan stabil serta risiko terukur.

Finance Lease

The financed assets comprised heavy equipment, vehicles, machinery, and property.

Based on industry sector, the largest portion of finance lease receivables was attributable to the Construction sector at IDR29 billion, followed by Mining at IDR28 billion and Manufacturing at IDR25 billion. The majority of the portfolio was distributed across Sulawesi, Sumatra, and Greater Jakarta, reflecting the Company's focus on regions and sectors with stable demand and measurable risk profiles.

Piutang Sewa Pembiayaan berdasarkan Tipe Aset

Finance Lease Receivables by Asset Type

Tipe Aset Asset Type	2025		2024		Perubahan Change	
	Unit	Rp (Juta) IDR (Million)	Unit	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Alat Berat Heavy Equipment	366	103.414	743	339.409	(235.995)	(69,53%)
Kapal Ships	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Vehicle	46	10.410	125	33.614	(23.204)	(69,03%)
Mesin Machinery	8	1.429	59	43.904	(42.475)	(96,75%)
Propert Property	9	84.978	48	427.749	(342.771)	(80,13%)
Jumlah Total	429	200.231	975	844.676	(644.444)	(76,29%)

Piutang Sewa Pembiayaan berdasarkan Sektor Industri

Finance Lease Receivables by Industry Sector

Sektor Industri Industry Sector	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Pertambangan Mining	28.144	100.258	(72.114)	(71,93%)
Jasa Services	86.594	155.568	(68.974)	(44,34%)
Transportasi Transportation	2.378	7.533	(5.155)	(68,44%)
Perkebunan Plantation	14.359	48.443	(34.085)	(70,36%)
Konstruksi Construction	28.728	82.686	(53.958)	(65,26%)
Manufaktur Manufacturing	24.549	78.279	(53.730)	(68,64%)
Kehutanan Forestry	7.832	28.684	(20.851)	(72,69%)
Pertanian, Peternakan, Perikanan Agriculture, Farms, Fisheries	457	3.301	(2.843)	(86,15%)
Perdagangan dan Distribusi Trading and Distribution	6.752	337.863	(331.111)	(98,00%)
Lainnya Others	439	2.061	(1.622)	(78,69%)
Jumlah Total	200.231	844.676	(644.444)	(76,29%)

Piutang Sewa Pembiayaan berdasarkan Wilayah Finance Lease Receivables by Region

Sektor Industri Industry Sector	2025	2024	Perubahan Change	
	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	Rp (Juta) IDR (Million)	%
Sumatra	23.246	103.809	(80.563)	(77,61%)
Kalimantan	34.293	118.788	(84.495)	(71,13%)
Jabodetabek Greater Jakarta	80.362	149.038	(68.677)	(46,08%)
Sulawesi	24.306	369.454	(345.149)	(93,42%)
Jawa Timur East Java	4.093	51.770	(47.677)	(92,09%)
Jawa Tengah Central Java	9.084	21.602	(12.519)	(57,95%)
Jawa Barat West Java	327	4.853	(4.526)	(93,25%)
Bali	24.521	25.362	(841)	(3,31%)
Jumlah Total	200.231	844.676	(644.444)	(76,29%)

Tinjauan Keuangan Financial Review

Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja keuangan disusun berdasarkan analisis keuangan yang disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia. Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) dengan penanggung jawab Novie, S.E., CPA dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Per 31 Desember 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp4,04 triliun, turun 41,08% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp6,86 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan piutang pembiayaan dan piutang sewa pembiayaan, masing-masing sebesar Rp2,08 triliun dan Rp337miliar.

The management discussion and analysis of financial performance is prepared based on analysis data presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"). The following discussion and analysis refers to the Company's financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG), with Novie, S.E., CPA as the engagement partner, as stated in its report dated March 27, 2026, which expressed an unqualified opinion.

Statement of Financial Position

Assets

As of December 31, 2025, the Company's total assets were recorded at IDR4.04 trillion, a decrease of 41.08% compared to IDR6.86 trillion in 2024. This decrease was primarily influenced by a decrease in financing receivables and finance lease receivables, amounting to IDR2.08 trillion and IDR337billion.



Aset Tahun 2025–2024

Assets in 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Kas dan bank Cash on hand and in banks	132.990	403.173	(270.183)	(67,01%)
Piutang pembiayaan – bersih Financing receivables – net Pihak ketiga Third parties	3.525.563	5.604.167	(2.078.604)	(37,09%)
Piutang sewa pembiayaan – bersih Finance lease receivables – net Pihak ketiga Third parties	150.840	487.731	(336.891)	(69,07%)
Beban dibayar dimuka Prepaid expenses	15.345	20.765	(5.420)	(26,10%)
Piutang lain-lain Other receivables	36.623	50.486	(13.863)	(27,46%)
Aset derivatif Derivative assets	52.671	84.550	(31.879)	(37,70%)
Aset pajak tangguhan – bersih Deferred tax assets – net	76.364	141.522	(65.158)	(46,04%)
Aset tetap – bersih Fixed assets – net	39.360	52.634	(13.274)	(25,22%)
Aset tak berwujud – bersih Intangible assets – net	4.677	4.704	(27)	(0,57%)
Aset lain-lain Other assets	5.947	7.585	(1.638)	(21,60%)
Jumlah Aset Total Assets	4.040.380	6.857.317	(2.816.937)	(41,08%)

Liabilitas

Per 31 Desember 2025, total liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp3,04 triliun, turun 43,85% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp5,42 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp1,36 triliun.

Liabilities

As of 31 December 2025, the Company's total liabilities amounted to IDR3.04 trillion, representing a decrease of 43.85% compared to IDR5.42 trillion in 2024. This decline was primarily attributable to a reduction in borrowings amounting to IDR1.36 trillion.

Liabilitas Tahun 2025–2024

Liabilities in 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Utang pajak Taxes payable	1.973	2.187	(214)	(9,79%)
Utang usaha Accounts payable	5.007	17.646	(12.639)	(71,63%)
Liabilitas lain-lain Other liabilities	59.301	51.656	7.645	14,80%
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	34.361	36.516	(2.155)	(5,90%)
Pinjaman yang diterima Borrowings	2.313.462	3.671.491	(1.358.029)	(36,99%)
Liabilitas derivatif Derivative liabilities	28.647	81.212	(52.565)	(64,73%)
Utang obligasi Bonds payable	586.283	1.240.949	(654.666)	(52,76%)
Surat utang jangka menengah Medium term notes	-	302.253	(302.253)	(100,0%)
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefits obligation	2.711	5.875	(3.164)	(53,86%)
Pinjaman subordinasi Subordinated loan	13.098	13.098	-	0,00%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.044.843	5.422.883	(2.378.040)	(43,85%)

Ekuitas

Per 31 Desember 2025, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp995,54 miliar, turun 30,60% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp1,43 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh perubahan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, sebesar Rp432,90 miliar.

Equity

As of December 31, 2025, the Company's total equity amounted to IDR995.54 billion, representing a decrease of 30.60% compared to IDR1.43 trillion in 2024. This decline was primarily attributable to changes in retained earnings (unappropriated), amounting to IDR432.90 billion.

Ekuitas Tahun 2024–2025**Equity in 2024–2025**

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Modal saham Share capital	1.224.475	1.224.475	-	0,00%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	243.689	243.689	-	0,00%
Cadangan lindung nilai arus kas Cash flows hedging reserves	(21.898)	(15.900)	(5.998)	37,72%
Komponen ekuitas lain Other equity components	1.971	1.971	-	0,00%
(Defisit) saldo laba (Deficit) retained earnings				
Telah ditentukan penggunaannya Appropriated	150.057	150.057	-	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	(602.757)	(169.858)	(432.899)	254,86%
Jumlah Ekuitas Total Equity	995.537	1.434.434	(438.897)	(30,60%)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berikut ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

The following is the Company's statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2025, and 2024:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2025–2024**Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2025–2024**

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
PENDAPATAN INCOME				
Pembiayaan – Pihak ketiga Financing – Third parties	727.591	934.413	(206.822)	(22,13%)
Sewa Pembiayaan – Pihak ketiga Finance lease – Third parties	24.436	76.702	(52.266)	(68,14%)
Lain-lain – Pihak berelasi Others – Related parties	9.808	41.150	(31.342)	(76,17%)
Lain-lain – Pihak ketiga Others – Third parties	261.116	364.266	(103.150)	(28,32%)
Jumlah Pendapatan Total Income	1.022.951	1.416.531	(393.580)	(27,78%)
BEBAN EXPENSES				
Beban keuangan Financing charges	(342.910)	(477.120)	134.210	(28,13%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses	(628.727)	(728.915)	100.188	(13,74%)
Gaji tunjangan Salaries and allowances	(221.996)	(303.206)	81.210	(26,78%)
Umum dan administrasi General and administrative	(200.092)	(250.387)	50.295	(20,09%)
Jumlah beban Total expenses	(1.393.725)	(1.759.628)	365.903	(20,79%)



Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Rugi sebelum pajak penghasilan Loss before income tax	(370.774)	(343.097)	(27.677)	8,07%
(Beban) manfaat pajak penghasilan Income tax (expense) benefit	(65.811)	58.283	(124.094)	(212,92%)
Rugi bersih Net loss	(436.585)	(284.814)	(151.771)	53,29%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: Items that will never be reclassified to profit or loss:				
Pengukuran kembali aktuarial atas kewajiban imbalan pascakerja, setelah pajak penghasilan Actuarial remeasurement of post-employment benefits obligation, net of income tax	3.686	(3.345)	7.031	(210,19%)
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi: Items that will be reclassified to profit or loss:				
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas, setelah pajak penghasilan Net changes in fair value of cash flows hedge, net of income tax	(5.998)	15.530	(21.528)	(138,62%)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan Other comprehensive income, net of income tax	(2.312)	12.185	(14.497)	(118,97%)
Jumlah rugi komprehensif Total comprehensive loss	(438.897)	(272.629)	(166.268)	60,99%
Rugi per saham dasar (dalam Rupiah penuh) Loss per share (in full Rupiah)	(356.547)	(232.600)	(123.947)	53,29%

Jumlah Pendapatan

Pada 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,02 triliun, turun 27,78% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp1,42 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya rata-rata piutang pembiayaan dan piutang sewa pembiayaan, seiring dengan penyesuaian strategi bisnis, termasuk penghentian kegiatan pembiayaan korporasi serta pembatasan penyaluran pada beberapa produk tertentu dalam rangka konsolidasi portofolio dan fokus pada segmen pembiayaan ritel.

Meskipun berdampak pada penurunan pendapatan jangka pendek, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memperbaiki kualitas aset, menekan risiko kredit, dan membangun struktur pendapatan yang lebih sehat dan berkelanjutan ke depan.

Jumlah Beban

Pada 2025, jumlah beban Perseroan tercatat sebesar Rp1,39 triliun, turun 20,79% dibandingkan Rp1,76 triliun pada 2024. Penurunan ini terutama didorong oleh berkurangnya beban penyisihan kerugian penurunan nilai seiring dengan pengelolaan portofolio yang lebih selektif serta penyesuaian eksposur pada pembiayaan berisiko tinggi.

Total Income

In 2025, the Company recorded total income of IDR1.02 trillion, representing a decrease of 27.78% compared to IDR1.42 trillion in 2024. This decline was primarily driven by a decrease in the average financing receivables and finance lease receivables, in line with adjustments to the Company's business strategy, including the cessation of corporate financing activities as well as restrictions on certain product disbursements as part of portfolio consolidation and a strategic focus on the retail financing segment.

Despite the short-term impact on income, these measures are part of the Company's efforts to improve asset quality, mitigate credit risk, and build a more sustainable and resilient income structure going forward.

Total Expenses

In 2025, the Company's total expenses amounted to IDR1.39 trillion, representing a decrease of 20.79% compared to IDR1.76 trillion in 2024. This decline was primarily driven by lower provision for impairment losses, in line with a more selective portfolio management approach and adjustments to exposure in higher-risk financing segments.

Efisiensi biaya operasional dan langkah pengendalian yang lebih disiplin juga turut berkontribusi dalam menekan total beban selama tahun berjalan.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan pada 2025 tercatat sebesar Rp342,91 miliar, turun 28,13% dibandingkan Rp477,12 miliar pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya saldo rata-rata pinjaman yang diterima serta pengelolaan struktur pendanaan yang lebih efisien.

Rugi sebelum Pajak Penghasilan

Pada 2025, Perseroan mencatat rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp370,77 miliar, meningkat dibandingkan rugi sebesar Rp343,10 miliar pada 2024. Peningkatan rugi ini terutama dipengaruhi oleh kondisi industri yang menantang serta penurunan pendapatan sebagai dampak dari penyesuaian portofolio bisnis yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun.

Rugi Bersih

Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp436,59 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan rugi bersih sebesar Rp284,81 miliar pada 2024. Peningkatan rugi bersih ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan sebagai dampak dari penyesuaian portofolio bisnis yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun.

Penghasilan Komprehensif Lain

Pada 2025, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar (Rp2,31) miliar, dibandingkan Rp12,19 miliar pada 2024. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi nilai wajar instrumen lindung nilai atas arus kas setelah pajak penghasilan.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Pada 2025, Perseroan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp438,90 miliar, meningkat dibandingkan rugi komprehensif sebesar Rp272,63 miliar pada 2024. Kenaikan rugi komprehensif ini terutama didorong oleh kenaikan rugi bersih seiring dengan penurunan pendapatan.

Operational efficiency initiatives and more disciplined cost control measures also contributed to the reduction in total expenses during the year.

Financing Charges

The Company's financial charges in 2025 amounted to IDR342.91 billion, a decrease of 28.13% compared to IDR477.12 billion in 2024. This decline was in line with the reduction in average outstanding borrowings and the adaption of more efficient funding structure.

Loss before Income Tax

In 2025, the Company recorded a loss before income tax of IDR370.77 billion, an increase compared to a loss of IDR343.10 billion in 2024. This increase in loss was primarily driven by challenging industry conditions as well as lower income resulting from portfolio adjustments implemented throughout the year.

Net Loss

The Company recorded a net loss of IDR436.59 billion in 2025, compared to a net loss of IDR284.81 billion in 2024. The increase in net loss was mainly driven by the decline in income as a result of the portfolio adjustments implemented throughout the year.

Other Comprehensive Income

In 2025, the Company recorded other comprehensive income of (IDR2.31) billion, compared to IDR12.19 billion in 2024. This was primarily driven by changes in fair value of cash flows hedge, net of income tax.

Comprehensive Loss for the Year

In 2025, the Company recorded a total comprehensive loss of IDR438.90 billion, an increase compared to a total comprehensive loss of IDR272.63 billion in 2024. The increase in comprehensive loss was primarily driven by a rise in net loss, alongside a decline in income.



Laporan Arus Kas

Berikut ini merupakan laporan arus kas Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Laporan Arus Kas Tahun 2025–2024

Cash Flows Statement in 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash provided by operating activities	2.082.018	1.105.695	976.323	88,30%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(7.871)	(10.429)	2.558	(24,53%)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities	(2.344.330)	(1.001.128)	(1.343.202)	134,17%
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan bank Net (decrease) increase in cash on hand and in banks	(270.183)	94.138	(364.321)	(387,01%)
Kas dan bank, awal tahun Cash on hand and in banks, beginning of the year	403.173	309.035	94.138	30,46%
Kas dan bank, akhir tahun Cash on hand and in banks, end of the year	132.990	403.173	(270.183)	(67,01%)

Posisi kas dan bank per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp132,99 miliar, turun 67,01% dibandingkan Rp403,17 miliar pada 2024. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama tahun berjalan. Kondisi kas yang terjaga mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola likuiditas secara prudent.

Cash and cash equivalents as of December 31, 2025 amounted to IDR132.99 billion, a decrease of 67.01% compared to IDR403.17 billion in 2024. This change was primarily driven by net cash flow from financing activities during the current year. The Company's healthy cash position reflects its ability to manage liquidity prudently.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Berikut ini merupakan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025–2024

Cash Flows from Operating Activities in 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Penerimaan kas dari: Cash received from:				
Transaksi pembiayaan Financing transactions	3.246.034	4.646.403	(1.400.369)	(30,14%)
Transaksi sewa pembiayaan Finance lease transactions	557.476	413.125	144.351	34,94%
Pendapatan administrasi Administration income	129.622	221.182	(91.560)	(41,40%)
Denda dari pelanggan Penalties from customers	35.956	38.628	(2.672)	(6,92%)
Pendapatan bunga Interest income	14.240	8.899	5.341	60,02%

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Lain-lain Other	103.046	139.297	(36.251)	(26,02%)
Jumlah penerimaan kas Total cash received	4.086.374	5.467.534	(1.381.160)	(25,26%)
Pengeluaran kas untuk: Cash disbursements for:				
Transaksi pembiayaan Financing transactions	(1.272.559)	(3.200.079)	1.927.520	(60,23%)
Transaksi sewa pembiayaan Finance lease transactions	-	(187.515)	187.515	(100,00%)
Beban usaha Operating expenses	(167.611)	(222.664)	55.053	(24,72%)
Gaji dan tunjangan Salaries and allowances	(220.528)	(299.230)	78.702	(26,30%)
Beban keuangan Financing charges	(343.658)	(448.727)	105.069	(23,41%)
Jumlah pengeluaran kas Total cash disbursements	(2.004.356)	(4.358.215)	2.353.859	(54,01%)
Pembayaran pajak penghasilan Payment of income taxes	-	(3.624)	3.624	(100,00%)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash provided by operating activities	2.082.018	1.105.695	976.323	88,30%

Pada 2025, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2,08 triliun, meningkat 88,30% dibandingkan Rp1,11 triliun pada 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh menurunnya pengeluaran kas untuk transaksi pembiayaan secara signifikan.

In 2025, the Company recorded net cash provided by operating activities of IDR 2.08 trillion, an increase of 88.30% compared to IDR 1.11 trillion in 2024. This increase was primarily driven by a significant reduction in cash outflows for financing transactions.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Berikut ini merupakan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following presents the cash flows from investing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024:

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025–2024

Cash Flows from Investing Activities in 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nominal	%
Penerimaan dari penjualan aset tetap Proceeds from sale of fixed assets	1.128	845	283	33,49%
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(6.208)	(9.085)	2.877	(31,67%)
Perolehan aset tak berwujud Acquisition of intangibl	(2.791)	(2.189)	(602)	27,50%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(7.871)	(10.429)	2.558	(24,53%)



Pada 2025, Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7,87 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10,43 miliar. Hal ini terutama berasal dari menurunnya perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Berikut ini merupakan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025–2024

Cash Flows from Financing Activities in 2025–2024

Uraian Description	Dalam jutaan Rupiah In millions of Rupiah		Perubahan Change	
	2025	2024	Nominal	%
Penerimaan dari pinjaman yang diterima Proceeds from borrowings	725.000	1.170.000	(445.000)	(38,03%)
Pembayaran pinjaman yang diterima Payments of borrowings	(2.113.748)	(2.478.636)	364.888	(14,72%)
Penerimaan dari utang obligasi Proceeds from bonds payable	-	500.000	(500.000)	(100,00%)
Pembayaran dari utang obligasi Payments of bonds payable	(650.000)	(188.000)	(462.000)	245,74%
Pembayaran dari surat hutang jangka menengah Payments of medium term notes	(300.000)	-	(300.000)	-
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	(5.582)	(4.492)	(1.090)	24,27%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities	(2.344.330)	(1.001.128)	(1.343.202)	134,17%

Pada 2025, Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2,34 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,00 triliun. Arus kas keluar ini terutama berasal dari pembayaran utang obligasi serta surat utang jangka menengah.

Rasio Keuangan

Kinerja Perseroan dalam mengelola sumber daya dan menjaga keberlanjutan usaha tercermin dalam rasio-rasio keuangan utama, khususnya rasio profitabilitas. Indikator ini memberikan gambaran mengenai efektivitas operasional, struktur biaya, serta kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dan menciptakan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pergerakan rasio profitabilitas mencerminkan dinamika peningkatan volume pembiayaan, pengendalian beban, serta peningkatan rugi bersih yang terjadi pada tahun 2025.

Tabel berikut menyajikan perbandingan pencapaian profitabilitas Perseroan selama dua tahun terakhir:

In 2025, the Company recorded net cash used in investing activities of IDR7.87 billion, a decrease compared to IDR10.43 billion in 2024. This was primarily driven by lower acquisition of fixed assets.

Cash Flows from Financing Activities

The following presents the cash flows from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024:

In 2025, the Company recorded net cash used in financing activities of IDR2.34 trillion, an increase compared to IDR1.00 trillion in the previous year. These cash outflows stem primarily from payments of bonds as well as medium term notes.

Financial Ratios

The Company's performance in managing resources and maintaining business sustainability is reflected in its key financial ratios, particularly profitability ratios. These indicators provide insights into operational efficiency, cost structure, as well as the Company's ability to generate profit and create value for shareholders and other stakeholders. The movement in profitability ratios reflects the dynamics of declining financing volume, cost containment initiatives, and the increase in net loss recorded in 2025.

The following table presents a comparison of the Company's profitability performance over the last two years:

Uraian Description	2025	2024	Perubahan / Change	
			Nominal	%
Margin laba bruto Gross profit margin	66,48%	66,32%	0,16%	0,24%
Margin laba usaha Operating profit margin	(33,12%)	(24,22%)	(8,90%)	36,75%
Margin laba bersih Net profit margin	(42,68%)	(20,11%)	(22,57%)	112,23%
Rasio laba terhadap total aset Return on assets	(6,70%)	(4,55%)	(2,15%)	47,25%
Rasio laba terhadap total ekuitas Return on equity	(33,55%)	(17,90%)	(15,65%)	87,43%

Kemampuan Membayar Utang

Debt Paying Ability

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan dievaluasi melalui analisis menyeluruh atas likuiditas dan solvabilitas. Indikator-indikator ini secara kolektif memberikan gambaran kesehatan keuangan Perseroan serta kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Perseroan menggunakan rasio lancar untuk menilai kemampuan memenuhi utang jangka pendek, khususnya utang yang telah jatuh tempo, dengan memanfaatkan aset lancar yang tersedia. Pada tahun 2025, rasio ini tercatat sebesar 126,81%, menunjukkan penurunan dibandingkan 148,49% pada 2024, yang mencerminkan penurunan likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Untuk menilai kemampuan membayar utang jangka panjang, Perseroan memantau beberapa rasio solvabilitas utama, termasuk:

- *Debt to Asset Ratio (DAR)* - rasio liabilitas terhadap total aset.
- *Debt to Equity Ratio (DER)* - rasio liabilitas terhadap ekuitas.
- *Gearing Ratio* - rasio leverage yang mengukur proporsi utang terhadap struktur permodalan Perseroan.

The Company's ability to meet its financial obligations is evaluated through a comprehensive analysis of liquidity and solvency. These indicators collectively provide an overview of the Company's financial health and its capacity to meet both short-term and long-term obligations.

Ability to Pay Short-Term Debt (Liquidity)

The Company uses the current ratio to assess its ability to meet short-term debt, particularly maturing debt, by utilizing available current assets. In 2025, this ratio was recorded at 126.81%, down from 148.49% in 2024, reflecting a decline in liquidity.

Ability to Pay Long-Term Debt (Solvency)

To assess its ability to service long-term debt, the Company monitors several key solvency ratios, including:

- *Debt to Asset Ratio (DAR)* - the ratio of total liabilities to total assets;
- *Debt to Equity Ratio (DER)* - the ratio of total liabilities to total equity; and
- *Gearing Ratio* - a leverage ratio that measures the proportion of debt to the Company's capital structure.



Ratio-rasio ini memberikan indikasi seberapa efektif Perseroan dalam mengelola utang jangka panjang dan menjaga struktur permodalan yang sehat, sekaligus mendukung kelangsungan operasional dan strategi ekspansi yang berkelanjutan.

These ratios provide an indication of the Company's effectiveness in managing long-term debt and maintaining a sound capital structure, while supporting operational continuity and a sustainable expansion strategy.

Rasio

Ratio

Uraian Description	2025	2024
Rasio liabilitas terhadap total aset (DAR) Debt to Assets Ratio (DAR)	75,36%	79,08%
Rasio liabilitas terhadap total ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)	305,85%	378,05%
Rasio Gearing Gearing Ratio	2,89x	3,61x

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility Rate

Perseroan menjalankan pengelolaan piutang pembiayaan secara hati-hati dengan melakukan perkiraan perolehan pembayaran dari pelanggan dan pengendalian risiko kredit secara ketat.

The Company manages its financing receivables prudently by estimating expected customer repayments and applying strict credit risk controls.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) neto dihitung dengan membagi piutang bermasalah yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dengan total piutang yang dikelola.

In accordance with applicable regulations, the net Non-Performing Financing (NPF) ratio is calculated by dividing non-performing receivables that are overdue by more than 90 days, net of impairment loss allowances, by total managed receivables.

Pada akhir 2025, tingkat NPF neto Perseroan tercatat sebesar 3,63%, tetap berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan yaitu 5,00%.

At the end of 2025, the Company's net NPF ratio was recorded at 3.63%, remains below the maximum limit set by the regulations, namely 5.00%.

Struktur Modal

Capital Structure

Perseroan menerapkan pendekatan yang bijaksana dan strategis dalam pengelolaan modal, dengan tujuan mencapai struktur permodalan yang kuat untuk menopang ketahanan operasional sekaligus meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Fokus utama adalah mempertahankan rasio permodalan yang optimal, yang penting untuk mendukung kegiatan usaha berjalan serta memastikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan kondisi pasar.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, manajemen menetapkan kebijakan pengelolaan modal yang mencakup:

- Menjaga rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) pada tingkat yang sehat untuk memastikan *leverage* yang terkendali dan profil risiko yang sesuai dengan strategi pertumbuhan Perseroan.
- Memastikan likuiditas dan solvabilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan operasional serta pemenuhan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- Meninjau secara berkala struktur modal dan melakukan penyesuaian bila diperlukan untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi makro, persyaratan regulator, dan peluang pengembangan bisnis.
- Mengoptimalkan penggunaan pinjaman dan ekuitas dengan pertimbangan biaya modal, efisiensi keuangan, dan dampak terhadap fleksibilitas operasional.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara utang dan ekuitas adalah DER, yang mencerminkan proporsi liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham dan memberikan gambaran mengenai *leverage* keuangan serta profil risiko Perseroan.

Tabel di bawah ini menyajikan komposisi struktur permodalan Perseroan selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung kesehatan operasional:

The Company adopts a prudent and strategic approach to capital management, with the objective of achieving a strong capital structure to support operational resilience while enhancing long-term value creation for shareholders. The primary focus is on maintaining an optimal capital ratio, which is essential to support ongoing business operations and ensure flexibility in responding to economic dynamics and changing market conditions.

In pursuit of this objective, management has established capital management policies that include:

- Maintaining a healthy Debt to Equity Ratio (DER) to ensure controlled leverage and a risk profile aligned with the Company's growth strategy.
- Ensuring adequate liquidity and solvency to support operational requirements as well as the settlement of both short-term and long-term obligations.
- Periodically reviewing the capital structure and making adjustments as necessary in response to changes in macroeconomic conditions, regulatory requirements, and business development opportunities.
- Optimizing the use of debt and equity with due consideration to cost of capital, financial efficiency, and its impact on operational flexibility.

One of the key indicators used to assess the balance between debt and equity is the DER, which reflects the proportion of liabilities to shareholders' equity and provides an indication of the Company's financial leverage and risk profile.

The table below presents the Company's capital structure composition over the last two years, demonstrating management's commitment to maintaining financial stability and supporting operational soundness:

Struktur Modal Tahun 2025–2024

Capital Structure for 2025–2024

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	2025		2024	
	Nominal	Struktur Modal (%) Proportion in Capital Structure (%)	Nominal	Struktur Modal (%) Proportion in Capital Structure (%)
Liabilitas Liabilities	3.044.843	75,36%	5.422.883	79,08%
Ekuitas Equity	995.537	24,64%	1.434.434	20,92%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	4.040.380	100,00%	6.857.317	100,00%



Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure Investments

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Throughout 2025, the Company did not have any material commitments for capital expenditure investments.

Realisasi Investasi Barang Modal

Capital Expenditures Realization

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak merealisasikan investasi barang modal.

Throughout 2025, the Company did not realize any capital expenditure investments.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Comparison between 2025 Targets and Realization [\[F.1, F.2\]](#)

Pada awal setiap tahun buku, Perseroan menetapkan target kinerja yang komprehensif, yang dirancang untuk memandu pencapaian kinerja keuangan dan operasional selama periode dua belas bulan. Target-target ini berfungsi sebagai kerangka kerja strategis, menyediakan tolok ukur yang jelas untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memastikan keselarasan di seluruh fungsi bisnis.

Sepanjang tahun, target-target tersebut dievaluasi secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan perkembangan internal Perseroan maupun perubahan lingkungan eksternal. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk tetap fleksibel dan responsif, menyesuaikan strategi bila diperlukan untuk menghadapi tantangan baru maupun memanfaatkan peluang yang muncul.

Hasil dari pemantauan kinerja ini khususnya perbandingan antara target awal dan pencapaian aktual tahun buku 2025 dirangkum dalam tabel berikut:

At the beginning of each financial year, the Company establishes comprehensive performance targets designed to guide the achievement of financial and operational performance over a twelve-month period. These targets serve as a strategic framework, providing clear benchmarks to support sustainable growth and ensure alignment across all business functions.

Throughout the year, these targets are continuously monitored, taking into account both internal developments and changes in the external environment. This approach enables the Company to remain flexible and responsive, adjusting its strategy when necessary to address emerging challenges and capitalize on new opportunities.

The outcome of this performance monitoring—particularly the comparison between initial targets and actual achievements for the 2025 financial year—is summarized in the following table:



Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Comparison between 2025 Targets and Realization

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	Target 2025	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Pembiayaan Baru New Financing	1.768.860	1.183.194	66,89%
Aset Assets	4.620.458	4.040.380	87,44%
Liabilitas Liabilities	3.333.717	3.044.843	91,33%
Ekuitas Equity	1.286.741	995.537	77,37%
Pendapatan Income	1.338.599	1.022.951	76,42%
Rugi Bersih Tahun Berjalan Net Loss for the Year	(162.776)	(436.585)	(268,21%)



Proyeksi Tahun 2026

2026 Outlook [F.1, F.2]

Perseroan telah menetapkan target kinerja untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas operasional pada tahun 2026 mendatang sebagai berikut:

The Company has established performance targets to serve as a reference for the execution of its operational activities in the upcoming 2026 financial year, as follows:

Proyeksi

Outlook

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Uraian Description	Target 2025
Pembiayaan Baru New Financing	245.640
Aset Assets	2.425.742
Liabilitas Liabilities	1.538.798
Ekuitas Equity	886.944
Pendapatan Income	527.580
Rugi Bersih Tahun Berjalan Net Loss for the Year	(197.857)

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

Material Information and Facts Subsequent to the Financial Reporting Date

Tidak ada informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

There is no material information or facts subsequent to the financial reporting date.

Prospek Usaha Business Outlook

Memasuki tahun 2026, perekonomian global masih berada dalam fase pertumbuhan moderat dengan tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sebesar 3,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh fragmentasi perdagangan global, kebijakan tarif resiprok Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik yang masih berkembang. Di sisi pasar keuangan global, ruang pelonggaran suku bunga kebijakan negara maju semakin terbatas, dengan imbal hasil obligasi yang tetap tinggi dan penguatan dolar AS yang berpotensi menahan aliran modal ke negara berkembang. Kondisi tersebut menuntut respons kebijakan yang adaptif untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi domestik.

Di tengah dinamika eksternal tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan ketahanan. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9%–5,7%, dengan inflasi yang tetap terjaga dalam sasaran 2,5% ± 1%. Pemerintah juga menargetkan akselerasi pertumbuhan menuju kisaran 6% pada tahun 2026 guna memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong permintaan domestik. Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan berada pada kisaran 8%–12%, mencerminkan ruang ekspansi pembiayaan yang tetap terbuka dengan dukungan likuiditas yang memadai dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Dalam industri otomotif roda empat, GAIKINDO mengidentifikasi bahwa tantangan utama tahun 2026 terletak pada daya beli masyarakat dan kebutuhan akan kepastian kebijakan yang konsisten serta berjangka panjang. Kenaikan harga kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat berpotensi memperlebar kesenjangan kemampuan beli. Namun demikian, dimulainya produksi kendaraan listrik secara lokal oleh sejumlah pabrikan global memberikan prospek positif dalam jangka menengah, terutama apabila akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemulihan permintaan kendaraan roda empat secara bertahap.

Sementara itu, pasar sepeda motor diproyeksikan relatif stabil. Berdasarkan pandangan AISI, pasar domestik tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 6,7 juta unit. Karakter sepeda motor sebagai sarana transportasi yang efisien dan produktif menjadikannya lebih resilien terhadap tekanan daya beli. Tingginya kontribusi pembelian secara kredit, yang mencapai sekitar 65% dari total transaksi, menegaskan peran strategis industri pembiayaan dalam menjaga stabilitas permintaan di segmen ini, meskipun terdapat tantangan seperti kebijakan pajak daerah dan dinamika ekonomi global.

Entering 2026, the global economy is expected to remain in a phase of moderate growth with a relatively high level of uncertainty. Global economic growth is projected at 3.2%, slightly lower than the previous year, influenced by global trade fragmentation, the United States' reciprocal tariff policies, and ongoing geopolitical dynamics. In global financial markets, the scope for monetary policy easing in advanced economies remains limited, with persistently high bond yields and a strengthening US dollar potentially constraining capital inflows to emerging markets. These conditions necessitate adaptive policy responses to safeguard domestic economic stability and resilience.

Amid these external dynamics, the Indonesian economy is expected to remain resilient. According to Bank Indonesia projections, national economic growth in 2026 is forecast to be in the range of 4.9%–5.7%, with inflation expected to remain within the target range of 2.5% ± 1%. The Government also targets an acceleration of economic growth toward approximately 6% in 2026 to strengthen household purchasing power and support domestic demand. On the intermediation side, banking credit growth is projected to range between 8%–12%, reflecting sustained room for financing expansion supported by adequate liquidity and a stable financial system.

In the four-wheeled automotive industry, GAIKINDO identifies that the primary challenge in 2026 lies in household purchasing power and the need for consistent, long-term policy certainty. The increase in vehicle prices outpacing income growth may further widen the affordability gap. Nevertheless, the commencement of local electric vehicle production by several global manufacturers presents a positive medium-term outlook, particularly if accelerated economic growth supports a gradual recovery in four-wheeled vehicle demand.

Meanwhile, the two-wheeled motorcycle market is projected to remain relatively stable. According to AISI, domestic sales in 2026 are expected to range between 6.4 million and 6.7 million units. The role of motorcycles as an efficient and productive means of transportation makes this segment relatively resilient to purchasing power pressures. The high proportion of credit-based transactions, accounting for approximately 65% of total sales, underscores the strategic role of the financing industry in sustaining demand in this segment, despite challenges such as regional tax policies and global economic volatility.



Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan pertumbuhan industri pembiayaan pada tahun 2026 berada dalam kisaran 6%–8%. Proyeksi tersebut didukung oleh kebijakan deregulasi yang membuka ruang ekspansi, khususnya pada pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan UMKM. Di sisi lain, regulator menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, terutama untuk memastikan pembiayaan berbasis pada aktivitas usaha yang riil serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

Dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik, inflasi yang terkendali, stabilitas sistem keuangan yang kuat, serta prospek pasar otomotif yang relatif stabil dengan potensi pemulihan bertahap, maka prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 dipandang tetap positif. Lingkungan makroekonomi yang kondusif serta dukungan kebijakan terhadap sektor pembiayaan memberikan peluang bagi Perseroan untuk mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

In line with these developments, the Financial Services Authority (OJK) projects the financing industry to grow within the range of 6%–8% in 2026. This outlook is supported by deregulation policies that create room for expansion, particularly in vehicle financing and MSME financing. At the same time, regulators emphasize the importance of strengthening governance and risk management, particularly to ensure that financing is based on real economic activities and to maintain public confidence in the financial services industry.

Considering improving national economic growth prospects, controlled inflation, a strong and stable financial system, and relatively stable automotive market conditions with gradual recovery potential, the Company's business outlook for 2026 is assessed to remain positive. The conducive macroeconomic environment, together with policy support for the financing sector, provides opportunities for the Company to pursue sustainable growth while maintaining prudent principles and Good Corporate Governance.

Aspek Pemasaran Marketing Aspects

Strategi Pemasaran

Pemasaran tetap menjadi motor penggerak utama Perseroan, mendorong perluasan pangsa pasar, respons cepat terhadap perubahan industri, dan peluncuran produk inovatif berkualitas tinggi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, strategi pemasaran terus disesuaikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, sambil menjaga efektivitas, efisiensi, dan mitigasi risiko.

Perseroan juga menekankan penguatan kapabilitas internal, terutama di fungsi penjualan dan layanan konsumen di cabang, guna membangun model operasional yang lebih responsif dan berfokus pada pelanggan.

Selain itu, jaringan cabang digunakan secara optimal sebagai platform pemasaran strategis. Melalui kemitraan dengan mitra pilihan, distribusi produk menjadi lebih luas dan efektif, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Program-program pemasaran yang telah ada disempurnakan dan diperkuat untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis, sekaligus mendapatkan respons positif dari para pemangku kepentingan.

Marketing Strategy

Marketing remains the Company's primary growth engine, driving market share expansion, rapid responsiveness to industry changes, and the launch of high-quality innovative products. In an increasingly competitive environment, marketing strategies continue to be refined to ensure sustainable growth while maintaining effectiveness, efficiency, and risk mitigation.

The Company also emphasizes the strengthening of internal capabilities, particularly within sales and branch-based consumer service functions, in order to build a more responsive and customer-centric operating model.

In addition, the branch network is optimally utilized as a strategic marketing platform. Through partnerships with selected business partners, product distribution has become broader and more effective, while also enhancing efficiency and productivity.

Existing marketing programs have been further refined and strengthened to ensure alignment with business objectives, while maintaining positive stakeholder responsiveness.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif pemasaran, antara lain:

- Fokus pada portofolio produk yang lebih menguntungkan, yaitu pembiayaan motor baru dan fasilitas dana MyCash;
- Menghentikan sementara pembiayaan baru untuk mobil baru/bekas, dan multi-produk sebagai langkah mitigasi risiko terkait kualitas aset;
- Secara permanen menutup kegiatan bisnis Sewa Pembiayaan (Pembiayaan Korporasi) mulai Januari 2025, dan mengelola portofolio yang ada hingga jatuh tempo;
- Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan MPM Group dan entitas di dalamnya, termasuk MPM Insurance, MPM Mulia, MSO, dan AUKSI;
- Meningkatkan kerja sama dengan *dealer/showroom* yang memberikan kontribusi profit lebih besar melalui program *privilege* yang teroptimalisasi;
- Menerapkan *dealer management* melalui *grading*, evaluasi, serta pemberian insentif berbasis performa *dealer*;
- Meningkatkan penjualan melalui *direct sales* dan agen internal, serta memperkuat *closing rate tele-sales* untuk pelanggan kategori *good book*;
- Meningkatkan *retention rate* produk melalui *telesales* dan pengembangan agen eksternal; dan
- Memperkuat *Service Level Agreement (SLA)* proses aplikasi pembiayaan dengan:
 - › Penerapan parameter *instant approval* dan penyederhanaan *credit screening* untuk pelanggan *repeat order* kategori *good book* pada produk MyCash motor.
 - › Program *fast approval* untuk pelanggan kategori *good book* pada produk MyCash mobil.

Pendekatan ini memastikan bahwa strategi pemasaran Perseroan tetap adaptif dan efektif, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepuasan pelanggan dan posisi Perseroan di pasar.

Pangsa Pasar

Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri pembiayaan nasional pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp505.59 triliun, menurun dari Rp578 triliun pada 2024.

Total aset Perseroan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4,04 triliun dan Rp6,86 triliun. Jika dibandingkan dengan total aset industri, pangsa pasar Perseroan pada 2025 tercatat sebesar 0,80%, dibandingkan 1,18% pada tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the Company implemented various marketing initiatives, including:

- Focusing on a more profitable product portfolio, namely new motorcycle financing and MyCash cash loan facilities;
- Temporarily suspending new financing for new and used four-wheeled vehicles, and multi-product financing activities as a risk mitigation measure related to asset quality;
- Permanently ceased its Finance Lease (Corporate Financing) business starting in January 2025 and continues to manage the existing portfolio until maturity.
- Strengthening synergies and collaboration with MPM Group and its affiliated entities, including MPM Insurance, MPM Mulia, MSO, and AUKSI;
- Enhancing cooperation with dealers/showrooms that generate higher profitability contributions through optimized privilege programs;
- Implementing dealer management through grading, evaluation, and performance-based incentive schemes;
- Increasing sales performance through direct sales and internal agents, as well as strengthening tele-sales closing rates for customers in the "good book" category;
- Improving product retention rates through telesales and the development of external agents; and
- Strengthening Service Level Agreement (SLA) for financing application processes through:
 - › The implementation of instant approval parameters and simplified credit screening for repeat-order "good book" customers under the MyCash motorcycle product; and
 - › Fast approval programs for "good book" customers under the MyCash automobile product.

This approach ensures that the Company's marketing strategy remains adaptive and effective, supporting sustainable growth while strengthening customer satisfaction and the Company's competitive position in the market.

Market Share

Based on official data published by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), total assets of the national financing industry as of December 31, 2025 amounted to IDR505,59 trillion, decrease from IDR578 trillion in 2024.

The Company's total assets as of December 31, 2025 and 2024 amounted to IDR 4.04 trillion and IDR6.86 trillion, respectively. Compared to total industry assets, the Company's market share in 2025 was recorded at 0.80%, compared to 1.18% in the previous year.



Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Perseroan menyusun kebijakan dividen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pembagian dividen didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan mempertimbangkan ketersediaan laba yang dapat dibagikan, likuiditas Perseroan, serta kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan modal Perseroan.

Selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan 2025, Perseroan tidak membagikan dividen. Keputusan ini diambil untuk memperkuat struktur permodalan, menjaga fleksibilitas likuiditas, dan mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

The Company formulates its dividend policy in accordance with Law No. 1 of 2023 concerning Limited Liability Companies. Dividend distribution is determined based on resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), taking into account the availability of distributable profits, the Company's liquidity position, as well as the need to support the Company's growth and capital strengthening initiatives.

Over the past two years, 2024 and 2025, the Company did not distribute dividends. This decision was made to strengthen the capital structure, maintain liquidity flexibility, and support the Company's long-term growth strategy.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Pada tahun 2025, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024, karena seluruh dana telah sepenuhnya direalisasikan dan dilaporkan kepada regulator melalui Surat No. 023/CORSEC/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024. Dengan demikian, penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan dan rencana yang disetujui.

In 2025, the Company was not required to submit a report on the utilization of proceeds from the Public Offering of the JACCS MPM Finance Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2024, as all proceeds had been fully utilized and reported to the regulator through Letter No. 023/CORSEC/VII/2024 dated July 4, 2024. Accordingly, the use of proceeds was in line with the approved objectives and plan.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information on Investments, Expansion, Divestments, Business Mergers/Consolidations, Acquisitions, Debt/Capital Restructuring, Affiliated Transactions, and Transactions with Conflicts of Interest

Pada tahun 2025, tidak terdapat informasi yang bersifat material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

In 2025, there was no material information related to investments, expansion, divestments, mergers or consolidations, acquisitions, debt or capital restructuring, affiliated transactions, or transactions involving conflicts of interest.

Perubahan Peraturan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perseroan

Changes in Regulations with Significant Impact on the Company

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan pemerintah dan otoritas pasar modal yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Throughout 2025, there were no changes in government regulations or capital market authority regulations that had a significant impact on the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan, dan Perseroan telah mengadopsi seluruh ketentuan dalam kebijakan akuntansi yang berlaku umum.

Throughout 2025, there were no changes in accounting policies that had a significant impact on the Company, and the Company has adopted all applicable generally accepted accounting standards.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Berkelanjutan

Implementation of Good and Sustainable Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan landasan utama bagi Perseroan dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, serta kewajaran, Perseroan berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Komitmen ini sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan membangun reputasi perusahaan yang kokoh, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga secara berkesinambungan.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan GCG dapat digerakkan melalui dua pendekatan utama, yaitu dorongan etika (*ethical driven*) dan dorongan regulasi (*regulatory driven*). Pendekatan *ethical driven* lahir dari kesadaran individu untuk menjalankan praktik bisnis yang berorientasi pada keberlangsungan jangka panjang, mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, serta menghindari pola penciptaan keuntungan sesaat yang berisiko merugikan perusahaan maupun masyarakat. Sementara itu, *regulatory driven* muncul dari kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator, sehingga memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai standar hukum dan tata kelola yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip GCG berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Perseroan menekankan pentingnya keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam praktik bisnis. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja finansial dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as the cornerstone for the Company in achieving sustainable growth. By upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, the Company is committed to creating long-term value that provides tangible benefits to all stakeholders and the broader community. This commitment simultaneously strengthens investor confidence and builds a solid corporate reputation, thereby ensuring the Company's business continuity.

The Company is committed to consistently and continuously applying the principles of good corporate governance (GCG) in all its business activities. The implementation of GCG can be driven by two main approaches: ethical-driven and regulatory-driven. The ethical-driven approach stems from an individual's awareness to conduct business practices focused on long-term sustainability, prioritizing the interests of all stakeholders, and avoiding short-term profit-seeking that has a risk of harming the company or society. Meanwhile, the regulatory-driven approach arises from compliance with regulations and policies established by regulators, thereby ensuring that all business activities operate in accordance with applicable legal and governance standards.

The implementation of GCG principles plays a crucial role in boosting investor and stakeholder confidence, lowering the cost of capital, strengthening the capital market and financial services sector, expanding employment opportunities, and driving economic growth in line with the principles of sustainable development.

Furthermore, the Company emphasizes the importance of sustainability by integrating environmental, social, and governance (ESG) aspects into its business practices. This is done to maintain a balance between financial performance and contributions to sustainable development. Thus, the Company not only creates value for shareholders but also provides long-term benefits for society and the environment.

Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan dilaksanakan dengan berlandaskan pada berbagai regulasi dan kebijakan yang berlaku. Landasan hukum ini menjadi pedoman utama bagi Perseroan dalam memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan berkesinambungan, serta memberikan kepastian bahwa seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan praktik terbaik. Regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
3. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
4. POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
5. POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
6. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. SEOJK No. 28 tahun 2025 tentang Laporan Penerapan Tata kelola yang baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya.
11. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi
12. Anggaran Dasar dan Pedoman Kebijakan Perseroan.
13. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

The implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles at the Company is based on various applicable regulations and policies. This legal framework serves as the primary guideline for the Company in ensuring good, transparent, and sustainable governance, as well as providing assurance that all business activities are conducted in accordance with legal regulations and best practices. The regulations and policies that serve as references include:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on the Capital Market.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT").
3. POJK No. 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
4. POJK No. 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
5. POJK No. 35 of 2025 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
6. POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
7. POJK No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.
8. POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies.
9. POJK No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Reports by Issuers or Public Companies.
10. POJK No. 28 of 2025 on Reports on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institution.
11. The 2021 General Guidelines on Corporate Governance in Indonesia (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy.
12. The Company's Articles of Association and Policy Guidelines.
13. Other relevant laws and regulations.



Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Principles of Corporate Governance

Pasal 2 POJK No. 48 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya termasuk dalam Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip GCG tersebut dan implementasinya di Perseroan, dijelaskan pada tabel berikut:

Article 2 of POJK No. 48 of 2024 mandates that the Company, whose business activities fall under the categories of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML), must apply the principles of Good Corporate Governance in all its business activities at every level of the organization. These GCG principles and their implementation within the Company are outlined in the following table:

Prinsip GCG Principles of Corporate Governance	Penjelasan Berdasarkan POJK No. 48 Tahun 2024 Explanation Based on POJK No. 48 of 2024	Penerapan di Perseroan Implementation at the Company
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparency in the decision-making process, as well as in the disclosure and provision of relevant and easily accessible information to stakeholders.	• Pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh debitur terkait pembiayaan; • Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; • Publikasi pengumuman melalui situs resmi Perseroan (www.jaccs-mpmfinance.com). • Disclosure of information required by borrowers regarding financing; • Submission of the Annual Report and Financial Statements; • Publication of announcements on the Company's official website (www.jaccs-mpmfinance.com).
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Accountability encompasses the clarity of the functions and the fulfillment of responsibilities of each corporate body.	• Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ Perseroan, dibuktikan dengan adanya Piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite penunjang; • Penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudence</i>) serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. • A clear division of duties and responsibilities among the Company's governing bodies, as evidenced by the charters of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the supporting committees; • The application of the principle of prudence and compliance with laws and regulations in the internal control and risk management systems.
Tanggung Jawab Responsibility	Tanggung jawab atas kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai etika, standar, prinsip, dan praktik yang berlaku. Responsibility for ensuring that management practices comply with applicable laws and regulations, ethical values, standards, principles, and practices.	• Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; • Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); • Pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi. • Compliance with the Articles of Association and applicable laws and regulations; • Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs; • Fulfilment of information disclosure obligations in accordance with regulations.

Prinsip GCG Principles of Corporate Governance	Penjelasan Berdasarkan POJK No. 48 Tahun 2024 Explanation Based on POJK No. 48 of 2024	Penerapan di Perseroan Implementation at the Company
Independensi Independence	Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional, bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. The Company is managed independently and professionally, free from conflicts of interest and from influence or pressure from any party that is inconsistent with legal and ethical standards.	• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar organ Perseroan; • Pemegang Saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan senantiasa menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. • Mutual respect for the rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among the Company's governing bodies; • Shareholders and the Board of Commissioners do not interfere in the management of the Company; • The Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees consistently avoid conflicts of interest in decision-making.
Kewajaran Fairness	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai perjanjian, peraturan perundang-undangan, serta nilai etika dan standar yang berlaku. Equality, balance, and justice in fulfilling the rights of stakeholders in accordance with agreements, laws and regulations, as well as applicable ethical values and standards.	• Pemberian hak yang sama kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); • Upaya menciptakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan sesuai dengan kemampuan Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. • Granting equal rights to all shareholders to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS); • Efforts to create a good, safe work environment that aligns with the Company's capabilities and applicable laws and regulations.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 Perseroan tetap konsisten menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di berbagai bidang. Penerapan tersebut diwujudkan melalui sejumlah inisiatif berikut:

1. Perseroan aktif sebagai anggota dalam sistem pendaftaran aset guna mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Langkah ini merupakan bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi sekaligus pemenuhan kewajiban regulasi.
2. Perseroan menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada publik secara transparan, sehingga pemangku kepentingan memperoleh akses terhadap data yang relevan dan akurat.
3. Perseroan menegakkan budaya disiplin dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, Perseroan telah memiliki serta menjalankan kebijakan *anti-fraud*, termasuk sistem pelaporan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Perseroan menginternalisasi prinsip *FAST FRIENDLY* sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja di lingkungan perusahaan.
5. Perseroan menyelenggarakan program pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Overall, in 2025 the Company continued to demonstrate a consistent commitment to the implementation of GCG principles across various areas. This commitment was realized through the following initiatives:

1. The Company actively participates in the asset registration system to prevent double financing. This step represents a commitment to transparency and compliance with regulatory obligations.
2. The Company discloses both financial and non-financial information to the public in a transparent manner, thereby ensuring that stakeholders have access to relevant and accurate data.
3. The Company upholds a culture of discipline and compliance at all levels of the organization through the signing of an Integrity Pact by all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In addition, the Company has established and implemented anti-fraud policies, including a reporting system in accordance with applicable regulations.
4. The Company has internalized the *FAST FRIENDLY* principles as core values that serve as guidelines for behavior and work culture within the company.
5. The Company conducts training programs on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction (AML-CFT and CPF) for employees to enhance awareness and compliance with regulations.



6. Perseroan melaksanakan pelatihan *Fraud Awareness* bagi seluruh karyawan serta *refreshment training* khusus bagi tim *Collection* terkait proses eksekusi aset, guna memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mencegah serta menangani potensi *fraud*.
7. Perseroan terus memperkuat sistem pengendalian internal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, efektivitas operasional, dan keberlanjutan usaha.
6. The Company conducts Fraud Awareness training for all employees as well as specialized refresher training for the Collection team regarding asset execution processes, to strengthen understanding and skills in preventing and addressing potential fraud levant and accurate data.
7. The Company continues to strengthen its internal control system as part of its efforts to maintain integrity, operational effectiveness, and business sustainability.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Assessment

Untuk memastikan efektivitas kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta memperkuat komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan praktik bisnis yang beretika, Perseroan secara konsisten melaksanakan penilaian GCG setiap tahun.

Penilaian GCG dilakukan melalui metode *self-assessment* yang berlandaskan pada ketentuan regulator, yaitu:

1. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
4. PADK No. 48 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. SEOJK No. 28 Tahun 2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Perseroan secara berkala meninjau pelaksanaan GCG, dan Perseroan terus melakukan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh di setiap lini bisnis, termasuk di antaranya perbaikan kualitas aset, dan perbaikan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Perseroan juga terus melakukan evaluasi dan pembaruan berbagai kebijakan internal mencakup manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, aktivitas pembiayaan, dan tata kelola teknologi informasi, agar selaras dengan ketentuan OJK serta standar industri terkini.

To ensure the effectiveness of the Corporate Governance framework, identify areas for improvement, and strengthen the Company's commitment to regulatory compliance and ethical business practices, the Company consistently conducts an annual Good Corporate Governance (GCG) assessment.

The GCG assessment is conducted through a self-assessment method based on regulatory provisions, namely:

1. POJK No. 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
2. POJK No. 28/POJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions.
3. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
4. PADK No. 48 of 2025 on the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
5. SEOJK No. 28 of 2025 on Reports on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

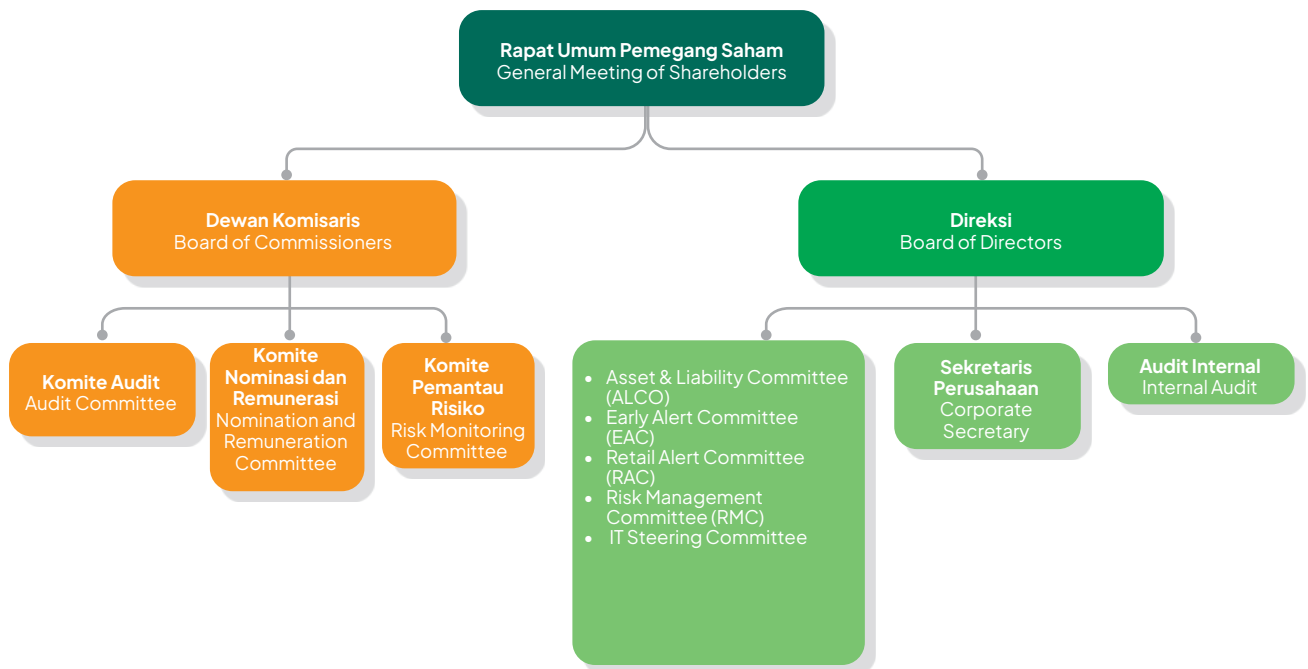
The Company regularly reviews the implementation of corporate governance, and continues to implement comprehensive improvement measures across all business lines, including asset quality improvements and the development of a more effective and efficient organizational structure. The Company also continues to evaluate and update various internal policies covering risk management, compliance, internal controls, financing activities, and information technology governance, to ensure they are in line with OJK regulations and the latest industry standards.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Praktik GCG di Perseroan didukung dengan struktur tata kelola yang terintegrasi, yang memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Struktur ini mencerminkan pemisahan peran antara organ pengawas dan organ pengelola, serta dilengkapi dengan komite-komite dan unit kerja yang mendukung pengambilan keputusan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Struktur tata kelola Perseroan ditampilkan dalam bagan berikut:



The Company's GCG practices are supported by an integrated governance structure that ensures oversight and management functions are carried out effectively, transparently, and accountably. This structure reflects the separation of roles between the supervisory and management bodies, and is complemented by committees and operational units that support decision-making in accordance with the principles of prudence and regulatory compliance.

The Company's corporate governance structure is illustrated in the following chart:

Struktur GCG Perseroan terbentuk dari organ utama dan organ pendukung yang saling melengkapi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, organ utama terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dengan kewenangan menetapkan arah kebijakan, menyetujui laporan tahunan, menentukan penggunaan laba, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga menjadi forum utama bagi pemegang saham untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan persetujuan atas keputusan strategis Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, yang didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Ketiga komite tersebut mendukung efektivitas pengawasan,

The Company's corporate governance structure consists of primary and supporting bodies that complement one another. In accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies in Indonesia, the primary bodies consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body with the authority to set policy direction, approve annual reports, determine the use of profits, and appoint and remove members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS also serves as the primary forum for shareholders to voice their concerns and approve the Company's strategic decisions.

The Board of Commissioners performs independent oversight functions, supported by the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. These three committees support



khususnya dalam aspek kepatuhan, penerapan tata kelola, dan pengendalian risiko.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didukung oleh sejumlah komite internal, antara lain *Asset & Liability Committee* (ALCO), *Early Alert Committee* (EAC), *Retail Alert Committee* (RAC), *Risk Management Committee* (RMC), dan *IT Steering Committee*. Selain itu, terdapat fungsi Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal yang berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

the effectiveness of oversight, particularly in the areas of compliance, governance implementation, and risk control.

The Board of Directors is responsible for operational management and day-to-day business decision-making. In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by a number of internal committees, including the Asset & Liability Committee (ALCO), Early Alert Committee (EAC), Retail Alert Committee (RAC), Risk Management Committee (RMC), and IT Steering Committee. In addition, the Corporate Secretary and Internal Audit functions play a crucial role in maintaining transparency, accountability, and the effectiveness of the internal control system.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bagian tertinggi Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS juga menjadi wadah untuk para pemegang saham mengambil keputusan-keputusan penting.

Perseroan dapat menyelenggarakan 2 (dua) jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang wajib diselenggarakan secara rutin setiap tahun, dan selain itu jika sewaktu-waktu diperlukan, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Kewenangan yang dimiliki RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, di antaranya:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.
3. Mengambil keputusan menyangkut Perseroan, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
4. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta membuat penawaran pekerjaan dan memodifikasi pekerjaan untuk level General Manager di Perseroan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body of the Company and holds authority not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors, within the limits specified by law and/or the Company's Articles of Association. The GMS also serves as a forum for shareholders to make important decisions.

The Company may hold two (2) types of General Meetings of Shareholders (GMS): the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which must be held regularly every year; and, if necessary at any time, the Company may hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

The authorities vested in the GMS as the highest governing body of the Company include the following:

1. To approve and ratify the Annual Report, including the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and to grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the relevant financial year.
2. To determine the appropriation of the Company's net profit.
3. To make decisions concerning the Company, including amendments to the Articles of Association, mergers, consolidations, acquisitions, spin-offs, dissolution, and liquidation of the Company.
4. To appoint and/or change the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as well as to approve employment offers and modifications for the General Manager level within the Company.

5. Menetapkan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, termasuk pembayaran pesangon untuk level *General Manager*.
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
7. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik terdaftar.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. To determine the remuneration of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, including severance payments for the General Manager level.
6. To grant approval for transactions involving conflicts of interest.
7. To appoint the Public Accounting Firm (KAP) and the registered Public Accountant.
8. To decide on other actions in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025

Perseroan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di tahun 2025. Informasi lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025 dilakukan melalui mekanisme Pembuatan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Juni 2025, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 39 tanggal 19 Juni 2025, dibuat di hadapan Hanum Megasari, S.H., M.Kn. Pada RUPST tersebut, para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

General Meeting of Shareholders in 2025

The Company held both an Annual GMS and an Extraordinary GMS in 2025. Detailed information is presented as follows:

Annual GMS

The 2025 Annual GMS was conducted through a Circular Resolution of the Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia in lieu of the Annual General Meeting of Shareholders dated 17 June 2025, as set forth in the Deed of Circular Resolution of the Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia in lieu of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39 dated 19 June 2025, drawn up before Hanum Megasari, S.H., M.Kn. At the AGMS, the shareholders adopted resolutions as presented in the following table:

No.	Keputusan RUPS Tahunan 2025 Resolutions of the 2025 Annual General Meeting	Realisasi Keputusan Implementation Decision
1.	Menerima dan menyetujui laporan tahunan/kinerja dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ("Laporan Tahunan"). To accept and approve the Company's Annual Report/performance report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 ("Annual Report").	Terealisasi di tahun 2025 Realized in 2025
2.	Mengesahkan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan. To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2024, as contained in the Annual Report.	Terealisasi di tahun 2025 Realized in 2025
3.	Berdasarkan laporan keuangan Perseroan, menetapkan bahwa Rugi Bersih Setelah Pajak ("RBSP") Perseroan tahun buku 2024 adalah sebesar Rp284.812.324.488 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah). Based on the Company's financial statements, to determine that the Company's Net Loss After Tax ("NLAT") for the financial year 2024 amounted to Rp284,812,324,488 (two hundred eighty-four billion eight hundred twelve million three hundred twenty-four thousand four hundred eighty-eight Rupiah).	Terealisasi di tahun 2025 Realized in 2025
4.	Menerima dan memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan. To accept and approve the report on the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility for the financial year ended December 31, 2024, as contained in the Annual Report.	Terealisasi di tahun 2025 Realized in 2025



No.	Keputusan RUPS Tahunan 2025 Resolutions of the 2025 Annual General Meeting	Realisasi Keputusan Implementation Decision
5.	Memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasannya dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya, yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024, demikian sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024. To grant full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements for the financial year 2024.	Terealisasi di tahun 2025 Realized in 2025

RUPS Luar Biasa

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan beberapa RUPS Luar Biasa melalui mekanisme Pembuatan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam beberapa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Hanum Megasari, S.H., M.Kn.

Seluruh keputusan yang dihasilkan telah direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2025. Tabel berikut menyajikan informasi rinci keputusan RUPS Luar Biasa sepanjang tahun 2025, antara lain:

Extraordinary GMS

Throughout 2025, the Company conducted several Extraordinary GMS through the Circular Resolution mechanism of the Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The resolutions of such EGMS have been set forth in several Deeds of Shareholders' Resolutions drawn up before Notary Hanum Megasari, S.H., M.Kn.

All resolutions adopted have been fully implemented in 2025. The following table presents detailed information on the resolutions of the EGMS throughout 2025, among others:

No.	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Resolutions of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders	Realisasi Keputusan Implementation Decision
1.	Pengangkatan kembali Bapak Benny Redjo Setyono dalam jabatannya selaku Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan 3 tahun, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2028. The reappointment of Mr. Benny Redjo Setyono to his position as a member of the Company's Board of Commissioners for a term of three (3) years, effective from 15 February 2025 until 14 February 2028.	Terealisasi di Februari tahun 2025 Realized in February 2025
2.	Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk memodifikasi ruang lingkup pekerjaan Direksi (dalam hal ini jabatan dari Bapak Kazuhiro Inoue selaku Direktur Utama dan jabatan dari Tuan Handoko selaku Direktur Perseroan). To grant approval to the Board of Directors to modify the scope of duties of the Board, specifically the position of Mr. Kazuhiro Inoue as President Director and Mr. Handoko as Director of the Company.	Terealisasi di Maret tahun 2025 Realized in March 2025
3.	a. Menerima pengunduran diri Ibu Gestik Dwi Puji Marhaeningsih dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. b. Memberikan pembebasan dan pelepasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Ibu Gestik Dwi Puji Marhaeningsih atas peran sertanya kepada Perseroan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan- tindakannya tercermin dalam buku Perseroan dan tindakan-tindakannya tidak bertentangan dengan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. a. To accept the resignation of Ms. Gestik Dwi Puji Marhaeningsih from her position as Director of the Company. b. To grant full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to Ms. Gestik Dwi Puji Marhaeningsih for her service to the Company during her tenure, provided that her actions are reflected in the Company's books and do not conflict with or violate applicable laws and regulations.	Terealisasi di Mei 2025 Realized in May 2025
4.	Mengangkat Bapak Yimmy Weddianto selaku Direktur Perseroan. To appoint Mr. Yimmy Weddianto as Director of the Company.	Terealisasi pada November 2025 Realized in November 2025

No.	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Resolutions of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders	Realisasi Keputusan Implementation Decision
5.	a. Menetapkan penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG); b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan diketahui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut, termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2025. a. To approve the engagement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Partners (KPMG); b. To authorize the Company's Board of Directors, with the knowledge of the Board of Commissioners, to determine the professional fees and other terms of such appointment, including the appointment of the partner in charge of the audit of the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025.	Terealisasi pada Oktober 2025 Realized in October 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, pelaksanaan RUPS Tahunan dilakukan melalui mekanisme Pembuatan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2024, yang menghasilkan 7 (tujuh) keputusan dan seluruhnya telah direalisasikan di tahun 2024.

Di samping itu, Perseroan juga melaksanakan RUPSLB melalui mekanisme Pembuatan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menghasilkan 10 (sepuluh) keputusan dan seluruhnya telah direalisasikan di tahun 2024.

General Meeting of Shareholders in the Previous Year

In 2024, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was conducted through a Circular Resolution of the Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia in lieu of the Annual General Meeting of Shareholders dated 24 June 2024, resulting in 7 (seven) resolutions, all of which were fully implemented in 2024.

In addition, the Company also conducted an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) through a Circular Resolution mechanism in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which resulted in 10 (ten) resolutions, all of which were fully implemented in 2024.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki peran penting dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi agar kepentingan Perseroan dapat tercapai sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Kehadiran komite-komite ini memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sehingga pengawasan dan pemberian nasihat dapat dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan sejalan dengan prinsip GCG.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh

The Board of Commissioners is a corporate body that plays a vital role in the implementation of Good Corporate Governance (GCG). In accordance with the provisions of the Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for conducting general and specific oversight and providing advice to the Board of Directors to ensure that the Company's interests are achieved in accordance with its established vision and objectives. In carrying out these oversight and advisory functions, the Board of Commissioners receives support from the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. The presence of these committees strengthens the effectiveness of the Board of Commissioners' duties, ensuring that oversight and advisory functions are carried out comprehensively, measurably, and in line with GCG principles.

Procedures for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders through the GMS, taking into account recommendations from the Nomination and



anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2025 telah mengikuti *fit & proper test* dan dinyatakan lulus oleh OJK. Perseroan memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Dewan Komisaris, dan peraturan terkait lainnya.

RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut. Perseroan juga menerapkan kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terbukti terlibat dalam tindak kejahatan keuangan, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan penerapan prinsip GCG.

Masa Jabatan dan Komposisi Dewan Komisaris [IDX G-03]

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat kembali diangkat oleh pemegang saham melalui prosedur nominasi yang berlaku. Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut, pengangkatan kembali dimungkinkan dengan syarat tetap memenuhi kriteria independensi serta menyampaikan pernyataan independensi kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 diuraikan pada tabel berikut ini:

Remuneration Committee. All members of the Board of Commissioners serving in 2025 have undergone the fit and proper test and have been declared to have passed by the Financial Services Authority (OJK). The Company ensures that each member of the Board of Commissioners meets the qualifications and criteria set out in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners Charter, and other relevant regulations.

The GMS may dismiss members of the Board of Commissioners at any time in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, members of the Board of Commissioners have the right to resign from their positions, and the Company is required to convene a GMS to decide upon such resignation. The Company also implements a resignation policy for members of the Board of Commissioners who are proven to be involved in financial crimes, as part of its commitment to integrity and the implementation of GCG principles.

Term of Office and Composition of the Board of Commissioners [IDX G-03]

Members of the Company's Board of Commissioners are appointed for a term of three (3) years from the date of their respective appointment. Upon the expiry of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the shareholders through the applicable nomination procedures. For Independent Commissioners who have served for two (2) consecutive terms, reappointment is permissible provided that they continue to meet the independence criteria and submit a statement of independence to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2025, is set forth in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i> Fit & Proper Test Approval Date and Reference Number	Masa Jabatan Term of Office
Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama Chairman of the Board	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Juni 2024. Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 26, 2024.	6 Juni 2024 June 6, 2024 No. KEP-258/PL.02/2024	2024–2027
Chihiro Ushigome ¹⁾	Komisaris Commissioner	Surat keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 24 Januari 2024. Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024.	20 November 2023 November 20, 2023 No. KEP-157/PL.02/2023	2024–2027

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test Fit & Proper Test Approval Date and Reference Number	Masa Jabatan Term of Office
Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Januari 2025. Circular Resolution of the Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 27, 2025.	16 Desember 2021 December 16, 2021 No. KEP-835/NB.11/2021	2025–2028
Josaphat Budisatyawira ²⁾	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Januari 2023. Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 27, 2023.	10 Februari 2017 February 10, 2017 No. KEP-50/NB.11/2017	2023–2026
Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Januari 2024. Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024	27 November 2023 November 27, 2023 No. KEP-185/PL.02/2023	2024–2027

Keterangan:

- 1) Chihiro Ushigome mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.
2) Masa jabatan Josaphat Budisatyawira telah berakhir secara efektif pada 9 Februari 2026.

Notes:

- 1) Chihiro Ushigome resigned effectively on February 28, 2026.
2) Josaphat Budisatyawira's term of office effectively ended on February 9, 2026.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris [IDX G-01]

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris mencerminkan kombinasi karakteristik baik dari sisi kelembagaan maupun individu yang menduduki posisi tersebut. Keberagaman ini tampak dalam aspek usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan variasi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga mampu mendukung efektivitas pengambilan keputusan serta memastikan fungsi pengawasan dijalankan secara menyeluruh dan berimbang.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners [IDX G-01]

Diversity in the composition of the Board of Commissioners reflects a combination of characteristics—both institutional and individual—of those holding these positions. This diversity is evident in terms of age, gender, nationality, educational background, and work experience relevant to the performance of oversight and advisory functions to the Board of Directors. The composition of the Board of Commissioners is determined by taking into account a variety of expertise, knowledge, and experience, thereby supporting effective decision-making and ensuring that oversight functions are carried out comprehensively and in a balanced manner.



Profil keberagaman anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

The diversity profile of the Board of Commissioners as of December 31, 2025 can be found in the following table:

Aspek Aspect	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Diversity in the Composition of the Board of Commissioners
Usia Age	Rentang usia antara 41 hingga 64 tahun Age range 41 to 64 years
Jenis Kelamin Gender	Seluruh anggota Dewan Komisaris berjenis kelamin pria All members of the Board of Commissioners are male
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Jepang; Comprising 3 Indonesian nationals and 2 Japanese nationals
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Diploma hingga Magister, dengan bidang studi Hukum, Ekonomi, Manajemen, Informatika, dan Bisnis Holding degrees ranging from diplomas to master's degrees in Law, Economics, Management, Computer Science, and Business
Pengalaman Kerja Work Experience	Jabatan manajerial dan eksekutif di sektor keuangan, otomotif, manufaktur, konsultasi strategis, serta bisnis internasional Holding managerial and executive positions in the financial, automotive, manufacturing, strategic consulting, and international business sectors

Informasi lebih rinci mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada Bab Profil Perusahaan, subbab Profil Dewan Komisaris.

More detailed information regarding the profiles of each member of the Board of Commissioners is provided in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.

Piagam Dewan Komisaris

Perseroan telah menyusun Pedoman Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris atau BOC Charter) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pedoman Dewan Komisaris Perseroan secara umum mencakup ketentuan mengenai:

1. Prosedur Pengangkatan/Pemilihan dan Pemberhentian/ Pengunduran Diri Dewan Komisaris
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Komisaris Independen;
4. Rapat Dewan Komisaris;
5. Penilaian Kinerja.

Piagam Dewan Komisaris ditinjau secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan arah strategis Perseroan serta perkembangan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2025 Piagam Dewan Komisaris mengalami pembaruan yang mulai berlaku sejak 1 Desember 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perseroan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dilaporkan kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada

Board of Commissioners' Charter

The Company has established the Board of Commissioners Guidelines (Board of Commissioners Charter or BOC Charter), which serves as the foundation for the performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners Guidelines generally cover provisions regarding:

1. Procedures for the Appointment/Election and Dismissal/ Resignation of the Board of Commissioners;
2. Duties and Responsibilities;
3. Independent Commissioners;
4. Board of Commissioners Meetings;
5. Performance Evaluation.

The Board of Commissioners Charter is reviewed periodically to ensure alignment with the Company's strategic direction and applicable regulatory developments. In 2025, the Board of Commissioners Charter was updated and became effective as of December 1, 2025.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors as the executive body of the Company, whose duties, responsibilities, and authorities are reported to the Shareholders. The Board of Commissioners supervises management policies and the general conduct of the Company's management, both in relation to the Company and its business operations, and

Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, Regulasi, dan Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
3. Mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;
5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
6. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
7. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik;
8. Komisaris Independen melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitor, penerimaan dana, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
9. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
10. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
11. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
12. Meneliti dan menelaah rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang yang telah dibuat oleh Direksi;
13. Dewan Komisaris wajib membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis;
14. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
15. Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Perseroan wajib membentuk:

provides advice to the Board of Directors. Such supervision and advisory functions are carried out in the best interest of the Company and in accordance with its objectives and purposes.

In performing its duties and responsibilities, the scope of work of the Board of Commissioners, based on applicable laws and regulations, regulatory requirements, and the Company's Articles of Association, includes the following:

1. Performing supervisory duties and providing advice to the Board of Directors;
2. Performing duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence;
3. Supervising management policies and the overall conduct of management carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with its objectives and purposes;
4. Directing, monitoring, and evaluating the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance, risk management, compliance, and internal audit;
5. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Auditors, OJK supervisory results, and/or other authorities and regulatory bodies;
6. Supervising the Board of Directors in maintaining a balance of interests among all stakeholders;
7. Monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance within the Company.;
8. Independent Commissioners perform supervisory functions to represent the interests of debtors, fund recipients, creditors, fund providers, venture capital investors, and/or other stakeholders;
9. The Board of Commissioners is required to report to the Financial Services Authority (OJK) no later than 10 (ten) business days upon discovery of:
 - a. Violations of laws and regulations in the financing sector; and/or
 - b. Conditions or potential conditions that may endanger the continuity of the Company's business.
10. Performing duties specifically assigned under the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
11. Providing opinions and recommendations in line with its supervisory function to the GMS on any other matters deemed important for the management of the Company;
12. Reviewing and examining the annual work plan and annual budget for the forthcoming financial year prepared by the Board of Directors;
13. The Board of Commissioners is required to prepare a Business Plan Supervision Report;
14. Reviewing and examining the annual report prepared by the Board of Directors and signing such report.;
15. In supporting the execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish:



- a. Komite Audit.
 - b. Komite Pemantau Risiko.
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - d. Komite lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
16. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada penerapan manajemen risiko paling kurang meliputi: Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- a. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
 - b. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
17. Pengawasan aktif Dewan Komisaris pada penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) paling kurang meliputi:
- a. Memastikan Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur penetapan program APU, PPT, dan PPSPM;
 - b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPSPM; dan
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
19. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan akan berlaku pula baginya.
20. Dalam hal penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup paling sedikit:
- a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan teknologi informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- a. Audit Committee;
 - b. Risk Monitoring Committee;
 - c. Nomination and Remuneration Committee;
 - d. Other committees to support the implementation of the Board of Commissioners' duties.
16. The authorities and responsibilities of the Board of Commissioners in risk management implementation include at least: Approving and evaluating the Risk Management Policy;
- a. Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of risk management policies at least once a year and at any time when there are factors that significantly affect business activities;
 - b. Evaluating and approving requests from the Board of Directors related to transactions and risk limits requiring Board of Commissioners' approval.
17. Active supervision of the Board of Commissioners in the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction (CPF) programs includes at least:
- a. Ensuring the Company has policies and procedures for the implementation of AML-CFT and CPF programs;
 - b. Approving policies and procedures for the implementation of AML-CFT and CPF programs proposed by the Board of Directors;
 - c. Evaluating policies and procedures for the implementation of AML-CFT and CPF programs;
 - d. Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities in relation to AML-CFT and CPF programs; and
 - e. Ensuring discussions on the implementation of AML-CFT and CPF programs are conducted in meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
18. The Board of Commissioners is required to temporarily manage the Company in the event that all members of the Board of Directors are suspended or the Company has no members of the Board of Directors. In such circumstances, the Board of Commissioners may delegate temporary authority to one or more of its members at the responsibility of the Board of Commissioners;
19. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities granted to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners under the Company's Articles of Association shall also apply to such member;
20. In relation to the use of information technology, the Board of Commissioners has at least the following authorities and responsibilities:
- a. Evaluating, directing, and monitoring information technology development plans and related policies;
 - b. Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of risk management in the use of information technology.

21. Dalam hal penerapan strategi anti *fraud* Dewan Komisaris memastikan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti *fraud* di Perseroan;
22. Dewan Komisaris turut juga mengarahkan dan memantau:
 - a. Rencana strategis pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM
 - b. Pelaksanaan tata kelola dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM.

Komisaris Independen [IDX G-01]

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris lainnya. Per 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan 2 (dua) di antaranya menjabat sebagai Komisaris Independen. Dengan proporsi 40% Komisaris Independen, Perseroan telah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan OJK, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari total anggota Dewan Komisaris.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen yang menjabat saat ini, yaitu Alip, telah dinyatakan memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan selaras dengan Pasal 49 POJK No. 48 Tahun 2024. Persyaratan independensi Komisaris Independen tersebut, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi pada Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan operasional Perseroan, termasuk dalam hal proses pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK.
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.

21. In relation to the implementation of anti-fraud strategies, the Board of Commissioners ensures active supervision over the implementation of the Company's anti-fraud strategy;
22. The Board of Commissioners also directs and monitors:
 - a. The strategic plan for facilitating access to financing for MSMEs;
 - b. The implementation of governance in facilitating access to MSME financing.

Independent Commissioners [IDX G-01]

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no affiliation with shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners. As of December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners consists of 5 (five) members, of whom 2 (two) serve as Independent Commissioners. With a proportion of 40% Independent Commissioners, the Company has complied with the minimum requirement set by the Financial Services Authority (OJK), which is at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Statement of Independence of Independent Commissioners

The current Independent Commissioner, Alip, has been declared to meet the independence requirements as stipulated in the Board of Commissioners Charter and in accordance with Article 49 of POJK No. 48/POJK.03/2024. The independence requirements for Independent Commissioners are as follows:

1. Not a person who has worked or held authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six (6) months, except for reappointment as Independent Commissioner for the subsequent term.
2. Does not directly or indirectly own shares in the Company.
3. Has no affiliation with the Company, shareholders, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors.
4. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities that may affect the ability to act independently in performing supervisory functions, including in decision-making processes, as regulated under GCG provisions for financing companies and OJK regulations.
5. Has not served as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or held a position one level below the Board of Directors in the Company or any affiliated company within the last six (6) months.



6. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
7. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
8. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kegiatan usaha, profil perusahaan, struktur organisasi, serta kerangka GCG. Selain itu, program orientasi juga mencakup penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta memperkenalkan anggota baru kepada personel kunci di seluruh organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.

Saat ini, Perseroan belum memiliki kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai program orientasi bagi Dewan Komisaris.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program orientasi karena tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat. Pemegang Saham menetapkan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Dasar Kebijakan

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris, yang juga selaras dengan Pasal 51 POJK No. 48 Tahun 2024.

Kebijakan mengenai Rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Dewan Komisaris bisa mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Persetujuan yang demikian itu dapat pula dibuat dalam bentuk *counterpart*. Keputusan yang

6. Has an understanding of applicable laws and regulations related to corporate matters and other relevant regulatory provisions.
7. Has sound knowledge of the Company's financial condition.
8. Is an Indonesian citizen and domiciled in Indonesia.

Orientation Program for Newly Appointed Members of the Board of Commissioners

The Company, through the Corporate Secretary, conducts an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. The program aims to provide a comprehensive understanding of the Company's business activities, corporate profile, organizational structure, and GCG framework. In addition, the orientation program includes explanations of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and introduces new members to key personnel across the organization to support the effective execution of their duties.

Currently, the Company does not have a specific written policy governing the orientation program for members of the Board of Commissioners.

In 2025, the Company did not conduct an orientation program as there were no newly appointed members of the Board of Commissioners. The shareholders reappointed members of the Board of Commissioners whose terms of office expired in that year.

Board of Commissioners' Meeting

Policy Basis

The implementation of Board of Commissioners Meetings is conducted in accordance with the provisions stipulated in the Board of Commissioners Charter, which is also aligned with Article 51 of POJK No. 48/POJK.03/2024.

The policies regarding Board of Commissioners Meetings include the following:

1. The Board of Commissioners is required to hold periodic meetings at least once every two (2) months.
2. Board of Commissioners Meetings may be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
3. Members of the Board of Commissioners are required to attend at least 75% of the total Board of Commissioners Meetings within a one year period.
4. The Board of Commissioners may adopt valid resolutions without convening a meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing, have provided approval on the proposed resolution, and have signed such approval. Such approval may also be executed in counterpart forms. Resolutions adopted in this manner have the same legal force as resolutions adopted

diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

5. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan mengikat apabila 3 (tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
8. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
9. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

in a duly convened Board of Commissioners Meeting.

5. A Board of Commissioners Meeting is deemed valid and binding if attended or represented by 3 (three) members of the Board of Commissioners.
6. Resolutions of the Board of Commissioners Meeting shall be adopted by consensus. In the event that consensus cannot be reached, resolutions shall be determined by voting based on a majority of more than one-half (1/2) of the valid votes cast in the meeting.
7. In the event of a tie vote, the Chair of the Board of Commissioners Meeting shall have the deciding vote.
8. The results of the Board of Commissioners Meetings shall be recorded in minutes of meeting signed by all attending members of the Board of Commissioners and properly documented.
9. Any dissenting opinions arising in the Board of Commissioners Meetings shall be clearly recorded in the minutes of meeting, including the reasons for such dissent.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran di 2025 [IDX G-02]

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan di tahun 2025 dengan frekuensi sebanyak 6 kali. Informasi tingkat kehadiran anggota dalam rapat yang diselenggarakan pada tahun 2025, diuraikan pada tabel berikut:

Meeting Frequency and Attendance in 2025 [IDX G-02]

Board of Commissioners Meetings were held 6 times during 2025. Information regarding the attendance of members at meetings held during 2025 is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran: Attendance Rate
Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%
Chihiro Ushigome	Komisaris Commissioners	6	6	100%
Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioners	6	5	83%
Josaphat Budisatyawira	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%



Agenda Rapat Tahun 2025

Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
23 Januari 2025 January 23, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners
24 Maret 2025 March 24, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners
22 Mei 2025 May 22, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners
24 Juli 2025 July 24, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners
25 September 2025 September 25, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners
26 November 2025 November 26, 2025	Pembahasan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Discussion of the performance of Committees under the Board of Commissioners

Meeting Agenda in 2025

The Board of Commissioners' meetings convened in 2025 discussed a number of agendas, as outlined in the following table:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik. Seluruh keputusan pemegang saham ditetapkan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yang berlaku sebagai pengganti RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertulis dan telah memperoleh persetujuan serta tanda tangan dari seluruh pemegang saham. Dengan mekanisme tersebut, Dewan Komisaris tetap terlibat dalam setiap keputusan strategis, sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJKE.2]

Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan program pengembangan kompetensi terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, serta partisipasi dalam forum industri yang relevan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman atas prinsip keuangan berkelanjutan sesuai ketentuan OJK dan praktik terbaik internasional. Program tersebut diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, serta karyawan Perseroan, sehingga mendukung kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan maupun proses bisnis secara konsisten dan terukur.

Attendance of the Board of Commissioners at the 2025 General Meeting of Shareholders

Throughout 2025, the Company did not hold any in-person General Meetings of Shareholders (GMS). All shareholder decisions were made through a Circular Resolution mechanism, which served as a substitute for both the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The decision-making process was conducted in writing and has received the approval and signatures of all shareholders. Through this mechanism, the Board of Commissioners remains involved in every strategic decision, thereby ensuring that its supervisory function is carried out optimally while ensuring compliance with applicable legal provisions.

Competency Development in Sustainable Finance Implementation [OJKE.2]

The Company continuously implements competency development programs related to the implementation of sustainable finance. These activities are carried out through training, outreach, and participation in relevant industry forums, with the aim of enhancing understanding of sustainable finance principles in accordance with OJK regulations and international best practices. The program is attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Corporate Secretary, and the Company's employees, thereby supporting the organization's ability to consistently and measurably integrate environmental, social, and governance aspects into policies and business processes.

Informasi rinci mengenai pengembangan kompetensi pada setiap level organisasi telah disajikan dalam pembahasan khusus mengenai pengembangan kompetensi pada subbab masing-masing organ perusahaan. Penyajian tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk kegiatan, cakupan materi, serta keterlibatan setiap organ dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris [IDX G-05]

Dasar Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen untuk mendukung anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan wawasan yang relevan dengan tugas serta tanggung jawab pengawasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap program pelatihan, seminar, *workshop*, *short course*, serta forum *sharing knowledge* yang berfokus pada praktik GCG, regulasi pasar modal, manajemen risiko, dan penerapan keuangan berkelanjutan.

Kebijakan ini mencakup penyusunan rencana pengembangan yang terstruktur, pemilihan materi sesuai kebutuhan pengawasan, serta keterlibatan aktif anggota Dewan Komisaris dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Pelaksanaan Program pada Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memfasilitasi anggota Dewan Komisaris dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Informasi rinci mengenai pelaksanaan program yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tema Theme
1.	Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama President Commissioner	6 Mei 2025 May 6, 2025	APPI	Seminar Nasional: <i>Will Trade War Create Financial Turnmoil</i> National Seminar : Will Trade War Create Financial Turnmoil
2.	Josaphat Budisatyawira	Komisaris Independen Independent Commissioner	11 Juli 2025 July 11, 2025	APPI	International seminar: <i>Global, ASEAN, and Indonesia Challenges to Indonesia Economy</i>
			17 Januari 2025 January 17, 2025	OJK Institute	<i>How to Achieve Peak Performance in 2025</i>
3.	Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner	4 Februari 2025 February 4, 2025	APPI	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK's Policy Directions for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy
4.	Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioner	2 September 2025 September 2, 2025	APPI	Seminar Online: <i>Economic Outlook 2026</i>
5.	Chihiro Ushigome	Komisaris Commissioner	4 Juli 2025 July 4, 2025	APPI	Keuangan Berkelanjutan dan Penerapannya di Perusahaan Sustainable Finance and Its Application in Financing Companies

Detailed information regarding competency development at each organizational level is presented in specific discussions on competency development within the respective subsections for each corporate body. This presentation provides a clearer picture of the nature of activities, the scope of materials, and the involvement of each body in supporting the comprehensive implementation of sustainable finance.

Training and Competency Development Program of the Board of Commissioners [IDX G-05]

Policy Basis

The Company is committed to supporting members of the Board of Commissioners in enhancing their competencies, knowledge, and insights relevant to their oversight duties and responsibilities. This support is realized through the provision of access to training programs, seminars, workshops, short courses, and knowledge-sharing forums focused on good corporate governance (GCG) practices, capital market regulations, risk management, and the implementation of sustainable finance.

This policy includes the development of a structured development plan, the selection of materials tailored to supervisory needs, and the active participation of Board of Commissioners members in various training and competency development programs.

Program Implementation in 2025

Throughout 2025, the Company facilitated various training and competency development programs for members of the Board of Commissioners. Detailed information regarding the programs attended by members of the Board of Commissioners during 2025 is presented in the following table:



Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Pendukung

Prosedur Penilaian Kinerja

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris didukung oleh tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Setiap komite melaksanakan *self-assessment* kinerja secara berkala setiap tahun untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada para pemegang saham melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja komite dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sepanjang tahun buku, kesesuaian kompetensi anggota dengan bidang pengawasan yang dijalankan, serta tingkat kehadiran dalam rapat sebagai ukuran komitmen terhadap peran yang diemban. Selain itu, kualitas pelaporan kepada Dewan Komisaris juga menjadi aspek penting, mencakup kejelasan, ketepatan waktu, dan transparansi dalam menyampaikan hasil kajian maupun rekomendasi. Melalui penerapan kriteria tersebut, Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa setiap komite menjalankan fungsinya secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan praktik GCG.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan pengawasan atas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Komite juga memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas audit internal dan eksternal, sehingga mendukung keandalan informasi keuangan Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi dalam memberikan rekomendasi mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, komite juga melakukan evaluasi terhadap proses nominasi dan pengembangan kompetensi, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan praktik GCG.

Komite Pemantau Risiko aktif melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemantauan atas profil risiko Perseroan. Sepanjang tahun 2025, komite memberikan masukan terkait strategi mitigasi risiko, termasuk risiko operasional, keuangan, dan kepatuhan, sehingga mendukung keberlanjutan usaha dan ketahanan Perseroan terhadap dinamika eksternal.

Board of Commissioners' Assessment of the Performance of Supporting Committees

Performance Assessment Procedure

The execution of the Board of Commissioners' duties is supported by three committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. Each committee conducts an annual self-assessment to evaluate the effectiveness of its duties and responsibilities. The results of such assessment are reported to the Board of Commissioners and subsequently submitted to shareholders through the Board of Commissioners' Supervisory Report as part of the accountability mechanism.

Performance Assessment Criteria

The performance assessment of the committees is conducted by taking into account the annual performance achievements, the alignment of members' competencies with their respective supervisory functions, and attendance levels in meetings as an indicator of commitment to their roles. In addition, the quality of reporting to the Board of Commissioners is also an important aspect, including clarity, timeliness, and transparency in presenting review results and recommendations. Through the application of these criteria, the Board of Commissioners ensures that each committee performs its functions consistently, accountably, and in alignment with GCG practices.

Results of Committee Performance Assessment in 2025

Throughout 2025, the Audit Committee carried out supervision over financial reporting, the effectiveness of the internal control system, and regulatory compliance. The Committee also provided recommendations to enhance the quality of both internal and external audits, thereby supporting the reliability of the Company's financial information.

The Nomination and Remuneration Committee performed its function by providing recommendations on the structure, policies, and remuneration levels for the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Committee also conducted evaluations of the nomination process and competency development to ensure alignment with organizational needs and GCG practices.

The Risk Monitoring Committee actively identified, evaluated, and monitored the Company's risk profile. Throughout 2025, the Committee provided input on risk mitigation strategies, including operational, financial, and compliance risks, thereby supporting business sustainability and the Company's resilience against external dynamics.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan salah satu organ utama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan perusahaan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Direksi juga berperan sebagai wakil Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Direksi yang menjabat pada tahun 2025 telah mengikuti *fit & proper test* dan dinyatakan lulus oleh OJK. Perseroan memastikan bahwa setiap anggota Direksi memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Direksi, dan peraturan terkait lainnya.

RUPS dapat memberhentikan Direksi sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, anggota Direksi berhak untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut. Perseroan juga menerapkan kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terbukti terlibat dalam tindak kejahatan keuangan, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan penerapan prinsip GCG.

Masa Jabatan dan Komposisi Direksi [IDX G-03]

Anggota Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat kembali diangkat oleh pemegang saham melalui prosedur nominasi yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, komposisi Direksi Perseroan mengalami beberapa kali perubahan. Informasi lebih rinci tentang perubahan komposisi Direksi telah diuraikan pada Bab profil Perusahaan, subbab Profil Direksi.

Adapun Komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 diuraikan pada tabel berikut:

The Board of Directors is one of the principal bodies with full authority and responsibility for managing the Company's affairs in accordance with its established objectives and purposes. The Board of Directors also acts as the Company's representative, both in and out of court, in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association.

Procedures for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS), taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. All members of the Board of Directors serving in 2025 have undergone the fit and proper test and have been declared to have passed by the Financial Services Authority (OJK). The Company ensures that each member of the Board of Directors meets the qualifications and criteria set out in the Company's Articles of Association, the Board of Directors Charter, and other relevant regulations.

The GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, members of the Board of Directors have the right to resign from their positions, and the Company is required to convene a GMS to decide upon such resignation. The Company also implements a resignation policy for members of the Board of Directors who are proven to be involved in financial crimes, as part of its commitment to integrity and the implementation of GCG principles.

Term of Office and Composition of the Board of Directors [IDX G-03]

Members of the Company's Board of Directors are appointed for a term of 3 (three) years from the date of their respective appointment. Upon the expiry of their term, members of the Board of Directors may be reappointed by the shareholders through the applicable nomination procedures.

Throughout 2025, the composition of the Company's Board of Directors underwent several changes. Further details regarding these changes are presented in the Company Profile chapter, sub-section Board of Directors Profile.

The composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025 is presented in the following



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test Fit & Proper Test Approval Date and Reference Number	Masa Jabatan Term of Office
Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Januari 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024	27 November 2023 November 27, 2023 No. KEP-184/PL.02/2023	2024–2027
Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Mei 2023 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	15 April 2003 April 15, 2003 No. 5/44/DGS/DPIP/Rahasia	2023–2026
Kazunori Inoue ¹⁾	Direktur Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Januari 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2024	27 November 2023 November 27, 2023 No. KEP-191/PL.02/2023	2024–2027
Supriyanto ²⁾	Direktur Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2023 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 10, 2023	30 Desember 2020 December 30, 2020 No. KEP-475/NB.11/2020	2023–2026
Handoko	Direktur Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 November 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 8, 2024	9 Desember 2024 December 9, 2024 No. KEP-517/PL.02/2024	2024–2027
Yimmy Weddianto ³⁾	Direktur Director	Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 November 2025 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 4, 2025	6 November 2025 November 6, 2025 No. KEP-258/PL.02/2025	2025–2028

Keterangan Periode:

- 1) Kazunori Inoue telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.
2) Supriyanto telah mengundurkan diri secara efektif pada 31 Maret 2026.
3) Yimmy Weddianto telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.

Period Note:

- 1) Kazunori Inoue resigned effectively on February 28, 2026.
2) Supriyanto resigned effectively on March 31, 2026.
3) Yimmy Weddianto resigned effectively on February 28, 2026.

Keberagaman Komposisi Direksi [IDX G-01]

Keberagaman komposisi Direksi mencerminkan perpaduan karakteristik kelembagaan dan individu yang menduduki posisi pengurusan Perseroan. Keberagaman ini tercermin dalam aspek usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis. Penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan variasi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga mampu mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan secara menyeluruh dan berimbang.

Diversity of the Board of Directors [IDX G-01]

The diversity of the Board of Directors reflects a blend of institutional and individual characteristics among those holding management positions within the Company. This diversity is reflected in aspects such as age, gender, nationality, educational background, and work experience relevant to the performance of management functions and strategic decision-making. The composition of the Board of Directors is determined by considering a variety of expertise, knowledge, and experience, thereby supporting the overall and balanced effectiveness of the Company's management.

Profil keberagaman anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

The diversity profile of the members of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, is shown in the following table:

Aspek Aspect	Keberagaman Komposisi Direksi Diversity in the Composition of the Board of Directors
Usia Age	Rentang usia antara 50 hingga 61 tahun Age range 50 to 61 years old
Jenis Kelamin Gender	Seluruh anggota Direksi berjenis kelamin pria All members of the Board of Directors are male
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Jepang Composed of 4 Indonesian nationals and 2 Japanese nationals
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana hingga Magister, dengan bidang studi Teknik Sipil, Ekonomi, Manajemen, Sistem Informasi, Bahasa Asing, dan Pendidikan Degrees ranging from bachelor's to master's, with fields of study including Civil Engineering, Economics, Management, Information Systems, Foreign Languages, and Education
Pengalaman Kerja Work Experience	Jabatan manajerial dan eksekutif di sektor keuangan, perbankan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, manajemen risiko, serta bisnis internasional Managerial and executive positions in the financial sector, banking, consumer finance, factoring, risk management, and international business

Piagam Direksi

Perseroan telah menyusun Pedoman Direksi (Piagam Direksi atau BOD Charter) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pedoman Direksi Perseroan secara umum mencakup ketentuan mengenai:

1. Prosedur Pengangkatan/Pemilihan dan Pemberhentian/Pengunduran Diri Direksi
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Rapat Direksi;
4. Penilaian Kinerja.

Piagam Direksi senantiasa ditinjau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan tujuan Perseroan serta perkembangan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2025 Piagam Direksi mengalami pembaruan yang mulai berlaku sejak 1 Desember 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal

Board of Directors' Charter

The Company has established the Board of Directors Charter (BOD Charter), which serves as the basis for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Company's Board of Directors Charter generally covers provisions regarding:

1. Procedures for the appointment/election and dismissal/resignation of the Board of Directors;
2. Duties and responsibilities;
3. Board of Directors meetings;
4. Performance evaluation.

The Board of Directors Charter is regularly reviewed to ensure alignment with the Company's objectives and developments in applicable regulations. In 2025, the Board of Directors Charter was updated, effective as of December 1, 2025.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with its objectives and purposes. In carrying out its duties and responsibilities, the scope of work of the Board of Directors, based on applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, includes the following:

1. The Board of Directors shall manage the Company in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
2. The Board of Directors shall comply with all applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the



- Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Direksi wajib memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
 4. Direksi wajib menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
 6. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang memuat anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
 - a. Pemegang Saham.
 - b. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perseroan.
 7. Direksi wajib menyusun laporan tahunan.
 8. Direksi juga harus menyediakan laporan keuangan bulanan Perseroan dan dokumen-dokumen lain yang diminta secara wajar oleh setiap Pemegang Saham.
 9. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan, dan tepat waktu.
 10. Direksi berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
 11. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 12. Direksi wajib menumbuhkan, memastikan dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
 13. Direksi membentuk satuan kerja atau fungsi yang memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada:
 - a. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - b. Satuan Kerja Audit Internal.
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
 14. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - b. Memastikan kegiatan usaha Perseroan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
 15. Direksi juga dapat membentuk komite-komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Company's internal regulations in performing its duties.
3. The Board of Directors shall ensure that the Company takes into account the interests of all stakeholders, particularly debtors, creditors, and other stakeholders, in good faith and with prudence, in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
 4. The Board of Directors shall uphold and implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all business activities of the Company at all levels of the organization.
 5. The Board of Directors shall be accountable for the execution of its duties to the shareholders through the GMS.
 6. The Board of Directors shall prepare the Business Plan, including the Company's annual budget, and submit it to the Board of Commissioners for approval. The Board of Directors shall communicate the Business Plan to:
 - a. Shareholders;
 - b. All levels of the Company's organization.
 7. The Board of Directors shall prepare the annual report.
 8. The Board of Directors shall provide monthly financial reports of the Company and other documents reasonably requested by any shareholder.
 9. The Board of Directors shall ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in an accurate, relevant, and timely manner.
 10. The Board of Directors is authorized to represent the Company in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.
 11. The Board of Directors shall follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Internal Audit Unit, External Auditors, OJK supervisory results, and/or other supervisory authorities or institutions.
 12. The Board of Directors shall promote, ensure, and supervise the Company's compliance with both internal and external regulations.
 13. The Board of Directors shall establish working units or functions to ensure the implementation of GCG principles, including but not limited to:
 - a. Risk Management Unit;
 - b. Internal Audit Unit;
 - c. Compliance Unit.
 14. Members of the Board of Directors responsible for the compliance function shall have at least the following duties and responsibilities:
 - a. Formulating strategies to promote a culture of compliance;
 - b. Ensuring that the Company's business activities comply with all applicable laws and regulations;
 - c. Other duties related to the implementation of the compliance function.
 15. The Board of Directors may establish committees under its authority to support the effectiveness of its duties and responsibilities.

16. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko usaha secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan.
17. Direksi wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
18. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
19. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.
20. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi.
21. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
22. Direksi wajib memastikan pelaksanaan inklusi dan literasi keuangan terlaksana setiap tahun.
23. Direksi menyetujui kebijakan pembiayaan.

Pembidangan Tugas Direksi

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolegal, setiap anggota Direksi juga memiliki pembagian peran sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Pembidangan ini memastikan efektivitas pengelolaan Perseroan serta kejelasan fungsi masing-masing Direksi.

Informasi lebih rinci tentang pembidangan tugas Direksi yang menjabat per 31 Desember 2025 dijelaskan pada tabel berikut ini:

16. The Board of Directors shall implement risk management by identifying, assessing, and monitoring business risks effectively, in line with the Company's objectives, business policies, size, and complexity, as well as its capabilities.
17. The Board of Directors shall ensure that established committees perform their duties effectively.
18. The Board of Directors has authority and responsibility for the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction (CPF) programs.
19. The Board of Directors has authority and responsibility for fraud control and the implementation of anti-fraud strategies.
20. The Board of Directors has authority and responsibility for the use of information technology.
21. The Board of Directors has authority and responsibility with respect to POJK on facilitating access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
22. The Board of Directors shall ensure the implementation of financial inclusion and financial literacy programs on an annual basis.
23. The Board of Directors approves financing policies.

Division of Responsibilities of the Board of Directors

In addition to carrying out their duties and responsibilities on a collegial basis, each member of the Board of Directors is assigned specific roles in accordance with their respective areas of responsibility. This division of responsibilities is intended to ensure the effectiveness of the Company's management as well as clarity of each Director's functions.

Detailed information regarding the division of responsibilities of the members of the Board of Directors as of December 31, 2025 is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	Sebagai pengambil keputusan tertinggi di Perseroan dan bertanggung jawab untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, serta wajib memastikan pelaksanaan strategi bisnis dan langkah-langkah inisiatif Perseroan yang telah ditetapkan. Direktur Utama menerima laporan langsung dari seluruh Direksi lainnya. Responsible as the highest decision-making authority in the Company and accountable for achieving the established business targets, as well as ensuring the implementation of the Company's business strategies and strategic initiatives. The President Director receives direct reports from all other Direct.
Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	Bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan yang diterapkan. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan teknologi informasi. Responsible for overseeing all financial activities and preparing financial statements in accordance with applicable financial accounting standards and regulations. In addition, he is also responsible for the development of information technology.



Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Kazunori Inoue	Direktur Director	Bertanggung jawab membuat strategi dan rencana kerja untuk mencapai target dalam melakukan pengembangan bisnis, pengembangan produk dan program pemasaran. Selain itu, beliau bertanggung jawab untuk memastikan standar pelayanan dilaksanakan dengan baik. Responsible for developing strategies and work plans to achieve targets in business development, product development, and marketing programs. In addition, he is responsible for ensuring that service standards are properly implemented.
Supriyanto	Direktur Director	Bertanggung jawab membuat strategi dan rencana kerja untuk mengelola kualitas aset dan meminimalkan tingkat NPF melalui aktivitas <i>collection</i> serta memberikan arahan terhadap aktivitas <i>collection</i>. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional Perseroan berjalan dengan baik. Responsible for developing strategies and work plans to manage asset quality and minimize the NPF level through collection activities, as well as providing direction over collection activities. In addition, he is also responsible for ensuring that the Company's operational activities run effectively.
Handoko	Direktur Director	Bertanggung jawab membuat strategi dan rencana kerja serta memantau dan memastikan fungsi manajemen risiko Perseroan berjalan dengan baik. Selain itu beliau meninjau dan memantau implementasi manajemen risiko terkait setiap jenis risiko dan mitigasinya. Responsible for developing strategies and work plans, as well as monitoring and ensuring that the Company's risk management function is properly implemented. In addition, he reviews and monitors the implementation of risk management for each type of risk and its mitigation.
Yimmy Weddianto	Direktur Director	Bertanggung jawab membuat strategi dan rencana kerja untuk mencapai target bisnis pada pembiayaan retail. Responsible for developing strategies and work plans to achieve business targets in retail financing.

Rapat Direksi

Dasar Kebijakan

Penyelenggaraan Rapat Direksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Direksi, yang juga selaras dengan Pasal POJK No. 48/POJK.03/2024. Kebijakan mengenai rapat Direksi mencakup antara lain:

1. Rapat Direksi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direksi.
2. Selain itu, Direksi juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Pada pelaksanaannya, Direktur Utama bertugas memimpin rapat dan bila yang bersangkutan tidak dapat hadir, maka rapat Direksi tetap dapat berlangsung dengan mendelegasikan wewenang kepada anggota Direksi lain sebagai pengganti pemimpin rapat.

Board of Directors' Meetings

Policy Basis

The implementation of Board of Directors Meetings is conducted in accordance with the provisions stipulated in the Board of Directors Charter, which is also aligned with Article 28 of POJK No. 48/POJK.03/2024. The policies regarding Board of Directors Meetings include, among others, the following:

1. Board of Directors Meetings are held at least once every month and/or may be convened at any time when deemed necessary by the Board of Directors.
2. In addition, the Board of Directors also holds joint meetings with the Board of Commissioners at least once every 3 (three) months.
3. Members of the Board of Directors are required to attend at least 50% of the total Board of Directors Meetings within a one year period.
4. In practice, the President Director serves as the chair of the meeting. In the event that the President Director is unable to attend, the Board of Directors Meeting may still be held by delegating the authority to another member of the Board of Directors to act as the chair of the meeting.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran di 2025 [IDX G-02]

Rapat Direksi telah dilaksanakan di tahun 2025 dengan frekuensi sebanyak 12 (duabelas) kali. Informasi tingkat kehadiran anggota dalam rapat yang diselenggarakan pada tahun 2025, diuraikan pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	12	12	100%
Kazunori Inoue ¹⁾	Direktur Director	12	12	100%
Supriyanto ²⁾	Direktur Director	12	12	100%
Handoko	Direktur Director	12	12	100%
Gestik Dwi Puji Marhaeningsih ³⁾	Direktur Director	5	5	100%
Yimmy Weddianto ⁴⁾	Direktur Director	2	1	50%

Keterangan Periode:

- 1) Kazunori Inoue telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.
- 2) Supriyanto telah mengundurkan diri secara efektif pada March 31 2026.
- 3) Gestik Dwi Puji Marhaeningsih telah mengundurkan diri secara efektif pada 31 Mei 2025.
- 4) Masa jabatan Yimmy Weddianto secara efektif dimulai pada 6 November 2025. dan telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.

Meeting Frequency and Attendance in 2025 [IDX G-02]

Board of Directors Meetings were held 12 (twelve) times during 2025. Information regarding the attendance of members at meetings held during 2025 is presented in the following table:

Period Note:

- 1) Kazunori Inoue resigned effectively on February 28, 2026.
- 2) Supriyanto resigned effectively on March 31, 2026.
- 3) Gestik Dwi Puji Marhaeningsih's resigned effectively on May 31, 2025.
- 4) Yimmy Weddianto's term of office effectively began on November 6, 2025 and resigned effectively on February 28, 2026.

Agenda Rapat Tahun 2025

Rapat Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Meeting Agenda in 2025

The Board of Directors Meetings held in 2025 discussed several agendas, as presented in the following table:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Januari 2025 January 22, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
19 Februari 2025 February 19, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
19 Maret 2025 March 19, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
16 April 2025 April 16, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
21 Mei 2025 May 21, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
18 Juni 2025 June 18, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
23 Juli 2025 July 23, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
20 Agustus 2025 August 20, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative
24 September 2025 September 24, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama Monthly Performance Review Key strategic initiative



Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
22 Oktober 2025 October 22, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama	Monthly Performance Review Key strategic initiative
18 November 2025 November 18, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama	Monthly Performance Review Key strategic initiative
17 Desember 2025 December 17, 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan Inisiatif strategis utama	Monthly Performance Review Key strategic initiative

Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

Dasar Kebijakan

Rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala sebagai forum koordinasi dan pengawasan strategis. Sesuai ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola, rapat ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap periode 3 (tiga) bulan. Melalui mekanisme tersebut, Perseroan memastikan adanya keselarasan pandangan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengelolaan serta pengawasan, sehingga keputusan yang diambil senantiasa mendukung keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap regulasi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran di 2025 [IDX G-02]

Rapat Gabungan telah dilaksanakan di tahun 2025 dengan frekuensi sebanyak 4 (empat) kali. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan yang diselenggarakan pada tahun 2025, diuraikan pada tabel berikut:

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Policy Basis

Joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners are held periodically as a forum for coordination and strategic oversight. In accordance with the provisions of the Governance Guidelines, such meetings are conducted at least once every 3 (three) months. Through this mechanism, the Company ensures alignment of perspectives between the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out management and supervisory functions, thereby ensuring that decisions taken consistently support business continuity and regulatory compliance.

Meeting Frequency and Attendance in 2025 [IDX G-02]

Joint Meetings were held 4 (four) times during 2025. Information regarding the attendance of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Joint Meetings held during 2025 is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Takeshi Kobayashi	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100%
Chihiro Ushigome ¹⁾	Komisaris Commissioners	4	4	100%
Benny Redjo Setyono	Komisaris Commissioners	4	3	75%
Josaphat Budisatyawira ²⁾	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%
Alip	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%
Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	4	4	100%
Hajimu Yukimoto	Direktur Keuangan Finance Director	4	4	100%
Kazunori Inoue ³⁾	Direktur Director	4	4	100%
Supriyanto ⁴⁾	Direktur Director	4	4	100%

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Handoko	Direktur Director	4	3	75%
Gestik Dwi Puji Marhaeningsih ⁵⁾	Direktur Director	1	1	100%
Yimmy Weddianto ⁶⁾	Direktur Director	1	1	100%

Keterangan:

- 1) Chihiro Ushigome telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.
- 2) Masa jabatan Josaphat Budisatyawira telah berakhir secara efektif pada 9 Februari 2026.
- 3) Kazunori Inoue telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.
- 4) Supriyanto telah mengundurkan diri secara efektif pada 31 Maret 2026.
- 5) Masa jabatan Gestik Dwi Puji Marhaeningsih secara efektif berakhir pada 31 Mei 2025.
- 6) Masa jabatan Yimmy Weddianto secara efektif dimulai pada 6 November 2025 dan telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026.

Notes:

- 1) Chihiro Ushigome resigned effectively on February 28, 2026.
- 2) Josaphat Budisatyawira's term of office effectively ended on February 9, 2026.
- 3) Kazunori Inoue resigned effectively on February 28, 2026.
- 4) Supriyanto resigned effectively on March 31, 2026.
- 5) Gestik Dwi Puji Marhaeningsih's term of office effectively ended on May 31, 2025.
- 6) Yimmy Weddianto's term of office effectively began on November 6, 2025 and resigned effectively on February 28, 2026.

Agenda Rapat Gabungan Tahun 2025

Rapat Gabungan yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Joint Meetings Agenda in 2025

The Joint Meetings held in 2025 discussed several agendas, as presented in the following table:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
24 Maret 2025 March 24, 2025	Laporan profil risiko, <i>Update scoring model</i> baru, <i>Financial audit adjustment</i> 2024 Risk profile report, New scoring model update, Financial audit adjustment 2024
23 Juni 2025 June 23, 2025	Update APU-PPT, Progress update audit OJK AML-CFT update, OJK audit progress update
25 September 2025 September 25, 2025	Update APU-PPT, Ringkasan hasil audit OJK AML-CFT update, Summary of OJK audit results
18 November 2025 November 18, 2025	Progress tindak lanjut audit OJK, POJK 19 tahun 2025 terkait UMKM, Update APU-PPT, <i>Financial Projection</i> 2026–2027 Progress on follow-up actions of OJK audit, POJK No 19 of 2025 on MSMEs, AML-CFT update, Financial Projection 2026–2027

Kehadiran Direksi dalam RUPS

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik. Seluruh keputusan pemegang saham ditetapkan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yang berlaku sebagai pengganti RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertulis dan telah memperoleh persetujuan serta tanda tangan dari seluruh pemegang saham. Melalui mekanisme tersebut, Direksi tetap menjalankan perannya dalam mendukung kelancaran proses RUPS, memastikan setiap keputusan strategis yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung keberlanjutan pengelolaan Perseroan.

Attendance of the Board of Directors at the GMS

Throughout 2025, the Company did not hold any in-person General Meetings of Shareholders (GMS). All shareholder decisions were made through the Circular Resolution mechanism, which served as a substitute for both the Annual GMS and the Extraordinary GMS.

The decision-making process was conducted in writing and received approval and signatures from all shareholders. Through this mechanism, the Board of Directors continued to fulfill its role in supporting the smooth operation of the GMS process, ensuring that every strategic decision made complied with applicable laws and regulations, and supporting the sustainable management of the Company.



Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Program ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kegiatan usaha, profil perusahaan, struktur organisasi, serta kerangka tata kelola perusahaan (GCG). Selain itu, program orientasi juga mencakup penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab Direksi, serta memperkenalkan anggota baru kepada personel kunci di seluruh organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Saat ini, Perseroan belum memiliki kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai program orientasi bagi Direksi.

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat, yaitu Yimmy Weddianto.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi [IDX G-05]

Dasar Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan wawasan anggota Direksi agar senantiasa relevan dengan tugas serta tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap berbagai program pelatihan, seminar, *workshop*, *short course*, serta *sharing knowledge* yang berfokus pada praktik tata kelola perusahaan (GCG), regulasi pasar modal, manajemen risiko, transformasi digital, dan penerapan keuangan berkelanjutan.

Kebijakan ini mencakup penyusunan rencana pengembangan yang terstruktur, pemilihan materi sesuai kebutuhan pengelolaan, serta keterlibatan aktif anggota Direksi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga mendukung efektivitas kepemimpinan dan keberlanjutan operasional Perseroan.

Pelaksanaan Program pada Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memfasilitasi anggota Direksi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Informasi rinci mengenai pelaksanaan program yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Orientation Program for New Board Members

The Company, through the Corporate Secretary, conducts an orientation program for newly appointed Board members. This program aims to provide a comprehensive understanding of business activities, the company profile, organizational structure, and the corporate governance framework (GCG). Additionally, the orientation program includes an explanation of the roles and responsibilities of the Board of Directors, as well as introducing new members to key personnel throughout the organization to support the effective performance of their duties. Currently, the Company does not have a written policy specifically regulating the provisions regarding the orientation program for the Board of Directors.

In 2025, the Company conducted an orientation program for its newly appointed Board member, Yimmy Weddianto.

Training and Competency Development Program of the Board of Directors [IDX G-05]

Policy Basis

The Company is committed to supporting the enhancement of the competencies, knowledge, and insights of Board members to ensure they remain relevant to their duties and responsibilities in managing the company. This support is realized through providing access to various training programs, seminars, workshops, short courses, and knowledge-sharing sessions focused on corporate governance (GCG) practices, capital market regulations, risk management, digital transformation, and the implementation of sustainable finance.

This policy encompasses the development of structured development plans, the selection of materials tailored to management needs, and the active participation of Board members in various training and competency development programs, thereby supporting the effectiveness of leadership and the Company's operational sustainability.

Program Implementation in 2025

Throughout 2025, the Company has facilitated Board members' participation in various training and competency development programs. Detailed information regarding the programs attended by Board members during 2025 is presented in the following table:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tema Theme
1.	Kazuhiro Inoue	Direktur Utama President Director	4 Juli 2025 July 4, 2025	APPI	Keuangan Berkelanjutan dan Penerapannya di Perusahaan Pembiayaan Sustainable Finance and Its Application in Financing Companies
			2 September 2025 September 2, 2025	APPI	Seminar Online: Economic Outlook 2026
2.	Hajimu Yukimoto	Direktur Director	4 Februari 2025 February 4, 2025	APPI	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK's Policy Directions for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy
			2 September 2025 September 2, 2025	APPI	Seminar Online: Economic Outlook 2026
3.	Kazunori Inoue ¹⁾	Direktur Director	4 Februari 2025 February 4, 2025	APPI	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK's Policy Directions for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy
			6 Mei 2025 May 6, 2025	APPI	Seminar Nasional: Will Trade War Create Financial Turnmoil National Seminar: Will Trade War Create Financial Turnmoil
			4 Juli 2025 July 4, 2025	APPI	Keuangan Berkelanjutan dan Penerapannya di Perusahaan Pembiayaan Sustainable Finance and Its Application in Financing Companies
4.	Supriyanto ²⁾	Direktur Director	11 Juli 2025 July 11, 2025	APPI	International Seminar: Global, ASEAN, and Indonesia Challenges to Indonesia Economy
			2 September, 2025 September 2, 2025	APPI	Seminar Online: Economic Outlook 2026
5.	Handoko	Direktur Director	6 Mei 2025 May 6, 2025	APPI	Seminar Nasional: Will Trade War Create Financial Turnmoil National Seminar: Will Trade War Create Financial Turnmoil
			11 Juli 2025 July 11, 2025	APPI	International Seminar: Global, ASEAN, and Indonesia Challenges to Indonesia Economy
			2 September 2025 September 2, 2025	APPI	Seminar Online: Economic Outlook 2026

Keterangan:

1) Kazunori Inoue telah mengundurkan diri secara efektif pada 28 Februari 2026
 2) Supriyanto telah mengundurkan diri secara efektif pada 31 Maret 2026.

Note:

1) Kazunori Inoue resigned effectively on February 28, 2026
 2) Supriyanto resigned effectively on March 31, 2026.

Penilaian Direksi Terhadap Kinerja Komite Pendukung

Prosedur Penilaian Kinerja

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didukung oleh sejumlah komite internal, antara lain Asset & Liability Committee (ALCO), Early Alert Committee (EAC), Retail Alert Committee (RAC), Risk Management Committee (RMC), dan IT Steering Committee.

Board of Directors' Assessment of the Performance of Supporting Committees

Performance Assessment Procedure

In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by several internal committees, including the Asset & Liability Committee (ALCO), Early Alert Committee (EAC), Retail Alert Committee (RAC), Risk Management Committee (RMC), and IT Steering Committee.



Setiap komite melaksanakan *self-assessment* kinerja secara tahunan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, mencakup capaian program kerja, kualitas rekomendasi, tingkat kehadiran rapat, serta kontribusi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Hasil *self-assessment* tersebut dilaporkan kepada Direksi sebagai dasar penilaian kinerja, kemudian disampaikan kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan mekanisme ini, Perseroan memastikan bahwa proses penilaian kinerja komite berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dijadikan acuan untuk peningkatan berkelanjutan di tahun berikutnya.

Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja komite dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sepanjang tahun buku, kesesuaian kompetensi anggota dengan bidang pengawasan yang dijalankan, serta tingkat kehadiran dalam rapat sebagai ukuran komitmen terhadap peran yang diemban. Selain itu, kualitas pelaporan kepada Direksi juga menjadi aspek penting, mencakup kejelasan, ketepatan waktu, dan transparansi dalam menyampaikan hasil kajian maupun rekomendasi. Melalui penerapan kriteria tersebut, Direksi dapat memastikan bahwa setiap komite menjalankan fungsinya secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan praktik GCG.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh komite di bawah Direksi telah melaksanakan rapat secara berkala sesuai dengan agenda kerja masing-masing. Evaluasi menunjukkan bahwa setiap komite berperan aktif dalam mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan.

Asset & Liability Committee (ALCO) berkontribusi dalam menjaga keseimbangan struktur aset dan liabilitas serta mendukung pengelolaan likuiditas. Early Alert Committee (EAC) dan Retail Alert Committee (RAC) menjalankan fungsi pemantauan dini terhadap potensi risiko kredit, sehingga turut menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Risk Management Committee (RMC) memperkuat sistem manajemen risiko melalui identifikasi, pemantauan, dan pemberian rekomendasi mitigasi atas risiko operasional maupun strategis. Sementara itu, IT Steering Committee memastikan arah pengembangan teknologi informasi tetap selaras dengan kebutuhan bisnis dan mendukung transformasi digital Perseroan.

Secara keseluruhan, kinerja komite di bawah Direksi pada tahun 2025 dinilai efektif, dengan tingkat kehadiran anggota yang tinggi serta kualitas pelaporan yang memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Each committee conducts an annual *self-assessment* to evaluate the effectiveness of its duties and responsibilities. The assessment is conducted based on established indicators, including work program achievements, quality of recommendations, meeting attendance levels, and contributions to the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

The results of the *self-assessment* are reported to the Board of Directors as the basis for performance evaluation and are subsequently submitted to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). Through this mechanism, the Company ensures that the committee performance assessment process is transparent, accountable, and serves as a reference for continuous improvement in the following year.

Performance Assessment Criteria

The performance assessment of the committees is conducted by considering annual performance achievements, alignment of members' competencies with their respective supervisory areas, and attendance levels in meetings as an indicator of commitment to their roles. In addition, the quality of reporting to the Board of Directors is also an important aspect, including clarity, timeliness, and transparency in presenting review results and recommendations. Through the application of these criteria, the Board of Directors ensures that each committee performs its functions consistently, accountably, and in alignment with GCG practices.

Results of Committee Performance Assessment in 2025

Throughout 2025, all committees under the Board of Directors held regular meetings in accordance with their respective work agendas. The evaluation indicates that each committee played an active role in supporting the effectiveness of the Company's management.

The Asset & Liability Committee (ALCO) contributed to maintaining the balance of the Company's asset and liability structure and supported liquidity management. The Early Alert Committee (EAC) and Retail Alert Committee (RAC) carried out early monitoring of potential credit risks, thereby contributing to the maintenance of financing portfolio quality. The Risk Management Committee (RMC) strengthened the risk management system through the identification, monitoring, and provision of mitigation recommendations for both operational and strategic risks. Meanwhile, the IT Steering Committee ensured that the direction of information technology development remained aligned with business needs and supported the Company's digital transformation.

Overall, the performance of the committees under the Board of Directors in 2025 was assessed as effective, with a high level of member attendance and reporting quality that met standards of transparency and accountability, thereby supporting the achievement of the Company's strategic objectives.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

[IDX G-04]

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari komitmen penerapan GCG, Perseroan melakukan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris. Penilaian ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dalam mendukung keberlanjutan Perseroan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun menggunakan metode *self-assessment*. Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara internal melalui beberapa tahapan. Proses penilaian kinerja dimulai dengan evaluasi terhadap kompetensi dan keahlian, yang menjadi dasar dalam menilai pencapaian kinerja. Penilaian kinerja juga mempertimbangkan perumusan rencana kerja, realisasi pelaksanaan tugas, dan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga mencakup kinerja komite-komite yang berada di bawahnya. Hasil penilaian kinerja tersebut akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan kinerja dan pengembangan berkelanjutan Perseroan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Tercapainya 4 (empat) kinerja penunjang yang ada di jajaran Dewan Komisaris.
2. Terlaksananya pemantauan efektivitas praktik GCG dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Tersusunnya KPI Direksi pada bulan Maret setiap tahun dan evaluasi pencapaian triwulan.
4. Terlaksananya pemantauan atas implementasi Rencana Bisnis Tahunan.
5. Terlaksananya pemantauan atas implementasi Rencana Pengembangan Perseroan.
6. Terlaksananya tugas khusus.
7. Terlaksananya pemantauan efektivitas pelaksanaan.
8. *Corporate Social Responsibility* (CSR).
9. Adanya tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulan dan tahunan Direksi.

Performance Assessment Procedure of the Board of Commissioners

As part of its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the Company conducts performance assessments of the Board of Commissioners. This assessment aims to ensure the effectiveness of the execution of duties and responsibilities, while strengthening the supervisory function in supporting the Company's sustainability.

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted annually using a self-assessment method. The assessment procedures for both the Board of Commissioners and the Board of Directors are carried out internally through several stages. The process begins with an evaluation of competencies and expertise, which serves as the basis for assessing performance achievements. The assessment also considers the formulation of work plans, the realization of duties, and accountability reporting to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The performance assessment of the members of the Board of Commissioners is conducted on a collegial basis using predefined assessment criteria. The assessment also includes the performance of committees under the Board of Commissioners. The results of the performance assessment serve as a basis for performance improvement and the Company's continuous development.

Performance Assessment Criteria of the Board of Commissioners

The performance of the Board of Commissioners is assessed based on the following criteria:

1. Achievement of 4 (four) supporting performance areas within the Board of Commissioners structure.
2. Implementation of monitoring over the effectiveness of GCG practices and Integrated Governance.
3. Timely formulation of Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors in March each year and quarterly performance evaluation.
4. Monitoring of the implementation of the Annual Business Plan.
5. Monitoring of the implementation of the Company's Development Plan.
6. Execution of special assignments.
7. Monitoring of the effectiveness of implementation.
8. Corporate Social Responsibility (CSR).
9. Provision of responses by the Board of Commissioners to the Directors' quarterly and annual reports.



Pihak Penilai Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan secara mandiri melalui mekanisme *self-assessment*, di mana setiap anggota menilai kontribusi, efektivitas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. Hasil penilaian tersebut kemudian dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam prosesnya, pemegang saham juga mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja Dewan Komisaris, sehingga penilaian yang dilakukan tetap objektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2025

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat telah berjalan efektif, tercermin dari tingkat kehadiran yang tinggi, partisipasi aktif, serta kualitas materi pembahasan yang sesuai dengan agenda. Fungsi pengawasan terhadap Perseroan juga dilaksanakan dengan baik melalui pemberian nasihat dan arahan yang disampaikan dalam rapat gabungan bersama Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris senantiasa menjaga integritas dan independensi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga penilaian kinerja pada tahun 2025 mencerminkan konsistensi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Sebagai bagian dari komitmen penerapan GCG, Perseroan melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara berkala. Penilaian ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sekaligus memperkuat fungsi pengelolaan dalam mendukung keberlanjutan Perseroan.

Prosedur penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun melalui metode *self-assessment* yang dilaksanakan secara internal dengan tahapan terstruktur. Proses penilaian dimulai dengan perumusan rencana kerja, realisasi pelaksanaan tugas, dan laporan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja kemudian dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Kemudian disampaikan kepada pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Dengan prosedur tersebut, Perseroan memastikan bahwa penilaian kinerja Direksi berlangsung transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Performance Assessment Party of the Board of Commissioners

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted independently through a self-assessment mechanism, whereby each member evaluates their contribution, effectiveness, and responsibilities in accordance with their respective roles. The results are reported to shareholders through the GMS. In the process, shareholders also consider recommendations from the Nomination and Remuneration Committee as part of the Board of Commissioners' performance evaluation, ensuring that the assessment remains objective, transparent, and accountable.

Results of the Board of Commissioners Performance Assessment in 2025

Based on the established criteria, the performance assessment of the Board of Commissioners in 2025 indicates that meetings were conducted effectively, as reflected in high attendance levels, active participation, and the quality of discussion materials aligned with meeting agendas. The supervisory function of the Company was also performed effectively through the provision of advice and guidance delivered in joint meetings with the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners consistently maintained integrity and independence in carrying out its duties, resulting in a 2025 performance assessment that reflects consistency, accountability, and alignment with Good Corporate Governance principles.

Performance Assessment Procedure of the Board of Directors

As part of its commitment to implementing GCG, the Company conducts periodic performance assessments of the Board of Directors. This assessment aims to ensure the effectiveness of the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors, while strengthening the management function in supporting the Company's sustainability.

The performance assessment of the Board of Directors is conducted annually using a self-assessment method through a structured internal process. The process begins with the formulation of work plans, followed by the evaluation of task implementation and accountability reporting. The assessment is then reviewed by the Board of Commissioners. Subsequently submitted to shareholders through the GMS.

Through this procedure, the Company ensures that the performance assessment of the Board of Directors is conducted in a transparent, accountable manner and in line with Good Corporate Governance principles.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mengacu pada sejumlah kriteria, antara lain:

1. Pencapaian target bisnis.
2. Pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan.
3. Pencapaian anggaran dan pendapatan.
4. Pelaksanaan praktik GCG yang efektif di Perseroan.
5. Pelaksanaan CSR.

Pihak Penilai Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Perseroan dilaksanakan secara mandiri melalui mekanisme *self-assessment*, di mana setiap anggota menilai kontribusi, efektivitas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. Hasil penilaian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam prosesnya, pemegang saham juga mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja Dewan Komisaris, sehingga penilaian yang dilakukan tetap objektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi tahun 2025

Hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2025 tercermin dari pencapaian kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun buku. Direksi juga dinilai berhasil menjaga efektivitas penerapan GCG melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi bagian dari penilaian, dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan kontribusi sosial.

Performance Assessment Criteria of the Board of Directors

The performance of the Board of Directors is assessed based on the following criteria:

1. Achievement of business targets.
2. Achievement of the Company's short-term and long-term plans.
3. Achievement of budget and revenue targets.
4. Effective implementation of GCG practices within the Company.
5. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

Performance Assessment Party of the Board of Directors

The performance assessment of the Board of Directors is conducted independently through a self-assessment mechanism, whereby each member evaluates their contribution, effectiveness, and responsibilities in accordance with their respective roles. The results are reported to the Board of Commissioners, which is then accountable to shareholders through the GMS. In the process, shareholders also consider recommendations from the Nomination and Remuneration Committee as part of the Board of Commissioners' performance evaluation, ensuring that the assessment remains objective, transparent, and accountable.

Results of the Board of Directors Performance Assessment in 2025

The results of the Board of Directors' performance assessment in 2025 are reflected in the Company's operational performance achievements throughout the financial year. The Board of Directors was also assessed to have successfully maintained effective implementation of GCG through transparent, accountable, and consistent management practices in line with integrated governance principles. The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs formed part of the assessment, demonstrating the Company's commitment to sustainability and social contribution.



Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of The Board of Commissioners and The Board of Directors [IDX G-06]

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mengacu pada Peraturan OJK tersebut, Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tahapan prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan prosedur nominasi, Perseroan perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang

Policy on the Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The nomination procedures for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are carried out in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Nomination Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Referring to the applicable OJK Regulation, the Company, through the Nomination and Remuneration Committee, is required to carry out the following stages of the nomination process for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

1. Preparing the composition and nomination process for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Formulating policies and criteria required in the nomination process for candidates of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Assisting in the evaluation of the performance of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Preparing development programs for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
5. Reviewing and proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the GMS.

Nomination Criteria for the Board of Commissioners and the Board of Directors

In implementing the nomination procedure, the Company applies the following criteria that must be met by candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as follows:

1. Possess good character, morals, and integrity.
2. Be legally capable of performing legal acts.
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during service:
 - a. Have never been declared bankrupt;
 - b. Have never served as a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Have never been convicted of a criminal offense that causes loss to state finances and/or is related to the

- berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Perseroan menyadari pentingnya kebijakan suksesi Direksi sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran operasional. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan suksesi merupakan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Kebijakan suksesi diterapkan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan melalui identifikasi calon kandidat potensial dari internal maupun eksternal yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman sesuai kebutuhan Perseroan. Program pengembangan disediakan bagi kandidat internal agar terdapat kesiapan untuk menduduki posisi Direksi di masa mendatang. Kebijakan suksesi juga diterapkan guna menjamin proses transisi kepemimpinan berlangsung terstruktur sehingga tidak mengganggu stabilitas operasional maupun pencapaian strategi bisnis.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan untuk menentukan besaran remunerasi kedua organ tersebut. Dalam praktiknya, RUPS dapat memberikan pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi setiap tahun dengan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- financial sector; and
- d. Have never served as a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors who, during their tenure:
 - i. Failed to organize an Annual GMS;
 - ii. Had their accountability as a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors rejected by the GMS or failed to submit accountability reports to the GMS; and
 - iii. Caused a company holding a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail to fulfill the obligation to submit Annual Reports and/or Financial Statements to OJK.
 4. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.
 5. Possess knowledge and/or expertise in fields required by the Company.

Board Succession Policy

The Company recognizes the importance of a Board succession policy as part of its efforts to ensure leadership continuity and operational smoothness. The development and implementation of the succession policy are the responsibility of the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with applicable regulations.

The succession policy is implemented to ensure leadership continuity by identifying potential candidates from both internal and external sources who possess the competencies, integrity, and experience required by the Company. Development programs are provided for internal candidates to ensure they are prepared to assume Board positions in the future. The succession policy is also implemented to ensure that the leadership transition process is structured so as not to disrupt operational stability or the achievement of business strategies.

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is established in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority to determine the amount of remuneration for both bodies. In practice, the GMS may delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration annually, taking into account input and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.



Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Tahapan yang dilaksanakan dalam prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi meninjau struktur dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi mengenai peningkatan remunerasi tahun berikutnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Rekomendasi kemudian akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
4. Rekomendasi yang telah dievaluasi akan diusulkan oleh Dewan Komisaris ke RUPS, untuk persetujuan atau disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris.

Prosedur, kebijakan, struktur, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi wajib dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara menyeluruh sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta untuk memastikan kesesuaian dengan kinerja, tanggung jawab, dan kondisi Perseroan.

Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator yang relevan dari aspek internal maupun eksternal. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan remunerasi yang diberikan selaras dengan tanggung jawab, kinerja, serta kondisi Perseroan dan lingkungan usaha. Indikator penetapan remunerasi yang digunakan Perseroan mengacu pada ketentuan Pasal 10 POJK No. 34/2014, sebagai berikut:

1. Standar remunerasi industri, sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha Perseroan dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan serta kinerja Perseroan;
3. Target kinerja maupun pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
4. Keseimbangan tunjangan antara komponen yang bersifat tetap dan yang bersifat variabel.

Remuneration Procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, is required to follow the procedures for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The steps carried out in the remuneration determination procedure for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee reviews the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. The Nomination and Remuneration Committee provides recommendations regarding the increase in remuneration for the following year for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. The recommendations are then evaluated by the Board of Commissioners.
4. The evaluated recommendations are proposed by the Board of Commissioners to the GMS for approval, or are approved by the Board of Commissioners based on the delegation of authority from the GMS to the Board of Commissioners.

The procedures, policies, structure, and amount of compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors must be thoroughly evaluated by the Nomination and Compensation Committee at least once a year to ensure compliance with regulations and to ensure that compensation is commensurate with the Company's performance, responsibilities, and circumstances.

Remuneration Determination Indicators

The structure, policies, and amounts of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are determined by taking into account a number of relevant indicators from both internal and external aspects. These considerations aim to ensure that the remuneration provided is aligned with the responsibilities, performance, and conditions of the Company and the business environment. The remuneration determination indicators used by the Company refer to the provisions of Article 10 of POJK No. 34/2014, as follows:

1. Industry remuneration standards, in accordance with the business activities of similar companies and the scale of the Company's operations within its industry;
2. The duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as related to the achievement of the Company's objectives and performance;
3. Performance targets and performance achievements of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
4. The balance of benefits between fixed and variable components.

Struktur dan Besaran Remunerasi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 POJK No. 34/2014, yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

1. Gaji;
2. Honorarium;
3. Insentif; dan
4. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan mengungkapkan total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam satu tahun penuh sebagai berikut:

Remuneration Structure and Amount

The remuneration structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors is established in accordance with the provisions of Article 10 of POJK No. 34/2014, which consists of several components, namely:

1. Salary;
2. Honorarium;
3. Incentives; and
4. Fixed and/or variable allowances.

In accordance with applicable regulations, the Company discloses the total remuneration and other benefits received by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for a full year as follows:

Uraian Description	Total Remunerasi Keseluruhan Direksi (Rp) Total Remuneration Board of Directors (IDR)	Total Remunerasi Keseluruhan Dewan Komisaris (Rp) Total Remuneration Board of Commissioners (IDR)
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) Total Remuneration and Other Benefits (Over 1 Year)	14.534.843.070	3.017.281.635

Sebagai penjelasan lebih lanjut atas total remunerasi, Perseroan menyajikan uraian komponen remunerasi tahunan dan jumlah yang diterima oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta fasilitas lain, pada tabel berikut ini:

For further details on total remuneration, the Company provides a breakdown of the components of annual compensation and the amounts received by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in the form of salaries, allowances, and other benefits, in the following table:

	Jumlah Anggota Total Members	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	Tunjangan dan Fasilitas Lain Allowances and Other Benefits	Total Remunerasi Total Remuneration
Direksi Board of Directors	6	11.176.698.000	3.358.145.070	14.534.843.070
Dewan Komisaris Board of Commissioner	4	2.463.305.000	553.976.635	3.017.281.635
Jumlah Total	10	13.640.003.000	3.912.121.705	17.552.124.705

Untuk memberikan gambaran mengenai jumlah remunerasi individu, Perseroan menyajikan informasi kelompok besaran remunerasi tahunan yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tabel berikut:

To provide an overview of individual remuneration amounts, the Company presents information on the ranges of annual remuneration received by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the following table:



Total Remunerasi per Anggota per Tahun Total Annual Remuneration per Member	Jumlah Anggota Number of Members	
	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners
Di atas Rp2 miliar Over Rp2 billion	3 orang people	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Over Rp1 billion to Rp2 billion	3 orang people	1 orang people
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Over Rp500 million to Rp1 billion	0 orang people	2 orang people
Rp500 juta ke bawah Rp500 million or less	0 orang people	1 orang people

Kebijakan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

Conflict of Interest Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors [IDX G-09]

Perseroan memiliki komitmen untuk mencegah dan mengelola potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun Direksi. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil senantiasa berlandaskan pada kepentingan terbaik Perseroan, bukan kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan mengungkapkan secara transparan setiap hubungan, transaksi, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, serta menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan.

The Company is committed to preventing and managing potential conflicts of interest that may arise in the execution of duties by the Board of Commissioners and the Board of Directors. This policy aims to ensure that every decision and action taken is consistently based on the best interests of the Company, rather than personal interests or the interests of any particular party. The Board of Commissioners and the Board of Directors are required to transparently disclose any relationships, transactions, or conditions that may potentially give rise to conflicts of interest, and to maintain objectivity in every decision-making process.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama

Affiliation Relationships between Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Major Shareholders

Sebagai bentuk penerapan prinsip keterbukaan, Perseroan menyajikan informasi mengenai hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham utama dan pengendali dalam Laporan Tahunan 2025. Uraian mengenai hubungan afiliasi telah dicantumkan secara rinci pada profil masing-masing anggota yang terdapat dalam Bab Profil Perusahaan, Subbab Profil Dewan Komisaris, dan Subbab Profil Direksi.

As part of the implementation of the principle of transparency, the Company presents information regarding affiliation relationships between members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's major and controlling shareholders in the 2025 Annual Report. A detailed description of such affiliation relationships has been disclosed in each member's profile, as presented in the Company Profile Chapter, under the Subsection of the Board of Commissioners Profile and the Subsection of the Board of Directors Profile.

Ringkasan informasi hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut:

A summary of affiliation relationships among members of the Board of Commissioners and the Board of Directors serving as of December 31, 2025 is presented in the following table:

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners:												
Takeshi Kobayashi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chihiro Ushigome		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Benny Redjo Setyono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Josaphat Budisatyawira		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Alip		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anggota Direksi Members of the Board of Directors:												
Kazuhiro Inoue		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hajimu Yukimoto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kazunori Inoue		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Supriyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Handoko		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yimmy Weddianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓



Komite–Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari komite-komite yang secara struktural berada di bawah koordinasinya. Keberadaan komite-komite ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap komite memiliki peran strategis sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

In carrying out its supervisory functions, the Board of Commissioners receives support from committees that are structurally under its coordination. These committees are established to strengthen the effectiveness of supervision and ensure the implementation of good corporate governance. Each committee plays a strategic role in accordance with its area of responsibility and reports directly to the Board of Commissioners.

The committees under the Board of Commissioners are:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Monitoring Committee

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Keberadaan komite ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya dalam memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas Perseroan.

Dasar Hukum Komite Audit

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit berlandaskan pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif tanggal 16 Juni 2022.
5. Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang berlaku efektif tanggal 17 Juni 2022.

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit. Piagam tersebut secara umum memuat ketentuan mengenai:

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners and reports directly to the Board of Commissioners. The purpose of this committee is to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions, particularly in ensuring the Company's compliance, transparency, and accountability.

Legal Basis for the Audit Committee

The formation and performance of the Audit Committee's duties are based on applicable laws and regulations, including:

1. POJK No. 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Companies.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of Audit Committee.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners effective as of June 16, 2022;
5. Circular Resolution of the Shareholders in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders effective as of June 17, 2022.

Audit Committee Charter

The Audit Committee performs its duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter. The Charter generally covers the following provisions:

1. Keanggotaan Komite Audit
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
3. Wewenang Komite Audit
4. Rapat Komite Audit

Dewan Komisaris telah menetapkan dan menyetujui Piagam Komite Audit sejak 30 Desember 2021. Piagam tersebut ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan tujuan Perseroan dan dinamika perubahan regulasi. Hingga akhir 2025, Dewan Komisaris menegaskan bahwa Piagam Komite Audit tersebut tetap berlaku dan belum memerlukan perubahan.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan, Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota, dengan masa jabatan tidak melebihi masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Sedangkan untuk anggota yang berasal pihak independen dan bukan anggota Dewan Komisaris, masa jabatannya ditetapkan sesuai dengan dasar hukum pengangkatannya.

Komposisi Komite Audit pada tahun 2025 mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

1. Composition of the Audit Committee
2. Duties and Responsibilities of the Audit Committee
3. Authority of the Audit Committee
4. Audit Committee Meetings

The Board of Commissioners has established and approved the Audit Committee Charter since December 30, 2021. The Charter is reviewed periodically to ensure its relevance to the Company's objectives and evolving regulatory requirements. As of the end of 2025, the Board of Commissioners confirms that the Audit Committee Charter remains in effect and does not require any amendments.

Composition and Term of Office of the Audit Committee

In accordance with applicable regulations, the Audit Committee consists of 3 (three) members, comprising Independent Commissioners and external parties of the Company. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, who also serves as a member, with a term of office not exceeding their tenure as a member of the Board of Commissioners. For members who are independent external parties and not members of the Board of Commissioners, the term of office is determined in accordance with the legal basis of their appointment.

The composition of the Audit Committee in 2025 underwent changes as described in the following table:

Nama Name	Posisi di Komite Audit Position in the Audit Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan/atau Anggota Komite Audit Legal Basis for Appointment As Chairman and/or Member of the Audit Committee	Keahlian Expertise	Masa Jabatan Term of Office
Josaphat Budisatyawira ¹⁾	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2022; Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2022. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 16, 2022; Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 17, 2022	Teknologi Informasi dan Audit Information Technology and Auditing	2022– 2025



Nama Name	Posisi di Komite Audit Position in the Audit Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan/atau Anggota Komite Audit Legal Basis for Appointment As Chairman and/or Member of the Audit Committee	Keahlian Expertise	Masa Jabatan Term of Office
Alip ²⁾	Ketua Chairman	- Komisaris Independen - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Pemantau Risiko - Independent Commissioner - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - Chairman of the Risk monitoring Committee	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025	Ekonomi, Administrasi Bisnis dan Audit Economics, Business Administration, and Auditing	2025–2027
Hendry	Anggota Member	Tidak merangkap jabatan struktural di Perseroan (Pihak Independen) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Does not hold any other executive positions within the Company (Independent Party) A member of the Risk Monitoring Committee who is an Independent Party	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025	Keuangan dan Audit Finance and Audit	2025–2028
Yusuke Yoshimoto ¹⁾	Anggota Member	Tidak merangkap jabatan struktural di Perseroan (Pihak Independen) Does not hold any other executive positions within the Company (Independent Party)	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2022; Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2022. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 16, 2022; Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 17, 2022.	Hukum Bisnis Internasional International Business Law	2022–2025

Nama Name	Posisi di Komite Audit Position in the Audit Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan/atau Anggota Komite Audit Legal Basis for Appointment As Chairman and/or Member of the Audit Committee	Keahlian Expertise	Masa Jabatan Term of Office
Rachmad Nursanto ²⁾	Anggota Member	Tidak merangkap jabatan struktural di Perseroan (Pihak Independen) Does not hold any other executive positions within the Company (Independent Party)	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025	Keuangan Finance	2025– 2028

Keterangan:

1) Masa jabatan di Komite Audit secara efektif berakhir pada 17 Juni 2025.

2) Masa jabatan di Komite Audit secara efektif dimulai pada 17 Juni 2025.

Notes:

1) Term of office on the Audit Committee ended effective June 17, 2025.

2) Term of office on the Audit Committee commenced effective June 17, 2025.

Profil Komite Audit

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2025 diuraikan berikut ini:

Audit Committee Profile

The profiles of the Chairman and members of the Audit Committee as of December 31, 2025, are outlined below:



Alip

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Usia
Age 50 tahun
50 years old

Kewarganegaraan
Nationality Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Ketua Komite Audit

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025

Masa Jabatan dan Periode
2025–2027, Periode ke-1

Profil lengkap Ketua Komite Audit yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, telah dijelaskan lebih rinci pada bab Profil Perseroan, subbab Profil Dewan Komisaris.

Legal Basis of Appointment as Chairman of the Audit Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025

Term of Office
2025–2027, First Term

A complete profile of the Chairman of the Audit Committee, who also serves as an Independent Commissioner of the Company, is provided in detail in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.



Hendry

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia
Age 47 tahun
47 years old

Kewarganegaraan
Nationality Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025

Masa Jabatan dan Periode
2025–2028, Periode ke-2

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Atmajaya

Legal Basis of Appointment as Member of the Audit Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025

Term of Office
2025–2028, Second Term

Educational Background
Bachelor of Economics in Accounting from Atmajaya Catholic University



Riwayat Jabatan

- Managing Partner Kantor Akuntan Publik Hendry & Kasman (2017–2020)
- Chief Financial Officer – SIS Group of Schools (2016–2016)
- Audit Senior Manager – PricewaterhouseCoopers (2014–2016)
- Audit Senior Manager – Ernst & Young Jakarta (2010–2014)

Rangkap Jabatan

- Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024–sekarang)
- Komite Audit Bangun Kosambi Jaya Tbk (2024–sekarang)
- Managing Partner, KAP Hendry, Ferdy & Rekan – a member firm of Santa Fe Associates Internasional (2020–sekarang)
- Founding Member & Deputy Treasury CFO Club Indonesia (Perkumpulan Direktur Keuangan Indonesia) (2019–sekarang)
- Direktur PT Kita Tumbuh Bersama (2019–sekarang)
- Komite Audit PT Medco Power Indonesia (2018–sekarang)

Employment History

- Managing Partner Public Accounting Firm Hendry & Kasman (2017–2020)
- Chief Financial Officer–SIS Group of Schools (2016–2016)
- Audit Senior Manager– PricewaterhouseCoopers (2014–2016)
- Audit Senior Manager– Ernst & Young Jakarta (2010–2014)

Concurrent Positions

- The Company's Risk Monitoring Committee (2024–present)
- Audit Committee Bangun Kosambi Jaya Tbk (2024–present)
- Managing Partner, KAP Hendry, Ferdy & Partners – a member firm of Santa Fe Associates International (2020–present)
- Founding Member & Deputy Treasurer CFO Club Indonesia (Indonesian Association of Chief Financial Officers) (2019–present)
- Director PT Kita Tumbuh Bersama (2019–present)
- Audit Committee PT Medco Power Indonesia (2018–present)



Rachmad Nursanto

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia 45 tahun
Age 45 years old

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2025

Legal Basis of Appointment as Member of the Audit Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2025

Masa Jabatan dan Periode

2025–2028, Periode ke-1

Term of Office

2025–2028, First Term

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi dari STIE Perbanas, Jakarta (2004)
- Diploma dari Curtin Direct, Perth, WA, Australia (2001)

Educational Background

- Bachelor of Accounting, STIE Perbanas, Jakarta (2004)
- Diploma, Curtin Direct, Perth, WA, Australia (2001)

Riwayat Jabatan

- Head of Accounting & Finance, PT Cipta Srigati Lestari (2013–2019)
- Tax Manager, Focus Data Consulting (2007–2013)

Employment History

- Head of Accounting & Finance, PT Cipta Srigati Lestari (2013–2019)
- Tax Manager, Focus Data Consulting (2007–2013)

Rangkap Jabatan

Director, AJCapital Advisory (2020–sekarang)

Concurrent Positions

Director, AJCapital Advisory 2020–present)

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit ditegakkan melalui penetapan anggota yang memenuhi persyaratan dan kriteria independensi. Perseroan memastikan bahwa seluruh personel dalam Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bersikap objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Komitmen terhadap independensi tercermin dalam setiap rekomendasi, penilaian, dan hasil pengawasan yang diberikan, sehingga dapat mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Independence of the Audit Committee

The independence of the Audit Committee is ensured by appointing members who meet the independence requirements and criteria. The Company ensures that all members of the Audit Committee are independent parties who have no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's shareholders.

In performing its functions, the Audit Committee acts objectively and is free from conflicts of interest. This commitment to independence is reflected in every recommendation, assessment, and oversight result provided, thereby supporting the implementation of corporate governance that is transparent, accurate, and accountable to stakeholders.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan kerja Audit Internal, Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit Audit Internal Perseroan, fungsi yang menjalankan manajemen risiko dan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa kepada Perseroan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan.
3. Komite Audit Perseroan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit Perseroan

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

As stipulated in the Company's Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. The Audit Committee shall act independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. Reviewing financial information to be disclosed by the Company to the public and/or regulatory authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
3. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Company's business activities.
4. Providing an independent opinion in the event of differences of opinion between management and the Public Accountant regarding services rendered.
5. Providing recommendations regarding the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS).
6. Monitoring and evaluating the planning and execution of audits, as well as monitoring the follow-up of audit results, in order to assess the adequacy of internal control systems, including the adequacy of financial reporting processes.
7. Monitoring the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on findings from Internal Audit, the Public Accounting Firm, and OJK supervisory results, and providing recommendations to the Board of Commissioners.
8. Reviewing risk management activities carried out by the Board of Directors, in the event the Company does not have a risk oversight function under the Board of Commissioners.
9. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
10. Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.

Authority of the Audit Committee

In performing its duties in accordance with its responsibilities, the Audit Committee has the authority to:

1. Access documents, data, and information of the Company related to employees, funds, assets, and resources necessary for the execution of its duties.
2. Communicate directly with Company employees, including members of the Board of Directors, the Internal Audit unit, risk management functions, and the Public Accountant and/or Public Accounting Firm providing services to the Company in relation to the execution of the Audit Committee's duties and responsibilities.
3. Engage external independent parties outside the Audit Committee members to assist in the execution of its



- untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Komite Audit

Dasar Kebijakan

Berdasarkan ketentuan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (insidental) apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang pengawasannya.

Kebijakan rapat Komite Audit juga mengacu pada Pasal 74 dan Pasal 75 POJK No. 48 Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, rapat harus dihadiri oleh mayoritas anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen. Keputusan rapat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran pada Tahun 2025

Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan frekuensi sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2025. Informasi mengenai kehadiran anggota Komite Audit ditampilkan pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Josaphat Budisatyawira ¹⁾	Ketua Chairman	4	4	100%
Alip ²⁾	Ketua Chairman	4	4	100%
Hendry	Anggota Member	8	8	100%
Yusuke Yoshimoto ¹⁾	Anggota Member	4	4	100%
Rachmad Nursanto ²⁾	Anggota Member	4	4	100%

Keterangan:/Notes:

1) Masa jabatan di Komite Audit secara efektif berakhir pada 17 Juni 2025./Term of office on the Audit Committee ended effective June 17, 2025.

2) Masa jabatan di Komite Audit secara efektif dimulai pada 17 Juni 2025./Term of office on the Audit Committee commenced effective June 17, 2025.

Agenda Rapat Tahun 2025

Rapat Komite Audit yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
15 Januari 2025 January 15, 2025	Membahas kinerja Audit Internal di tahun 2024 dan rencana kerja Audit Internal di tahun 2025, membahas perkembangan Audit Internal, dan Laporan Keuangan Perseroan. Discussion on Internal Audit performance in 2024 and the Internal Audit work plan for 2025, discussion on developments in Internal Audit activities, and the Company's Financial Statements.
13 Maret 2025 March 13, 2025	Membahas perkembangan Audit Internal, dan kinerja Keuangan Perseroan. Discussion on developments in Internal Audit and the Company's financial performance.

duties (if necessary), subject to approval from the Board of Commissioners.

4. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

Audit Committee Meetings

Policy Basis

Based on the provisions of the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to hold meetings regularly at least once every 3 (three) months. Meetings may also be date on an ad hoc basis if requested by the Board of Commissioners or in the event of important and urgent matters within its supervisory scope.

The meeting policy of the Audit Committee also refers to Articles 74 and 75 of POJK No. 48 of 2024. In accordance with these provisions, meetings must be attended by a majority of members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party. Resolutions are preferably reached through deliberation and consensus; failing that, decisions are made based on a majority vote.

Meeting Frequency and Attendance in 2025

The Audit Committee held a total of 8 (eight) meetings throughout 2025. Information regarding the attendance of Audit Committee members is presented in the following table:

Meeting Agenda in 2025

The Audit Committee meetings held throughout 2025 discussed the following agenda items:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
18 Maret 2025 March 18, 2025	Laporan KAP mengenai hasil audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan. Report from the Public Accounting Firm (PAF) regarding the audit results of the Company's Financial Statements.
14 Mei 2025 May 14, 2025	Membahas perkembangan Audit Internal, <i>Collection performance update</i> , dan kinerja Keuangan Perseroan. Discussion on developments in Internal Audit, collection performance update, and the Company's financial performance.
16 Juni 2025 June 16, 2025	Membahas perkembangan Audit Internal dan kinerja Keuangan Perseroan. Discussion on developments in Internal Audit and the Company's financial performance.
17 September 2025 September 17, 2025	Membahas perkembangan Audit Internal dan kinerja Keuangan Perseroan. Discussion on developments in Internal Audit and the Company's financial performance.
12 November 2025 November 12, 2025	Membahas perkembangan Audit Internal dan kinerja Keuangan Perseroan. Discussion on developments in Internal Audit and the Company's financial performance.
28 November 2025 November 28, 2025	Laporan KAP mengenai proses audit Laporan Keuangan Perseroan. Report from the Public Accounting Firm (PAF) regarding the audit process of the Company's Financial Statements.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memastikan anggota memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan terhadap regulasi, praktik tata kelola perusahaan, serta perkembangan industri.

Untuk pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Komite Audit dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Meninjau laporan keuangan Perseroan dan memastikan bahwa laporan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan Perseroan secara wajar.
2. Melakukan evaluasi atas rencana kerja dan pelaksanaan Audit Internal, termasuk kecukupan metodologi audit, serta tindak lanjut atas temuan audit.
3. Menerima dan meninjau laporan dari Auditor Eksternal terkait pelaksanaan audit keuangan Perseroan.
4. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal.
5. Melaksanakan evaluasi atas hasil audit Teknologi Informasi dan menyampaikan rekomendasi untuk pertimbangan serta tindak lanjut segera oleh Perseroan.

Competency Development Program of Audit Committee in 2025

The Audit Committee is committed to enhancing its competencies through continuous education and training. The competency development program is implemented with the aim of ensuring that members possess the relevant knowledge, skills, and understanding of regulations, corporate governance practices, and industry developments.

Information regarding the education and/or training attended by the Audit Committee can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Implementation of the Audit Committee's Duties in 2025

Throughout 2025, the Audit Committee carried out the following activities:

1. Reviewed the Company's financial statements and ensured that they were prepared in accordance with applicable Financial Accounting Standards and fairly reflected the Company's financial position.
2. Conducted an evaluation of the Internal Audit work plan and its implementation, including the adequacy of audit methodologies and the follow-up of audit findings.
3. Received and reviewed reports from the External Auditor regarding the audit of the Company's financial statements.
4. Evaluated the performance of the External Auditor and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the External Auditor.
5. Conducted an evaluation of Information Technology audit results and submitted recommendations for consideration and prompt follow-up by the Company.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi Perseroan. Komite ini berperan menjaga objektivitas dan transparansi proses, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan arah strategis Perseroan.

Dasar Hukum Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan ketentuan regulator serta keputusan internal Perseroan. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah:

1. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2024, mengenai Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam tersebut secara umum memuat ketentuan mengenai:

1. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan tujuan Perseroan dan dinamika perubahan regulasi. Hingga akhir 2025, Dewan Komisaris menegaskan bahwa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi masih relevan dan belum memerlukan perubahan.

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting body of the Board of Commissioners established to assist in the oversight of the Company's nomination and remuneration policies. This Committee is responsible for maintaining the objectivity and transparency of the process, as well as ensuring the implementation of good corporate governance in accordance with the Company's strategic direction.

Legal Basis of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was established based on regulatory provisions and the Company's internal decisions. The legal basis serving as a reference is:

1. POJK No. 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Companies.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
3. Circular Resolution of the Board of Commissioners dated July 22, 2024, regarding Changes to the Composition of the Nomination and Remuneration Committee.

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the Charter of the Nomination and Remuneration Committee. The Charter generally contains provisions regarding:

1. Membership of the Nomination and Remuneration Committee
2. Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
3. Authority of the Nomination and Remuneration Committee
4. Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

The Charter of the Nomination and Remuneration Committee is reviewed periodically to ensure its relevance to the Company's objectives and evolving regulatory landscape. As of the end of 2025, the Board of Commissioners has confirmed that the Charter of the Nomination and Remuneration Committee remains relevant and does not require any changes.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengatur bahwa anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit berjumlah dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

1. Seorang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang wajib memenuhi syarat:
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - Memiliki pengalaman terkait nominasi dan remunerasi.
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee Charter stipulates that members of the Company's Board of Directors are not eligible to serve as members of the Nomination and Remuneration Committee. The composition of the Nomination and Remuneration Committee shall consist of at least 3 (three) members, comprising:

1. A Chairperson who concurrently serves as a member, and who is an Independent Commissioner.
2. Other members who may consist of:
 - a. Members of the Board of Commissioners.
 - b. External parties who must meet the following requirements:
 - Have no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Company's Major Shareholders.
 - Have experience related to nomination and remuneration.
 - Do not concurrently serve as members of other committees within the Company.
3. A managerial-level personnel reporting directly to the Board of Directors responsible for human resources.

The composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan Anggota Komite Legal Basis for Appointment As Chairman and Members of the Committee	Masa Jabatan Term of Office
Josaphat Budisatyawira ¹⁾	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2022, mengenai Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2022 on Changes in the Composition of the Nomination and Remuneration Committee.	2022–2025
Alip ²⁾	Ketua Chairman	• Komisaris Independen • Ketua Komite Pemantau Risiko • Ketua Komite Audit • Independent Commissioner • Chairman of the Risk Monitoring Committee • Chairman of the Audit Committee	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2026, mengenai Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated on February 9, 2026 on Changes in the Composition of the Nomination and Remuneration Committee.	2026–2029



Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan Anggota Komite Legal Basis for Appointment As Chairman and Members of the Committee	Masa Jabatan Term of Office
Takeshi Kobayashi	Anggota Member	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2024, mengenai perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated July 22, 2024 on changes to the composition of the Nomination and Remuneration Committee.	2024–2027
Lidwina ³⁾	Anggota Member	Human Capital Division Head	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2025, mengenai Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated July 22, 2024, on changes to the composition of the Nomination and Remuneration Committee.	2025–2028
Benny Redjo Setyono ⁴⁾	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2022, mengenai Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 17, 2022, on Changes to the Composition of the Nomination and Remuneration Committee.	2022–2025

Keterangan:/Notes:

- 1) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif berakhir pada 9 Februari 2026./Term of office on the Nomination and Remuneration Committee ended effective February 9, 2026.
- 2) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif dimulai pada 9 Februari 2026./Term of office on the Nomination and Remuneration Committee commenced effective February 9, 2026.
- 3) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif dimulai pada 24 Oktober 2025./The term of office on the Nomination and Remuneration Committee commenced effective October 24, 2025.
- 4) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif berakhir pada 24 Oktober 2025./The term of office on the Nomination and Remuneration Committee ended effective October 24, 2025.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan berikut ini:

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

The profiles of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee are outlined below:



Alip

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Usia
Age 50 tahun
50 years old

Kewarganegaraan
Nationality Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2026

Masa Jabatan dan Periode

2026–2029, Periode ke-1

Profil lengkap Ketua Komite yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah dijelaskan lebih rinci pada bab Profil Perseroan, subbab Profil Dewan Komisaris.

Legal Basis of Appointment as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 9, 2026

Term of Office

2026–2029, First Term

His full profile, as he also serves as a member of the Company's Board of Commissioners, is described in detail in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.

**Takeshi Kobayashi**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Usia 55 tahun
Age 55 years old

Kewarganegaraan Jepang
Nationality Japan

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2024

Masa Jabatan dan Periode

2024–2027, Periode ke-1

Profil lengkap beliau yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah dijelaskan lebih rinci pada bab Profil Perseroan, subbab Profil Dewan Komisaris.

Legal Basis of Appointment as Member of the Nomination and Remuneration Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated July 22, 2024

Term of Office

2024–2027, First Term

A complete profile of the Committee Chairman, who also serves as a member of the Company's Board of Commissioners, is provided in detail in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.

**Lidwina**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Usia 45 tahun
Age 45 years old

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Oktober 2025

Masa Jabatan dan Periode

2025–2028 Periode ke 1

Riwayat Pendidikan

Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia (2004)

Legal Basis of Appointment as Member of the Nomination and Remuneration Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated October 9, 2025

Term of Office

2025–2028 First Term

Educational Background

Bachelor of Psychology from the University of Indonesia (2004)

Riwayat Jabatan

- Kepala Divisi HRD & GS PT Buana Finance Tbk (2022–2025)
- Kepala Departemen HR & Departemen GA di PT Hino Finance Indonesia (2018–2022)
- Kepala Divisi HR & GA di PT MNC Sekuritas (2016–2017)
- Kepala Divisi HR & GA di PT Intan Baruprana Finance Tbk (2010–2016)
- Supervisor HR & GA di PT Harian Indonesia (2008–2010)
- Officer HR di High Desert Indonesia (2004–2008)

Employment History

- Head of the HRD & GS Division at PT Buana Finance Tbk (2022–2025)
- Head of the HR Department and General Affairs Department at PT Hino Finance Indonesia (2018–2022)
- Head of HR & GA Division at PT MNC Sekuritas (2016–2017)
- Head of HR & GA Division at PT Intan Baruprana Finance Tbk (2010–2016)
- HR & GA Supervisor at PT Harian Indonesia (2008–2010)
- HR Officer at High Desert Indonesia (2004–2008)

Rangkap Jabatan

- Kepala Divisi Human Capital Perseroan
- Kepala Divisi Operation Perseroan

Concurrent Positions

- The Company's Human Capital Division Head
- The Company's Operations Division Head

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi ditegakkan melalui penunjukan anggota yang memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham, sehingga dapat menjalankan fungsi secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The independence of the Nomination and Remuneration Committee is ensured through the appointment of members who meet the independence requirements in accordance with applicable regulations. The Company ensures that all members of the Nomination and Remuneration Committee have no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or shareholders, enabling them performing their duties professionally and free from conflicts of interest.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam hal fungsi nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan dan/atau diputuskan oleh pemegang saham melalui RUPS.

Dalam hal tugas remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran remunerasi terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan guna memperoleh persetujuan RUPS.
2. Merekomendasikan manfaat lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Membantu Komisaris Utama dalam menyusun pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara individual dan bersama-sama di dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Mempertimbangkan hal-hal lain berkaitan dengan remunerasi atau syarat pekerjaan yang diberlakukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal dilakukannya program pengurangan pegawai.
6. Senantiasa melakukan studi banding, survei, dan penelitian dalam rangka mengembangkan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In relation to its nomination function, the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. The composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the nomination process of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
 - c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
2. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners based on established performance indicators as evaluation input;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
4. Proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for submission and/or approval by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

In relation to its remuneration function, the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration structure, remuneration policies, and remuneration amounts for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for submission to the GMS for approval.
2. Recommending other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Assisting the President Commissioner in preparing the disclosure of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, both individually and collectively, in the Company's Annual Report.
4. Considering other matters related to remuneration or employment conditions applicable to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. Providing recommendations on compensation systems and other benefits in the event of workforce reduction programs.
6. Continuously conducting benchmarking, surveys, and research in order to develop the remuneration system for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan komunikasi secara langsung dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, unit kerja, dan/atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan.
2. Apabila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berhak melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar Kebijakan

Piagam Komite telah mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Namun demikian, pelaksanaan rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu (insidental) apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.

Sesuai dengan Pasal 74 POJK No. 48 Tahun 2024, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi harus dihadiri oleh mayoritas anggota komite remunerasi dan nominasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran pada Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat dengan frekuensi sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2025. Informasi mengenai kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditampilkan pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Josaphat Budisatyawira ¹⁾	Ketua Chairman	3	3	100%
Alip ²⁾	Ketua Chairman	-	-	-
Takeshi Kobayashi	Anggota Member	3	3	100%
Lidwina ³⁾	Anggota Member	1	1	100%
Benny Redjo Setyono ⁴⁾	Anggota Member	2	2	100%

Authority of the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee has the following authorities:

1. With the knowledge of the Board of Commissioners, the Committee may communicate directly and maintain effective working relationships with the Board of Directors, organizational units, and/or other relevant parties related to the implementation of nomination and remuneration systems within the Company.
2. If necessary, the Committee is entitled to engage experts and/or independent consultants to assist in the execution of its duties, subject to written approval from the Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Policy Basis

The Committee Charter stipulates that the Nomination and Remuneration Committee is required to hold meetings regularly at least 3 (three) times per year. However, meetings may also be date on an ad hoc basis if requested by the Board of Commissioners or in the event of important and urgent matters within its supervisory scope.

In accordance with Article 74 of POJK No. 48 of 2024, Nomination and Remuneration Committee meetings must be attended by a majority of committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) managerial-level employee under the Board of Directors responsible for human resources.

Meeting Frequency and Attendance in 2025

The Nomination and Remuneration Committee held 3 (three) meetings throughout 2025. Information regarding the attendance of Committee members is presented in the following table:



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate

Keterangan:/Notes:

- 1) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif berakhir pada 9 Februari 2026./Term of office on the Nomination and Remuneration Committee ended effective February 9, 2026.
- 2) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif dimulai pada 9 Februari 2026./Term of office on the Nomination and Remuneration Committee commenced effective February 9, 2026.
- 3) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif dimulai pada 24 Oktober 2025./The term of office on the Nomination and Remuneration Committee commenced effective October 24, 2025.
- 4) Masa jabatan di Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif berakhir pada 24 Oktober 2025./The term of office on the Nomination and Remuneration Committee ended effective October 24, 2025.

Agenda Rapat Tahun 2025

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda in 2025

The Nomination and Remuneration Committee meetings held throughout 2025 discussed the following agenda items:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
24 Maret 2025 March 24, 2025	Membahas implementasi aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Discussion of the implementation of the Company's Nomination and Remuneration Committee activities.
24 Juli 2025 July 24, 2025	Membahas implementasi aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Discussion of the implementation of the Company's Nomination and Remuneration Committee activities.
26 November 2025 November 26, 2025	Membahas implementasi aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Discussion of the implementation of the Company's Nomination and Remuneration Committee activities.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memastikan anggota memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan terhadap regulasi, praktik tata kelola perusahaan, serta perkembangan industri.

Untuk pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee in 2025

The Nomination and Remuneration Committee is committed to enhancing its competencies through continuous education and training. The competency development program is designed to ensure that members possess relevant knowledge, skills, and understanding of regulations, corporate governance practices, and industry developments.

Information regarding the education and/or training attended by the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2025. Tugas utama yang dilaksanakan meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait nominasi anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi terkait sistem remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Implementation of the Nomination and Remuneration Committee's Duties in 2025

The Nomination and Remuneration Committee actively engaged in various initiatives to fulfill its duties and responsibilities throughout 2025. The main activities carried out include:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination of members of committees under the Board of Commissioners.
3. Providing recommendations regarding the remuneration system for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, dengan mandat untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko Perseroan. Keberadaan komite ini bertujuan memastikan bahwa sistem pengelolaan risiko berjalan efektif, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, serta sejalan dengan ketentuan regulator dan praktik terbaik industri. Melalui pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berperan menjaga keberlanjutan usaha dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan internal Perseroan. Adapun dasar hukum yang digunakan antara lain adalah:

1. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024 mengenai Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam tersebut secara umum memuat ketentuan mengenai:

1. Struktur Komite
2. Keanggotaan Komite
3. Wewenang
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Rapat Komite
6. Pelaporan

Piagam Pemantau Risiko ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan tujuan Perseroan dan dinamika perubahan regulasi. Hingga akhir 2025, Dewan Komisaris menegaskan bahwa Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut masih relevan dan belum memerlukan perubahan.

The Risk Monitoring Committee was established as part of the implementation of corporate governance principles, with a mandate to support the Board of Commissioners in performing its oversight function regarding the Company's risk management. The purpose of this committee is to ensure that the risk management system operates effectively, in accordance with established policies, and in line with regulatory requirements and industry best practices. Through the performance of its duties, the Risk Monitoring Committee plays a role in safeguarding business continuity and protecting the interests of stakeholders.

Legal Basis of the Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee is based on applicable laws and regulations as well as the Company's internal decisions. The legal basis used includes:

1. POJK No. 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Companies.
2. POJK No. 42 of 2024 on the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
3. POJK No. 28/POJK.05/2020 on the Assessment of the Health Status of Non-Bank Financial Services Institutions.
4. Circular Resolution of the Board of Commissioners dated February 26, 2024, regarding Changes to the Composition of the Risk Monitoring Committee.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the Risk Monitoring Committee Charter. The Charter generally contains provisions regarding:

1. Committee Structure
2. Committee Membership
3. Authority
4. Duties and Responsibilities
5. Committee Meetings
6. Reporting

The Risk Monitoring Committee Charter is reviewed periodically to ensure its relevance to the Company's objectives and the dynamics of regulatory changes. As of the end of 2025, the Board of Commissioners confirms that the Risk Monitoring Committee Charter remains relevant and does not require any changes.



Komposisi dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite, keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 2 orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua; dan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko sebagai anggota.

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3 (tiga) tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Komite Pemantau Risiko dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Risk Monitoring Committee

Pursuant to the provisions set forth in the Committee Charter, the Risk Monitoring Committee shall consist of at least 2 members, comprising:

- 1 (one) Independent Commissioner as Chair; and
- 1 (one) Independent Party with expertise in finance and/or risk management as a member.

The term of office for members of the Risk Monitoring Committee is 3 (three) years. Upon the expiration of their term, members of the Risk Monitoring Committee may be reappointed based on the assessment and approval of the Board of Commissioners.

The composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions at the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Sebagai Ketua dan Anggota Komite Legal Basis of Appointment as the Chairman and Members of the Committee	Masa Jabatan Term of Office
Alip	Ketua Chairman	- Ketua Komite Audit - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Chairman of the Audit Committee - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 26, 2024	2024–2027
Takeshi Kobayashi ¹⁾	Anggota Member	- Komisaris Utama - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - President Commissioner - Member of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2026 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 26, 2026	2026–2029
Hendry	Anggota Member	- Tidak merangkap jabatan struktural di Perseroan (Pihak Independen) - Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen - Does not hold any other executive positions within the Company (Independent Party) - Member of the Audit Committee who is Independent Party	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 26, 2024	2024–2027
Chihiro Ushigome ²⁾	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024 Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 26, 2024	2024–2027

Keterangan:

1) Masa jabatan di Komite Pemantau Risiko secara efektif dimulai pada 26 Februari 2026./The term of office in the Risk Monitoring Committee commenced effective February 26, 2026.

2) Masa jabatan di Komite Pemantau Risiko secara efektif berakhir pada 26 Februari 2026./The term of office in the Risk Monitoring Committee ended effective February 26, 2026.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 diuraikan berikut ini:



Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024

Masa Jabatan dan Periode

2024–2027 Periode ke 1

Profil lengkap Ketua Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, telah dijelaskan lebih rinci pada bab Profil Perseroan, subbab Profil Dewan Komisaris.



Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2026

Masa Jabatan dan Periode

2026–2029 Periode ke 1

Profil lengkap beliau yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah dijelaskan lebih rinci pada bab Profil Perseroan, subbab Profil Dewan Komisaris.



Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2024

Masa Jabatan dan Periode

2024–2027 Periode ke 1

Profil lengkap beliau yang juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, telah dijelaskan lebih rinci pada Bab Tata Kelola Perusahaan, subbab Komite Audit, dalam pembahasan berjudul Profil Komite Audit.

Profile of the Risk Monitoring Committee

The profiles of the Chairman and members of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025, are outlined below:

Alip

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Usia 50 tahun
Age 50 years old

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Legal Basis of Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated February 26, 2024

Term of Office

2024–2027 First Term

A complete profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, who also serves as an Independent Commissioner of the Company, is provided in detail in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.

Takeshi Kobayashi

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Usia 55 tahun
Age 55 years old

Kewarganegaraan Jepang
Nationality Japan

Legal Basis of Appointment as Member of the Risk Monitoring Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners meeting dated February 26, 2026

Term of Office

2026–2029 First Term

His full profile, as he also serves as a member of the Company's Board of Commissioners, is described in detail in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection.

Hendry

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Usia 47 tahun
Age 47 years old

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Legal Basis of Appointment as Member of the Risk Monitoring Committee

Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated. February 26, 2024

Term of Office

2024–2027 First Term

His full profile, as he also serves as a member of the Audit Committee, is described in detail in the Corporate Governance chapter, under the Audit Committee subsection, in the section titled Audit Committee Profile.



Independensi Komite Pemantau Risiko

Independensi Komite Pemantau Risiko ditegakkan melalui penunjukan anggota yang memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham, sehingga dapat menjalankan fungsi secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, seperti yang tercantum dalam Piagam Komite, paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risikonya.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit-unit manajemen risiko.
4. Menyelenggarakan rapat secara teratur/rutin.
5. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Dasar Kebijakan

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan frekuensi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap periode 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemantau Risiko untuk memastikan jalannya diskusi secara terarah. Setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota dan peserta yang hadir, kemudian didistribusikan kepada peserta rapat serta Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas. Risalah tersebut didokumentasikan secara tertib dan dapat dikelola dengan dukungan fungsi Corporate Secretary guna menjamin ketersediaan dan keakuratan catatan rapat. Kebijakan ini telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran pada Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat dengan frekuensi sebanyak 6 (enam) kali sepanjang tahun 2025. Informasi mengenai kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

The independence of the Risk Monitoring Committee is ensured through the appointment of members who meet the independence requirements in accordance with applicable regulations. The Company ensures that all members of the Risk Monitoring Committee have no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or shareholders, enabling them performing their functions professionally and free from conflicts of interest.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, as stated in the Committee Charter, include at a minimum the following:

1. Evaluating and reviewing risk management policies and strategies for approval by the Board of Commissioners.
2. Evaluating the alignment between the implementation of risk management and its established policies.
3. Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and risk management units.
4. Holding regular meetings.
5. Preparing the Committee's charter and reviewing it as necessary, at least once every 2 (two) years.

Risk Monitoring Committee Meetings

Policy Basis

Meetings of the Risk Monitoring Committee are held in accordance with the Company's needs, with a minimum frequency of once every 3 (three) months. Meetings are chaired by the Chairperson of the Risk Monitoring Committee to ensure structured discussions. Each meeting must be documented in minutes of meeting, signed by all attending members and participants, and subsequently distributed to meeting participants and the Board of Commissioners as a form of accountability. The minutes are properly archived and may be supported by the Corporate Secretary function to ensure availability and accuracy of records. This policy is governed by the Risk Monitoring Committee Charter.

Meeting Frequency and Attendance Rates in 2025

The Risk Monitoring Committee held 6 (six) meetings throughout 2025. Information regarding the attendance of members of the Risk Monitoring Committee is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Alip	Ketua Chairman	6	6	100%
Chihiro Ushigome	Anggota Member	6	6	100%
Hendry	Anggota Member	6	6	100%

Agenda Rapat Tahun 2025

Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 membahas sejumlah agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda in 2025

The Risk Monitoring Committee meetings held throughout 2025 discussed the following agenda items:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
17 Januari 2025 January 17, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.
14 Maret 2025 March 14, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.
15 Mei 2025 May 15, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.
17 Juli 2025 July 17, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.
17 September 2025 September 17, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.
12 November 2025 November 12, 2025	Membahas perkembangan dari pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Discussion on the development of risk management implementation in the Company.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memastikan anggota memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan terhadap regulasi, praktik GCG, serta perkembangan industri.

Untuk pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program of the Risk Monitoring Committee in 2025

The Risk Monitoring Committee is committed to enhancing competencies through continuous education and training. The competency development program is implemented with the aim of ensuring that members possess the relevant knowledge, skills, and understanding regarding regulations, GCG practices, and industry developments.

Information regarding the education and/or training attended by the Risk Monitoring Committee can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 secara konsisten menjalankan peran pengawasan melalui berbagai aktivitas yang mendukung penguatan sistem manajemen risiko Perseroan. Sepanjang periode tersebut, Komite berfokus pada dua hal utama, yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta unit-unit manajemen risiko, sehingga efektivitas pengendalian risiko dapat terjaga.

Implementation of the Risk Monitoring Committee's Duties in 2025

In 2025, the Risk Monitoring Committee consistently carried out its supervisory role through various activities supporting the strengthening of the Company's risk management system. Throughout the period, the Committee focused on two key areas, namely:

1. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and risk management units, thereby ensuring the effectiveness of risk control is maintained.



2. Menyelenggarakan rapat secara berkala, yang menjadi sarana untuk membahas perkembangan risiko dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

2. Holding regular meetings as a forum to discuss risk developments and the necessary follow-up actions.

Komite–Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperoleh dukungan dari komite-komite yang secara struktural berada di bawah koordinasinya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

1. *Risk Management Committee* (RMC)
2. *Early Alert Committee* (EAC)
3. *Retail Alert Committee* (RAC)
4. *Asset and Liability Committee* (ALCO)
5. *IT Steering Committee*

Pembentukan komite-komite di bawah Direksi bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Direksi dengan kewenangan untuk mengkaji, memberikan rekomendasi dan/atau memberikan persetujuan atau keputusan.

Secara umum fungsi Komite adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direksi merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Membantu Direksi merumuskan pemecahan masalah.
3. Memberikan masukan mengenai suatu masalah sesuai dengan bidangnya.
4. Memantau dan mengevaluasi masalah sesuai dengan bidangnya.

in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors receives support from committees that are structurally under its coordination, as described in the following table:

1. Risk Management Committee (RMC)
2. Early Alert Committee (EAC)
3. Retail Alert Committee (RAC)
4. Asset and Liability Committee (ALCO)
5. IT Steering Committee

The establishment of committees under the Board of Directors is intended to support the effective execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors, taking into account the needs of the Company. These committees are accountable to the Board of Directors and are vested with the authority to review, provide recommendations, and/or grant approvals or make decisions.

In general, the functions of the Committees are as follows:

1. Assisting the Board of Directors in formulating policies and strategies in accordance with their respective areas of responsibility.
2. Assisting the Board of Directors in developing solutions to issues and challenges.
3. Providing input and advice on matters within their respective areas of expertise.
4. Monitoring and evaluating matters within their respective areas of responsibility.

Komite Committee	Kategori Risiko Risk Categories	Anggota Komite Member of Committee	Kewenangan Authority	Periode Period
Risk Management Committee (RMC)	Seluruh Profil Risiko Complete Risk Profile	- Direksi; - Seluruh Divisi yang menerapkan manajemen risiko. - Board of Directors; - All divisions implementing risk management practices.	- Melakukan penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko; - Memastikan proses kaji ulang secara berkala serta melakukan perbaikan atau penyesuaian pada penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko berjalan secara efektif di seluruh unit kerja yang berkaitan sehingga risiko yang dihadapi dapat diminimalkan dan terjaga dengan baik; dan - Penetapan dan hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. - Developing risk management policies, strategies, and guidelines; - Ensuring that periodic reviews are conducted, and implementing improvements or adjustments to the application of risk management policies and procedures effectively across all relevant business units, so that risks are minimized and properly managed; and - Determining and approving matters related to business decisions that deviate and from established procedures.	Bulanan Monthly
Early Alert Committee (EAC)	Risiko Kredit pada Segmen Debitur Korporasi Credit Risk in the Corporate Debtor Segment	- Direksi; - Divisi Credit Risk, Fraud & Operational Risk Management; - Departemen Penagihan MSHE; - Manajer Wilayah Bisnis Korporasi. - Board of Directors; - Credit Risk, Fraud & Operational Risk Management Division; - MSHE Collections Department; - Corporate Business Regional Manager.	Meninjau portofolio bisnis Korporasi secara umum serta akun yang masuk dalam peringatan dini, termasuk pergerakan akun-akun tersebut (keluar dan masuk dari peringatan dini) dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk pengembangan dan penyelesaian masalah. Reviewing the overall corporate business portfolio, as well as accounts classified under early warning, including movements of such accounts (entries into and exits from early warning status), and taking the necessary actions for business development and issue resolution.	Bulanan Monthly
Retail Alert Committee (RAC)	Risiko Kredit pada Segmen Debitur Retail Credit Risk in the Retail Debtor Segment	- Direksi; - Divisi Credit Risk, Fraud & Operational Risk Management; - Divisi Business Development; - Divisi Sales & Marketing; - Divisi Collection; - Divisi General Affair & Operations - Board of Directors; - Credit Risk, Fraud & Operational Risk Management Division; - Business Development Division; - Sales & Marketing Division; - Collections Division; - General Affairs & Operations Division.	Mengkaji proses portofolio bisnis ritel secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas dan profitabilitas dari setiap produk. Reviewing the retail business portfolio process comprehensively and implementing corrective measures to enhance the quality and profitability of each product.	Bulanan Monthly



Komite Committee	Kategori Risiko Risk Categories	Anggota Komite Member of Committee	Kewenangan Authority	Periode Period
Asset and Liability Committee (ALCO)	Risiko Pasar, Risiko Likuiditas Market Risk, Liquidity Risk	- Direksi; - Divisi Finance & Accounting - Board of Directors; - Finance & Accounting Division	- Memberikan arahan strategis dan pengawasan efektif atas manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar) serta struktur aset dan liabilitas. - Memastikan proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan melaporkan risiko likuiditas dan risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar). - Memastikan tersedianya kebijakan, prosedur dan ambang batas yang memadai untuk memitigasi risiko likuiditas dan risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar). - Providing strategic direction and effective oversight of liquidity risk management, market risk management (interest rate risk and foreign exchange risk), as well as asset and liability structure management. - Ensuring a comprehensive process for identifying, measuring, monitoring, controlling, and reporting liquidity risk and market risk (interest rate risk and foreign exchange risk). - Ensuring the availability of adequate policies, procedures, and limits to mitigate liquidity risk and market risk (interest rate risk and foreign exchange risk).	Bulanan Monthly
IT Steering Committee	Semua Profil Risiko All Risk Profiles	- Direksi; - Divisi Information Technology; - Divisi Credit Risk, Fraud & Operational Management; - Divisi Sales & Marketing; - Divisi Finance & Accounting; - Divisi Collection; - Divisi GA & Operations - Board of Directors; - Information Technology Division; - Credit Risk, Fraud & Operational Management Division; - Sales & Marketing Division; - Finance & Accounting Division; - Collections Division; - General Affairs & Operations Division.	- Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi ("TI") untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan untuk mendukung strategi bisnis Perseroan. - Mengelola dan mengendalikan kemungkinan risiko yang muncul dalam hal penggunaan TI untuk melindungi kepentingan Perseroan dan para pelanggan. - Memastikan bahwa implementasi operasional TI telah berjalan secara efektif dan efisien dengan kebijakan TI termasuk regulasi dan hukum yang berlaku. - Optimizing the use of Information Technology ("IT") to enhance the effectiveness and efficiency of operational activities, as well as to improve the quality of services to customers in support of the Company's business strategy. - Managing and controlling potential risks arising from the use of IT to safeguard the interests of the Company and its customers. - Ensuring that IT operational implementation is conducted effectively and efficiently in accordance with IT policies, including applicable regulations and laws.	Tiga Bulanan Quarterly

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung di bawah koordinasi Direksi yang berperan menjaga kelancaran komunikasi antar organ Perseroan serta menjembatani hubungan dengan pemegang saham, regulator termasuk OJK dan BEI, serta pemangku kepentingan lainnya. Fungsi ini juga mencakup tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sekaligus mendukung penerapan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan Sekretaris Perusahaan menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan komunikasi Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengangkatan dan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Corporate Secretary is a supporting body under the coordination of the Board of Directors that plays a role in maintaining smooth communication among the Company's organs and bridging relationships with shareholders, regulators—including the OJK and the IDX—and other stakeholders. This function also includes the responsibility of ensuring compliance with laws and regulations in the capital market sector, while supporting the implementation of the principles of information disclosure and good corporate governance. The presence of the Corporate Secretary is a crucial element in maintaining transparency, accountability, and consistent communication between the Company and all stakeholders. The appointment and performance of the Corporate Secretary's duties are guided by POJK No. 35/ POJK.04/2014 regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Nama Name	Suviana
Usia Age	44 tahun 44 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 116/LGL-MPMF/SK-DIR/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 Decree of the Board of Directors No. 116/LGL-MPMF/SK-DIR/VI/2019 dated June 24, 2019
Masa Jabatan dan Periode Term of Office	2024–2027
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Industri, Universitas Bina Nusantara (2003) Bachelor of Industrial Engineering, Bina Nusantara University (2003)
Riwayat Karier Employment History	• Promotion and Branding Department Head (2016–2019) • Promotion and Media Communication (2015–2016) • Service Assistant Manager (2007–2015) • Quality Service Specialist



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui situs web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi mengenai Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sekretaris Perusahaan memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memastikan anggota memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan terhadap regulasi, praktik GCG, serta perkembangan industri.

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang dirangkum dalam tabel berikut:

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Keeping abreast of capital market developments, particularly prevailing laws and regulations in the capital market sector.
2. Providing advice to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure compliance with applicable capital market laws and regulations.
3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Good Corporate Governance, which includes:
 - a. Disclosure of information to the public, including through the Company's website.
 - b. Timely submission of reports to OJK.
 - c. Organization and documentation of the GMS.
 - d. Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - e. Implementation of orientation programs regarding the Company for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
4. Acting as liaison between the Company and shareholders, the OJK, and other stakeholders.

Competency Development Program of the Corporate Secretary in 2025

The Corporate Secretary is committed to continuously enhancing competencies through ongoing education and training. The competency development program is conducted to ensure that members possess relevant knowledge, skills, and understanding of regulations, GCG practices, and industry developments.

In 2025, the Corporate Secretary has participated in various competency development programs, summarized in the following table:

Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Materi Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program Materials	Penyelenggara Organizer
28 Februari 2025 February 28, 2025	Webinar Sustainability Report Awareness	OJK
7 Maret 2025 March 7, 2025	EnvironmenTalk: Sustainable House	MPM Group
25 Juni 2025 June 25, 2025	Kode Etik Code of Conduct	Internal
10 Oktober 2025 October 10, 2025	Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector	Internal
29 Oktober 2025 October 29, 2025	Risk Catastrophic Assesment Workshop	Internal
26 Desember 2025 December 26, 2025	Analytical Thinking: 5 Whys	Internal

Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam mendukung kelancaran operasional dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya di bidang pasar modal, serta menjaga transparansi komunikasi dengan pemangku kepentingan. Adapun kegiatan yang dijalankan meliputi:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, serta rapat komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat yang diselenggarakan.
3. Mengikuti perkembangan peraturan pasar modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas pasar modal maupun dari OJK.
4. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui situs web Perseroan, serta melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun OJK setiap informasi yang bersifat material.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan keuangan berkelanjutan dan mempersiapkan Laporan Keberlanjutan Perseroan.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan edukasi, literasi, dan inklusi Perseroan.
7. Mempersiapkan Laporan Tahunan Perseroan.
8. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan-laporan berkala maupun insidental yang wajib disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK.

Implementation of the Corporate Secretary Activities in 2025

The Corporate Secretary plays an active role in supporting the smooth execution of operational activities and the implementation of Good Corporate Governance. Various activities have been carried out throughout 2025 to ensure compliance with applicable regulations, particularly in the capital market sector, as well as to maintain transparent communication with stakeholders. The activities undertaken include:

1. Organizing and attending meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and committees under the Board of Commissioners.
2. Preparing and documenting minutes of meetings held.
3. Keeping abreast of capital market regulatory developments and providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners, particularly in relation to the issuance of new regulations by capital market authorities and OJK.
4. Conducting information disclosure to the public through the Company's website, as well as reporting material information to the Indonesia Stock Exchange and OJK.
5. Coordinating the implementation of sustainable finance activities and preparing the Company's Sustainability Report.
6. Coordinating the implementation of the Company's education, literacy, and inclusion activities.
7. Preparing the Company's Annual Report.
8. Preparing and submitting periodic and ad-hoc reports required to be submitted to the Indonesia Stock Exchange and OJK.



Audit Internal

Internal Audit

Audit Internal merupakan kegiatan independen dan objektif yang bertujuan memberikan keyakinan serta konsultasi untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Dengan pendekatan sistematis, Audit Internal berfokus pada evaluasi serta peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan penerapan GCG.

Pelaksanaan fungsi Audit Internal di Perseroan menjadi tanggung jawab Divisi Audit Internal. Divisi ini secara umum bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian internal, sekaligus memberikan pandangan, keyakinan, dan konsultasi yang independen dan objektif guna mendukung peningkatan nilai serta perbaikan kinerja operasional Perseroan.

Dasar Hukum Audit Internal

Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Audit Internal Perseroan berlandaskan pada regulasi yang berlaku, antara lain:

1. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal.
2. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal sebagai pelaksana fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga memastikan independensi serta kepatuhan terhadap regulasi. Profil Kepala Divisi Audit Internal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Internal Audit is an independent and objective activity designed to provide assurance and consulting services aimed at enhancing value and improving the Company's operations. Through a systematic approach, Internal Audit focuses on evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and the implementation of GCG.

The implementation of the Internal Audit function within the Company is the responsibility of the Internal Audit Division. This Division is generally tasked with monitoring and evaluating internal controls, as well as providing independent and objective assurance and consulting services to support value enhancement and the improvement of the Company's operational performance.

Legal Basis of Internal Audit

The establishment and implementation of the Company's Internal Audit function are based on applicable regulations, including:

1. POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment of Internal Audit Units and Guidelines for Internal Audit Unit Charters.
2. POJK No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Financial Services Institutions.

Profile of the Head of the Internal Audit Division

The Internal Audit Division, as the implementing unit of the Internal Audit function, is led by a Head of Division. The appointment of the Head of the Internal Audit Division is conducted in accordance with applicable requirements and regulations, thereby ensuring independence and regulatory compliance. The profile of the Head of the Internal Audit Division as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Rino Bayu Irawan
Jabatan Position	Kepala Divisi Audit Internal Head of Internal Audit Division
Usia Age	49 tahun 49 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direktur Utama No. 002/CORSEC-JMFI/SK-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 Decree of the President Director No. 002/CORSEC-JMFI/SK-DIR/III/2025 dated March 10, 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, di STIE YPKP Bandung (1995) Bachelor of Economics, majoring in Accountancy, at STIE YPKP Bandung (1995)
Riwayat Karier Employment History	• Kepala Divisi Audit Internal, PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2024–2025) • Kepala Divisi Audit Internal di Perseroan (2021–2024) • Kepala Divisi Internal Audit di PT Nissan Financial Services Indonesia (2018–2021) • Kepala Divisi Internal Audit di PT CIMB Niaga Auto Finance Indonesia (2015–2018) • Head of Internal Audit Division, PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2024–2025) • Head of Internal Audit Division of the Company (2021–2024) • Head of Internal Audit Division at PT Nissan Financial Services Indonesia (2018–2021) • Head of Internal Audit Division at PT CIMB Niaga Auto Finance Indonesia (2015–2018)

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal, yang secara umum memuat ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenang Audit Internal.

Piagam Audit Internal yang saat ini berlaku secara resmi ditetapkan pada tanggal 17 April 2025. Piagam tersebut merupakan pembaruan atas hasil peninjauan berkala agar tetap relevan dengan tujuan Perseroan dan dinamika perubahan regulasi.

Struktur dan Kedudukan

Dalam kerangka organisasi Perseroan, Unit Audit Internal beroperasi di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Unit ini memegang peran penting dalam memastikan kontrol dan tatakelola internal yang kuat, dengan kewajiban pelaporan langsung kepada Direktur Utama sambil mempertahankan akuntabilitas fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal, terdapat sejumlah ketentuan lain sebagai berikut:

1. Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.
3. Direksi Perseroan memberikan dukungan penuh kepada Audit Internal untuk bekerja secara independen tanpa pengaruh dalam bentuk apa pun. Aktivitas Audit Internal harus bebas intervensi dalam penentuan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit.

Internal Audit Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Division adheres to the Internal Audit Charter, which generally sets forth provisions regarding the duties, responsibilities, and authority of Internal Audit.

The currently effective Internal Audit Charter was officially adopted on April 17, 2025. This Charter is an update resulting from a periodic review to ensure it remains relevant to the Company's objectives and the evolving regulatory landscape.

Structure and Position

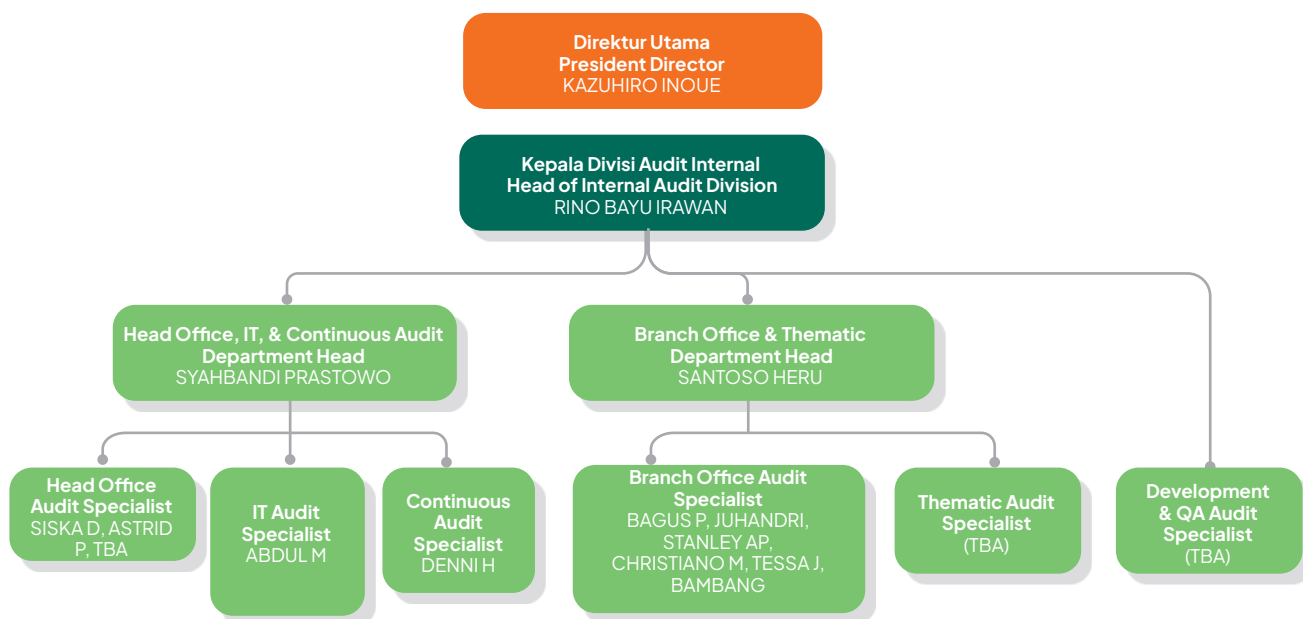
Within the Company's organizational framework, the Internal Audit Unit operates under the direct supervision of the President Director. This unit plays a crucial role in ensuring strong internal controls and governance, with a direct reporting obligation to the President Director while maintaining functional accountability to the Board of Commissioners through the Audit Committee. As set forth in the Internal Audit Charter, the following additional provisions apply:

1. The Company's Internal Audit is led by the Head of Internal Audit Division, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee.
2. Internal Auditors report directly to the Head of Internal Audit Division.
3. The Company's Board of Directors provides full support to the Internal Audit function to operate independently without any form of influence. Internal Audit activities must be free from interference in determining the scope of the audit, conducting the audit, and communicating audit results.



4. Audit Internal Perseroan harus independen dari aktivitas yang diaudit dan harus dilakukan dengan tidak memihak, keahlian yang memadai dan kecermatan profesional.

4. The Company's Internal Audit must be independent from the activities being audited and must be conducted impartially, with adequate expertise and professional diligence.



Tugas dan Tanggung Jawab

Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Ruang lingkup tugas Audit Internal meliputi seluruh unit kerja di Perseroan. Ruang lingkup tugas ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian Perseroan dengan penjabaran sebagai berikut, yaitu:
 - Melakukan identifikasi dari semua risiko Perseroan yang dapat terbentuk.
 - Penerapan Tata Kelola Perusahaan.
 - Memastikan kesesuaian, kebenaran dan keakuratan mengenai informasi keuangan, teknologi informasi, sumber daya manusia, bisnis, dan operasional Perseroan.
 - Memastikan tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, hukum, dan peraturan yang berlaku.
 - Memperoleh sumber daya diterapkan secara ekonomis, penggunaannya secara efisien serta program, rencana dan sasaran tercapai dengan baik.
 - Terdapatnya perbaikan berkesinambungan yang berkualitas di dalam proses pengendalian Perseroan.
 - Pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman dari seluruh Organ Perseroan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengidentifikasi perbaikan yang dapat dilakukan terhadap pengendalian manajemen dan reputasi Perseroan yang akan tercantum dalam pemeriksaan.
- Audit Internal Perseroan bertanggung jawab untuk:
 - Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis risiko, dan menyampaikan

Duties and Responsibilities

Internal Audit has the following duties and responsibilities:

- The scope of Internal Audit covers all business units within the Company. The scope is established to evaluate the Company's governance, risk management, and control processes, as detailed below:
 - Identifying all potential risks arising within the Company.
 - Implementation of Corporate Governance.
 - Ensuring the accuracy, completeness and reliability of the Company's financial, information technology, human resources, business, and operational information.
 - Ensuring that employee actions comply with applicable policies, laws, and regulations.
 - Ensuring that resources are utilized economically, used efficiently, and that programs, plans, and objectives are effectively achieved.
 - Ensuring continuous, high-quality improvement in the Company's control processes.
 - Ensuring knowledge, awareness, and understanding of all Company organs regarding applicable laws and regulations.
 - Identifying improvements to management controls and the Company's reputation to be included in audit activities.
- Internal Audit of the Company is responsible for:
 - Preparing an annual audit plan based on a risk-based methodology and submitting it to the President

rencana audit tahunan kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

- b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh Direksi atau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- d. Memastikan tersedianya jumlah anggota audit yang cukup dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai serta bersertifikasi profesional untuk melaksanakan audit.
- e. Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang diaudit dengan tembusan kepada Direktur Utama, Direktur terkait, dan unit lain yang berkepentingan.
- g. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang signifikan akan tetap berstatus "belum selesai" sampai temuan diselesaikan.
- h. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- i. Menyiapkan tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Audit Internal.
- j. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku.
- k. Melaksanakan *Quality Assurance and Improvement Programs* (QAIP) yang mencakup seluruh aspek aktivitas Audit Internal. QAIP tersebut meliputi evaluasi integritas auditor dalam menerapkan kode etik. QAIP juga menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas Audit Internal serta mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.

Wewenang

1. Audit Internal Perseroan berwenang untuk:
 - a. Melakukan akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, pencatatan, keuangan, teknologi informasi dan personel dalam hal komunikasi di Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Memiliki akses yang penuh dan bebas, langsung kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
 - d. Mendapatkan bantuan personil dari unit-unit kerja di Perseroan di mana audit dilaksanakan, serta jasa

Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

- b. Implementing the annual audit plan, including special assignments or projects requested by the Board of Directors or the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- c. Examining and evaluating the implementation of internal controls and the risk management system in accordance with Company policies.
- d. Ensuring the availability of a sufficient number of audit personnel with adequate knowledge, skills, experience, and professional certifications to conduct audits.
- e. Conducting audit activities and assessing the efficiency and effectiveness of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other activities.
- f. Preparing audit reports and submitting them to the audited parties, with copies to the President Director, relevant Directors, and related units.
- g. Following up on audit findings and recommendations. All significant audit findings shall remain "open" until resolved.
- h. Reporting the status of corrective actions on audit findings and recommendations to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- i. Establishing performance measurement benchmarks for Internal Audit objectives.
- j. Preparing and maintaining adequate audit working papers in accordance with applicable regulations.
- k. Implementing *Quality Assurance and Improvement Programs* (QAIP) covering all aspects of Internal Audit activities. The QAIP includes evaluation of auditors' integrity in applying the code of ethics, as well as assessment of the efficiency and effectiveness of Internal Audit activities and identification of improvement opportunities.

Authority

1. Internal Audit of the Company is authorized to:
 - a. Have unrestricted access to all activities, functions, records, financial information, information technology, and personnel in the Company in connection with its duties and functions.
 - b. Have full and unrestricted direct access to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
 - c. Allocate resources, determine frequency, select audit subjects, define the scope of work, and apply the necessary audit techniques to achieve audit objectives.
 - d. Obtain assistance from personnel of the Company's business units where audits are conducted, as well as



khusus lainnya (jika diperlukan) dari dalam maupun luar Perseroan.

other specialized services (if necessary) from within or outside the Company.

2. Audit Internal Perseroan tidak berwenang untuk:
 - a. Melaksanakan tugas operasional Perseroan dan/atau pihak lainnya.
 - b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi kecuali untuk kepentingan Audit Internal Perseroan
 - c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal Perseroan, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan untuk Audit Internal Perseroan.

2. Internal Audit of the Company is not authorized to:
 - a. Performing operational duties of the Company and/or other parties.
 - b. Initiate and approve accounting transactions, except for Internal Audit purposes.
 - c. Direct the activities of employees not employed by Internal Audit, unless such employees are explicitly assigned as audit team members or seconded to Internal Audit.

Rapat Unit Audit Internal

Dasar Kebijakan

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, Unit Audit Internal menyelenggarakan rapat rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk memastikan pengawasan yang efektif dan keselarasan dengan tujuan strategis Perseroan. Selain itu, unit ini tetap tanggap terhadap isu-isu yang muncul dengan mengadakan rapat insidental setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris atau ketika timbul masalah kritis dan mendesak dalam lingkup pengawasannya.

Internal Audit Unit Meetings

Policy Basis

In accordance with the provisions set forth in the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit holds regular meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee to ensure effective oversight and alignment with the Company's strategic objectives. In addition, the unit remains responsive to emerging issues by holding ad hoc meetings whenever requested by the Board of Commissioners or when critical and urgent issues arise within its scope of oversight.

Frekuensi dan Agenda Rapat Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal terlibat dalam diskusi komprehensif, membahas agenda utama yang berkontribusi pada penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Informasi rincian pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Meeting Frequency and Agenda in 2025

Throughout 2025, the Internal Audit Unit engaged in comprehensive discussions, addressing key agenda items that contribute to strengthening internal controls, risk management, and overall corporate governance. Details of these discussions are outlined as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
15 Januari 2025 January 15, 2025	Audit Committee Meeting
31 Januari 2025 January 31, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
28 Februari 2025 February 28, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
13 Maret 2025 March 13, 2025	Audit Committee Meeting
27 Maret 2025 March 27, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
28 April 2025 April 28, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
14 Mei 2025 May 14, 2025	Audit Committee Meeting
28 Mei 2025 May 28, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
30 Juni 2025 June 30 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
15 Juli 2025 July 15, 2025	Executive Summary Report - BOD Meeting
16 Juli 2025 July 16, 2025	Audit Committee Meeting
30 Juli 2025 July 30, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
29 Agustus 2025 August 29, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
17 September 2025 September 17, 2025	Audit Committee Meeting
30 September 2025 September 30, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
31 Oktober 2025 October 31, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
12 November 2025 November 12, 2025	Audit Committee Meeting
3 Desember 2025 December 3, 2025	Internal Audit Progress Update - CEO Meeting
19 Desember 2025 December 19, 2025	Executive Summary Report - BOD Meeting

Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

- Sertifikasi *Qualified Internal Audit* Tingkat Lanjutan
- Sertifikasi *Investigator Fraud Profesional*
- Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi Profesional
- Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 27001:2022

Internal Audit Qualifications or Professional Certifications

- Advanced Qualified Internal Auditor Certification
- Professional Fraud Investigator Certification
- Professional Information Technology Auditor Certification
- ISO 27001:2022 Lead Auditor Certification

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development Program in 2025

Throughout 2025, the Internal Audit Unit participated in the following competency development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tahun Year	Penyelenggara Organizer
Rino Bayu Irawan	Head of Internal Audit Division	- Sertifikasi manajerial SPPI - Sertifikasi <i>balanced scorecard</i> dan sertifikasi <i>coaching for performance & development</i> - <i>Training</i> APU PPT - <i>Training</i> Code of Conduct - <i>Effective team work</i> - ISO 27001:2022 - 5 Cara Berpikir Analitis - <i>4dx Disciplines</i> - SPPI Managerial Certification - Balanced score card and coaching for performance & development certifications - AML-CFT Training - Code of Conduct Training - Effective team work - ISO 27001:2022 - Analytical Thinking 5ways - 4DX Disciplines	2025	APPI OneGML Consulting Blanchard LMS Perusahaan APPI OneGML Consulting Blanchard Corporate LMS



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tahun Year	Penyelenggara Organizer
Stanley Adhitama Putra	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Bagus Pratama	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Abdul Mursid	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Siska Desylawati	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Santoso Heru	Internal Audit Department Head	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tahun Year	Penyelenggara Organizer
Tessa Jogo	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Juhandri	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Christiano Mecca	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Bambang Windra Widi Nugraha	Internal Audit Specialist	- Microsoft SQL Server Query for End Users - Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	Executrain LMS Perusahaan Executrain Corporate LMS
Syahbandi Prastowo	Internal Audit Department Head	- Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan - Training ISO Awareness - Training Code of Conduct - Training APU PPT	2025	LMS Perusahaan Corporate LMS
Erwin Tumpal	Internal Audit Specialist	- Certified Professional Forensic Auditor (CPFA)	2025	Revolution Mind Indonesia



Pelaksanaan Tugas Unit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Audit Internal telah melaksanakan proses audit kepada 41 cabang dan 6 unit kerja di kantor pusat, serta melakukan peninjauan khusus terhadap implementasi:
 - a. Proses kredit dan penanganan kredit bermasalah baik untuk pembiayaan retail, serta proses operasional lainnya.
 - b. Pelaksanaan audit kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK yang terdiri dari:
 - i. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
 - ii. Teknologi Informasi (TI).
 - iii. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM).
 - iv. Customer Care dan Customer Relation.
2. Audit atas Implementasi ISO 27001:2022 sistem manajemen keamanan informasi.
3. Tematik audit terkait *contract early termination*.
4. *Joint Audit Onboarding to Collection, Fraud Assessment Collection*, dan *Audit Branch Assessment* bersama MPM Holding.
5. Menyampaikan hasil audit dan rekomendasi kepada Direksi dan Komite Audit serta unit kerja terkait secara berkala.
6. Melakukan pertemuan dengan Direksi dan Komite Audit secara berkala untuk membahas perkembangan kinerja Audit Internal.
7. Melakukan pertemuan dengan Komite Audit secara berkala untuk membahas perkembangan kinerja Audit Internal.

Implementation of Unit Activities in 2025

Throughout 2025, the Internal Audit Unit has carried out the following activities:

1. The Internal Audit Unit conducted audits at 41 branches and 6 head office units, as well as performed special reviews on the implementation of:
 - a. Credit processes and non-performing loan handling for retail financing, as well as other operational processes.
 - b. Compliance audits in accordance with OJK regulations, consisting of:
 - i. Financial Information Service System (SLIK).
 - ii. Information Technology (IT).
 - iii. Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction (AML-CFT and CPF).
 - iv. Customer Care and Customer Relations.
2. Audit of the implementation of ISO 27001:2022 Information Security Management System.
3. Thematic audit on contract early termination.
4. Joint audit on Onboarding to Collection, Fraud Assessment Collection, and Branch Assessment Audit with MPM Holding.
5. Submitting audit results and recommendations to the Board of Directors, the Audit Committee, and related business units on a periodic basis.
6. Conducting regular meetings with the Board of Directors and the Audit Committee to discuss the progress of Internal Audit performance.
7. Conducting regular meetings with the Audit Committee to discuss the progress of Internal Audit performance.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan komponen mendasar dari komitmen Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang memastikan bahwa pengawasan keuangan dan operasional dilakukan secara efektif. SPI yang diterapkan dengan baik memainkan peran penting dalam menjaga data keuangan dan operasional yang akurat dan andal, memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengurangi potensi risiko, termasuk kerugian finansial, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Penetapan kerangka pengendalian internal yang efektif dimulai dengan menetapkan tujuan dan strategi yang jelas di semua tingkatan organisasi. Proses ini mencakup

Financial and Operational Controls

The Internal Control System (ICS) is a fundamental component of the Company's commitment to Good Corporate Governance, ensuring that financial and operational oversight is conducted effectively. A well-implemented ICS plays a crucial role in maintaining accurate and reliable financial and operational data, strengthening compliance with applicable laws and regulations, and mitigating potential risks, including financial losses, irregularities, and breaches of the principle of prudence.

Establishing an effective internal control framework begins with setting clear objectives and strategies at all levels of the organization. This process involves identifying potential

mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat memengaruhi tujuan tersebut dan menerapkan strategi manajemen risiko yang menjaga eksposur dalam tingkat toleransi yang dapat diterima. Pada akhirnya, SPI dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan Perseroan dapat tercapai dengan sukses.

Untuk menjaga sistem pengendalian internal yang terstruktur dan efisien, Perseroan mengadopsi mekanisme pertahanan tiga lapis:

1. **Pertahanan Lapis Pertama** dilaksanakan oleh *risk officer/* unit/fungsi bisnis/karyawan yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Seluruh karyawan harus dipastikan memahami seluruh kebijakan, SOP yang ditetapkan Perseroan.
2. **Pertahanan Lapis Kedua** dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko operasional dan kepatuhan, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, memantau dan memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, memastikan koordinasi atau fasilitas aktivitas pengelolaan risiko secara menyeluruh serta melakukan pengawasan fungsi bisnis dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
3. **Pertahanan Lapis Ketiga** dilaksanakan oleh Audit Internal yang akan memastikan secara independen bahwa semua risiko *residual* telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

Untuk memastikan ketahanan bisnis dalam menghadapi gangguan, Perseroan telah menetapkan kerangka kerja *Business Continuity Management (BCM)*, yang mencakup rencana kontingensi berikut:

1. **Business Contingency Plan (BCP)**
Kerangka kerja strategis yang dirancang untuk memastikan kelangsungan fungsi bisnis penting jika terjadi gangguan parah yang disebabkan oleh bencana alam, serangan siber, atau kejadian tak terduga lainnya. BCP bertujuan untuk meminimalkan dampak gangguan tersebut dan memungkinkan operasional bisnis berlanjut.
2. **Disaster Recovery Plan (DRP)**
Rencana tindakan terstruktur yang menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, selama, dan setelah insiden yang membahayakan sistem informasi perusahaan. DRP sangat penting dalam situasi krisis, memastikan bahwa aktivitas operasional penting dapat terus berlanjut jika terjadi kegagalan server atau waktu henti sistem (*downtime system*) melalui penggunaan sistem cadangan (*back up system*) yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. **Emergency Response Plan (ERP)**
Strategi proaktif yang dikembangkan untuk mengelola situasi darurat secara efektif. Rencana ini melibatkan pembentukan tim tanggap darurat khusus yang bertugas melaksanakan operasi penyelamatan dan upaya mitigasi krisis jika terjadi keadaan darurat.

events that could affect those objectives and implementing risk management strategies that keep exposure within acceptable tolerance levels. Ultimately, the ICS is designed to provide reasonable assurance that the Company's objectives can be successfully achieved.

To maintain a structured and efficient internal control system, the Company adopts the three lines of defense mechanism:

1. **The First Line of Defense** is carried out by risk officers, business units/functions, and employees who perform the Company's day-to-day operational activities, particularly those at the frontline of the organization. All employees are required to ensure an understanding of all Company policies and established Standard Operating Procedures (SOPs).
2. **The Second Line of Defense** is carried out by operational risk management and compliance functions, which are responsible for developing, monitoring, and ensuring the adequacy of risk mitigation measures, policies, and procedures, ensuring coordination or facilitation of overall risk management activities, as well as overseeing business functions within the framework of the Company's risk management policies and SOPs.
3. **The Third Line of Defense** is carried out by Internal Audit, which provides independent assurance that all residual risks are managed in accordance with the approved risk tolerance.

To ensure business resilience in the face of disruptions, the Company has established a Business Continuity Management (BCM) framework, which includes the following contingency plans:

1. **Business Contingency Plan (BCP)**
A strategic framework designed to ensure the continuity of critical business functions in the event of severe disruptions caused by natural disasters, cyberattacks, or other unforeseen events. The BCP aims to minimize the impact of such disruptions and enable business operations to continue.
2. **Disaster Recovery Plan (DRP)**
A structured action plan outlining the steps to be taken before, during, and after incidents that affect the Company's information systems. The DRP is essential in crisis situations, ensuring that critical operational activities can continue in the event of server failure or system downtime through the use of pre-established backup systems.
3. **Emergency Response Plan (ERP)**
A proactive strategy developed to effectively manage emergency situations. This plan involves the establishment of a dedicated emergency response team responsible for carrying out rescue operations and crisis mitigation efforts in the event of an emergency.



Unit Kerja Fraud Detection dan Investigation

Untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko kegiatan penipuan atau kecurangan (*fraud*), Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang berfokus pada deteksi dan investigasi *fraud* yaitu: Unit Kerja *Fraud Detection dan Investigation*.

Unit Kerja *Fraud Detection dan Investigation* bertanggung jawab untuk:

1. Mendeteksi adanya indikasi *fraud* dalam kegiatan operasional Perseroan dengan melakukan pengecekan, analisis dan memberikan persetujuan/rekomendasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan risiko operasional Perseroan.
2. Melakukan tindak lanjut investigasi terhadap penanganan atas indikasi *fraud*, dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud* dan mencari fakta-fakta terkait indikasi tersebut yang terjadi di perusahaan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Perseroan tetap teguh dalam menegakkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, memastikan bahwa semua operasional selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang relevan dengan industrinya. Untuk menjaga komitmen ini, Perseroan terus meninjau dan menyempurnakan proses bisnis dan kebijakan internalnya agar tetap sejalan dengan perkembangan peraturan terbaru. Pendekatan proaktif ini menjaga kepatuhan dan memperkuat integritas operasional di seluruh fungsi bisnis.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sistem Pengendalian Internal Perseroan menunjukkan efektivitas yang kuat, terbukti dengan tidak adanya temuan signifikan dalam proses audit internal dan eksternal yang dapat membahayakan kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi Perseroan untuk terus memperkuat pengendalian internal. Sepanjang tahun, penilaian dan penyempurnaan Prosedur Operasional Standar terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan dan memastikan bahwa semua mekanisme pengendalian tetap selaras dengan praktik terbaik.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Setelah melakukan peninjauan menyeluruh atas penerapan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris dan Direksi menegaskan bahwa sistem tersebut berfungsi efektif pada tahun 2025, memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik di seluruh organisasi.

Fraud Detection and Investigation Work Unit

To strengthen oversight and mitigate the risk of fraud, the Company has established a dedicated unit focusing on fraud detection and investigation, namely: Fraud Detection and Investigation Work Unit.

Fraud Detection and Investigation Work Unit responsible for:

1. Detecting indications of fraud in the Company's operational activities by conducting checks, analysis, and providing approvals/recommendations in accordance with applicable provisions, thereby minimizing the Company's operational risk.
2. Conducting follow-up investigations related to suspected fraud by collecting evidence related to incidents suspected of constituting fraudulent acts and identifying facts related to such indications occurring within the Company, whether committed by internal or external parties.

Compliance with Laws and Regulations

The Company remains steadfast in upholding ethical and responsible business practices, ensuring that all operations align with the laws and regulations in force in Indonesia, particularly those relevant to its industry. To maintain this commitment, the Company continuously reviews and refines its business processes and internal policies to keep pace with the latest regulatory developments. This proactive approach ensures compliance and strengthens operational integrity across all business functions.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System for 2025

Throughout 2025, the Company's Internal Control System demonstrated strong effectiveness, evidenced by the absence of significant findings in internal and external audit processes that could compromise the fairness and reliability of financial statements. This achievement reflects the Company's dedication to continuously strengthening internal controls. Throughout the year, assessments and refinements of Standard Operating Procedures were continuously conducted to enhance the overall efficiency of the system and ensure that all control mechanisms remain aligned with best practices.

Statement by the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Adequacy of the Internal Control System

After conducting a comprehensive review of the implementation of the Internal Control System, the Board of Commissioners and the Board of Directors affirm that the system functioned effectively in 2025, ensuring sound governance and risk management throughout the organization.

Auditor Eksternal

External Auditor

Untuk menjamin keakuratan, transparansi, dan independensi pelaporan keuangannya, Perseroan menunjuk auditor eksternal untuk mengkaji laporan keuangannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025.

Penunjukan kantor akuntan publik independen ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menyampaikan laporan keuangan secara objektif dan mematuhi ketentuan peraturan, khususnya Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Untuk audit laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengeluarkan biaya audit sebesar Rp1.905.000.000, dengan tambahan Rp83.406.510 dialokasikan untuk jasa lainnya.

Berikut adalah informasi mengenai KAP yang ditunjuk Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir:

To ensure the accuracy, transparency, and independence of its financial reporting, the Company has appointed an external auditor to review its financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025. The public accounting firm Siddharta Widjaja & Partners (KPMG) was appointed pursuant to a Shareholders' Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 28, 2025.

The appointment of this independent public accounting firm is in line with the Company's commitment to presenting financial statements objectively and complying with regulatory provisions, particularly Article 68 (1) letter c of the Limited Liability Companies Act (UUPT) and POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities. For the audit of the financial statements as of December 31, 2025, the Company incurred audit fees of IDR1,905,000,000, with an additional IDR83,406,510 allocated for other services.

The following is information regarding the public accounting firms appointed by the Company over the past 5 (five) years:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Jenis Jasa Type of Service	
			Jasa Audit Audit Service	Jasa Lainnya Other Services
2025	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK).
	Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan		Audit of Financial Statements	To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing.
2024	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK).
	Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan		Audit of Financial Statements	To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing.
2023	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK).
	Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan		Audit of Financial Statements	To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing.



Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Jenis Jasa Type of Service	
			Jasa Audit Audit Service	Jasa Lainnya Other Services
2022	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	- Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK). - Menerbitkan <i>comfort letter</i> untuk penerbitan obligasi. - To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing. - To issue a <i>comfort letter</i> for bond issuance.
2021	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan	Rialiany Arista Ku, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Memeriksa Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (Laporan KPPK). To examine the Report on Implementation of Prudential Principles in the Management of Offshore Borrowing.

Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation [OJKE.3]

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko yang komprehensif, Perseroan mengintegrasikan proses penilaian risiko menyeluruh ke dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa potensi risiko yang terkait dengan inisiatif keberlanjutan diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara efektif. Strategi manajemen risiko Perusahaan mencakup metodologi terstruktur, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar, sistem manajemen risiko operasional, berbagai kategori risiko yang mungkin timbul, dan langkah-langkah mitigasi terkait yang dirancang untuk mengatasi setiap jenis risiko.

As part of a comprehensive risk management framework, the Company integrates a comprehensive risk assessment process into its sustainable finance implementation. This approach ensures that potential risks associated with sustainability initiatives are identified, analyzed, and managed effectively. The Company's risk management strategy includes a structured methodology that outlines fundamental principles, an operational risk management system, various categories of risks that may arise, and related mitigation measures designed to address each type of risk.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Beroperasi dalam sektor pembiayaan yang dinamis, Perseroan menghadapi berbagai risiko bisnis yang timbul dari faktor eksternal dan internal. Risiko-risiko ini berpotensi memengaruhi operasional bisnis dan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Merespons hal tersebut, Direksi tetap proaktif dalam melakukan penilaian risiko menyeluruh untuk merumuskan kebijakan yang tepat yang memandu pengambilan keputusan strategis. Untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan menyelaraskan praktiknya dengan serangkaian kerangka peraturan yang relevan, termasuk:

1. POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. Pengawasan mereka memastikan keselarasan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan komite aktif yang didedikasikan untuk memantau delapan profil risiko yang berbeda.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perseroan telah mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang luas, yang mencakup delapan profil risiko sebagaimana diamanatkan oleh peraturan. Kebijakan ini dapat diakses melalui portal kebijakan internal Perseroan. Batasan risiko ditetapkan melalui pendelegasian wewenang yang terstruktur, yang mencakup persetujuan kredit, kewenangan biaya yaitu kewenangan terkait pengeluaran biaya yang terjadi maupun pemberian penetapan bunga, kewenangan operasional yaitu kewenangan terkait proses, dokumen, sumber daya manusia yang terlibat, dan penerapan sistem yang dinamis. Selain itu, ambang batas risiko ditetapkan untuk pembiayaan intra-bisnis, limit pembiayaan per debitur, dan konsentrasi risiko di setiap lini industri yang dibiayai.

Operating in the dynamic financing sector, the Company faces various business risks arising from external and internal factors. These risks have the potential to affect business operations and impact the achievement of the Company's objectives. In response, the Board of Directors remains proactive in conducting comprehensive risk assessments to formulate appropriate policies that guide strategic decision-making. To ensure the effective implementation of the Risk Management System, the Company aligns its practices with a series of relevant regulatory frameworks, including:

1. POJK No. 42 of 2024 on the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
2. POJK No. 28/POJK.05/2020 on Soundness Level Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions.
3. SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance.
4. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 on Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Finance Companies.

The implementation of the Risk Management System at the Company includes the following:

1. Active Oversight by the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Directors and the Board of Commissioners play a crucial role in formulating and overseeing risk management policies and strategies. Their oversight ensures alignment with the Company's risk appetite and risk tolerance. This commitment is reflected in the establishment of active committees dedicated to monitoring eight distinct risk profiles.

2. Adequacy of policies, procedures, and risk limit setting

The Company has developed comprehensive risk management policies and procedures covering the eight risk profiles as mandated by regulations. These policies are accessible through the Company's internal policy portal. Risk limits are established through a structured delegation of authority, which includes credit approval, cost authority (i.e., authority regarding incurred expenses and interest rate setting), and operational authority (i.e., authority regarding processes, documents, human resources involved, and the implementation of dynamic systems). In addition, risk thresholds are established for intra-business financing, financing limits per debtor, and risk concentration in each financed industry sector.



3. Kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Perseroan secara sistematis mengidentifikasi risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bisnisnya, serta menilai dampak potensialnya.

Pengukuran risiko melibatkan evaluasi efektivitas upaya mitigasi risiko, dengan tingkat paparan yang dianalisis berdasarkan parameter risiko yang telah ditetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan. Pemantauan dan pengendalian berkelanjutan dilakukan melalui pelaporan rutin kepada Komite Manajemen Risiko, guna memastikan mitigasi risiko yang proaktif.

4. Sistem informasi manajemen risiko

Perseroan memanfaatkan data warehouse khusus untuk meningkatkan kemampuan manajemen risikonya. Didukung oleh analitik visual *Tableau*, sistem ini meningkatkan fungsi pelaporan dengan membuat *dashboard* data sebagai *analytics tools* untuk analisis data, dan juga portofolio monitoring. Perusahaan juga menggunakan analisis statistik dari indikator kredit yang digunakan dalam pembentukan skor peraplikasi baru yang masuk. Selain itu, Perseroan juga memastikan integritas data, yang mendukung kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perseroan memiliki pertahanan 3 (tiga) lapis meliputi:

- Pertahanan Lapis Pertama dilaksanakan oleh *risk officer/unit/fungsi bisnis/karyawan* yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Seluruh karyawan harus dipastikan memahami seluruh kebijakan, SOP yang ditetapkan Perseroan.
- Pertahanan Lapis Kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko operasional dan kepatuhan, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, memantau dan memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, memastikan koordinasi atau fasilitas aktivitas pengelolaan risiko secara menyeluruh serta melakukan pengawasan fungsi bisnis dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
- Pertahanan Lapis Ketiga dilaksanakan oleh Audit Internal yang akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes

The Company systematically identifies risks inherent in all its products and business activities, and assesses their potential impact.

Risk measurement involves evaluating the effectiveness of risk mitigation efforts, with exposure levels analyzed based on pre-defined risk parameters tailored to the complexity of the Company's products and activities. Continuous monitoring and control are conducted through routine reporting to the Risk Management Committee to ensure proactive risk mitigation.

4. Risk management information system

The Company utilizes a dedicated data warehouse to enhance its risk management capabilities. Supported by *Tableau* visual analytics, this system enhances reporting functions by creating data dashboards as analytical tools for data analysis and portfolio monitoring. The Company also uses statistical analysis of credit indicators in the scoring process for new applications. Additionally, the Company ensures data integrity, which supports compliance with the reporting requirements of the Financial Information Service System (SLIK).

5. Comprehensive internal control system

The Company has a 3 (three) three-layer defense system comprising:

- The First Line of Defense is carried out by risk officers, units, business functions, and employees who perform the Company's daily operational activities, particularly those on the front lines or at the forefront of the organization. All employees must be ensured to understand all policies and SOPs established by the Company.
- The Second Line of Defense is carried out by operational risk management and compliance functions, which are responsible for developing, monitoring, and ensuring the adequacy of risk mitigation, policies, and procedures; ensuring coordination or facilitating comprehensive risk management activities; and overseeing business functions within the framework of the Company's established risk management policies and SOPs.
- The Third Line of Defense is carried out by Internal Audit, which will independently ensure that all residual risks have been managed in accordance with the approved risk tolerance.

Jenis Risiko dan Mitigasi Risiko

Perseroan mengelompokkan risiko-risiko dan pengelolaannya sebagai berikut:

Risiko Strategi

Deskripsi

Risiko Strategi adalah risiko akibat pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis yang tidak tepat, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan Risiko Strategi dilakukan melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab menyiapkan rencana bisnis Perseroan untuk kemudian dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi dan situasi ekonomi, politik, pasar, dan kompetisi yang dihadapi Perseroan di wilayah operasionalnya.
2. Evaluasi dampak peraturan yang berlaku dan akan diajukan.
3. Memastikan rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan visi, misi, dan budaya Perseroan, serta toleransinya terhadap risiko dan arah pengembangan bisnis.
4. Meninjau sumber daya manusia, kompetensi dan infrastruktur Perseroan telah memadai untuk menopang strategi bisnis tersebut.
5. Mengukur Risiko Strategis melalui parameter Laba Bersih Setelah Pajak, Pendapatan, Akuisisi Pelanggan, Pertumbuhan Portofolio dan Volume Bisnis, Komposisi Penjualan, Kualitas Aset, dan Pencadangan Piutang.

Risiko Operasional

Deskripsi

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan melalui:

1. Adanya pertahanan 3 (tiga) lapis, yaitu:
 - Lini Pertahanan Pertama, yaitu seluruh karyawan, dan Bisnis Unit Manajer yang menjalankan semua kebijakan/SOP/SKEP yang ditetapkan.
 - Lini Pertahanan Kedua, yaitu *Operational Risk Person*, dan fungsi kontrol lainnya yaitu para pemilik kontrol risiko/Kepala Divisi.
 - Lini Pertahanan Ketiga, adalah Audit Internal sebagai pengawas internal.
2. Menetapkan kebijakan Pengendalian *Fraud* dan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada internal dan eksternal Perseroan.

Types of Risk and Risk Mitigation

The Company classifies risks and their management as follows:

Strategic Risk

Description

Strategic risk is the risk arising from the adoption and/or implementation of an inappropriate strategic decision, as well as the failure to anticipate changes in the business environment.

Risk Mitigation

Strategic risk management is carried out through active oversight by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Directors is responsible for preparing the Company's business plan, which is then reviewed and approved by the Board of Commissioners, taking into account the following:

1. The economic, political, market, and competitive conditions and situations faced by the Company in its operational areas.
2. An evaluation of the impact of existing and proposed regulations.
3. Ensuring that the business plan aligns with the Company's vision, mission, and culture, as well as its risk tolerance and business development direction.
4. Reviewing whether the Company's human resources, competencies, and infrastructure are adequate to support the business strategy.
5. Measuring Strategic Risk using the following parameters: Net Profit After Tax, Revenue, Customer Acquisition, Portfolio Growth and Business Volume, Sales Composition, Asset Quality, and Accounts Receivable Allowance.

Operational Risk

Description

Operational Risk is the risk arising from the inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Company's operational activities.

Risk Mitigation

Operational Risk Management is conducted through:

1. A 3 (three)-layer defense system, namely:
 - First Line of Defense, consisting of all employees and Business Unit Managers who implement all established policies, SOPs, and SKEPs.
 - Second Line of Defense, consisting of the Operational Risk Officer and other control functions, namely risk control owners/Division Heads.
 - Third Line of Defense, which is Internal Audit as the internal oversight function.
2. Establishing Fraud Control policies and implementing Anti-Fraud Strategies as preventive measures against operational irregularities within and outside the Company.



3. Menetapkan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai panduan kelanjutan operasional Perseroan ketika terjadi gangguan atau bencana yang berimbas pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Likuiditas

Deskripsi

Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan internal maupun eksternal yang ada tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Mitigasi Risiko

Perseroan setiap bulan mengelola risiko aset dan liabilitas melalui Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee* – ALCO). ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola neraca dan mengontrol likuiditas dan risiko pasar dalam menunjang bisnis Perseroan.
2. Meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan.
3. Meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
4. Memantau margin bunga bersih (*net interest margin*).
5. Memantau pemenuhan terhadap kewajiban Perseroan dalam perjanjian kredit.
6. Memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku.
7. Mengelola neraca secara efisien dengan mengambil pandangan ke depan dalam perubahan ekonomi, peraturan maupun perubahan lainnya.

Risiko Pasar

Deskripsi

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan adalah:

1. Perseroan dalam mengelola Risiko Pasar yaitu dengan melakukan dokumentasi, pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi terkini terkait dengan risiko tingkat suku bunga maupun nilai tukar yang dapat memengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan.
2. Meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.
3. Pengukuran Risiko Pasar menggunakan parameter strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan Risiko Pasar, volume dan komposisi portofolio aset yang memiliki eksposur Risiko Pasar, volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos Risiko Pasar.

3. Establishing a *Business Continuity Plan* (BCP) as a guide for the Company's operational continuity in the event of disruptions or disasters that impact the Company's operational activities.

Liquidity Risk

Description

Liquidity Risk Management aims to minimize the potential negative impact of the Company's inability to meet its maturing obligations from existing internal and external funding sources without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Mitigation

The Company manages asset and liability risks on a monthly basis through the Asset and Liability Committee (ALCO). The ALCO has the following duties and responsibilities:

1. Manage the balance sheet and control liquidity and market risk in supporting the Company's business.
2. Review key financial indicators and discuss funding topics.
3. Review liquidity risk, exchange rate risk, interest rate risk and risk of mismatch between assets and liabilities.
4. Monitor the net interest margin.
5. Monitor the fulfillment of the Company's obligations in the credit agreement.
6. Monitor compliance with applicable regulations.
7. Manage the balance sheet efficiently by taking the foresight of economic, regulatory and other changes.

Market Risk

Description

Market Risk is the risk in positions of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts, including derivative transactions, arising from overall changes in market conditions.

Risk Mitigation

The Company's risk management measures are as follows:

1. The Company manages Market Risk by conducting regular documentation, recording, and periodic evaluation of the latest conditions related to interest rate and foreign exchange risks that may affect the Company's assets, liabilities, and equity.
2. Minimizing the potential adverse impact of changes in market conditions on the Company's assets and capital.
3. Measuring Market Risk using parameters of business strategies and policies related to Market Risk, as well as the volume and composition of asset portfolios exposed to Market Risk, and the volume and composition of liability portfolios exposed to Market Risk.

4. Memastikan kesesuaian nilai tukar antara aset dan liabilitas, profil tingkat suku bunga tetap dan/atau mengambang pada aset dan liabilitas, serta melakukan transaksi lindung nilai yang sesuai dengan ketentuan regulator dan kebijakan manajemen risiko internal Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Deskripsi

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Tujuan utama manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Perseroan baik secara instansi maupun perangkat kerja dari Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Mitigasi Risiko

1. Pengukuran Risiko Kepatuhan dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan menggunakan prosedur, metodologi dan kebijakan yang disusun dengan memperhatikan ketentuan dari regulator. Pengukuran risiko Perseroan selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan analisis gap terhadap ketentuan regulator, kajian terhadap kebijakan internal yang dilakukan secara berkala, pemeriksaan sampel terhadap implementasi kebijakan regulator yang ada untuk memastikan tingkat responsibilitas Perseroan terhadap standar yang berlaku.

Risiko Hukum

Deskripsi

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Mitigasi Risiko

Tujuan utama manajemen risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum dilakukan:

1. Legal watch yaitu memberikan analisis atau nasihat hukum kepada pihak-pihak terkait dalam Perseroan serta pemantauan dari sisi perikatan, baik antara Perseroan dengan debitur dan/atau Perseroan dengan pihak ketiga lainnya.
2. Pelaksanaan review secara berkala terhadap dokumen-dokumen dan/atau kontrak-kontrak yang telah terstandarisasi guna memastikan efektivitas terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, serta memastikan bahwasanya dokumen/perjanjian yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Ensuring consistency in foreign exchange positions between assets and liabilities, fixed and/or floating interest rate profiles on assets and liabilities, and conducting hedging transactions in accordance with regulatory requirements and the Company's internal risk management policies.

Compliance Risk

Description

Compliance Risk is the risk arising from the Company's failure to comply with and/or implement prevailing laws and regulations. The primary objective of Compliance Risk management is to minimize the potential negative impact of conduct by the Company, both at the institutional level and at the operational level, that deviates from or violates applicable regulations and/or laws.

Risk Mitigation

1. Compliance Risk measurement may be conducted qualitatively and/or quantitatively using procedures, methodologies, and policies developed in accordance with regulatory requirements. The Company's risk measurements are subsequently reported periodically to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Compliance Risk control is conducted through gap analysis against regulatory requirements, periodic reviews of internal policies, and sample testing of the implementation of existing regulatory policies to ensure the Company's level of compliance with applicable standards.

Legal Risk

Description

Legal Risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects.

Risk Mitigation

The primary objective of Legal Risk management is to minimize the potential negative impact of legal weaknesses, the absence and/or changes in laws and regulations, and litigation processes.

In managing Legal Risk, the following controls are implemented:

1. Legal watch, which provides legal analysis or advice to relevant parties within the Company, as well as monitoring of contractual arrangements, both between the Company and debtors and/or between the Company and other third parties.
2. Periodic review of standardized documents and/or contracts to ensure the effectiveness of the fulfillment of the rights and obligations of the contracting parties, and to ensure that documents/agreements to be used are appropriate for their intended purpose and comply with applicable laws and regulations in Indonesia.



3. Proses kaji ulang secara berkala terhadap setiap kebijakan dan/atau panduan maupun terhadap SOP yang ada pada Perseroan.
 4. Analisis dari aspek hukum terhadap kegiatan usaha baru dan/atau dalam hal adanya produk baru pada Perseroan.
 5. Bekerja sama dengan kantor jasa hukum guna mendapatkan opini dan/atau referensi lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat material bagi Perseroan.
 6. Pembuatan laporan atas setiap kejadian yang berkaitan dengan proses litigasi dan/atau non-litigasi yang terjadi pada Perseroan.
 7. Mengukur toleransi risiko yang telah ditetapkan Perseroan, khususnya berkaitan dengan proses litigasi dan/atau non-litigasi yang sedang berjalan dan dihadapi Perseroan yang akan berdampak pada Risiko Hukum.
3. Periodic review of all Company policies, guidelines, and Standard Operating Procedures (SOPs).
 4. Legal analysis of new business activities and/or new products of the Company.
 5. Cooperation with legal service providers to obtain opinions and/or other references that may be used as a basis for consideration in making material decisions for the Company.
 6. Preparation of reports on each incident related to litigation and/or non-litigation processes occurring within the Company.
 7. Measurement of risk tolerance established by the Company, particularly in relation to ongoing litigation and/or non-litigation processes faced by the Company that may impact Legal Risk.

Risiko Reputasi

Deskripsi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan Risiko Reputasi bertujuan untuk meminimalkan dampak kerugian dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta komunikasi Perseroan yang kurang efektif. Risiko Reputasi dikelola melalui:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Risiko Reputasi dibahas dalam rapat *Risk Management Committee* yang dihadiri oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta unit terkait. Pembahasannya antara lain, penanganan pengaduan dan pemberitaan negatif terhadap Perseroan.
2. Sumber Daya
Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang memengaruhi reputasi Perseroan dan juga mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain daripada Sekretaris Perusahaan, Perseroan juga telah memiliki unit kerja terkait penanganan pengaduan konsumen disertai dengan mekanisme pengaduan.
3. Kebijakan
Penjabaran kebijakan penanganan pengaduan dituangkan dalam bentuk kebijakan dan SOP. Mekanisme pengaduan yang diterapkan oleh Perseroan antara lain:
 - *Walk in customer* (penerimaan keluhan konsumen yang datang langsung ke kantor Perseroan).
 - *Hotline* JACCS MPM Finance Indonesia: 1500309.
 - Email: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com.

Reputation Risk

Description

Reputation Risk is the risk arising from a decline in stakeholder trust due to negative perceptions of the Company.

Risk Mitigation

Reputation Risk management aims to minimize the impact of losses resulting from a decline in stakeholder trust arising from negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as ineffective Company communication. Reputation Risk is managed through:

1. Active oversight by the Board of Directors and the Board of Commissioners
Reputation Risk is discussed in the meetings of Risk Management Committee attended by the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and relevant units. Discussions include handling of complaints and negative news regarding the Company.
2. Resources
The Company has a Corporate Secretary who performs public relations functions and follows up on negative news or other events affecting the Company's reputation, as well as communicating necessary information to stakeholders. In addition, the Company also has a dedicated unit for handling customer complaints supported by a complaint handling mechanism.
3. Policies
The complaint handling policy is set out in policies and SOPs. The Company's complaint handling mechanisms include:
 - *Walk-in customers* (receipt of customer complaints submitted directly at the Company's office).
 - JACCS MPM Finance Indonesia Hotline: 1500309.
 - Email: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com.

- Mengirimkan pesan atau komentar pada media sosial.
- Menghubungi nomor telepon kantor pusat: 021- 29710100.
- Mengirimkan surat resmi kepada Perseroan.

- Messages or comments via social media.
- Company head office telephone number: 021-29710100.
- Submission of official written letters to the Company.

Risiko Pembiayaan (Risiko Kredit)

Deskripsi

Perseroan menghadapi Risiko Pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan Risiko Kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi dan meminimalkan kerugian akibat kegagalan konsumen dalam memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit dikelola melalui:

1. Kebijakan Pembiayaan
Penjabaran kebijakan pembiayaan secara operasional dituangkan dalam bentuk SOP. Proses pengelolaan pembiayaan diawali dengan penetapan *target market*, melakukan *risk assessment*, dan monitoring atas pemberian pembiayaan. Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, di mana fungsi analisis kredit dilakukan oleh unit bisnis dan unit manajemen risiko yang independen.
2. Persetujuan Pembiayaan
Dalam menilai aplikasi pembiayaan, Perseroan senantiasa mengacu pada regulasi dan prinsip kehati-hatian di antaranya berdasarkan faktor penilaian kemampuan membayar, prospek usaha, dan kinerja debitur. Implementasi proses *pre-screening* menggunakan verifikasi KTP, pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dan *credit scoring*. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan pembiayaan, Perseroan telah memberikan kewenangan persetujuan pembiayaan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kualifikasi tertentu.
3. *Monitoring* Kredit
Monitoring pembiayaan dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dalam memantau kinerja debitur, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dini untuk mencegah penurunan kualitas pembiayaan debitur. Monitoring juga dilakukan pada tingkat portofolio melalui analisis portofolio. Perseroan juga melakukan monitoring secara berkala terhadap pejabat pemegang kewenangan persetujuan kredit.
4. *Collection* dan *Recovery*
Perseroan secara khusus menjalankan kebijakan penanganan *collection* dan *recovery* yang dibuat secara lebih terfokus, sistematis, agresif, dan terintegrasi berdasarkan jenis produk dan masing-masing *bucket collection*.

Financing Risk (Credit Risk)

Description

The Company is exposed to Financing Risk, namely the inability of debtors to repay the financing facilities provided. This risk arises if the structure of credit financing, customer eligibility, and receivables are not managed prudently.

Risk Mitigation

Credit Risk management aims to measure, anticipate, and minimize losses resulting from customer default in fulfilling their obligations. Credit Risk is managed through:

1. Financing Policy
The operational implementation of financing policies is set out in Standard Operating Procedures (SOPs). The financing management process begins with target market determination, risk assessment, and monitoring of financing disbursement. The Company applies prudential principles in financing activities, where credit analysis functions are carried out by the business unit and an independent risk management unit.
2. Financing Approval
In assessing financing applications, the Company consistently refers to applicable regulations and prudential principles, including assessment factors such as repayment capacity, business prospects, and debtor performance. The pre-screening process includes identity verification (KTP), checking the Financial Information Service System (SLIK), and credit scoring. To accelerate financing decision-making, the Company delegates financing approval authority to designated officers based on specific qualification criteria.
3. Credit Monitoring
Financing monitoring is conducted in a structured and comprehensive manner to assess debtor performance, enabling early action to prevent deterioration in financing quality. Monitoring is also performed at the portfolio level through portfolio analysis. The Company also conducts periodic monitoring of officers with credit approval authority.
4. Collection and Recovery
The Company implements a dedicated collection and recovery policy that is more focused, systematic, aggressive, and integrated based on product type and respective collection buckets.



Tinjauan atas Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Perseroan secara berkala meninjau efektivitas sistem manajemen risiko untuk memastikan potensi risiko yang relevan terhadap keberlangsungan usaha dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara tepat. Tinjauan dilakukan melalui pemantauan rutin serta pelaporan dari setiap unit kerja, sehingga langkah mitigasi dapat segera diterapkan bila diperlukan.

Dengan demikian, Perseroan memperoleh dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian, serta memperkuat tata kelola perusahaan. Upaya tersebut juga mendukung keberlanjutan operasional dengan tetap memperhatikan dinamika eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan pasar, maupun faktor internal seperti operasional, keuangan, dan sumber daya manusia.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Setelah melakukan penelaahan secara menyeluruh, Dewan Komisaris dan Direksi menegaskan bahwa Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah diterapkan secara efektif sepanjang tahun 2025, sehingga Perseroan memiliki ketahanan terhadap potensi risiko keuangan dan operasional.

Review of the Effectiveness of Risk Management System Implementation

The Company periodically reviews the effectiveness of the risk management system to ensure that risks relevant to business continuity can be properly identified, measured, and managed. The review is conducted through regular monitoring and reporting from each business unit, enabling mitigation measures to be promptly implemented when necessary.

Accordingly, the Company obtains a stronger basis for decision-making, enhances preparedness in facing uncertainties, and strengthens corporate governance. These efforts also support operational sustainability while taking into account external dynamics such as economic conditions, regulations, and market developments, as well as internal factors such as operations, finance, and human resources.

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Adequacy of the Risk Management System

After a comprehensive review, the Board of Commissioners and the Board of Directors affirm that the Company's Risk Management System has been effectively implemented throughout 2025, thereby enabling the Company to maintain resilience against potential financial and operational risks.

Perkara Penting

Material Litigation

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Perseroan, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris.

Throughout 2025, there were no material litigation cases faced by the Company, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Pada tahun 2025, Perseroan menerima 3 (tiga) sanksi administratif berupa denda dengan total sebesar Rp50.250.000 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 13 (tiga belas) sanksi administratif berupa peringatan tertulis. OJK telah melakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2025, dan pada tanggal 11 November 2025 OJK mencabut salah satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang terkait dengan pelanggaran ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sementara itu, terhadap sanksi lainnya yang berkaitan dengan keterlambatan pelaporan dan koreksi pencatatan debitur, di luar periode pemeriksaan langsung, Perseroan telah menyelesaikan serta melakukan perbaikan atas seluruh sanksi yang dikenakan oleh regulator.

In 2025, the Company received 3 (three) administrative sanctions in the form of fines totaling IDR50,250,000 (fifty million two hundred fifty thousand rupiah) and 13 (thirteen) administrative sanctions in the form of written warnings. OJK conducted an on-site inspection in 2025, and on November 11, 2025, OJK revoked one of the administrative sanctions in the form of a written warning related to a violation of the provisions on Good Corporate Governance. Meanwhile, for other sanctions related to delayed reporting and debtor record corrections outside the inspection period, the Company has completed the settlement and implemented corrective actions for all sanctions imposed by the regulator.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen

Employee or Management Share Ownership Program

Sampai akhir tahun 2025, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan ataupun manajemen.

As of the end of 2025, the Company does not have any employee or management share ownership program.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Disclosure of Share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan memiliki kebijakan yang ketat mengenai keterbukaan informasi terkait kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mengacu pada POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih pada setiap perusahaan tempat ia menjabat, baik di lingkungan Perseroan maupun di perusahaan lain di dalam dan luar negeri. Pengungkapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk bersikap transparan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

The Company has a strict policy regarding the disclosure of share ownership by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with POJK No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies. In accordance with these provisions, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to disclose their share ownership of 5% or more in any company in which they serve, both within the Company and in other companies domestically and internationally. Such disclosure forms an integral part of the GCG implementation report submitted to the Financial Services Authority (OJK) as part of the Company's commitment to transparency and regulatory compliance.



Kebijakan untuk Mencegah Terjadinya *Insider Trading*

Policy to Prevent Insider Trading [IDX G-08]

Perseroan bukan merupakan perusahaan publik, sehingga penerapan kebijakan terkait *insider trading* tidak menjadi kewajiban bagi Perseroan. Namun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas usaha, serta memastikan bahwa seluruh informasi material dikelola secara hati-hati dan tidak disalahgunakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Perseroan memastikan bahwa tidak pernah terjadi tindakan *insider trading* yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun karyawan. Kebijakan ini ditegakkan melalui pedoman etika kerja, pengawasan internal, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan informasi strategis, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh keyakinan atas integritas tata kelola Perseroan.

The Company is not a public listed company; therefore, the implementation of insider trading policies is not a mandatory requirement for the Company. Nevertheless, the Company remains committed to maintaining integrity and transparency in all business activities and ensuring that all material information is managed carefully and is not misused by internal or external parties.

The Company ensures that no insider trading has ever occurred involving members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Executive Officers, or employees. This policy is enforced through the code of conduct, internal oversight, and the application of prudential principles in managing strategic information, thereby providing assurance to all stakeholders regarding the integrity of the Company's governance.

Kode Etik

Code of Conduct [IDX G-07]

Perseroan telah mengembangkan Kode Etik komprehensif yang berfungsi sebagai kerangka etika mendasar, yang memandu semua karyawan dalam interaksi profesional mereka, baik secara internal maupun eksternal. Kode ini menguraikan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku di tempat kerja, memastikan bahwa setiap karyawan menjunjung tinggi standar integritas, ketertiban, dan disiplin tertinggi. Dengan menanamkan nilai-nilai inti ini ke dalam operasional sehari-hari, Perseroan berupaya untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang mencegah perilaku tidak etis, penyalahgunaan, atau penipuan, sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas dan profesionalisme.

Pokok-Pokok Kode Etik

Etika Bisnis

1. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan dan/atau kegiatan operasional Perseroan lainnya, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya

The Company has developed a comprehensive Code of Conduct that serves as a fundamental ethical framework guiding all employees in their professional interactions, both internally and externally. This Code outlines the principles governing workplace behavior, ensuring that every employee upholds the highest standards of integrity, order, and discipline. By embedding these core values into daily operations, the Company seeks to foster a work environment that prevents unethical behavior, misuse, or fraud, while strengthening a culture of accountability and professionalism.

Key Principles of the Code of Conduct

Business Ethics

1. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from offering or giving anything, directly or indirectly, to other parties to influence decision-making related to financing transactions and/or other operational activities of the Company, in violation of applicable laws and regulations.
2. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company are

dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapa pun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan dan/atau kegiatan operasional Perseroan lainnya.

Etika Perusahaan

Lingkup etika bisnis Perseroan wajib mencakup upaya yang mendorong terbinanya hal-hal berikut yang mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. **Komitmen:** Perseroan memberikan komitmen untuk menjunjung tinggi dan menegakkan standar etika yang tinggi di setiap jenjang Perseroan.
2. **Kompetensi:** Perseroan wajib membangun dan mengasah kompetensi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
3. **Kepatuhan:** Perseroan menerapkan sebuah sistem kepatuhan untuk menerapkan standar etika Perseroan yang mewajibkan pegawai Perseroan pada setiap jajaran untuk mematuhi peraturan Perseroan yang berlaku.
4. **Komunikasi:** Perseroan menerapkan suatu mekanisme komunikasi perihal etika bisnis yang jelas dan berkesinambungan agar dapat membangun budaya etika tinggi dalam Perseroan.
5. **Konsistensi:** Perseroan mengadakan mekanisme penghargaan maupun sanksi atas tindakan yang menyangkut etika yang jelas, adil, dan konsisten.
6. **Kontrol:** Perseroan menjalankan sistem pengawasan dan pengendalian efektif untuk mengidentifikasi pelanggaran etika dan melakukan pencegahan atas terjadinya pelanggaran etika tersebut.
7. **Kepeloporan:** Perseroan menghargai pegawai/karyawan yang bertindak selaku pelopor dalam penegakan standar etika yang tinggi.

Ketentuan terkait Etika Bisnis dan Etika Perusahaan di atas berlaku bagi seluruh insan Perseroan tanpa terkecuali.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Untuk menanamkan landasan etika yang kuat di seluruh organisasi, Perseroan memperkuat Kode Etiknya melalui proses sosialisasi tahunan. Hal ini dicapai dengan mewajibkan semua karyawan untuk menegaskan komitmen mereka melalui Pakta Integritas, yang menggarisbawahi tanggung jawab mereka untuk menegakkan standar etika dan menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam pekerjaan mereka. Dengan terus menekankan nilai-nilai ini, Perseroan memastikan bahwa semua personel tetap selaras dengan kerangka etika dan kewajiban peraturannya.

prohibited from receiving anything for personal benefit, in violation of applicable laws and regulations, whether directly or indirectly, from any party that may influence decision-making related to financing transactions and/or other operational activities of the Company.

Corporate Ethics

The scope of the Company's business ethics shall include efforts to promote the following principles, including but not limited to:

1. **Commitment:** The Company is committed to upholding and enforcing high ethical standards at all levels of the organization.
2. **Competence:** The Company is required to develop and enhance competencies in conducting its business activities.
3. **Compliance:** The Company implements a compliance system to enforce its ethical standards, requiring all employees at every level to comply with applicable Company regulations.
4. **Communication:** The Company applies a clear and continuous communication mechanism regarding business ethics to foster a strong ethical culture within the organization.
5. **Consistency:** The Company implements a clear, fair, and consistent reward and sanction mechanism for ethics-related conduct.
6. **Control:** The Company maintains an effective monitoring and control system to identify ethical violations and prevent their occurrence.
7. **Leadership:** The Company recognizes employees who act as role models in upholding high ethical standards.

The above provisions on Business Ethics and Corporate Ethics apply to all personnel of the Company without exception.

Code of Conduct Dissemination and Enforcement Efforts

To instill a strong ethical foundation throughout the organization, the Company reinforces its Code of Conduct through annual socialization programs. This is achieved by requiring all employees to affirm their commitment through an Integrity Pact, which emphasizes their responsibility to uphold ethical standards and apply principles of integrity in their work. By continuously reinforcing these values, the Company ensures that all personnel remain aligned with its ethical framework and regulatory obligations.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Menyadari pentingnya lingkungan perusahaan yang transparan dan akuntabel, Perseroan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang dirancang untuk memberdayakan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan setiap pelanggaran atau perilaku buruk dalam organisasi. Sistem ini memainkan peran penting dalam memperkuat kontrol internal Perseroan dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan.

Perlindungan bagi Pelapor

Untuk mendorong pelaporan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan, Perseroan menjamin perlindungan menyeluruh bagi pelapor pelanggaran. Perlindungan ini mendorong terciptanya lingkungan yang aman di mana individu dapat dengan yakin mengungkapkan pelanggaran, yang memperkuat komitmen Perseroan terhadap tata kelola yang etis.

Kerahasiaan

Perseroan memastikan bahwa semua laporan, termasuk identitas pelapor pelanggaran dan rincian pengungkapannya, tetap dirahasiakan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong transparansi sekaligus melindungi mereka yang memberikan informasi penting.

Cakupan Pelaporan

Mekanisme pelaporan pelanggaran memungkinkan pelaporan berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada:

- *Fraud* (Internal atau Eksternal);
- Pelanggaran hukum;
- Kesalahan operasional yang signifikan;
- Pelanggaran peraturan Perseroan;
- Pelanggaran Kode Etik;
- Pelanggaran benturan kepentingan.

Mekanisme Pengaduan dan Pihak yang Mengelola Pengaduan

Perseroan telah menunjuk unit kerja khusus untuk mengawasi penanganan, investigasi, dan penyelesaian pelanggaran yang dilaporkan. Bergantung pada sifat pengaduan, tanggung jawab ini dapat berada di bawah satuan pengendalian *fraud*, manajemen risiko operasional, audit internal, sumber daya manusia, atau satuan kerja kepatuhan. Unit-unit ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap laporan diperiksa secara menyeluruh dan ditangani sesuai dengan kebijakan dan standar etika yang ditetapkan.

Recognizing the importance of a transparent and accountable corporate environment, the Company has implemented a whistleblowing system designed to empower employees, customers, and other stakeholders to report any violations or misconduct within the organization. This system plays an important role in strengthening the Company's internal controls and ensuring compliance with ethical standards and regulations.

Protection for Whistleblowers

To encourage reporting without fear of retaliation, the Company provides full protection for whistleblowers. This protection promotes a safe environment in which individuals can confidently disclose violations, thereby strengthening the Company's commitment to ethical governance.

Confidentiality

The Company ensures that all reports, including the identity of the whistleblower and details of the disclosure, are kept confidential. This measure is taken to encourage transparency while protecting those who provide important information.

Scope of Reporting

The whistleblowing mechanism allows reporting of various violations, including but not limited to:

- *Fraud* (internal or external);
- Violations of law;
- Significant operational errors;
- Violations of Company regulations;
- Violations of the Code of Conduct;
- Conflicts of interest violations.

Complaint Handling Mechanism and Responsible Parties

The Company has appointed dedicated units to oversee the handling, investigation, and resolution of reported violations. Depending on the nature of the complaint, responsibility may lie with the fraud control unit, operational risk management, internal audit, human resources, or compliance function. These units work together to ensure that each report is thoroughly reviewed and handled in accordance with established policies and ethical standards.

Media Pelaporan

Untuk memfasilitasi proses pelaporan pelanggaran yang mudah diakses dan aman, Perseroan menyediakan beberapa sarana pelaporan:

- *ISpeak*: Sistem pelaporan yang dibentuk dan dikelola langsung oleh PIC berwenang di Perseroan.
- *MPM Speak Up!*: Media pelaporan ini dibentuk dan dikelola oleh PT MPM Tbk bagi seluruh anak perusahaannya.
- *JACCS Group Global Hotline*: Media pelaporan ini dibentuk dan dikelola oleh JACCS Co., Ltd. bagi seluruh perusahaan yang berada di bawah naungan JACCS.
- Email, faksimile, telepon atau sarana lain yang disediakan Perseroan.

Pengelola sistem pelaporan pelanggaran memegang peranan penting dalam menyortir laporan yang masuk, memverifikasi kebenaran atas pelaporan, dan mengeskalasi kasus kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan Perseroan. Setiap laporan, beserta temuan investigasinya, dicatat secara sistematis dan disampaikan kepada manajemen, serta kepada Komite Manajemen Risiko Operasional dan/atau Komite Manajemen Risiko, secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, terdapat 8 (delapan) pengaduan *whistleblowing* yang masuk terkait pelanggaran, dan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja *Fraud and Operational Risk Management*.

Reporting Channels

To facilitate an accessible and secure reporting process, the Company provides several reporting channels:

- *iSpeak*: A reporting system established and directly managed by the Company's authorized PIC.
- *MPM Speak Up!*: A reporting channel established and managed by PT MPM Tbk for all its subsidiaries.
- *JACCS Group Global Hotline*: A reporting channel established and managed by JACCS Co., Ltd. for all companies under the JACCS group.
- Email, fax, telephone, or other channels provided by the Company.

The whistleblowing system administrator plays an important role in sorting incoming reports, verifying the validity of reports, and escalating cases to the relevant parties in accordance with Company policies. Each report, along with its investigation findings, is systematically recorded and periodically submitted to management, as well as to the Operational Risk Management Committee and/or Risk Management Committee, to ensure transparency and accountability.

Whistleblowing Reports in 2025

Throughout 2025, there were 8 (eight) whistleblowing complaints received related to violations, all of which were followed up by the Fraud and Operational Risk Management unit.

Kebijakan Antikorupsi

Anti-corruption Policy [IDX G-07]

Perseroan tetap teguh dalam komitmennya untuk menegakkan integritas dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara aktif mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi. Komitmen ini juga berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, yang diharapkan dapat menjalankan bisnis dengan kewajaran, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Dalam seluruh kegiatan bisnisnya, Perseroan menyelaraskan sikap antikorpunya dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Landasan hukum ini menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjaga etika operasional dan menumbuhkan budaya transparansi.

The Company remains firm in its commitment to upholding integrity by complying with all applicable laws and regulations and actively supporting the Government of Indonesia's efforts to combat corruption. This commitment also applies to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees, who are expected to conduct business with fairness, professionalism, and adherence to the principles of Good Corporate Governance (GCG). In all its business activities, the Company aligns its anti-corruption stance with Law No. 20 of 2001, which amends Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This legal framework serves as a guideline for the Company in maintaining operational ethics and fostering a culture of transparency.



Perseroan berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Perseroan mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawannya untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme serta prinsip-prinsip GCG.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan komitmen tersebut, Perseroan berlandaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari kebijakan antikorupsi Perseroan antara lain:

1. Menumbuhkan budaya perusahaan yang secara aktif menentang korupsi di setiap jenjang organisasi.
2. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko korupsi dalam operasional bisnis.

Sebagai bagian dari kerangka antikorupsi termasuk mitigasi tindak pidana korupsi, Perseroan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana berikut:

1. Menegakkan langkah-langkah transparansi yang ketat, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, serta mengatur pemberian atau penerimaan hadiah, insentif, atau janji antara pihak internal dan eksternal, dengan memastikan tidak ada pengaruh yang tidak semestinya diberikan berdasarkan jabatan atau wewenang.
2. Dibuat dan ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan Perseroan, yang salah satu poin dalam Pakta Integritas yakni menyatakan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tersebut berkomitmen untuk tidak melakukan (ataupun berupaya melakukan) tindakan memperkaya (ataupun mencari keuntungan) bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain di lingkungan Perseroan maupun dari pihak ketiga, dengan menggunakan jabatannya dalam Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan semua transaksi bisnis dengan cara yang sah, etis, dan transparan yang sejalan dengan etika bisnis inti, visi, dan misinya. Lebih jauh, Perseroan mengakui dan menghargai kontribusi semua pemangku kepentingan yang secara aktif berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan, dan pelaporan praktik korupsi sesuai dengan kebijakan Perseroan.

The Company is committed to and complies with applicable laws and regulations and supports the Government of Indonesia in combating corruption. Therefore, the Company requires all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to uphold fair business competition, values of integrity and professionalism, and the principles of GCG.

In conducting its business activities based on this commitment, the Company refers to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The objectives of the Company's anti-corruption policy include:

1. Fostering a corporate culture that actively opposes corruption at all levels of the organization.
2. Increasing awareness and vigilance regarding corruption risks in business operations.

As part of its anti-corruption framework, including mitigation of corruption offenses, the Company implements the following measures:

1. Enforcing strict transparency measures, particularly in procurement of goods and services, and regulating the giving or receiving of gifts, incentives, or promises between internal and external parties, ensuring that no improper influence is exerted based on position or authority.
2. Requiring all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to sign an Integrity Pact, one of the provisions of which states that the signatories commit not to engage in (or attempt to engage in) any act of enriching themselves or others, or seeking personal gain within the Company or from third parties, by using their position in the Company.

The Company is committed to conducting all business transactions in a lawful, ethical, and transparent manner in line with its core business ethics, vision, and mission. Furthermore, the Company recognizes and appreciates the contribution of all stakeholders who actively participate in preventing, combating, and reporting corrupt practices in accordance with Company policies.

Kebijakan Pengendalian *Fraud*

Fraud Control Policy

Kebijakan Anti *Fraud* Perseroan berupaya menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan serta memenuhi seluruh aspek regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan implementasi Kebijakan Pengendalian *Fraud* yang wajib ditaati oleh seluruh karyawan Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Struktur strategi pengendalian *fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko khususnya pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi anti *fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan, yaitu: 1) Pencegahan 2) Deteksi, 3) Investigasi, pelaporan, dan sanksi, 4) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Oleh karena itu efektivitas penerapan strategi pengendalian *fraud* perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek manajemen risiko yang berfokus pada pengendalian *fraud*. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi: 1) Pengawasan aktif manajemen, 2) Struktur organisasi, 3) Pertanggungjawaban, 4) Pengendalian dan pemantauan.

Untuk memastikan praktik bisnis yang etis dan menjaga operasi dari aktivitas *fraud*, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Anti-*Fraud* yang komprehensif. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah *fraud* dalam segala bentuk, meningkatkan integritas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap karyawan diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini saat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Strategi pengendalian *fraud* Perseroan berakar pada prinsip-prinsip dasar manajemen risiko, pengendalian internal, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pendekatan terstruktur dan berlapis telah diterapkan, yang terdiri dari empat pilar utama yang memperkuat kerangka kerja pencegahan *fraud*:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, Perseroan mengintegrasikan manajemen risiko *fraud* ke dalam kerangka tata kelola yang lebih luas. Hal ini meliputi: 1) Pengawasan aktif manajemen, 2) Struktur organisasi, 3) Pertanggungjawaban, 4) Pengendalian dan pemantauan.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pencegahan *fraud*, Perseroan telah menerapkan langkah-langkah pengendalian dan mekanisme pemantauan yang ketat di bawah ini guna memastikan bahwa semua kegiatan bisnis tetap etis, transparan, dan bebas dari praktik penipuan:

The Company's Anti-Fraud Policy aims to establish clean business practices, avoid all forms of fraud, and comply with all applicable regulations in Indonesia. This is implemented through the Fraud Control Policy, which must be adhered to by all employees in performing their duties and responsibilities. The overall fraud control strategy structure integrates the fundamental principles of risk management, particularly internal control and good corporate governance. The implementation of the anti-fraud strategy in the form of a fraud control system is structured through four (4) interconnected pillars of fraud control strategy, namely: 1) Prevention, 2) Detection, 3) Investigation, reporting, and sanctions, and 4) Monitoring, evaluation, and follow-up. Therefore, the effectiveness of the implementation of the fraud control strategy needs to be supported by strengthening risk management aspects focused on fraud control. These aspects include at least: 1) Active management supervision, 2) Organizational structure, 3) Accountability, and 4) Control and monitoring.

To ensure ethical business practices and safeguard operations from fraud activities, the Company has established a comprehensive Anti-Fraud Policy. This policy is designed to prevent fraud in all forms, enhance integrity, and ensure compliance with applicable regulations in Indonesia. Every employee is expected to uphold these principles in performing their duties and responsibilities.

The Company's fraud control strategy is based on the fundamental principles of risk management, internal control, and Good Corporate Governance. A structured and layered approach has been implemented, consisting of four main pillars that strengthen the fraud prevention framework:

1. Prevention
2. Detection
3. Investigation, reporting, and sanctions
4. Monitoring, evaluation, and follow-up

To enhance the effectiveness of this strategy, the Company integrates fraud risk management into a broader governance framework. This includes: 1) Active management supervision, 2) Organizational structure, 3) Accountability, and 4) Control and monitoring.

As part of its commitment to fraud prevention, the Company has implemented the following control measures and monitoring mechanisms to ensure that all business activities remain ethical, transparent, and free from fraudulent practices:



1. Pengendalian di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*.
 2. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*.
 3. Pengendalian lain dalam pengendalian *fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.
 4. Pengendalian melalui kaji ulang oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh audit internal atas pelaksanaan strategi *anti-fraud*.
 5. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas pada seluruh jenjang organisasi dalam pemisahan fungsi antara yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*.
 6. *Whistleblowing*.
1. Human Resources (HR) controls aimed at improving the effectiveness of task execution and fraud control.
 2. Information system controls supporting electronic data processing, storage, and security to prevent potential fraud.
 3. Other fraud controls, such as physical asset control and documentation control.
 4. Management review controls (*top-level review*) as well as operational reviews (*functional review*) conducted by Internal Audit on the implementation of the anti-fraud strategy.
 5. Segregation of duties across all organizational levels, particularly separating functions related to acceptance, claims, and finance processes, to ensure that no party has the opportunity to commit or conceal fraud.
 6. Whistleblowing system.

Kampanye *anti-fraud* dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang berkelanjutan kepada seluruh karyawan, baik melalui:

- Pelatihan secara *online (e-learning)* dan *offline*
Secara berkelanjutan Perseroan mengadakan pelatihan *Fraud Awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan di Perseroan.
- Fraud awareness campaign e-mail dan *wallpaper*
Sosialisasi yang dilakukan melalui email ke seluruh karyawan secara berkala dan memasang wallpaper secara serempak di seluruh laptop atau komputer karyawan.
- Poster *Whistleblowing*
Sosialisasi penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) melalui poster di kantor pusat dan kantor cabang.

Anti-fraud campaigns are conducted through continuous socialization to all employees, including:

- Online and offline training (*e-learning* and classroom training)
The Company continuously conducts Fraud Awareness training, which is mandatory for all employees.
- Fraud awareness campaign via email and wallpaper
Dissemination is carried out through periodic emails to all employees and simultaneous installation of awareness wallpapers on employees' laptops or computers.
- Whistleblowing posters
Socialization of the whistleblowing system through posters displayed at head office and branch offices.

Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction Policy

Kerangka kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) dirancang agar selaras dengan persyaratan peraturan dan praktik terbaik industri, guna memastikan mitigasi risiko dan kepatuhan yang kuat. Kerangka kerja ini dibangun di atas lima pilar utama:

The Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapon of Mass Destruction (AML-CFT and CPF) framework is designed to be aligned with regulatory requirements and industry best practices to ensure strong risk mitigation and compliance. This framework is built on five main pillars:

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

1. Kebijakan dan prosedur;
2. Pengendalian internal;
3. Sistem informasi manajemen; dan
4. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU-PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
2. Memastikan program APU-PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
3. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
4. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU-PPT dan PPPSPM;
5. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU-PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), dan/atau PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal);
6. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
7. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU-PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
2. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM; dan

Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners;

1. Policies and procedures;
2. Internal control;
3. Management information system; and
4. Human resources and training.

Active Supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

Active supervision by the Board of Directors over the implementation of the AML-CFT and CPF program is carried out as follows:

1. Proposing written policies and procedures related to the AML-CFT and CPF program to the Board of Commissioners;
2. Ensuring that the AML-CFT and CPF program is implemented in accordance with established written policies and procedures;
3. Establishing a dedicated unit and/or appointing an officer responsible for implementing the AML-CFT and CPF program;
4. Supervising business units' compliance in implementing the AML-CFT and CPF program;
5. Ensuring that written policies and procedures related to the AML-CFT and CPF program are aligned with changes and developments in products, services, and technology in the financial services sector, as well as in line with developments in typologies of Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and/or Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (PF);
6. Ensuring that officers and/or employees, particularly those in relevant work units and new employees, receive training related to the implementation of the AML-CFT and CPF program at least once within a one-year period; and
7. Ensuring that discussions related to the implementation of the AML-CFT and CPF program are conducted in Board of Directors meetings.

Active supervision of the Board of Commissioners in the implementation of the AML-CFT and CPF program is carried out as follows:

1. Ensuring that the Company has policies and procedures for implementing the AML-CFT and CPF program;
2. Providing approval for the policies and procedures for implementing the AML-CFT and CPF program proposed by the Board of Directors;
3. Evaluating the policies and procedures for implementing the AML-CFT and CPF program;
4. Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities in implementing the AML-CFT and CPF program; and



5. Memastikan adanya pembahasan terkait program APU-PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan dan Prosedur

Perseroan telah menetapkan kebijakan APU-PPT dan PPPSPM yang kuat yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas keuangan terlarang secara sistematis. Kebijakan ini berfungsi sebagai perlindungan penting, yang memastikan bahwa semua operasional bisnis mematuhi langkah-langkah kepatuhan yang ketat sambil secara proaktif mengatasi potensi ancaman.

Untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan memperkuat keamanan finansial, Perseroan menerapkan kerangka kerja APU-PPT dan PPPSPM secara konsisten di semua aktivitas bisnis. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat praktik manajemen risiko tetapi juga menumbuhkan budaya kewaspadaan dan akuntabilitas dalam organisasi.

Pedoman Implementasi APU-PPT dan PPPSPM menguraikan serangkaian kebijakan dan prosedur tertulis yang komprehensif, yang meliputi:

1. *Customer Due Diligence* (CDD)
2. *Enhanced Due Diligence* (EDD)
3. Pemantauan transaksi dan evaluasi
4. Pengkinian data nasabah
5. Penatausahaan dokumen
6. Penutupan hubungan usaha, pembatalan dan penolakan transaksi
7. Penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi
8. Pelaporan kepada manajemen dan Regulator

5. Ensuring that discussions related to the AML-CFT and CPF program are conducted in Board of Directors and Board of Commissioners meetings.

Policies and Procedures

The Company has established a robust AML-CFT and CPF policy designed to systematically identify, assess, and mitigate risks associated with illicit financial activities. This policy serves as a critical safeguard, ensuring that all business operations comply with strict regulatory requirements while proactively addressing potential threats.

To uphold regulatory compliance and strengthen financial security, the Company consistently implements the AML-CFT and CPF framework across all business activities. This approach not only strengthens risk management practices but also fosters a culture of vigilance and accountability within the organization.

The AML-CFT and CPF Implementation Guidelines set out a comprehensive set of written policies and procedures, which include:

1. *Customer Due Diligence* (CDD)
2. *Enhanced Due Diligence* (EDD)
3. Transaction monitoring and evaluation
4. Customer data updating
5. Documentation administration
6. Termination of business relationships, cancellation, and transaction rejection
7. Transaction delay and temporary suspension of transactions
8. Reporting to management and regulators

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal yang terstruktur dengan baik dan efektif merupakan hal mendasar untuk memastikan keberhasilan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM Perseroan. Efektivitas pengendalian ini ditunjukkan melalui aspek-aspek utama berikut:

1. Perseroan telah memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.

A well-structured and effective internal control system is fundamental to ensuring the successful implementation of the Company's AML-CFT and CPF program. The effectiveness of these controls is demonstrated through the following key aspects:

1. The Company has adequate policies, procedures, and internal monitoring;
2. The existence of authority and responsibility limits of work units related to the implementation of the AML-CFT and CPF program; and
3. Independent reviews are conducted to ensure the effectiveness of the implementation of the AML-CFT and CPF program.

Sistem Informasi Manajemen

Management Information System

Untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan memastikan penilaian yang akurat terhadap profil debitur dan perilaku transaksional, Perseroan telah menerapkan sistem informasi yang kuat dan dirancang untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pola atau anomali secara sistematis dalam transaksi debitur, yang memungkinkan deteksi dini aktivitas yang mencurigakan.
2. Memfasilitasi pelacakan dan pelaporan karakteristik transaksi secara *real-time*, baik melalui proses manual maupun otomatis.
3. Mengintegrasikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi informasi oleh individu yang mencoba terlibat dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

To enhance monitoring capabilities and ensure accurate assessment of debtor profiles and transactional behavior, the Company has implemented a robust information system designed to:

1. Systematically analyze and identify patterns or anomalies in debtor transactions, enabling early detection of suspicious activities.
2. Facilitate real-time tracking and reporting of transaction characteristics, both through manual and automated processes.
3. Integrate safeguards against the potential misuse of information technology by individuals attempting to engage in money laundering, terrorism financing, or proliferation financing of weapons of mass destruction.

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Human Resources and Training

Perseroan mengutamakan langkah-langkah pencegahan yang ketat untuk mengurangi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, terutama dengan mempertahankan standar yang tinggi dalam perekrutan dan pemantauan karyawan. Hal ini dicapai melalui:

1. Prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris. *Know your employee* mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

Untuk lebih memperkuat kepatuhan, Perseroan menyelenggarakan program pelatihan APU-PPT dan PPPSPM secara berkala, memastikan bahwa semua karyawan dan pejabat terkait tetap memperoleh informasi yang memadai. Sesi pelatihan ini diadakan setidaknya setahun sekali, dengan materi kursus meliputi:

1. Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU-PPT dan PPPSPM termasuk

The Company prioritizes strict preventive measures to mitigate the risk of money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction, particularly by maintaining high standards in employee recruitment and monitoring. This is achieved through:

1. Screening procedures to ensure high standards in the recruitment of new employees (*pre-employment screening*), both permanent and non-permanent employees, including senior officers and experts, from the lowest level up to one level below the Board of Directors and Board of Commissioners; and
2. Introduction and monitoring of employee profiles (*know your employee*), for both permanent and non-permanent employees, including experts, from the lowest level up to the Board of Directors and Board of Commissioners. *Know Your Employee* includes employees' character, behavior, and lifestyle.

To further strengthen compliance, the Company conducts AML-CFT and CPF training programs on a regular basis, ensuring that all employees and relevant officers continue to receive adequate information. These training sessions are held at least once a year, with course materials covering:

1. Implementation of laws and regulations related to the AML-CFT and CPF program, including the Company's



dalam hal ini Kebijakan dan Prosedur APU-PPT dan PPPSPM internal yang berlaku;

2. Teknik, metode dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
3. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
4. Materi pelatihan lain, jika dibutuhkan.

Untuk membangun kerangka kerja pengenalan pelanggan yang efektif, Perseroan memprioritaskan pelatihan khusus bagi karyawan yang memegang peranan penting dalam interaksi dengan pelanggan. Pelatihan ini sangat penting bagi personel yang:

1. Berhadapan langsung dengan nasabah; dan/atau
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan.

internal AML-CFT and CPF policies and procedures;

2. Techniques, methods, and typologies of ML, TF, and/or PF
3. Policies and procedures for implementing the AML-CFT and CPF program, as well as the roles and responsibilities of employees in preventing and combating ML, TF, and/or PF; and
4. Other training materials, if required.

To build an effective customer identification framework, the Company prioritizes specialized training for employees who play key roles in customer interactions. This training is essential for personnel who:

1. Have direct interaction with customers; and/or
2. Are involved in the provision of financing facilities.

Kebijakan Pengadaan

Procurement Policy

Perseroan menegakkan kebijakan pengadaan yang dirancang untuk mengamankan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dengan tetap menjaga standar kualitas tinggi dan mencegah konflik kepentingan. Kebijakan ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan.

Kebijakan ini menguraikan mekanisme terstruktur untuk memperoleh barang dan jasa, yang merinci kriteria pemilihan yang diperlukan untuk pemasok. Melalui peraturan ini, Perseroan memastikan bahwa praktik pengadaan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan dan perilaku bisnis yang etis.

Seleksi dan Evaluasi Vendor/Pemasok

Penunjukan vendor mengikuti proses seleksi yang ketat sesuai dengan kebijakan Perseroan. Selama siklus pengadaan, vendor dinilai berdasarkan kualifikasi, kinerja masa lalu, dan kesesuaian keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan. Proses seleksi dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

- Penunjukan Langsung – Melibatkan vendor berdasarkan persyaratan khusus atau kemitraan strategis.
- Seleksi Langsung – Memilih dari sejumlah kecil vendor yang telah memenuhi syarat.
- Tender Kompetitif – Melaksanakan penawaran terbuka untuk memastikan nilai, kualitas, dan layanan yang optimal.

The Company enforces a procurement policy designed to secure goods and services at competitive prices while maintaining high quality standards and preventing conflicts of interest. This policy serves as a reference framework to ensure transparency, efficiency, and accountability in procurement activities.

This policy outlines a structured mechanism for procuring goods and services, detailing the necessary selection criteria for suppliers. Through this policy, the Company ensures that procurement practices are aligned with corporate governance principles and ethical business conduct.

Vendor/Supplier Selection and Evaluation

Vendor appointments follow a strict selection process in accordance with the Company's policies. During the procurement cycle, vendors are assessed based on qualifications, past performance, and overall suitability to meet the Company's operational needs. The selection process may be conducted through various methods, including:

- Direct Appointment – Engaging vendors based on specific requirements or strategic partnerships.
- Direct Selection – Selecting from a limited number of qualified vendors.
- Competitive Tender – Conducting open bidding to ensure optimal value, quality, and service.

Dengan menerapkan kerangka evaluasi menyeluruh, Perseroan mempertahankan standar pengadaan yang tinggi sekaligus membina hubungan pemasok yang kuat dan dapat diandalkan.

By implementing a comprehensive evaluation framework, the Company maintains high procurement standards while fostering strong and reliable supplier relationships.

Pemangku Kepentingan Stakeholders

Para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang Perseroan. Mereka mewakili individu dan entitas yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasional Perseroan. Menyadari hubungan yang dinamis ini, Perseroan berkomitmen untuk membina kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan.

Stakeholders are an essential part of the Company's long-term growth and sustainability. They represent individuals and entities that influence or are affected by the Company's operations. Recognizing this dynamic relationship, the Company is committed to fostering strong and mutually beneficial partnerships with all stakeholders.

Melalui keterlibatan yang berkelanjutan, Perseroan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan Perseroan. Perseroan telah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama, termasuk konsumen, karyawan, regulator, masyarakat umum, pemegang saham, pemasok, dan media.

Through continuous engagement, the Company aims to create added value for stakeholders, which ultimately contributes to the Company's advancement. The Company has identified key stakeholder groups, including consumers, employees, regulators, the general public, shareholders, suppliers, and the media.

Untuk memastikan dialog yang terbuka dan konstruktif, Perseroan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti: interaksi di media sosial, layanan *customer service*, komunikasi dengan karyawan di internal Perseroan, interaksi di seluruh wilayah operasional, pertemuan dengan investor dan semua regulator yang terkait. Perseroan menyerap informasi berupa keluhan, harapan dan masukan untuk perbaikan dan kemajuan bisnis yang Perseroan jalankan. Semua aspirasi tersebut ditampung untuk dikelola lebih lanjut.

To ensure open and constructive dialogue, the Company utilizes various communication channels, such as social media interactions, customer service channels, internal communication with employees, interactions across operational areas, meetings with investors, and engagement with all relevant regulators. The Company captures information in the form of complaints, expectations, and input for the improvement and development of its business activities. All such feedback is collected and managed for further follow-up.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Pemilihan Basis of Selection	Pendekatan Keterlibatan Engagement Approach	Isu/Topik yang Dikemukakan Issues/Topics Raised	Respons Perseroan Response of the Company
Konsumen	Kepuasan konsumen menentukan pertumbuhan usaha.	Komunikasi sehari-hari di <i>showroom/diler, front office cabang, call centre</i> , dan media sosial.	Kualitas pelayanan kepada konsumen, keterbukaan informasi terkait produk, menjaga kerahasiaan identitas konsumen.	Memberikan informasi mengenai produk dan layanan kepada konsumen melalui selebaran/poster di <i>front office</i> dan media sosial.
Customers	Customer satisfaction determines business growth.	Daily communication at <i>showroom/dealer, front office at branches, call center</i> , and social media.	Quality of customer service, disclosure of product-related information, and maintaining the confidentiality of customers' identity	Provide information on products and services to customers through flyers/posters at the front office and social media.



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Pemilihan Basis of Selection	Pendekatan Keterlibatan Engagement Approach	Isu/Topik yang Dikemukakan Issues/Topics Raised	Respons Perseroan Response of the Company
Karyawan	Aset perusahaan yang penting dan perlu dikembangkan terus.	Kegiatan kerja setiap hari, pertemuan berkala, pengembangan karier.	Kesejahteraan karyawan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pengembangan karyawan.	Memberi asuransi atau BPJS, melengkapi sarana dan prasarana K3, pendidikan dan pelatihan.
Employees	An important company asset for continuous development.	Daily work activities, regular meetings, career development.	Employee welfare and Occupational Health and Safety (OHS), employee development.	Provide insurance or social security, complete OHS facilities and infrastructure, education and training.
Masyarakat	Pihak yang berpotensi terdampak atas kegiatan operasional.	Literasi dan edukasi keuangan, pelaksanaan kegiatan CSR.	Dampak nyata yang positif.	Pemberian literasi dan edukasi, dan kegiatan CSR.
Public	Party with a potential to be affected by operations.	Financial literacy and education, implementation of CSR activities.	Positive real impact	Provide literacy and education, and CSR activities.
Pemerintah	Kepatuhan peraturan.	Pemenuhan peraturan dan perundang-undangan.	Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.	Memenuhi setiap ketentuan yang berlaku.
Government	Regulatory compliance.	Fulfillment of laws and regulations.	Compliance with laws and regulations.	Fulfill any applicable provisions.
Pemegang Saham/ Investor	Organ tertinggi dalam RUPS, Dukungan investasi.	Penyampaian informasi dan laporan secara berkala melalui RUPS, Laporan Tahunan, dan keterbukaan informasi.	Pencapaian kinerja Perseroan.	Melalui pengelolaan perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan.
Shareholders/ Investors	The highest organ in the GMS, Investment support.	Submission of information and reports on a regular basis through the GMS, Annual Report, and information disclosure	The Company's performance achievement.	Improve financial performance through good corporate governance management.
Pemasok Utama (Principal) dan Pemasok Lainnya	Mitra kerja penunjang kelancaran operasional usaha.	Proses tender, evaluasi atau review bersama.	Kemudahan dan perlakuan yang sama, Kepatuhan.	Perlakuan inklusif bagi semua mitra, memberi keterbukaan informasi.
Principal Suppliers and Other Suppliers	Business partners supporting smooth operations.	Tender process, evaluation or joint review.	Convenience and equal treatment, Compliance.	Provide information disclosure and inclusive treatment for all partners.
Media	Sarana komunikasi, publikasi/keterbukaan informasi.	Situs web, media sosial.	Keterbukaan informasi.	Bekerja sama melalui saluran media yang tersedia, baik karena ketentuan regulasi maupun kepentingan Perseroan.
	Means of communication, publication/ disclosure of information.	Website, social media.	Information disclosure.	Work closely through available media channels, both due to regulatory provisions and the interests of the Company.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Issues Encountered in the Implementation of Sustainable Finance

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menemui kendala yang berarti dalam melaksanakan inisiatif keuangan berkelanjutan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dengan mengadopsi kebijakan berwawasan ke depan yang mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Untuk memperkuat upaya keberlanjutannya, Perseroan telah menjalankan program pengembangan kompetensi bagi anggota manajemen, serta program sosialisasi GCG dan penerapan keuangan berkelanjutan bagi karyawan. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan, pendekatan strategis Perseroan berfokus pada 3 (tiga) pilar inti: pembangunan ekonomi, dampak sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Analisis yang lebih rinci tentang inisiatif ini dan implementasinya sepanjang tahun 2025 dapat ditemukan di bab Kinerja Keberlanjutan.

As of December 31, 2025, the Company did not encounter any significant obstacles in implementing sustainable finance initiatives. Nevertheless, the Company remains committed to enhancing its capacity in responsible financial management by adopting forward-looking policies that support long-term value creation for stakeholders.

To strengthen its sustainability efforts, the Company has implemented competency development programs for management members, as well as GCG socialization programs and sustainable finance implementation training for employees. As part of its sustainability commitment, the Company's strategic approach focuses on 3 (three) core pillars: economic development, social impact, and environmental responsibility. A more detailed analysis of these initiatives and their implementation during 2025 is presented in the Sustainability Performance chapter.

Akses Informasi Perseroan

Access to Company Information

Sejalan dengan prinsip transparansi, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang tepat waktu dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Hingga akhir tahun 2025, Perseroan telah menyediakan informasi yang lengkap mengenai kinerjanya kepada publik melalui berbagai platform yang mudah diakses, antara lain:

- **Situs web:** <http://www.jaccs-mpmfinance.com/>
- **Hubungan Investor:** corporate.secretary@jaccs-mpmfinance.com
- **Media Sosial:**
 - Facebook: @jaccsmpmfinance
 - Instagram: @jaccs_mpmfinance
 - LinkedIn: JACCS MPM Finance Indonesia
- **E-mail:** pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- **Hotline:** 1500309

In line with the principle of transparency, the Company is committed to providing timely and accurate access to information to stakeholders. As of the end of 2025, the Company has made comprehensive information regarding its performance available to the public through various accessible platforms, including:

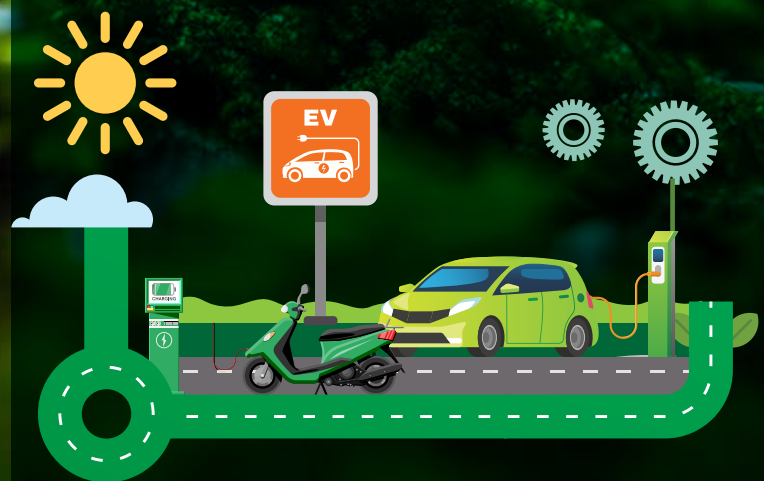
- **Website:** <http://www.jaccs-mpmfinance.com/>
- **Investor Relations:** corporate.secretary@jaccs-mpmfinance.com
- **Social Media:**
 - Facebook: @jaccsmpmfinance
 - Instagram: @jaccs_mpmfinance
 - LinkedIn: JACCS MPM Finance Indonesia
- **E-mail:** pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- **Hotline:** 1500309





Kinerja Keberlanjutan

Sustainability
Performance





Strategi dan Pendekatan Keberlanjutan

Sustainability Strategy and Approach [OJK.A.1]

Sebagai institusi penyedia jasa keuangan dan pembiayaan yang tepercaya di Indonesia, PT JACCS MPM Finance Indonesia (Perseroan) menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perusahaan harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Pendekatan keberlanjutan Perseroan dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG) ke dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga sebagai wujud kontribusi proaktif Perseroan dalam mendukung agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Strategi Keberlanjutan: Empat Pilar Kinerja Perseroan

Dalam mengimplementasikan komitmen dan strategi keberlanjutan, PT JACCS MPM Finance Indonesia mengacu pada empat pilar utama. Keempat pilar ini menjadi landasan aksi korporasi dan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target TPB/SDGs.

As a trusted provider of financial and financing services in Indonesia, PT JACCS MPM Finance Indonesia (the Company) positions sustainability as a strategic foundation for creating long-term value for all stakeholders. We recognize that the Company's economic growth must align with improvements in social welfare and environmental conservation.

The Company's sustainability approach is designed to integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every aspect of operations and business decision-making. This commitment is not only aimed at ensuring compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations but also serves as a manifestation of the Company's proactive contribution to supporting the global agenda, namely the Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainability Strategy: The Company's Four Pillars of Performance

In implementing its sustainability commitments and strategies, PT JACCS MPM Finance Indonesia relies on four main pillars. These four pillars serve as the foundation for corporate actions and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs specifically designed to address societal challenges and needs, while supporting the achievement of SDG targets.



Pilar Ekonomi: Sahabat Rakyat Economic Pillar: "Sahabat Rakyat"

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan memiliki kapasitas untuk menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. Pilar "Sahabat Rakyat" merupakan wujud kepedulian Perseroan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan fokus utama pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

As a financing company, the Company plays a role in driving inclusive economic growth. The "Sahabat Rakyat" pillar reflects the Company's commitment to empowering community economies, with a primary focus on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).



Pilar Kesehatan: Sahabat Sehat **Education Pillar: “Sahabat Cerdas”**

Perseroan meyakini bahwa pendidikan adalah esensi dari kemajuan sebuah bangsa. Pilar “Sahabat Cerdas” mencakup inisiatif penyaluran manfaat berupa dukungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan masyarakat, guna menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing.

The Company believes that education is the foundation of national progress. The “Sahabat Cerdas” pillar covers initiatives that provide direct and indirect support for educational activities in society, aimed at developing a competent and competitive generation.



Pilar Pendidikan: Sahabat Cerdas **Health Pillar: “Sahabat Sehat”**

Kesehatan masyarakat dan karyawan adalah prasyarat bagi produktivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pilar “Sahabat Sehat” merupakan manifestasi kepedulian Perseroan dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

Public and employee health is a prerequisite for productivity and sustainable growth. The “Sahabat Sehat” pillar represents the Company’s commitment to improving health standards in both the workplace and the broader community.



Pilar Lingkungan: Sahabat Hijau **Environmental Pillar: “Sahabat Hijau”**

Meskipun bergerak di sektor jasa keuangan, Perseroan berkomitmen penuh untuk meminimalkan jejak ekologis dari aktivitas operasionalnya. Pilar “Sahabat Hijau” adalah bentuk nyata kepedulian Perseroan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang diterapkan secara konsisten baik di lingkup internal maupun eksternal.

Although operating in the financial services sector, the Company is fully committed to minimizing the ecological footprint of its operations. The “Sahabat Hijau” pillar reflects the Company’s dedication to environmental preservation, implemented consistently across both internal operations and external initiatives.



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Overview of Sustainability Performance

ASPEK EKONOMI [OJK B.1]

ECONOMIC ASPECTS

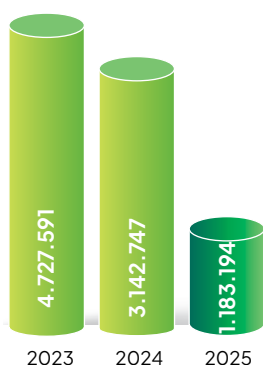
Kuantitas Produksi/Jasa yang Dijual

Quantity of Products/Services Provided

Pembiayaan Baru

New Financing

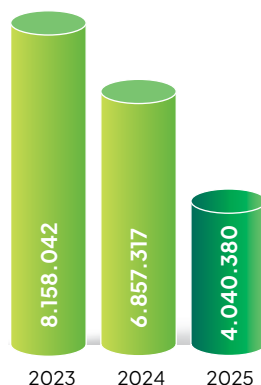
Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



Jumlah Aset

Total Assets

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



Jumlah Pendapatan

Total Income

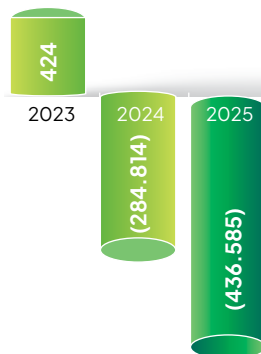
Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



(Rugi) Laba Bersih

Net (Loss) Profit

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



Produk Ramah Lingkungan

Environmentally Friendly Products



HYBRID

4W

1 UNIT

140.000.000

Penjualan | Sales

2W

16 UNIT

308.076.700

Penjualan | Sales



LISTRIK
ELECTRIC

4W

1 UNIT

452.000.000

Penjualan | Sales

2W

16 UNIT

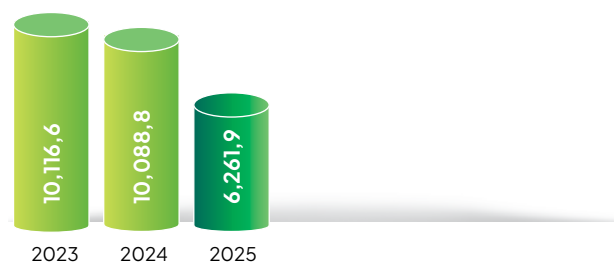
108.868.400

Penjualan | Sales

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP [OJK B.2] ENVIRONMENTAL ASPECT

Pemakaian Listrik Electricity Consumption

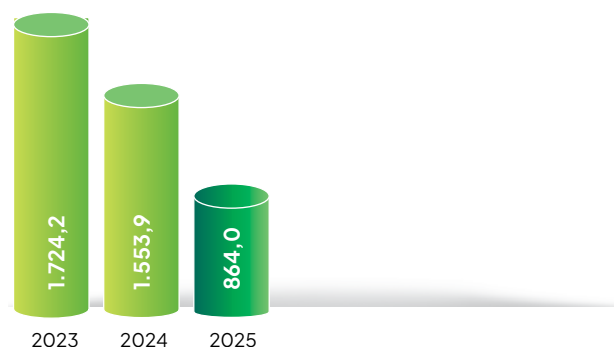
dalam kWh | In kWh



Keterangan Description	Satuan Unit	2023	+ -	2024	+ -	2025
Pemakaian Listrik Electricity Consumption	kWh	2.810.172,1	-7.736,1	2.802.436,7	-1.063.020,7	1.739.416,0
Pemakaian Listrik Electricity Consumption	Giga Joule	10.116,6	-27,9	10.088,8	-3.826,9	6.261,9
Emisi Scope 2 Scope 2 Emissions	ton CO ₂ -eq	2.444,9	-6,7	2.438,1	-924,8	1.513,3

Pemakaian BBM Fuel Consumption

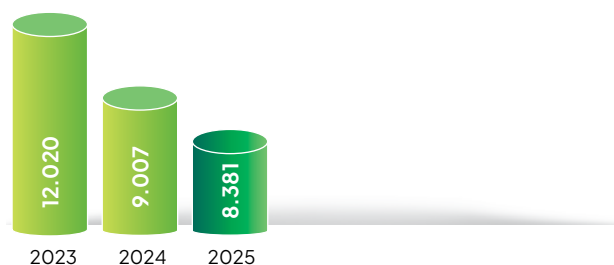
dalam Giga Joule | In Giga Joule



Keterangan Description	Satuan Unit	2023	+ -	2024	+ -	2025
Pemakaian BBM Fuel Consumption	Liter	47.878,7	-4.730,2	43.148,5	-19.156,6	23.991,9
Pemakaian BBM Fuel Consumption	Giga Joule	1.724,2	-170,3	1.553,9	-689,9	864,0
Emisi Scope 1 Scope 1 Emissions	ton CO ₂ -eq	128,2	-12,7	115,5	-51,3	64,2

Pemakaian Air Water Consumption

dalam m³ | In m³



Keterangan Description	Satuan Unit	2023	+ -	2024	+ -	2025
Pemakaian Air Water Consumption	m ³	12.020	-3.013	9.007	-62,6	8.381



ASPEK SOSIAL [OJK B.2] SOCIAL ASPECT

Dampak Positif Penerapan Praktik Keuangan Berkelanjutan bagi Masyarakat dan Lingkungan [F.25] Positive Impacts of Sustainable Finance Practices on Society and the Environment



Program Bantuan Pendidikan

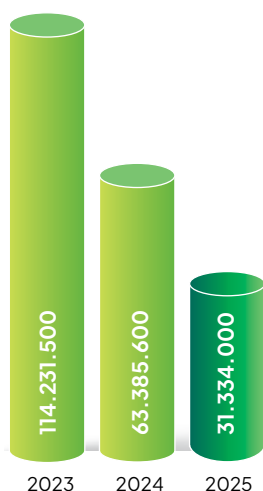
Perseroan menyalurkan beasiswa bagi siswa-siswi SMK YPK Ora et Labora. Beasiswa tersebut telah dimanfaatkan melalui sejumlah aktivitas edukasi, mencakup studi lapangan, pelatihan kepemimpinan dasar, hingga membiayai seragam dan buku tulis bagi siswa-siswi terpilih.

Education Assistance Program

The Company provides scholarships to students of SMK YPK Ora et Labora. These scholarships have been utilized to support various educational activities, including field studies, basic leadership training, as well as funding for school uniforms and notebooks for selected students.

Biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Expenditures

Dalam jutaan Rupiah/ In millions of Rupiah



Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Perseroan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berintegritas. Melalui penerapan prinsip ini, Perseroan berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja bisnis, kepentingan pemegang saham, serta tanggung jawab sosial dan etika kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan keuangan berkelanjutan yang selaras dengan lima prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pendekatan ini mendukung terciptanya kesinambungan usaha sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

GCG merupakan kerangka yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha agar mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Penerapan GCG mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendorong praktik bisnis yang transparan, etis, dan bertanggung jawab. Bagi Perseroan, implementasi GCG tidak hanya berfokus pada pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga integritas, memitigasi potensi konflik kepentingan, serta memastikan kejelasan fungsi dan tanggung jawab di setiap tingkat organisasi. Dengan demikian, tata kelola keberlanjutan berperan penting dalam memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan terus mengembangkan budaya tata kelola yang kuat melalui penerapan nilai-nilai perusahaan, kebijakan internal, serta berbagai program dan inisiatif yang sejalan dengan prinsip GCG.

Informasi lebih lengkap mengenai struktur, kebijakan, organ pendukung, serta pelaksanaan, pelatihan, dan evaluasi GCG dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJKE.1]

Sebagai bagian integral dari penerapan prinsip GCG, implementasi keuangan berkelanjutan di Perseroan dilaksanakan melalui koordinasi dan tanggung jawab berbagai organ dalam struktur Tata Kelola Perusahaan, sebagai berikut:

The Company positions sustainability principles as one of the key pillars in supporting sustainable and integrity-driven business growth. Through the implementation of these principles, the Company strives to maintain a balance between the achievement of business performance, the interests of shareholders, and its social and ethical responsibilities toward all stakeholders. This commitment is realized through the management of sustainable finance practices aligned with the five core principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This approach supports business continuity while delivering sustainable value creation for stakeholders.

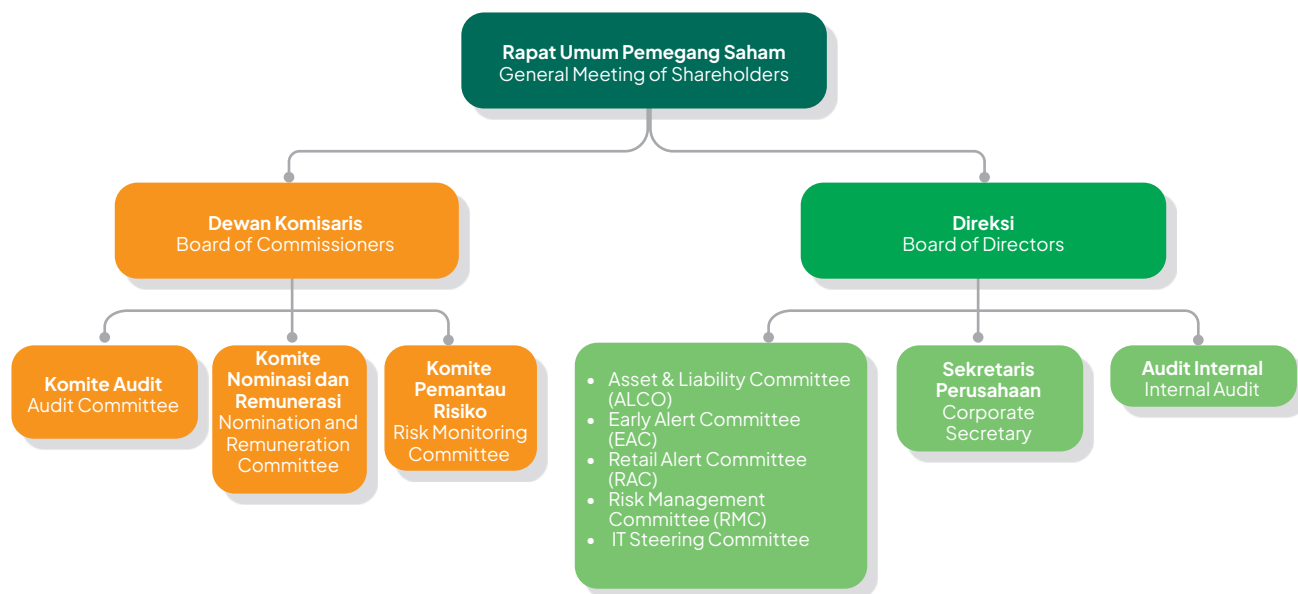
GCG serves as a framework that directs and controls business activities to enable the creation of sustainable value. Its implementation encompasses supervisory and control systems that promote transparent, ethical, and responsible business practices. For the Company, the implementation of GCG is not limited to compliance with prevailing laws and regulations, but also serves as a foundation for maintaining integrity, mitigating potential conflicts of interest, and ensuring clarity of roles and responsibilities at all organizational levels. Accordingly, sustainability governance plays a vital role in strengthening competitiveness, enhancing stakeholder trust, and safeguarding long-term business continuity.

To support these objectives, the Company continues to foster a strong governance culture through the implementation of corporate values, internal policies, and various programs and initiatives aligned with GCG principles.

Further information regarding the structure, policies, supporting organs, as well as the implementation, training, and evaluation of GCG can be found in the Corporate Governance section.

Person in Charge of Sustainable Finance Implementation [OJKE.1]

As an integral part of the implementation of GCG principles, sustainable finance at the Company is carried out through the coordination and responsibility of various bodies within the Corporate Governance structure, as follows:



Pengembangan Kompetensi Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJKE.2]

Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, serta karyawan di berbagai tingkat organisasi. Inisiatif ini didasarkan pada pemahaman bahwa Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha, termasuk dalam memastikan implementasi keuangan berkelanjutan berjalan secara efektif.

Melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas, Perseroan berupaya memperkuat pemahaman serta kapabilitas seluruh insan perusahaan terhadap prinsip dan praktik keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap individu diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, serta karyawan Perseroan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dan Bab Tata Kelola Perusahaan.

Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJKE.3]

Perseroan melakukan penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan sebagai bagian yang terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek keberlanjutan telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara sistematis guna meminimalkan potensi dampak yang dapat memengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha.

Competency Development for the Implementation of Sustainable Finance [OJKE.2]

The Company continuously implements competency development initiatives for the Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, and employees across all organizational levels. This initiative is grounded in the understanding that Human Resources play a strategic role in supporting business development, including ensuring the effective implementation of sustainable finance.

Through various training programs and capacity-building initiatives, the Company seeks to strengthen the understanding and capabilities of all personnel with respect to sustainable finance principles and practices. Accordingly, each individual is expected to contribute optimally to the achievement of the Company's sustainability objectives.

Further information regarding competency development activities undertaken by the Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, and employees for the year 2025 can be found in the Company Profile and Corporate Governance chapters.

Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance [OJKE.3]

The Company conducts risk assessments on the implementation of sustainable finance as an integral part of its overall risk management framework. This approach ensures that all sustainability aspects are systematically identified, analyzed, and managed in order to minimize potential impacts that may affect business performance and continuity.

Uraian lebih lengkap mengenai penerapan manajemen risiko Perseroan, termasuk landasan kebijakan, kerangka kerja, jenis risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

A more comprehensive description of the Company's risk management practices, including its policy foundation, framework, types of risks encountered, and mitigation measures undertaken, is presented in the Corporate Governance chapter.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement [OJKE.4]

Identifikasi Pemangku Kepentingan Perseroan dan Pelibatan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Perseroan secara berkelanjutan membangun hubungan yang positif dan saling memberikan nilai tambah dengan seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan serta memastikan keselarasan antara strategi Perseroan dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Untuk itu, Perseroan melakukan proses identifikasi dan pemetaan terhadap setiap kelompok pemangku kepentingan, termasuk memahami kepentingan dan isu yang relevan bagi masing-masing pihak. Berdasarkan pemetaan tersebut, Perseroan menetapkan pendekatan komunikasi yang tepat, mencakup metode interaksi, topik yang dibahas, serta frekuensi pelibatan, guna menciptakan hubungan yang efektif dan berkesinambungan.

Informasi lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan, bentuk pelibatan, serta topik yang menjadi perhatian disajikan pada tabel berikut:

Identification of Stakeholders and Their Engagement in the Implementation of Sustainable Finance

The Company continuously fosters positive and value-creating relationships with all stakeholders. Such engagement constitutes an essential component in supporting the implementation of sustainable finance and ensuring alignment between the Company's strategies and stakeholder expectations.

To this end, the Company undertakes a systematic process of identifying and mapping each stakeholder group, including gaining an understanding of the interests and relevant issues associated with each party. Based on this mapping, the Company establishes appropriate communication approaches, encompassing methods of interaction, topics of discussion, and frequency of engagement, in order to foster effective and sustainable relationships.

Further information regarding stakeholders, forms of engagement, and key topics of concern is presented in the following table:

Pemangku Kepentingan dan Pelibatan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Stakeholders and Their Engagement in the Implementation of Sustainable Finance

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Dasar Pemilihan Basis of Stakeholder Identification	Metode Pelibatan Engagement Method	Isu/Topik yang Dibahas Issues/Topics Discussed	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Pelanggan Customers	Kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Customers satisfaction significantly influences the Company's business continuity.	- Komunikasi langsung sehari-hari - Pengelolaan Call Center - Penyediaan akses informasi melalui media sosial - Customer Gathering - Direct daily communication - Call Center Management - Provision of information access through social media - Customer Gathering	- Kualitas layanan - Kualitas produk/jasa - Service quality - Product/service quality	- Setiap hari kerja - Saat diperlukan - Daily - As required



Pemangku Kepentingan Stakeholder	Dasar Pemilihan Basis of Stakeholder Identification	Metode Pelibatan Engagement Method	Isu/Topik yang Dibahas Issues/Topics Discussed	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Karyawan Employees	Karyawan merupakan Sumber Daya Manusia yang berperan penting sebagai aset strategis Perseroan. Employees are key human resources serving as the Company's strategic assets.	Kegiatan operasional sehari-hari Pertemuan berkala <i>Periodical meetings</i> Daily operational activities Periodic meetings	Kesejahteraan karyawan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif Employee welfare Occupational Health and Safety (OHS) Aspect Development of conducive work environment	Setiap hari kerja Saat diperlukan Daily As required
Masyarakat Community	Masyarakat merupakan pihak yang berpotensi menerima dampak aktivitas operasional Perseroan. Community is a party who potentially receives the impact of the Company's operational activities.	Program kehumasan Sosialisasi kegiatan TJSL Pelaksanaan kegiatan TJSL Public relations program CSER activities disseminations CSER activities implementation	Pemberdayaan ekonomi Bantuan sosial-kemasyarakatan Economic empowerment Social assistance and community development	Setiap tahun buku Annually
Regulator Regulator	Regulator merupakan pihak yang memiliki kewenangan menentukan aturan bagi Perseroan. Regulators are authorities with the mandate to establish and enforce regulations applicable to the Company.	Penyampaian laporan secara triwulanan dan tahunan Pembayaran pajak Quarterly and annual report submission Tax payment	Pemenuhan regulasi Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan Regulatory compliance Support to sustainable development	Setiap tahun Setiap triwulan Annually Quarterly
Pemegang Saham Shareholders	Pemegang saham merupakan pihak yang memegang kepemilikan atas Perseroan. Shareholders are parties holding ownership in the Company.	RUPS Pembagian dividen GMS Dividend distribution	Kinerja Perseroan Persetujuan atas hal-hal penting terkait Perseroan. Company performance Approval of significant matters related to the Company	Setiap tahun Saat diperlukan Annually As required
Pemasok Supplier	Pemasok merupakan mitra kerja yang menunjang kegiatan operasional Perseroan. Suppliers are business partner who supports the Company's operational activities.	Proses tender Penyampaian informasi bagi pemasok Tender process Information dissemination for suppliers	Mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemenuhan terhadap ketentuan dan persyaratan dalam proses tender Products and services procurement mechanism Compliance with tender requirements and procedures	Setiap tahun Saat diperlukan Annually As required
Media Massa Media	Media massa merupakan pihak eksternal yang memberi dampak bagi kualitas keberlangsungan usaha Perseroan. Media is an external party influencing the Company's business continuity quality.	Press release	Keterbukaan informasi Perseroan Company's information disclosure	Secara berkala Saat diperlukan Periodically As required

Permasalahan yang Dihadapi dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJKE.5]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berjalan lancar dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, tanpa menghadapi hambatan yang berarti. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Perseroan dalam mengintegrasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Meski demikian, Perseroan tetap fokus pada peningkatan kapasitas internal. Berbagai pelatihan manajemen dan sosialisasi terkait *Good Corporate Governance* (GCG) serta keuangan berkelanjutan bagi karyawan dilaksanakan secara berkelanjutan. Langkah ini memastikan setiap individu memahami peran dan kontribusinya dalam mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan di masa depan, Perseroan menekankan strategi keberlanjutan pada tiga bidang utama: ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan lingkungan. Setiap strategi diterapkan dengan tujuan menciptakan dampak positif bagi pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar. Detail pelaksanaan strategi ini selama 2025 dibahas lebih lanjut dalam Bab Kinerja Keberlanjutan.

Challenges Faced in the Implementation of Sustainable Finance [OJKE.5]

Throughout 2025, the Company successfully implemented sustainable finance principles without encountering any significant obstacles. This achievement reflects the Company's readiness to integrate responsible business practices while supporting sustainable development in Indonesia.

Nevertheless, the Company remains focused on strengthening internal capacity. Various management training programs and dissemination activities related to *Good Corporate Governance* (GCG) and sustainable finance for employees are continuously conducted. These initiatives ensure that every individual understands their roles and contributions in supporting the Company's sustainability objectives.

To address future challenges, the Company emphasizes its sustainability strategy across three key areas: economic, social, and environmental. Each strategy is implemented with the objective of creating positive impacts for stakeholders and the surrounding environment. Further details on the implementation of these strategies during 2025 are presented in the Sustainability Performance chapter.

Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance [F]

Membangun Budaya Keberlanjutan [OJKE.1]

Bagi Perseroan, keberlanjutan lebih dari sekadar kebijakan; ia menjadi bagian dari pola pikir dan praktik sehari-hari. Budaya ini mendorong setiap keputusan bisnis untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan, sekarang dan di masa depan.

Implementasi budaya keberlanjutan dilakukan melalui tata kelola yang bertanggung jawab, selaras dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Perseroan secara rutin menyelenggarakan sosialisasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan praktik keuangan berkelanjutan bagi karyawan, sekaligus mendorong mitra dan pemasok untuk menerapkan standar yang sama, sehingga nilai keberlanjutan tersebar di seluruh ekosistem bisnis.

Teknologi menjadi pilar penting dalam strategi keberlanjutan Perseroan. Layanan keuangan digital dikembangkan untuk lebih inklusif dan ramah lingkungan, memudahkan akses bagi konsumen dan mitra. Produk seperti MyCash

Building a Culture of Sustainability [OJKE.1]

For the Company, sustainability is more than just a policy; it is an integral part of our mindset and daily practices. This culture drives every business decision to not only pursue profit but also deliver tangible benefits to employees, the community, and the environment—both now and in the future.

The implementation of a sustainability culture is carried out through responsible governance, aligned with the achievement of the *Sustainable Development Goals* (SDGs) in Indonesia. The Company regularly conducts awareness programs on the principles of *Good Corporate Governance* (GCG) and sustainable financial practices for employees, while also encouraging partners and suppliers to adopt the same standards, ensuring that sustainability values are embedded throughout the entire business ecosystem.

Technology is a key pillar of the Company's sustainability strategy. Digital financial services are developed to be more inclusive and environmentally friendly, facilitating access for consumers and partners. Products like MyCash provide



menyediakan solusi dana yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan, sementara aplikasi JACCY memungkinkan mitra *dealer* memantau proses pembiayaan secara cepat dan efisien. Selain itu, aplikasi JM CARE menghadirkan informasi dan layanan keuangan secara mudah bagi masyarakat, mendukung literasi dan inklusi keuangan secara lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh insan Perseroan terhadap pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, Perseroan secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif edukasi dan sosialisasi yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk memperkuat budaya keberlanjutan di lingkungan kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang memadai terkait praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Sepanjang periode pelaporan, Perseroan menyelenggarakan berbagai program sosialisasi dan kampanye, antara lain sosialisasi keberlanjutan (*sustainability awareness campaign*), sosialisasi ramah lingkungan (*environmental awareness campaign*), serta program Sahabat Hijau yang mendorong perilaku hemat energi di lingkungan kerja. Selain itu, Perseroan juga menerapkan inisiatif operasional berupa pemilahan sampah di Kantor Pusat sebagai bagian dari upaya pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab.

Dari aspek tata kelola, Perseroan secara aktif meningkatkan kesadaran terkait etika dan kepatuhan melalui program peningkatan kesadaran fraud (*fraud awareness*). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat integritas serta membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam mendukung aspek kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan, seperti pelatihan *basic safety riding* guna meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara bagi karyawan. Tidak hanya itu, Perseroan turut memberikan pelatihan terkait perlindungan data berbasis standar ISO 27001 guna memperkuat keamanan informasi dan perlindungan data perusahaan.

Lebih lanjut, Perseroan juga berkolaborasi dengan MPM Group dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti MPM *Wellness Series*, *Environmentalk*, serta forum diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) terkait pengembangan *sustainability/ESG roadmap*. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperluas dampak positif keberlanjutan secara lebih holistik dan berkelanjutan.

flexible funding solutions for various needs, while the JACCY app enables dealer partners to monitor financing processes quickly and efficiently. Additionally, the JM CARE app provides easy access to financial information and services for the public, supporting broader financial literacy and inclusion.

In order to enhance awareness and understanding among all employees of the importance of implementing sustainability principles, the Company consistently carries out various integrated education and awareness initiatives. These efforts are undertaken not only to strengthen a sustainability-driven culture within the workplace, but also to ensure that every individual possesses an adequate understanding of responsible business practices.

Throughout the reporting period, the Company organized a range of awareness programs and campaigns, including sustainability awareness campaigns, environmental awareness campaigns, as well as the Green Friends Program, which promotes energy conservation behavior within the workplace. In addition, the Company implemented operational initiatives such as waste sorting at the Headquarters as part of its commitment to more responsible waste management practices.

From a governance perspective, the Company actively promotes awareness of ethics and compliance through fraud awareness programs. These initiatives aim to reinforce integrity and foster a corporate culture that upholds the principles of transparency and accountability.

In supporting occupational health and safety, the Company also conducted various training programs, including basic safety riding training to enhance employees' awareness of road safety. Furthermore, the Company provided training on data protection in accordance with ISO 27001 standards to strengthen information security and safeguard corporate data.

Moreover, the Company collaborates with MPM Group in various sustainability initiatives, including the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs such as the MPM *Wellness Series*, *Environmentalk*, and focus group discussions (FGDs) related to the development of the sustainability/ESG roadmap. This collaboration reflects the Company's commitment to expanding its positive sustainability impact in a more holistic and sustainable manner.

Kinerja Ekonomi Economic Performance

Sepanjang 2025, fokus utama Perseroan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonomi secara berkelanjutan. Seluruh aktivitas bisnis dan operasional diarahkan untuk menciptakan nilai yang bisa dinikmati berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham, karyawan, pemasok, hingga masyarakat dan regulator. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi ekosistem sosial dan ekonomi di sekitar perusahaan.

Selain pencapaian finansial, distribusi manfaat menjadi tolok ukur penting. Aktivitas bisnis diatur agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan, mendukung pembangunan inklusif dan kesejahteraan jangka panjang bagi semua pihak terkait.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Kehadiran jaringan operasional Perseroan di berbagai wilayah nusantara tidak sekadar bertujuan untuk memperluas akses inklusi keuangan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator penggerak ekonomi daerah. Salah satu dampak ekonomi langsung (*direct economic impact*) yang paling signifikan dari ekspansi dan keberlanjutan bisnis Perseroan adalah penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar area kantor cabang.

Sejalan dengan semangat pilar keberlanjutan “**Sahabat Rakyat**” (Pilar Ekonomi), Perseroan memiliki komitmen kuat untuk memprioritaskan rekrutmen talenta lokal dalam mengisi berbagai posisi operasional, mulai dari tenaga pemasar, surveyor, analis kredit, layanan pelanggan, hingga staf administratif. Penyerapan tenaga kerja ini memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran.

Lebih jauh lagi, strategi rekrutmen lokal ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian setempat. Dengan terserapnya angkatan kerja daerah ke dalam ekosistem bisnis Perseroan, terjadi peningkatan stabilitas pendapatan dan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini pada akhirnya mendorong perputaran roda ekonomi lokal yang lebih dinamis dan tangguh.

Perseroan tidak hanya berhenti pada penyerapan tenaga kerja, melainkan juga berinvestasi pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) sumber daya manusia daerah. Melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan, Perseroan membekali karyawan lokal dengan literasi finansial dan kompetensi profesional yang kompetitif di industri jasa keuangan.

Langkah konkret dalam memberdayakan tenaga kerja lokal ini merupakan wujud nyata kontribusi Perseroan terhadap

Throughout 2025, the Company's primary focus was to maintain and enhance sustainable economic performance. All business and operational activities were directed toward creating value for a broad range of stakeholders, including shareholders, employees, suppliers, as well as local communities and regulators. The overarching objective is to ensure that the growth achieved is not only financially beneficial, but also generates positive impacts on the surrounding social and economic ecosystem.

In addition to financial achievements, value distribution is considered a key performance indicator. Business activities are structured to ensure that the economic value generated is distributed in a fair and sustainable manner, thereby supporting inclusive development and long-term prosperity for all stakeholders.

Utilization of Local Workforce

The Company's operational network across various regions in Indonesia is not only intended to expand financial inclusion access for the public, but also serves as a catalyst for regional economic development. One of the most significant direct economic impacts of the Company's business expansion and sustainability is job creation and the absorption of local labor residing in the vicinity of its branch offices.

In line with the spirit of the sustainability pillar “**Sahabat Rakyat**” (Economic Pillar), the Company is strongly committed to prioritizing the recruitment of local talent for various operational roles, including marketing officers, surveyors, credit analysts, customer service personnel, and administrative staff. This absorption of local workforce contributes meaningfully to supporting local governments in reducing unemployment rates.

Furthermore, this local recruitment strategy creates a multiplier effect on the regional economy. As local labor forces become integrated into the Company's business ecosystem, household income stability and purchasing power in the surrounding areas improve. This ultimately stimulates a more dynamic and resilient local economic cycle.

The Company does not merely focus on employment absorption but also invests in local human capital development. Through continuous training and certification programs, the Company equips local employees with financial literacy and professional competencies relevant to the financial services industry.

This initiative represents a tangible contribution to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs),



pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) 8, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua.

Hingga 31 Desember 2025, sekitar 99,7% dari total 1.679 karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja lokal yang direkrut dari wilayah sekitar kantor cabang Perseroan.

Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Baru, Pendapatan, dan Laba Bersih [OJKF.2]

Indikator Indicator	Target 2025	Realisasi 2025 2025 Actual	Pencapaian Achievement
Pembiayaan Baru New Booking	1.768.860	1.183.194	66,89%
Pendapatan Income	1.338.599	1.022.951	76,42%
Rugi Bersih Tahun Berjalan Net Loss for the Year	(162.776)	(436.585)	(268,21%)

Di tahun 2025, realisasi pembiayaan baru, pendapatan, maupun rugi bersih tahun berjalan belum dapat memenuhi target yang telah dicanangkan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan seiring dengan penyesuaian portofolio bisnis yang dilakukan Perseroan sebagai bagian dari penguatan strategi jangka panjang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Rantai Pasokan

Rantai pasokan menjadi salah satu pilar kunci dalam pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Pendekatan berkelanjutan diterapkan dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola, selain efisiensi biaya dan profitabilitas.

Dalam praktiknya, Perseroan menyeleksi mitra bisnis berdasarkan kualitas, harga, pengalaman, jaminan, dan sertifikasi yang relevan. Proses pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender kompetitif, dengan penilaian menyeluruh terhadap kinerja dan kelayakan vendor. Dengan mekanisme ini, seluruh rantai pasokan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang inklusif serta tangguh.

particularly SDG 8, which promotes sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all.

As of 31 December 2025, approximately 99.7% of the Company's total 1,679 employees were local workers recruited from areas surrounding the Company's branch offices.

Comparison of Targets and Actual Results for New Financing, Revenue, and Net Income [OJKF.2]

In 2025, the realization of new financing, revenue, and net loss for the current year did not yet meet the established targets. This was primarily driven by a decline in revenue, in line with adjustments to the Company's business portfolio as part of its long-term strategic strengthening. Further details are presented in the Management Discussion and Analysis chapter.

Supply Chain

The supply chain is one of the key pillars of responsible business growth. A sustainable approach is implemented by taking into account social, environmental, and governance aspects, in addition to cost efficiency and profitability.

In practice, the Company selects business partners based on quality, price, experience, guarantees, and relevant certifications. The procurement process can be conducted through direct appointment, direct selection, or competitive bidding, with a comprehensive assessment of vendor performance and eligibility. Through this mechanism, the entire supply chain aligns with sustainability principles and supports inclusive and resilient business growth.

Dukungan terhadap SDGs Support for SDGs		
 Menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui jaringan rantai nilai Perseroan yang terdiri dari pemasok lokal. Creating economic growth through the Company's value chain network of local suppliers.	 Pelaksanaan proses pengadaan yang inklusif dan transparan telah mendorong praktik pengadaan yang berkelanjutan. The implementation of inclusive and transparent procurement processes has encouraged sustainable procurement practices.	 Berkontribusi pada pembangunan nasional melalui kewajiban retribusi dan pajak. Contributing to national development through levy and tax obligations.

Kinerja Lingkungan Environmental Performance

Biaya Lingkungan Hidup Tahun 2025 [OJK F.4]

Pada tahun 2025, Perseroan belum mengalokasikan biaya secara khusus untuk pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, aspek pengelolaan lingkungan tetap diintegrasikan dalam kegiatan operasional Perseroan sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

Penggunaan Material Ramah Lingkungan [OJK F.4]

Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, Perseroan terus mendorong praktik operasional yang lebih ramah lingkungan melalui program *paperless*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan memanfaatkan digitalisasi dalam berbagai proses administrasi. Beberapa inisiatif yang telah diterapkan antara lain:

- **Document Management System (DMS)** untuk pengarsipan dokumen secara digital.
- **Sistem HR e-solution** yang memfasilitasi proses personalia seperti pengajuan cuti, slip gaji, dan penilaian kinerja.
- **Sistem e-memo** untuk pengajuan memorandum internal.
- **Data warehouse** sebagai penyimpanan data terpusat dan digital.
- **Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)** untuk mendukung proses audit yang efisien.
- **Aplikasi JM Order** untuk memfasilitasi proses aplikasi pembiayaan oleh marketing.

Environmental Expenditure in 2025 [OJK F.4]

In 2025, the Company did not allocate specific expenditures for environmental management. Nevertheless, environmental considerations remain integrated into the Company's operational activities as part of its commitment to sustainable business practices.

Use of Environmentally Friendly Materials [OJK F.5]

In an effort to reduce its environmental impact, the Company continues to promote more environmentally friendly operational practices through a paperless program. This approach not only improves work efficiency but also supports environmental conservation by reducing paper usage and leveraging digitalization in various administrative processes. Some of the initiatives that have been implemented include:

- **Document Management System (DMS)** for digital document archiving.
- **HR e-solution system** that facilitates HR processes such as leave requests, pay slips, and performance evaluations.
- **E-memo system** for submitting internal memorandums
- **Data warehouse** as a centralized digital data storage solution.
- **Audit Management Information System** to support efficient audit processes.
- **JM Order application** to facilitate the financing application process by the marketing team.



Selain itu, kesadaran lingkungan juga ditanamkan kepada seluruh karyawan. Salah satu langkah nyata adalah pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai dengan mendorong karyawan menggunakan botol minum pribadi, sehingga limbah plastik dapat ditekan dan gaya hidup ramah lingkungan lebih terbiasa di lingkungan kerja.

Dengan berbagai inisiatif ini, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Aspek Energi [OJK F.6, F.7]

Perseroan terus melanjutkan berbagai inisiatif penghematan energi, terutama di kantor pusat, sebagai upaya mengurangi konsumsi listrik sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menanamkan kesadaran hemat energi di kalangan seluruh karyawan.

Untuk mendorong budaya hemat energi, Perseroan menggelar kampanye internal melalui media sosial serta menyelenggarakan kompetisi interaktif yang melibatkan semua cabang dan kantor pusat. Pendekatan ini diharapkan dapat membiasakan karyawan menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, sekaligus memperkuat efisiensi operasional perusahaan.

Selain itu, Perseroan secara rutin melakukan pengukuran penggunaan energi dalam aktivitas operasionalnya. Hasil pengukuran, yang mencakup konsumsi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), dibandingkan selama tiga tahun terakhir. Data ini menjadi dasar dalam merancang strategi penghematan energi ke depan dan memastikan langkah-langkah keberlanjutan Perseroan terus efektif.

Konsumsi Energi Perseroan [OJK F.6] [IDX E-03] The Company's Energy Consumption

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2024	2025
Energi BBM Fossil Fuel Energy	GigaJoule Gigajoule	1.724,2	1.553,9	864,0
Energi Listrik (PLN) Electricity (PLN)	GigaJoule Gigajoule	10.116,6	10.088,8	6.261,9
Total Energi Total Energy	GigaJoule Gigajoule	11.840,9	11.642,7	7.125,9
Pendapatan Revenue	Dalam jutaan Rupiah In millions of Rupiah	1.604.504	1.416.531	1.022.951
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/jutaan rupiah GJ/millions of rupiah	0,007	0,008	0,007

In addition, environmental awareness is instilled in all employees. One concrete step is reducing the use of single-use plastic bottles by encouraging employees to use their own water bottles, thereby minimizing plastic waste and fostering an eco-friendly lifestyle in the workplace.

Through these various initiatives, the company reaffirms its commitment to implementing sustainable, efficient, and environmentally responsible business practices, in line with its long-term sustainability goals.

Energy Aspects [OJK F.6, F.7]

The Company continues to implement various energy-saving initiatives, particularly at its headquarters, as part of efforts to reduce electricity consumption while supporting environmental conservation. This program aims not only to improve operational efficiency but also to instill energy-saving awareness among all employees.

To foster an energy-saving culture, the Company runs internal campaigns via social media and organizes interactive competitions involving all branches and the headquarters. This approach is expected to help employees adopt energy-saving habits in their daily activities, while simultaneously strengthening the Company's operational efficiency.

In addition, the Company routinely measures energy consumption in its operational activities. The measurement results, which include electricity and fuel consumption, are compared over the past three years. This data serves as the basis for designing future energy-saving strategies and ensuring the Company's sustainability measures remain effective.

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2024	2025
Listrik Electricity	Rupiah	4.059.856.725	4.048.680.339	2.512.934.310
BBM Fuel	Rupiah	682.471.000	590.685.010	320.591.400

Aspek Air [OJK F.8] [IDX E-04]

Perseroan berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap air tanah dengan memanfaatkan pasokan dari Perusahaan Air Minum (PAM) untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Langkah ini menunjukkan kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan, mengingat pemakaian air tanah dalam jangka panjang dapat menurunkan permukaan tanah dan berdampak negatif terhadap ekosistem.

Selain pengaturan sumber air, Perseroan juga mendorong karyawan untuk menerapkan kebiasaan hemat air. Berbagai kampanye internal melalui media sosial diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan membiasakan penggunaan air yang lebih efisien di lingkungan kerja.

Penggunaan air untuk seluruh aktivitas operasional dipantau secara berkala. Hasil pengukuran volume air selama tiga tahun terakhir menjadi acuan bagi Perseroan dalam merumuskan strategi pengelolaan air yang lebih berkelanjutan, sekaligus memastikan praktik operasional tetap ramah lingkungan.

Konsumsi Air Perseroan The Company's Water Consumption

Pemakaian Air Water Consumption	Satuan Unit	2023	2024	2025
Air Water	m ³	150.845.541	113.034.365	105.185.566

Aspek Keanekaragaman Hayati [OJK F.9, F.10]

Walaupun seluruh lokasi operasional Perseroan tidak berada di kawasan konservasi atau area lindung, Perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Setiap proses kerja dirancang agar dampak terhadap flora dan fauna sekitar dapat diminimalkan, sehingga keberlanjutan ekosistem menjadi bagian dari praktik operasional sehari-hari.

Aspek Emisi [OJK F.11, F.12] [IDX E-01, DX E-02, E-07]

Perseroan terus berupaya menurunkan emisi dari kegiatan operasionalnya. Penggunaan kendaraan operasional beremisi rendah dan perawatan rutin kendaraan menjadi langkah strategis untuk menjaga performa sekaligus efisiensi bahan bakar. Upaya ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjalankan operasional yang lebih ramah lingkungan.

Water Aspect [OJK F.8] [IDX E-04]

The Company is committed to reducing its reliance on groundwater by utilizing supplies from the Water Supply Company (PAM) to meet its daily operational needs. This initiative demonstrates the Company's commitment to environmental conservation, as long-term groundwater use can cause land subsidence and negatively impact ecosystems.

In addition to managing water sources, the Company also encourages employees to adopt water-saving habits. Various internal campaigns via social media are conducted to raise awareness and foster more efficient water usage in the workplace.

Water consumption for all operational activities is monitored regularly. Water volume measurements over the past three years serve as a reference for the Company in formulating more sustainable water management strategies, while ensuring that operational practices remain environmentally friendly.

Biodiversity Aspect [OJK F.9, F.10]

Although none of the Company's operational sites are located within conservation areas or protected zones, the Company conducts its operations with due regard for environmental balance. Every work process is designed to minimize impacts on the surrounding flora and fauna, ensuring that ecosystem sustainability is an integral part of daily operational practices.

Emissions Aspect [OJK F.11, F.12] [IDX E-01, DX E-02, E-07]

The Company continues to strive to reduce emissions from its operational activities. The use of low-emission operational vehicles and routine vehicle maintenance are strategic steps to maintain performance while ensuring fuel efficiency. These efforts align with the Company's commitment to conducting operations that are more environmentally friendly.



Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2024	2025
Emisi Scope 1 Scope 1 Emissions	ton CO ₂ -eq tons of CO ₂ -eq	128,2	115,5	64,2
Emisi Scope 2 Scope 2 Emissions	ton CO ₂ -eq tons of CO ₂ -eq	2.444,9	2.438,1	1.513,3
Total Emisi Total Emissions	ton CO ₂ -eq tons of CO ₂ -eq	2.573,0	2.553,6	1.577,5
Pendapatan Revenue	Dalam jutaan rupiah In millions of rupiah	1.604.504	1.416.531	1.022.951
Intensitas Energi Energy Intensity	ton CO ₂ -eq/jutaan rupiah tons of CO ₂ -eq/million rupiah	0,002	0,002	0,002

Aspek Limbah dan Efluen [OJK B.2, F.13, F.14, F.15]

Karakter usaha Perseroan di sektor jasa pembiayaan tidak menimbulkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari proses manufaktur, efluen cair beracun, maupun insiden tumpahan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup [OJK F.15].

Oleh sebab itu, jejak limbah Perseroan bersifat non-signifikan dan pengelolaannya difokuskan pada sampah domestik perkantoran (kertas dan plastik) serta limbah elektronik (e-waste) di kantor pusat maupun cabang.

Perseroan memastikan sampah dikelola sesuai prinsip ramah lingkungan. Mekanisme pengelolaan yang saat ini berjalan mencakup pemilahan sampah dasar di area kerja dan optimalisasi masa pakai aset elektronik IT sebelum disalurkan ke pihak ketiga, guna mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.

Inventarisasi Timbulan Limbah [OJK F.13] [IDX E-05]

Pada tahun pelaporan ini, Perseroan masih dalam tahap pembenahan sistem rekapitulasi data sehingga belum dapat menyajikan total timbulan limbah padat maupun non-padat dalam satuan kuantitatif (tonase). Sejalan dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, Perseroan merencanakan pemetaan *baseline* data limbah secara bertahap di masa mendatang. Saat ini, fokus utama Perseroan adalah pada upaya pengurangan di sumber (*source reduction*), salah satunya melalui akselerasi digitalisasi layanan dan proses persetujuan internal untuk menekan konsumsi kertas secara masif.

Pembiayaan Kendaraan Listrik

Perseroan juga mendorong mobilitas rendah emisi melalui kebijakan pembiayaan kendaraan listrik dan *hybrid*. Hingga Desember 2025, total realisasi pembiayaan kendaraan listrik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	4W		2W	
	Unit	Penjualan Sales	Unit	Penjualan Sales
Hybrid	1	140.000.000	16	308.076.700
Listrik	1	452.000.000	6	108.868.400

Waste and Effluent Aspect [OJK B.2, F.13, F.14, F.15]

The nature of the Company's business in the financing services sector does not generate hazardous waste from manufacturing processes, toxic liquid effluents, or spill incidents that have a significant impact on the environment [OJK F.15].

Therefore, the Company's waste footprint is insignificant, and its management focuses on domestic office waste (paper and plastic) as well as electronic waste (e-waste) at both the headquarters and branches.

The Company ensures waste is managed in accordance with environmentally friendly principles. Current management mechanisms include basic waste sorting in work areas and optimizing the lifespan of IT electronic assets before they are transferred to third parties, to support sustainable business practices.

Waste Generation Inventory [OJK F.13] [IDX E-05]

During the reporting year, the Company is still in the process of improving its data consolidation system and, therefore, has not yet been able to present the total volume of solid and non-solid waste in quantitative terms (tonnage). In line with its commitment to continuous improvement, the Company plans to gradually establish a waste data baseline in the future. At present, the Company's primary focus is on source reduction efforts, including the acceleration of service digitalization and internal approval processes to significantly reduce paper consumption.

Electric Vehicle Financing

The Company also promotes low-emission mobility through its electric and hybrid vehicle financing policies. As of December 2025, the total amount of electric vehicle financing disbursed is shown in the following table:

Langkah ini menegaskan komitmen Perseroan untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan di masyarakat Indonesia.

Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup [OJK F.16]

Perseroan menyediakan saluran komunikasi bagi pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan pengaduan terkait lingkungan:

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Gedung Lippo Kuningan Lantai 25,
Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-12, Karet Kuningan
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan mengenai masalah lingkungan di sekitar wilayah operasional, mencerminkan praktik operasional yang telah berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

supporting the use of environmentally friendly vehicles among the Indonesian public.

Environmental Complaints [OJK F.16]

The Company provides communication channels for stakeholders who wish to submit complaints related to environmental matters:

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Lippo Kuningan Building, 25th Floor
Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-12, Karet Kuningan
South Jakarta City, DKI Jakarta 12940, Indonesia

As of December 31, 2025, the Company did not receive any complaints related to environmental issues in the areas surrounding its operational activities, reflecting operational practices that are in line with sustainability principles.

Dukungan terhadap SDGs Support for SDGs		
 Pemakaian air secara bijaksana. Responsible consumption stewardship).	 Menjalankan inisiatif guna mendukung efisiensi energi. Implementation of initiatives to support energy efficiency.	 • Pengelolaan sampah yang baik menciptakan lingkungan masyarakat sekitar menjadi bersih dan sehat. • Pembiayaan kendaraan berbasis listrik. • Proper waste management contributes to a clean and healthy environment for surrounding communities. • Electric vehicles financing.

Kinerja Sosial Social Performance

Aspek Ketenagakerjaan

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18] [IDX S-07, S-08, S-09]

Perseroan menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi sebagai dasar dalam membangun lingkungan kerja yang adil dan terbuka. Kesempatan untuk berkembang diberikan secara setara kepada seluruh karyawan, baik dalam proses rekrutmen maupun pengembangan karier, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi secara optimal.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Perseroan telah menetapkan kebijakan yang melarang segala bentuk diskriminasi dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan kerja. Kebijakan ini didukung oleh mekanisme pelaporan yang memungkinkan karyawan menyampaikan keluhan secara aman dan rahasia.

Employment Aspects

Equal Employment Opportunity [OJK F.18] [IDX S-07, S-08, S-09]

The Company upholds the principles of inclusivity and nondiscrimination as the foundation for building a fair and open work environment. Opportunities for growth are provided equally to all employees, both in the recruitment process and career development, ensuring that every individual has the same opportunity to contribute optimally.

As part of this commitment, the Company has established policies prohibiting all forms of discrimination and harassment, including sexual harassment, and upholding respect for human rights in the workplace. This policy is supported by a reporting mechanism that allows employees to submit complaints safely and confidentially.



Hingga akhir tahun pelaporan 2025, tidak terdapat pelanggaran terkait diskriminasi, pelecehan, maupun hak asasi manusia di lingkungan Perseroan.

As of the end of the 2025 reporting year, there were no violations related to discrimination, harassment, or human rights within the Company.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender Employee Composition by Gender

Uraian Description	2023		2024		2025	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki Male	2.063	77,85%	1.455	77,02%	1.308	77,90%
Perempuan Female	587	22,15%	434	22,98%	371	22,10%
Jumlah Total	2.650	100,00%	1.889	100,00%	1.679	100,00%

Berikut ini adalah persentase karyawan perempuan berdasarkan deskripsi pekerjaannya, baik pada tingkat perusahaan, tingkat manajerial, serta manajemen inti selama 3 (tiga) tahun terakhir:

The following are the percentages of female employees by job description—at the company level, the managerial level, and the executive level—over the past 3 (three) years:

Persentase Karyawan Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Level Jabatan [IDX S-01] Percentage of Male and Female Employees by Job Level

Level Jabatan Job Level	Laki-laki Male		Perempuan Female	
	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase pegawai (%) Percentage of employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase pegawai (%) Percentage of employees (%)
Entry-Level	950	72,63%	245	66,04%
Mid-Level	339	25,92%	119	32,08%
Senior-level	12	0,92%	7	1,89%
Executive level	7	0,54%		
Total Karyawan Total Employees	1.308	100,00%	371	100,00%

Jumlah Karyawan Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Level Jabatan dan Rentang Usia [IDX S-02] Number of Male and Female Employees by Job Level and Age Group

Rentang Usia (tahun) Age Range (years)	Level Jabatan Job Level								Jumlah Pegawai Number of Employees
	Entry-Level		Mid-Level		Senior-Level		Executive-Level		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
18-24	25	9	2	6					42
25-34	328	149	57	40					574
35-44	445	76	163	52	3	2			741
45-55	152	11	117	21	9	5	5		320
>55							2		2

Jumlah Karyawan Sementara [IDX S-04]

Perseroan memanfaatkan dukungan tenaga profesional dari pihak eksternal, termasuk kontraktor dan konsultan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu. Keterlibatan tenaga kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam pelaksanaannya, Perseroan tetap memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja eksternal sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi standar etika dan tata kelola perusahaan.

Adapun jumlah tenaga kerja yang berasal dari kontraktor dan/atau konsultan selama Tahun Buku 2025 disajikan pada tabel berikut:

Keterangan Description	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Number of Employees (in the reporting year)	Persentase Pegawai (dalam tahun pelaporan) Percentage of Employees (in the reporting year)
Jumlah karyawan perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	114	6,78%
Number of company employees managed by contractors and/or consultants		

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19] [IDX S-10]

Seluruh kegiatan operasional Perseroan dijalankan tanpa melibatkan tenaga kerja anak maupun praktik kerja paksa. Sebagai langkah pencegahan, Perseroan menetapkan batas usia minimum dan persyaratan khusus bagi calon karyawan pada proses rekrutmen. Selain itu, hak-hak karyawan seperti hari libur keagamaan dan cuti diakomodasi secara penuh, sehingga lingkungan kerja tetap adil, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemenuhan Remunerasi Karyawan [OJK F.20]

Perseroan memastikan remunerasi karyawan diberikan secara adil dan transparan melalui gaji, tunjangan, serta fasilitas sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Penentuan besaran remunerasi memperhatikan berbagai faktor, termasuk kinerja individu, pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), serta peran dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan.

Berikut tren rasio gaji karyawan dibandingkan Upah Minimum Regional (UMR) selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Number of Temporary Employees [IDX S-04]

The Company utilizes the support of external professionals, including contractors and consultants, to assist in the execution of certain business activities. The engagement of such personnel is tailored to operational needs and is carried out with due consideration for work efficiency and effectiveness. In practice, the Company ensures that the use of external labor complies with applicable laws and regulations, as well as meets corporate ethics and governance standards.

The number of workers from contractors and/or consultants during the 2025 Fiscal Year is presented in the following table:

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19] [IDX S-10]

All of the Company's operational activities are conducted without the use of child labor or forced labor. As a preventive measure, the Company sets a minimum age limit and specific requirements for prospective employees during the recruitment process. Additionally, employee rights such as religious holidays and leave are fully accommodated, ensuring the work environment remains fair, safe, and compliant with applicable regulations.

Employee Remuneration Compliance [OJK F.20]

The Company ensures that employee remuneration is provided fairly and transparently through salaries, allowances, and benefits in accordance with applicable labor regulations. The determination of remuneration levels considers various factors, including individual performance, achievement of *Key Performance Indicators* (KPIs), as well as employees' roles and contributions to the Company.

The following presents the trend of the ratio between employee salaries and the Regional Minimum Wage (RMW) over the past 3 (three) years:



Uraian Description	2023	2024	2025
Rasio antara Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest to Lowest Employee Salary	42	42	37
Persentase Gaji Pegawai Terendah terhadap Upah Minimum Regional Percentage of Highest Employee Salary to the Regional Minimum Wage	100%	100%	100%

Fasilitas Kesehatan bagi Karyawan

Perseroan menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi seluruh karyawan, mencakup manfaat rawat jalan dan rawat inap, perawatan gigi, pemberian kacamata, cuti melahirkan, serta istirahat panjang bagi karyawan dengan kondisi kesehatan tertentu. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan dan memastikan mereka dapat bekerja dalam kondisi sehat dan produktif.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [OJK F.21] [IDX ESG S-11]

Sarana Keselamatan Kerja

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, Perseroan melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana keselamatan kerja yang memadai. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko insiden serta memastikan penanganan yang cepat jika terjadi keadaan darurat. Beberapa sarana yang disediakan antara lain:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Smoke Detector dan Fire Sprinkler
3. Pompa Hidran
4. Kotak P3K
5. CCTV 24 Jam

Tingkat Kecelakaan Kerja [IDX S-06]

Perseroan secara rutin memantau dan mengevaluasi tingkat kecelakaan kerja untuk memastikan langkah pencegahan yang efektif. Pada 2025, tercatat 5 kasus kecelakaan ringan dan 4 kasus kecelakaan berat. Upaya perbaikan berkelanjutan terus dijalankan untuk memperkuat sistem keselamatan dan mengurangi risiko insiden di masa mendatang.

Employee Health Benefits

The Company provides comprehensive health benefits for all employees, including outpatient and inpatient care, dental care, eyeglasses, maternity leave, and extended leave for employees with specific health conditions. These benefits are designed to support employee well-being and ensure they can work in a healthy and productive manner.

A Decent and Safe Work Environment [OJK F.21] [IDX ESG S-11]

Workplace Safety Equipment

To create a safe and comfortable work environment, the Company provides adequate workplace safety facilities, equipment, and infrastructure. This measure aims to reduce the risk of incidents and ensure a rapid response in the event of an emergency. Some of the equipment provided includes:

1. Portable Fire Extinguishers (APAR)
2. Smoke Detectors and Fire Sprinklers
3. Fire Hydrants
4. First Aid Kits
5. 24-Hour CCTV

Work-related Injury Rate [IDX S-06]

The Company routinely monitors and evaluates the work-related injury rate to ensure the effectiveness of preventive measures. In 2025, there were 5 recorded cases of minor work-related injuries and 4 cases of severe work-related injuries. FFC continuous improvement initiatives are consistently implemented to strengthen the occupational health and safety system and reduce the risk of future incidents.

Uraian Description	2023	2024	2025
Jumlah kecelakaan kerja Total number of work-related injuries	8	6	9
Total pegawai Total number of employees	2.650	1.889	1.679

Uraian Description	2023	2024	2025
Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai Percentage of serious work-related injuries, including severe injuries and fatalities, relative to total number of employees	0,26%	0,1%	0,2%

Tingkat Pergantian Karyawan [IDX S-03]

Tingkat pergantian karyawan pada 2025 tercatat sebesar 18,4%. Perseroan memantau tren ini untuk menilai efektivitas strategi retensi dan kepuasan karyawan, sekaligus menjadi dasar perbaikan manajemen SDM.

Employee Turnover Rate [IDX S-03]

The employee turnover rate in 2025 stood at 18.4%. The Company monitors this trend to assess the effectiveness of its retention strategies and employee satisfaction, and to inform improvements in human resources management.

Uraian Description	2023		2024		2025	
	Jumlah Pegawai Number of Employees	%	Jumlah Pegawai Number of Employees	%	Jumlah Pegawai Number of Employees	%
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja Number of Employee Resignations and Terminations	580	22,4%	1.220	53,7%	535	30,3%
Jumlah Pegawai Baru/pengganti Number of New Hires/Replacement Employees	700	27,0%	459	20,2%	325	18,4%

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi [OJK F.22] [IDX S-05]

Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan tetap menjadi fokus Perseroan. Program ini meliputi peningkatan keterampilan, pengembangan kepemimpinan, dan penguatan kapasitas profesional sesuai kebutuhan unit masing-masing.

Training and Competency Development [OJK F.22] [IDX S-05]

Employee training and competency development remains a key focus for the Company. These programs include skills enhancement, leadership development, and strengthening professional capabilities in accordance with the needs of each unit.

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun pelaporan Average training hours per employee during the reporting year	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Number of employees participating in training programs	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) Percentage of employees participating in training programs (%)
5 Jam/Pegawai 5 Hours/Employee	2.019	100%

Rincian lengkap mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia di Bab Profil Perseroan.

Complete details regarding training and competency development can be found in the Human Resources section of the Company Profile chapter.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perseroan memastikan tersedianya saluran yang aman dan transparan bagi seluruh karyawan untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Tujuannya adalah menjaga hak-hak karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- **Surat Elektronik** yang dialamatkan langsung ke Divisi Human Capital, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Grievance Mechanism for Employment-Related Issues

The Company ensures the availability of secure and transparent channels for all employees to submit complaints related to employment matters. This aims to safeguard employees' rights and foster a fair and equitable working environment. The available grievance channels include:

- **Email Communication** addressed directly to the Human Capital Division, enabling each report to be followed up in a timely and appropriate manner.



- **Mekanisme Whistleblowing System (WBS) Perseroan**, yang memungkinkan karyawan melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik tidak sesuai kebijakan perusahaan secara rahasia dan terlindungi.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh pengaduan akan ditangani dengan prinsip kerahasiaan dan objektivitas, serta menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen sumber daya manusia.

- **The Company's Whistleblowing System (WBS)**, which allows employees to report alleged violations or practices inconsistent with Company policies in a confidential and protected manner.

The Company emphasizes that all complaints are handled with strict confidentiality and objectivity, and are treated as part of its continuous improvement efforts in human capital management.

Dukungan terhadap SDGs Support for SDGs		
 Pemberian jaminan sosial tenaga kerja (BPJS) terhadap seluruh karyawan. Provision of employee social security benefits (BPJS) for all employees.	 Non-diskriminasi terhadap perempuan. Non-discrimination against women.	 • Tidak ada kerja paksa dan pekerja di bawah umur. • Penyediaan sarana dan prasarana K3. • Lingkungan kerja yang aman dan sehat. • No forced labour and underage labour. • Provision of OHS facilities and infrastructure. • Safe and healthy workplace.

Aspek Masyarakat

Dampak Operasional terhadap Masyarakat Sekitar [OJK F.23] [IDX S-12]

Perseroan menyadari bahwa setiap kegiatan operasional memiliki potensi dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dirancang agar memberikan manfaat sosial yang positif sekaligus meminimalkan efek negatif. Pendekatan ini mencakup komunikasi terbuka dengan komunitas lokal, pemantauan dampak sosial, serta penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan berupaya memastikan operasionalnya selaras dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sekitar.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, Perseroan membuka peluang kerja bagi penduduk di sekitar kantor cabang. Hingga Desember 2025, 99,7% karyawan Perseroan berasal dari komunitas lokal, menunjukkan kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung perekonomian masyarakat di sekitar operasionalnya.

Inisiatif ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan keterlibatan komunitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Perseroan menilai secara rutin rasio tenaga kerja lokal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan sosial, sehingga manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Community Aspects

Operational Impact on the Surrounding Community [OJK F.23] [IDX S-12]

The Company recognizes that every operational activity has the potential to impact the surrounding community. Therefore, all activities are designed to provide positive social benefits while minimizing negative effects. This approach includes open communication with local communities, monitoring of social impacts, and the implementation of responsible business practices. Through these measures, the Company strives to ensure its operations align with community well-being and the sustainability of the surrounding environment.

Use of Local Labor

As part of its commitment to local economic empowerment, the Company provides employment opportunities for residents near its branch offices. As of December 2025, 99.7% of the Company's employees come from local communities, demonstrating the company's tangible contribution to supporting the local economy around its operations.

This initiative not only creates jobs but also enhances community engagement and improves the quality of life for local residents. The Company regularly assesses the ratio of local employees as part of its social sustainability strategy, ensuring that the benefits provided are directly felt by the community.

Mekanisme dan Jumlah Pengaduan Masyarakat
[OJK F.24]

Perseroan menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dampak operasional perusahaan, sehingga setiap keluhan atau masukan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.

Hingga Desember 2025, tidak ada pengaduan, sanksi, maupun denda yang diterima Perseroan terkait dampak operasional terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan penerapan praktik operasional yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Mechanisms and Number of Public Complaints
[OJK F.24]

The Company provides communication channels for the public to submit complaints regarding the company's operational impacts, ensuring that every complaint or feedback is addressed promptly and transparently.

As of December 2025, the Company has received no complaints, sanctions, or fines related to operational impacts on the community. This reflects the implementation of operational practices that prioritize the interests and well-being of the surrounding community.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
[OJK F.25]

Environmental and Social Responsibility Activities
[OJK F.25]

Dukungan terhadap SDGs Support for SDGs	
	Penyerapan tenaga kerja lokal. Absorption of local labour.



Memberikan Pelayanan yang Setara kepada Konsumen

Providing Equal Service to Customers

Mekanisme Pengaduan Pelanggan

Pelanggan merupakan pemangku kepentingan utama yang berperan strategis dalam keberlangsungan dan perkembangan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menekankan pemenuhan hak pelanggan secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Selain itu, Perseroan melaksanakan pengelolaan layanan pelanggan serta penanganan keluhan, saran, kritik, dan pengaduan melalui *Risk Management Committee*.

Seluruh mekanisme pengaduan pelanggan disusun dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang relevan, antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Proses Penanganan Pengaduan Pelanggan

Proses penanganan pengaduan pelanggan dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Konsumen/Pelapor menyampaikan pengaduan.
2. Perseroan melakukan verifikasi data dan dokumen Konsumen/Pelapor.
3. Perseroan menerima pengaduan.
4. Konsumen/Pelapor menerima nomor tiket pengaduan.
5. Perseroan melakukan investigasi terkait pengaduan.
6. Perseroan menindaklanjuti pengaduan sesuai temuan.
7. Perseroan memberikan penjelasan atas penyelesaian pengaduan.
8. Konsumen/Pelapor menerima hasil penyelesaian dari Perseroan.

Dengan mekanisme ini, Perseroan memastikan setiap pengaduan ditangani secara cepat, akurat, dan transparan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan.

Customer Complaint Handling Mechanism

Customers are key stakeholders who play a strategic role in the continuity and development of the Company's business. Therefore, the Company emphasizes the fulfillment of customer rights in a fair manner and in accordance with applicable laws and regulations, without any form of discrimination.

In addition, the Company manages customer service operations and handles complaints, suggestions, feedback, and grievances through the Risk Management Committee.

All customer complaint mechanisms are established in accordance with relevant laws and regulations, including:

- Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
- POJK No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.
- SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.
- Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.
- POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.
- Other applicable laws and regulations.

Customer Complaint Handling Process

The customer complaint handling process is carried out systematically as follows:

1. The Customer/Complainant submits a complaint.
2. The Company verifies the Customer/Complainant's data and supporting documents.
3. The Company formally receives the complaint.
4. The Customer/Complainant receives a complaint ticket number.
5. The Company conducts an investigation into the complaint.
6. The Company follows up on the complaint based on investigation results.
7. The Company provides an explanation regarding the resolution of the complaint.
8. The Customer/Complainant receives the final resolution from the Company.

Through this mechanism, the Company ensures that all complaints are handled promptly, accurately, and transparently, while also supporting continuous improvement in service quality and customer satisfaction.

Saluran Pengaduan Pelanggan

Perseroan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, baik secara lisan maupun tertulis. Saluran pengaduan meliputi:

- Website resmi: www.jaccs-mpmfinance.com
- Email: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- Media sosial resmi Perseroan (antara lain Instagram, Facebook)
- Hotline: 021-30927200
- Kunjungan langsung ke kantor cabang atau Kantor Pusat JACCS MPM Finance Indonesia
- Telepon cabang
- Surat tertulis yang ditujukan ke kantor cabang terdekat atau Kantor Pusat

Untuk memastikan efektivitas proses, Perseroan menetapkan kondisi di mana pengaduan dapat ditolak, antara lain:

- Konsumen/Pelapor tidak melengkapi persyaratan dokumen yang diminta Perseroan.
- Pengaduan yang sebelumnya telah diselesaikan sesuai aturan OJK.
- Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material yang wajar dan langsung sesuai perjanjian pembiayaan atau dokumen produk/layanan.
- Pengaduan bukan merupakan Pengaduan Berindikasi Sengketa atau Pelanggaran.
- Pengaduan tidak terkait dengan produk atau layanan Perseroan.
- Pengaduan sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga peradilan secara perdata.

Perseroan menargetkan penyelesaian pengaduan dalam 10 hari kerja, dan akan memberi pemberitahuan kepada Konsumen/Pelapor apabila proses penyelesaian membutuhkan waktu lebih lama.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menerima 121 pengaduan pelanggan, seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan. Angka ini menunjukkan peningkatan 7,08% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 113 pengaduan pelanggan, mencerminkan meningkatnya kesadaran pelanggan terhadap kanal pengaduan yang tersedia, sekaligus menunjukkan keterbukaan pelanggan dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas layanan.

Customer Complaints Channel

The Company provides a complaint mechanism that is easily accessible to consumers, both verbally and in writing. Complaint channels include:

- Official website: www.jaccs-mpmfinance.com
- Email: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- The Company's official social media (including Instagram, Facebook)
- Hotline: 021-30927200
- In-person visits to a branch office or the JACCS MPM Finance Indonesia Head Office
- Branch phone
- Written letters addressed to the nearest branch office or the Head Office

To ensure the effectiveness of the process, the Company has established conditions under which complaints may be rejected, including:

- The consumer/complainant has not fulfilled the document requirements requested by the Company.
- Complaints that have previously been resolved in accordance with OJK regulations.
- The complaint is not related to reasonable and direct material losses and/or potential losses in accordance with the financing agreement or product/service documents.
- The complaint does not constitute a Complaint Indicating a Dispute or Violation.
- The complaint is not related to the Company's products or services.
- The complaint is currently being processed or has been adjudicated by a civil court.

The Company aims to resolve complaints within 10 business days and will notify the Customer/Complainant if the resolution process takes longer.

Throughout 2025, the Company received 121 customer complaints, all of which were addressed and resolved. This figure represents a 7.08% increase compared to 2024, which recorded 113 customer complaints, reflecting increased customer awareness of available complaint channels, while also demonstrating customers' openness in raising issues they face, as part of the Company's efforts to enhance transparency and service quality.



Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen [OJK F.17]

Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa secara setara kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi. Setiap konsumen memperoleh akses yang sama terhadap informasi, proses, serta kualitas layanan, sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kepuasan pelanggan.

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa [OJK F.26]

Perseroan senantiasa berupaya menghadirkan inovasi dan pengembangan produk/jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan secara berkala, dipublikasikan luas, dan dapat diikuti oleh pelanggan maupun masyarakat umum. Program-program ini mendukung pemahaman konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih cerdas dan aman.

Produk/Jasa yang Dievaluasi Keamanannya [OJK F.27]

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat produk atau jasa Perseroan yang dievaluasi kembali keamanannya akibat insiden tertentu yang berpotensi memengaruhi keamanan pelanggan. Hal ini menegaskan bahwa Perseroan terus memelihara standar keamanan produk dan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak Produk/Jasa bagi Pelanggan [OJK F.28]

Literasi dan Inklusi Keuangan

Perseroan memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang ditawarkan memberikan dampak positif bagi pelanggan melalui program edukasi dan inklusi keuangan. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai penggunaan produk secara aman, efisien, dan menguntungkan.

Pada 2025, kegiatan literasi dan inklusi keuangan diselenggarakan secara berkala di berbagai wilayah operasional Perseroan, terbuka untuk partisipasi pelanggan serta masyarakat umum. Inisiatif ini menjadi salah satu upaya Perseroan dalam membangun kepercayaan pelanggan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Commitment to Provide Equitable Access to Products and/or Services for Consumers [OJK F.17]

The Company is committed to providing equitable access to its products and/or services to all consumers without discrimination. Each consumer is afforded equal access to information, processes, and service quality, as part of the Company's efforts to uphold the principles of fairness, transparency, and customer satisfaction.

Product/Service Innovation and Development [OJK F.26]

The Company continuously strives to deliver innovation and develop products and/or services that not only meet customer needs but also generate positive impacts on their lives. These efforts are implemented through financial literacy and inclusion programs conducted on a regular basis, widely communicated, and accessible to both customers and the general public. These initiatives support consumers' understanding of the Company's products and services, while also promoting more prudent and secure financial management practices.

Products/Service Safety Evaluation [OJK F.27]

As of 31 December 2025, there were no products or services of the Company that required re-evaluation due to specific incidents that could potentially affect customer safety. This underscores the Company's continued adherence to applicable standards in maintaining the safety and reliability of its products and services.

Impact of Products/Services on Customers [OJK F.28]

Financial Literacy and Inclusion

The Company ensures that every product and service offered has a positive impact on customers through financial education and inclusion programs. These programs are designed to enhance consumers' understanding of how to use products safely, efficiently, and profitably.

In 2025, financial literacy and inclusion activities were conducted regularly across the Company's various operational areas and were open to participation by both customers and the general public. This initiative represents one of the Company's efforts to build customer trust while enhancing financial literacy within the broader community.

Realisasi Program Edukasi Keuangan Implementation of the Financial Education Program

Tanggal Date	Tema/Judul Kegiatan Activity Title/Theme	Media Sosial Social Media
27 Februari 2025 February 27, 2025	Waspada Modus Penipuan (<i>Fraudster</i>)! Cegah dengan Menjaga Data Pribadi Beware of Scammers! Prevent Fraud by Protecting Your Personal Data	Instagram
29 April 2025 April 29, 2025	Mengenal Perusahaan Pembiayaan Understanding Financing Companies	Instagram
18 Juni 2025 June 18, 2025	3 Keterampilan Finansial buat Remaja dan Mahasiswa 3 Financial Skills for Teens and College Students	Instagram
28 Juli 2025 July 28, 2025	Mau Pembiayaan Kamu Disetujui? Want Your Loan Approved?	Instagram
5 Agustus 2025 August 5, 2025	Jangan Cuma Gaya, Tapi Juga Harus Selamat Don't Just Look Good—Stay Safe Too	Instagram
24 September 2025	Jangan Pura-pura Lupa dengan Cicilanmu Don't Pretend to Forget About Your Installments	Instagram
9 Oktober 2025 October 9, 2025	Penyalahgunaan Identitas Orang Lain pada Pengajuan Pembiayaan Identity Theft in Financing Applications	Instagram
16 November 2025	Berapa Sih Pendapatan Ideal Untuk Kredit Motor? What's the Ideal Income for a Motorcycle Loan?	Instagram
30 Desember 2025 December 30, 2025	ebook: Mengenal Perusahaan Pembiayaan ebook: Understanding Financing Companies	Situs Web Website

Produk yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat penarikan kembali produk dari peredaran akibat pelanggaran peraturan perlindungan konsumen. Hal ini mencerminkan karakter bisnis Perseroan yang bergerak di sektor jasa keuangan, di mana praktik operasional dan layanan senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku.

Survei Kepuasan Pelanggan [OJK F.30]

Perseroan secara rutin melaksanakan survei *Net Promoter Score* (NPS) untuk menilai tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan. Survei ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi luas dari konsumen agar dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai pengalaman mereka menggunakan produk dan layanan Perseroan.

Hasil survei pada 2025 menunjukkan skor 87% dari 264 konsumen, yang mencerminkan seberapa besar peluang konsumen untuk kembali menggunakan layanan Perseroan maupun merekomendasikannya kepada orang lain. Data ini menjadi dasar bagi Perseroan dalam merancang perbaikan layanan, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan secara berkelanjutan.

Product Recalls [OJK F.29]

As of 31 December 2025, there were no product recalls resulting from violations of consumer protection regulations. This reflects the Company's business characteristics as a financial services provider, where operational practices and service delivery consistently comply with applicable regulatory requirements.

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30]

The Company regularly conducts a *Net Promoter Score* (NPS) survey to assess customer loyalty and satisfaction. The survey involves broad consumer participation to obtain an accurate representation of their experience in using the Company's products and services.

The 2025 survey results indicated a score of 87% based on responses from 264 customers, reflecting the likelihood of customers continuing to use the Company's services and recommending them to others. These insights serve as a basis for the Company in driving service improvements, developing new products, and continuously enhancing the overall customer experience.



Dukungan terhadap SDGs [OJK F.25] Support for SDGs



Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan memberikan solusi produk-produk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Participating in various initiatives to enhance financial literacy and inclusion, while providing financing product solutions that address the needs of the community.



Mengutamakan pemenuhan hak pelanggan tanpa adanya praktik-praktik diskriminatif apa pun.
Prioritizing the fulfillment of customer rights without any form of discriminatory practices.

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Written Verification by an Independent Party [OJK G.1]

Pada tahun pelaporan ini, Perseroan belum melaksanakan verifikasi tertulis oleh pihak independen, sejalan dengan praktik pelaporan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Perseroan memastikan seluruh informasi dan data kuantitatif yang disajikan tetap konsisten dan andal melalui proses verifikasi internal yang dilaksanakan secara cermat. Sehubungan dengan aspek keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan ini mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen sesuai dengan standar audit yang berlaku.

During the reporting year, the Company did not undertake written verification by an independent party, in line with reporting practices in previous years. Nevertheless, the Company ensures that all information and quantitative data presented remain consistent and reliable through a rigorous internal verification process. With respect to financial aspects, the information presented in this report refers to the Company's consolidated financial statements for the period from 1 January to 31 December 2025, which have been audited by an independent Public Accounting Firm (KAP) in accordance with applicable auditing standards.

Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun 2024

Response to Feedback on the 2024 Sustainability Report [OJK G.3]

Pada Tahun Buku 2025, Perseroan tidak menerima tanggapan, masukan, maupun umpan balik material terkait Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Perseroan tetap membuka ruang komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan secara transparan dan akuntabel.

In the 2025 financial year, the Company did not receive any responses, comments, or material feedback related to the 2024 Sustainability Report. The Company remains open to communication with all stakeholders and is committed to continuously improving the quality of its sustainability reporting in a transparent and accountable manner.

Referensi Silang POJK No. 51/POJK.03/2017

Cross-Reference to POJK NO. 51/POJK.03/2017 [OJK.G.4]

POJK 51/OJK.03/2017 Pengungkapan	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
A. Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1 Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation of Sustainability Strategy		210
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Berkelanjutan Sustainability Aspect Performance Highlights		
B.1 Aspek Ekonomi (3 tahun terakhir) Economic Aspect (last 3 years)	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual Quantity of products and services being sold	212
	Pendapatan atau penjualan Revenues or sales	212
	Laba atau rugi bersih Net profits or loss	212
	Produk ramah lingkungan Environmentally friendly products	212
B.2 Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	Penggunaan energi (listrik dan air) Energy usage (electricity and water)	213
	Pengurangan emisi yang dihasilkan Reducing emission production	213
	Pengurangan limbah dan efluen yang dihasilkan Reducing waste and effluent production	213
	Pelestarian keanekaragaman hayati Biodiversity preservation	213
B.3 Aspek Sosial Social Aspect	Dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan Positive and negative impact from the implementation of Sustainable Finance	214
	Pengeluaran biaya untuk masyarakat Allocated fund for the community	214
C. Profil Perseroan Company Profile		
C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan Vision, mission, and sustainability value of the Company	38
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, email, dan situs resmi Name, address, phone number, fax number, email, and official website	32
C.3	Skala usaha (total aset atau kapitalisasi aset, total kewajiban, jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan), persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), wilayah operasional Scale of business (total assets or assets capitalization, total liabilities, total employees based on gender, position, age, education, and employment status), share ownership percentage (public and government), operational area	40
C.4	Penjelasan singkat produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan Brief explanation on products, services, and business activities	41
C.5	Keanggotaan pada asosiasi Membership in association	43
C.6	Perubahan Perseroan yang bersifat signifikan misal terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan Significant changes in the Company, such as the closing or opening of branches, and ownership structure	43



POJK 51/OJK.03/2017 Pengungkapan		Pengungkapan Disclosure
D. Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation		
D.1	Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Policy to response to challenges in fulfilling sustainability strategy	22-29
D.2	Penjelasan respons Perseroan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan Explanation on the Company's response related to the implementation of Sustainable Finance	22-29
D.3	Strategi Pencapaian Target Target Achievement Strategy	22-29
E. Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible Person for the implementation of Sustainable Finance	215
E.2	Pengembangan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan Competency development related to Sustainable Finance	216
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on Sustainable Finance Implementation	216
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationship with the Stakeholders	217
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keberlanjutan/Topik Utama Keberlanjutan Issues with Sustainability Implementation/Key Sustainability Topics	219
F. Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan Activities to establish sustainability culture	219
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Baru, Pendapatan, dan Laba Bersih Comparison of Targets and Actual Results for New Financing, Revenue, and Net Income	221
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Targets and Portfolio Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Compatible with Sustainable Finance	222
Kinerja Lingkungan Hidup Environment Performance		
Aspek Umum General Aspect	F.4 Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	223
Aspek Material Material Aspect	F.5 Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	223
Aspek Energi Energy Aspect	F.6 Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	223
	F.7 Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements of Energy Efficiency and The Use of Renewable Energy	223
Aspek Air Water Aspect	F.8 Penggunaan Air The Use of Water	224
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect	F.9 Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas Nearby or Located in Conservation Areas or Possessing Biodiversity	225
	F.10 Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Effort	225
Aspek Emisi Emission Aspect	F.11 Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Emissions Produced Based on Type	225
	F.12 Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Emission Reduction Efforts and Achievements	225

POJK 51/OJK.03/2017 Pengungkapan		Pengungkapan Disclosure	
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects	F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent Produced Based on Type	225
	F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	225
	F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills Occurred (if any)	225
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment	F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	226
Kinerja Sosial Social Performance			
	F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Products and/or Services to Consumers	235
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect	F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	61
	F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	229
	F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	229
	F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	230
	F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capabilities Training and Development	231
Aspek Masyarakat Community Aspect	F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	232
	F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaint	232
	F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities (ESRA)	232
Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Products and/Services Development Responsibility			
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Innovation and Sustainable Product/Service Development		235
F.27	Produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan Products and services regarding the safety for customers		235
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact		235
F.29	Jumlah produk yang ditarik kembali Total recalled products		236
F.30	Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau Jasa Keuangan Keberlanjutan Customer satisfaction survey on products and/or Sustainability Financial Services		236



POJK 51/OJK.03/2017 Pengungkapan		Pengungkapan Disclosure
G. Lain-lain I Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	237
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	242
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Review on Previous Year's Sustainability Report Feedback	237
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	238

Keterangan/Notes:

N/A: Tidak Ada/Not Available

Lembar Umpan Balik

Feedback Form [OJK G.2]

Kami mengucapkan terima kasih saudara telah membaca Laporan Tahunan 2025 ini. Untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi harapan ke depannya kami berharap bisa mendapatkan masukan. Respons saudara sangat berarti bagi kami, oleh karenanya izinkan kami menanyakan beberapa hal terkait laporan ini.

We would like to thank you for reading this 2025 Annual Report. To improve our report quality and fulfill future expectations, kindly please give input about it. As your opinion really matters, allow us to ask you a few questions regarding this report.

No.	Pertanyaan/Question	Ya/Yes	Tidak/No
1.	Laporan ini memberi informasi yang bermanfaat./This report contains useful information.	()	()
2.	Laporan ini mudah dimengerti./This report is easily understood.	()	()
3.	Laporan ini telah mendorong saudara untuk berkontribusi dalam keberlanjutan. This report inspires you to make contribution within the sustainability aspect.	()	()
	Seberapa penting/menarik kinerja di bawah ini:/How important/interesting the following performance:	(Skala/Scale 1-10)	
4.	Kinerja Ekonomi/Economic Performance		
5.	Kinerja Sosial/Social Performance		
6.	Kinerja Lingkungan /Environment Performance		
7.	Materi apa yang dirasa perlu ditambahkan?/What other kind of information should be included in next report?		
8.	Kontribusi apa yang dirasa perlu ditingkatkan Perseroan?/What kind of contribution does the Company need to improve?		
9.	Saran dan masukan lain:/Any other input or advice:		

Profil Pemangku Kepentingan/Stakeholder Profile

() Pemegang Saham/Investor Shareholder/Investor	() Karyawan Employee	() Konsumen Consumer	() Masyarakat Community	() Pemerintah Government
() Mitra Bisnis Business Partner	() Media Media	() LSM NGOs	() Lain-lain Others	

Jenis Kelamin/Gender : _____

Usia/Age : _____

Pekerjaan/Job : _____

Pendidikan Akhir/Latest Education : _____

Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon agar lembar umpan balik ini dikirimkan kembali ke alamat:
Thank you for your participation. Please return this feedback form:

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Lippo Kuningan, Lantai 23 & 25/23rd & 25th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Kuningan, Jakarta 12940
Indonesia

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors
on the Responsibility for the 2025 Annual Report of
PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2025 Annual Report of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This statement is hereby made in all integrity.

Jakarta, 28 April 2026

DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS



TAKESHI KOBAYASHI
Komisaris Utama
President Commissioner



BENNY REDJO SETYONO
Komisaris
Commissioner



ALIP
Komisaris Independen
Independent Commissioner

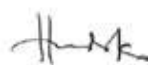
DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS



KAZUHIRO INOUE
Direktur Utama
President Director



HAJIMU YUKIMOTO
Direktur Keuangan
Finance Director

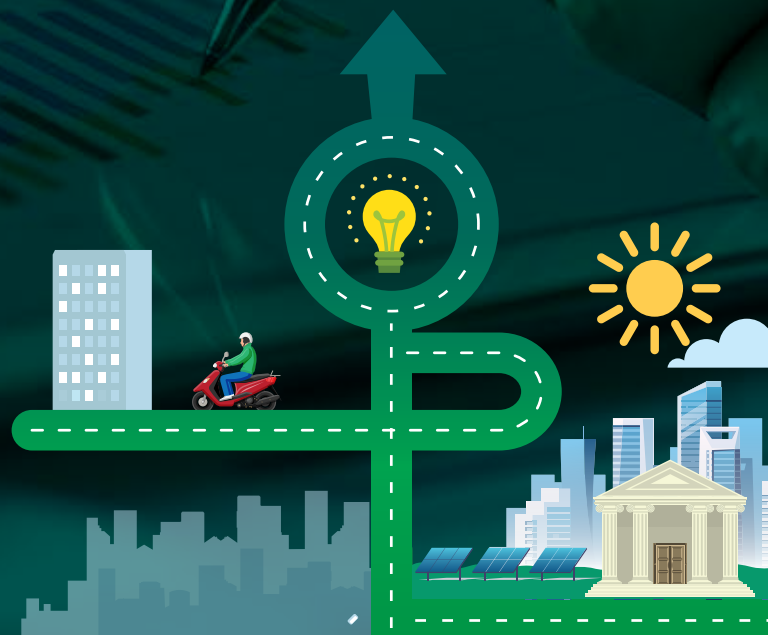


HANDOKO
Direktur
Director



Laporan Keuangan

Financial Statement



PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
*YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025***

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

ISI	HALAMAN/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI		<i>BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITIES</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1	<i>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2	<i>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3	<i>STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY</i>
LAPORAN ARUS KAS	4	<i>STATEMENTS OF CASH FLOWS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 77	<i>NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025/
THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025**

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/ <i>Name</i>	:	Kazuhiro Inoue
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	:	Lippo Kuningan Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia
Alamat domisili/ <i>Residential address</i>	:	Oakwood Suites La Maison Jakarta Unit 19H, Jl. Barito II No. 56
Telepon kantor/ <i>Office telephone</i>	:	(021) 29710100
Jabatan/ <i>Title</i>	:	Direktur Utama/ <i>President Director</i>
2. Nama/ <i>Name</i>	:	Hajimu Yukimoto
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	:	Lippo Kuningan Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia
Alamat domisili/ <i>Residential address</i>	:	The Mayflower Jakarta Marriott Executive Apartment Unit 3110, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Telepon kantor/ <i>Office telephone</i>	:	(021) 29710100
Jabatan/ <i>Title</i>	:	Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i>

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia/("Perusahaan");
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah diungkapkan secara lengkap dan benar dan;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

declare that:

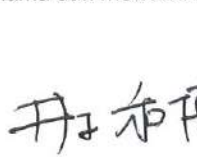
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia/("the Company");*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of the Company has been completely and correctly disclosed and;*
b. *The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Maret / March 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

		
Kazuhiro Inoue		Hajimu Yukimoto
Direktur Utama/ <i>President Director</i>		Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN/STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024	ASSETS
Kas dan bank	4,6,35,36	132.990	403.173	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan – bersih	4,7,36,40			Financing receivables - net
Pihak ketiga		3.525.563	5.604.167	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - bersih	4,8,36,40			Finance lease receivables - net
Pihak ketiga		150.840	487.731	Third parties
Beban dibayar dimuka	9	15.345	20.765	Prepaid expenses
Piutang lain-lain	4,10,35,36,40	36.623	50.486	Other receivables
Aset derivatif	4,11,35,36	52.671	84.550	Derivative assets
Aset pajak tangguhan - bersih	32	76.364	141.522	Deferred tax assets - net
Aset tetap - bersih	12	39.360	52.634	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	13	4.677	4.704	Intangible assets - net
Aset lain-lain	14	5.947	7.585	Other assets
JUMLAH ASET		4.040.380	6.857.317	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak		1.973	2.187	Taxes payable
Utang usaha	4,15,35,36	5.007	17.646	Accounts payable
Liabilitas lain-lain	4,16,36	59.301	51.656	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	4,17,35,36	34.361	36.516	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	4,18,35,36	2.313.462	3.671.491	Borrowings
Liabilitas derivatif	4,11,35,36	28.647	81.212	Derivative liabilities
Utang obligasi	4,20,35,36	586.283	1.240.949	Bonds payable
Surat utang jangka menengah	4,19,36	-	302.253	Medium term notes
Liabilitas imbalan pasca kerja	31	2.711	5.875	Post-employment benefits obligation
Pinjaman subordinasi	4,21,35,36	13.098	13.098	Subordinated loan
JUMLAH LIABILITAS		3.044.843	5.422.883	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.224.475 saham	22	1.224.475	1.224.475	Authorized capital and issued and fully paid-up capital 1,224,475 shares
Tambahan modal disetor	24	243.689	243.689	Additional paid-in capital
Cadangan lindung nilai arus kas	11	(21.898)	(15.900)	Cash flows hedging reserves
Komponen ekuitas lain		1.971	1.971	Other equity components
(Defisit) saldo laba				(Deficit) retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	23	150.057	150.057	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(602.757)	(169.858)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		995.537	1.434.434	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.040.380	6.857.317	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2025	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pembiayaan				Financing
Pihak ketiga	25	727.591	934.413	Third parties
Sewa pembiayaan				Finance lease
Pihak ketiga		24.436	76.702	Third parties
Lain-lain				Others
Pihak berelasi	26,35	9.808	41.150	Related parties
Pihak ketiga	26	261.116	364.266	Third parties
JUMLAH PENDAPATAN		1.022.951	1.416.531	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban keuangan	27,35	(342.910)	(477.120)	Financing charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai	28	(628.727)	(728.915)	Provision for impairment losses
Gaji dan tunjangan	29,35	(221.996)	(303.206)	Salaries and allowances
Umum dan administrasi	30,35	(200.092)	(250.387)	General and administrative
JUMLAH BEBAN		(1.393.725)	(1.759.628)	TOTAL EXPENSES
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(370.774)	(343.097)	LOSS BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	32	(65.811)	58.283	INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
RUGI BERSIH		(436.585)	(284.814)	NET LOSS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will never be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali aktuarial atas kewajiban imbalan pascakerja, setelah pajak penghasilan		3.686	(3.345)	Actuarial remeasurement of post- employment benefits obligation, net of income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas, setelah pajak penghasilan		(5.998)	15.530	Net changes in fair value of cash flows hedge, net of income tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(2.312)	12.185	OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF		(438.897)	(272.629)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
Rugi per saham dasar (nilai penuh)	33	(356.547)	(232.600)	Loss per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS/STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Lindung nilai arus kas/ Cash flows hedges	Saldo laba/Retained earnings		Komponen ekuitas lain/Other equity components	Jumlah ekuitas/ Total equity	
					Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		1.224.475	243.689	(31.430)	150.017	118.341	1.971	1.707.063	Balance as of 31 December 2023
Pembentukan cadangan umum	23	-	-	-	40	(40)	-	-	Appropriation of general reserve
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	(284.814)	-	(284.814)	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan									Other comprehensive income, net of income tax
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas	11	-	-	15.530	-	-	-	15.530	Net changes in fair value of cash flows Hedges
Pengukuran kembali aktuarial atas kewajiban imbalan kerja		-	-	-	-	(3.345)	-	(3.345)	Actuarial remeasurement of post- employment benefits obligation
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		1.224.475	243.689	(15.900)	150.057	(169.858)	1.971	1.434.434	Balance as of 31 December 2024
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	(436.585)	-	(436.585)	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan									Other comprehensive income, net of income tax
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas	11	-	-	(5.998)	-	-	-	(5.998)	Net changes in fair value of cash flows hedges
Pengukuran kembali aktuarial atas kewajiban imbalan kerja		-	-	-	-	3.686	-	3.686	Actuarial remeasurement of post- employment benefits obligation
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		1.224.475	243.689	(21.898)	150.057	(602.757)	1.971	995.537	Balance as of 31 December 2025

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS/STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Transaksi pembiayaan		3.246.034	4.646.403	Financing transactions
Transaksi sewa pembiayaan		557.476	413.125	Finance lease transactions
Pendapatan administrasi	26	129.622	221.182	Administration income
Denda dari pelanggan		35.956	38.628	Penalties from customers
Pendapatan bunga	26	14.240	8.899	Interest income
Lain - lain		103.046	139.297	Other
Jumlah penerimaan kas		4.086.374	5.467.534	Total cash received
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Transaksi pembiayaan		(1.272.559)	(3.200.079)	Financing transactions
Transaksi sewa pembiayaan		-	(187.515)	Finance lease transactions
Beban usaha		(167.611)	(222.664)	Operating expenses
Gaji dan tunjangan		(220.528)	(299.230)	Salaries and allowances
Beban keuangan		(343.658)	(448.727)	Financing charges
Jumlah pengeluaran kas		(2.004.356)	(4.358.215)	Total cash disbursements
Pembayaran pajak penghasilan		-	(3.624)	Payment of income taxes
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		2.082.018	1.105.695	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	12	1.128	845	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap		(6.208)	(9.085)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	13	(2.791)	(2.189)	Acquisition of intangible assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(7.871)	(10.429)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		725.000	1.170.000	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima		(2.113.748)	(2.478.636)	Payments of borrowings
Penerimaan dari utang obligasi		-	500.000	Proceeds from bonds payable
Pembayaran dari utang obligasi		(650.000)	(188.000)	Payments of bonds payable
Pembayaran dari surat hutang jangka menengah		(300.000)	-	Payments of medium term notes
Pembayaran liabilitas sewa	38	(5.582)	(4.492)	Payment of lease liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(2.344.330)	(1.001.128)	Net cash used-in financing activities
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	6	(270.183)	94.138	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK, AWAL TAHUN		403.173	309.035	CASH ON HAND AND IN BANKS, BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN	6	132.990	403.173	CASH ON HAND AND IN BANKS, END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

1. INFORMASI UMUM**a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan**

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (dahulu PT Mitra Pinasthika Mustika Finance) ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Elbatama Securindo pada tanggal 3 Mei 1990 berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 26. Akta Notaris ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melalui Surat Keputusan No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juli 1990 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 85 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1583 tanggal 26 Juli 1990.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 68/KMK.017/1994 tanggal 5 Maret 1994. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan yang mencakup kegiatan usaha:

- pembiayaan investasi;
- pembiayaan modal kerja;
- pembiayaan multiguna; dan
- kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Perusahaan berlokasi di Lippo Kuningan, Lantai 25, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki 70 kantor cabang dan 1 kantor pemasaran (tidak diaudit) yang tersebar di wilayah Indonesia. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1994.

Surat keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing dari Perusahaan dan PT Sasana Artha Finance tanggal 23 April 2014 (disahkan dalam akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 37 dan No. 38 tanggal 24 April 2014) menyetujui penggabungan usaha antara Perusahaan dan PT Sasana Artha Finance, yang efektif terhitung pada tanggal 14 Mei 2014, dimana Perusahaan merupakan *surviving entity*.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar Perusahaan dilakukan dengan Akta No. 37 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-010393.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2019.

Perusahaan adalah bagian dari kelompok usaha JACCS Co., Ltd., Jepang ("JACCS") yang merupakan perusahaan global yang menawarkan berbagai ragam jasa keuangan. Pemegang saham mayoritas dari JACCS adalah MUFG Bank, Ltd., yang berkedudukan di Jepang.

1. GENERAL INFORMATION**a. Establishment and general information of the Company**

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (formerly PT Mitra Pinasthika Mustika Finance) ("the Company"), was established under the name of PT Elbatama Securindo on 3 May 1990 based on Notarial Deed No. 26 of Rachmat Santoso, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia (now Indonesian Ministry of Law and Human Rights) in its Decision Letter No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 dated 16 July 1990 and was published in Supplement No. 85 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1583 dated 26 July 1990.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Ministry of Finance based on Decision Letter No. 68/KMK.017/1994 dated 5 March 1994. In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company engages as a financial institution in the following lines of business:

- investment financing;
- working capital financing;
- multipurpose financing; and
- other financing business activities based on the approval of the Financial Services Authority ("OJK").

The Company's registered office is located at Lippo Kuningan, 25th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia. As of 31 December 2025, the Company had 70 branches and 1 marketing points (unaudited) throughout Indonesia. The Company started its commercial operations in 1994.

The circular resolutions in lieu of an extraordinary general meeting of shareholders of each of the Company and PT Sasana Artha Finance dated 23 April 2014 (notarized by deed of notary public Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 37 and No. 38 dated 24 April 2014) resolved among other to approve the merger between the Company and PT Sasana Artha Finance, which was effective on 14 May 2014, whereby the Company became the surviving entity.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association was effected by notarial deed No. 37 dated 6 December 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary public in Jakarta. This amendment has been informed and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Receipt Letter No. AHU-010393.AH.01.02 dated 10 December 2019.

The Company is part of JACCS Co., Ltd., Japan ("JACCS") which is a diversified global company whose business provides a broad range of financial services. The majority shareholders of JACCS is MUFG Bank, Ltd., a Company based in Japan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)**a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan (Lanjutan)**

Entitas induk terakhir adalah Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
Komisaris Utama	: Takeshi Kobayashi
Komisaris	: Chihiro Ushigome*)
Komisaris	: Benny Redjo Setyono
Komisaris Independen	: Josaphat Budisatyawira**)
Komisaris Independen	: Alip

*)Berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 127 tanggal 20 Februari 2026, Chihiro Ushigome telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 28 Februari 2026.

**)Berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 127 tanggal 20 Februari 2026, masa jabatan Josaphat Budisatyawira berakhir pada tanggal 09 Februari 2026.

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
Direktur Utama	: Kazuhiro Inoue
Direktur	: Kazunori Inoue***)
Direktur	: Hajimu Yukimoto
Direktur	: Supriyanto**)
Direktur	: Yimmy Weddianto*)
Direktur	: Handoko

*)Berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 50 tanggal 6 November 2025, Yimmy Weddianto telah diangkat menjadi Direktur. Selanjutnya, berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 127 tanggal 20 Februari 2026 Yimmy Weddianto telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 28 Februari 2026.

**)Berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 147 tanggal 29 Januari 2026 Supriyanto telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Perusahaan efektif tanggal 31 Maret 2026.

***)Berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai dengan akta nomor 127 tanggal 20 Februari 2026 Kazunori Inoue telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 28 Februari 2026.

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 27 Maret 2026.

c. Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (Continued)**a. Establishment and general information of the Company (Continued)**

The ultimate parent is Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

b. Board of Commissioners and Board of Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2024
Takeshi Kobayashi	: President Commissioner
Chihiro Ushigome	: Commissioner
Benny Redjo Setyono	: Commissioner
Josaphat Budisatyawira	: Independent Commissioner
Alip	: Independent Commissioner

*)Based on shareholder decree in accordance with deed number 127 dated 20 February 2026, Chihiro Ushigome resigned from his position as Company's Commissioner, effective 28 February 2026.

**)Based on shareholder decree in accordance with deed number 127 dated 20 February 2026, the term of office of Josaphat Budisatyawira ended on 09 February 2026.

The composition of the Company's Board of Directors as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2024
Kazuhiro Inoue	: President Director
Kazunori Inoue	: Director
Hajimu Yukimoto	: Director
Supriyanto	: Director
Gestik DP	: Director
Handoko	: Director

*)Based on shareholder decree in accordance with deed number 50 dated 6 November 2025, Yimmy Weddianto has been appointed as Director. Subsequently, based on shareholder decree in accordance with deed number 127 dated 20 February 2026, Yimmy Weddianto resigned from his position as Company's Director, effective 28 February 2026.

**)Based on shareholder decree in accordance with deed number 147 dated 29 January 2026, Supriyanto has resigned from his position as Company's Director, effective 31 March 2026.

***)Based on shareholder decree in accordance with deed number 127 dated 20 February 2026, Kazunori Inoue resigned from his position as Company's Director, effective 28 February 2026.

The financial statements of the Company were prepared by the Board of Directors and authorized for issue on 27 March 2026.

c. Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee

As of 31 December 2025 and 2024, the composition of the Company's Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee was as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

- c. Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

	2025
<u>Komite Manajemen Risiko</u>	
Ketua :	Handoko
Anggota :	Direksi/Board of Directors Lingling Liesuanto Melinda Lilananda Nopan Adiputra
<u>Komite Pemantau Risiko</u>	
Ketua :	Alip
Anggota :	Chihiro Ushigome
Anggota :	Hendry
<u>Komite Audit</u>	
Ketua :	Alip
Anggota :	Rachmad Nursanto Hendry
<u>Komite Nominasi dan Remunerasi</u>	
Ketua :	Josaphat Budisatyawira
Anggota :	Takeshi Kobayashi Lidwina

- d. Laporan keuangan ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.

2. DASAR PENYUSUNAN**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK Indonesia") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya telah dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual (kecuali laporan arus kas) dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali bila standar akuntansi mengharuskan pengukuran dengan nilai wajar.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

- c. Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee (Continued)

	2024
<u>Risk Management Committee</u>	
Handoko :	Chairman
Direksi/Board of Directors :	Members
Lingling Liesuanto	
Melinda Lilananda	
Nugroho Budi Santoso	
<u>Risk Monitoring Committee</u>	
Alip :	Chairman
Chihiro Ushigome :	Members
Hendry :	Members
<u>Audit Committee</u>	
Josaphat Budisatyawira :	Chairman
Yusuke Yoshimoto :	Members
Hendry	
<u>Nomination and Remuneration Committee</u>	
Josaphat Budisatyawira :	Chairman
Takeshi Kobayashi :	Members
Benny Redjo Setyono	

- d. These financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

2. BASIS OF PREPARATION**a. Statement of compliance**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK Indonesia") and Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to OJK starting 1 January 2013) Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies, enclosed in the decision Letter No.KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

b. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis (except for the statement of cash flows) using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)**c. Laporan arus kas**

Laporan arus kas menyajikan perubahan dalam kas dan bank dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan disusun dengan metode langsung.

d. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang mana merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Semua informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan ke dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

e. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan.

Walaupun estimasi tersebut dibuat berdasarkan pemahaman terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan terkini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkesinambungan. Perubahan terhadap estimasi akuntansi diakui di periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode selanjutnya yang terkena dampaknya.

Informasi mengenai asumsi dan estimasi ketidakpastian yang dapat mengakibatkan penyesuaian yang material dalam satu tahun kedepan dijelaskan di Catatan 5.

f. Amendemen standar akuntansi

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025:

- Amandemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran",

Penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)**c. Statement of cash flows**

The statement of cash flows presents the changes in cash on hand and in banks from operating, investing and financing activities, and is prepared using the direct method.

d. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest millions of Rupiah.

e. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses.

Although those estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in material adjustment within the next financial year are described in Note 5.

f. Amendments in accounting standards

The following accounting standards became effective on 1 January 2025:

- PSAK 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates : Lack of Exchangeability",

The implementation of the above-mentioned accounting standards did not have materials impacts to the Company's financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan - kebijakan akuntansi material di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Perusahaan terutama terdiri dari kas dan bank, piutang pembiayaan, piutang sewa pembiayaan, aset derivatif dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Perusahaan terutama terdiri dari pinjaman yang diterima, surat utang jangka menengah, utang obligasi, liabilitas derivatif, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain dan pinjaman subordinasi.

a.1. Klasifikasi**Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan Perusahaan, kecuali aset derivatif, diklasifikasikan ke dalam kategori biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi merupakan aset keuangan yang pada tanggal tertentu sesuai persyaratan kontraktualnya menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang dan aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*).

Aset derivatif diklasifikasikan ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi. Seluruh instrumen derivatif Perusahaan merupakan instrumen untuk lindung nilai.

Liabilitas Keuangan

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan, kecuali liabilitas derivatif, diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas derivatif diklasifikasikan ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi. Seluruh instrumen derivatif Perusahaan merupakan instrumen untuk lindung nilai.

a.2. Pengakuan

Perusahaan pada awalnya mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal dimana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan Perusahaan diukur pada nilai wajar (untuk item yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi setelah pengakuan awal) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies have been applied consistently to all periods presented in the financial statements.

a. Financial assets and financial liabilities

The Company's financial assets mainly consist of cash on hand and in banks, financing receivables, finance lease receivables, derivative assets and other receivables.

The Company's financial liabilities mainly consist of borrowings, medium term notes, bonds payable, derivative liabilities, accounts payable, accrued expenses, other liabilities and subordinated loan.

a.1. Classification**Financial Assets**

All of the Company's financial assets, except for derivative assets, are classified into amortized cost category. The financial assets in amortized cost category represent the financial assets which its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding and they are managed in a business model whose objective is to hold the assets to collect contractual cash flows (hold to collect).

Derivative assets are classified into fair value through profit or loss category. All of the Company's derivative instruments are for hedging instruments.

Financial Liabilities

All of the Company's financial liabilities, except for derivative liabilities, are classified as amortized cost.

Derivative liabilities are classified into fair value through profit or loss category. All of the Company's derivative instruments are for hedging instruments.

a.2. Recognition

The Company initially recognizes financial assets and liabilities on the date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

At initial recognition, the Company's financial assets or financial liabilities are measured at fair value (including the assets that are subsequently measured at amortized cost) plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

a.2. Pengakuan (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 3a.5).

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan jika sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban keuangan jika sehubungan dengan liabilitas keuangan.

a.3. Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Perusahaan juga menghentikan pengakuan aset keuangan yang dianggap tidak dapat dipulihkan. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

a.4. Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

a. Financial assets and liabilities (Continued)

a.2. Recognition (Continued)

Subsequent to initial recognition, financial assets and financial liabilities that are carried at amortized cost are remeasured using the effective interest method (see Note 3a.5).

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of revenue if related to financial assets, and as part of finance charges if related to financial liabilities.

a.3. Derecognition

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire.

The Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

The Company also derecognizes financial assets that are deemed to be unrecoverable. Subsequent recovery of written-off financial assets is recorded as other income.

a.4. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

a. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

a.4. Saling hapus (Lanjutan)

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

a.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah merupakan suatu nilai dimana aset atau liabilitas keuangan diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 'Nilai tercatat bruto aset keuangan' merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

a.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (KKE 12 bulan) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (KKE *lifetime*). KKE *lifetime* adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan KKE 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kredit) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian dan arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual.

Model KKE akan diterapkan pada semua aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

a. Financial assets and liabilities (Continued)

a.4. Offsetting (Continued)

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

a.5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any allowance for impairment losses. The 'gross carrying amount of financial asset' is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.

a.6. Identification and measurement of impairment

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month ECL or lifetime ECL. Lifetime ECL is the ECL that results from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECL is the portion of ECL that results from default events that are possible within the 12-month after reporting date.

Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (i.e the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due.

The ECL model will be applied to all financial assets measured at amortized cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

a.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai
(Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sebesar kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian yang akan diakui sebesar KKE 12 bulan:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah; dan
- Instrumen keuangan dengan risiko kredit yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal

Perusahaan mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), *Loss Given Default* (LGD) dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian (KKE), komponen-komponen tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif.

Dalam model KKE, tiga tahap pendekatan berikut ini diterapkan dalam menghitung KKE berdasarkan migrasi kredit di antara tahap tersebut sejak pengakuan awal:

- Tahap 1: pada pengakuan awal aset keuangan, dan dimana tidak ada peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal, maka penyisihan kerugian sebesar KKE 12 bulan diakui.
- Tahap 2: Jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, maka penyisihan kerugian sebesar KKE *lifetime* diakui. Jika, risiko kredit membaik pada periode berikutnya sehingga peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal tidak lagi dianggap signifikan, eksposur kembali ke tahap 1 dan KKE 12 bulan diakui.
- Tahap 3: Jika aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit, aset keuangan tersebut dipindahkan ke Tahap 3 dan KKE *lifetime* diakui.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

a. Financial assets and liabilities (Continued)

a.6. Identification and measurement of impairment (Continued)

At each reporting date, the Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, except in the following condition, for which the amount recognized will be 12-month ECL:

- *Financial instruments with low credit risks; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*

The Company measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD) and macroeconomic variables for forward looking perspective. To determine the expected credit loss (ECL), these components are multiplied together and discounted to the reporting date using the effective interest rate.

Under the ECL model, the following three-stage approach is applied to measuring ECL based on credit migration between the stages since origination:

- *Stage 1: At the origination of a financial asset, and where there has not been a significant increase in credit risk since origination, a loss allowance equivalent to 12-month ECL is recognized.*
- *Stage 2: Where there has been a significant increase in credit risk since origination, a loss allowance equivalent to lifetime ECL is recognized. If the credit risk improves in a subsequent period such that the increase in credit risk since origination is no longer considered significant, the exposure returns to a Stage 1 classification and a 12-month ECL is recognized.*
- *Stage 3: If the financial asset is credit impaired, the financial asset is moved to Stage 3 and a lifetime ECL is recognized.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

a.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai
(Lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diestimasi pada tingkat fasilitas dengan menggunakan suatu probabilitas gagal bayar yang mencerminkan probabilitas kisaran tertimbang dari skenario ekonomi masa depan dan menerapkannya terhadap estimasi eksposur Perusahaan pada saat gagal bayar (*exposure at default*) setelah memperhitungkan nilai agunan yang dimiliki atau mitigasi kerugian lainnya (*loss given default*), dan memperhitungkan dampak diskonto atas nilai waktu uang (*time value of money*).

a.7. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

a. Financial assets and liabilities (Continued)

a.6. Identification and measurement of impairment (Continued)

Expected credit losses are estimated at the facility level by using a probability of default reflecting a probability-weighted range of possible future economic scenarios, and applying this to the estimated exposure of the Company at the point of default (exposure at default) after taking into account the value of any collateral held or other mitigations of loss (loss given default), while allowing for the impact of discounting for the time value of money.

a.7. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

a. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

a.7. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

b. Piutang Pembiayaan

Setelah pengakuan awal, piutang pembiayaan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 3a.2 dan 3a.5).

Pendapatan pembiayaan yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam kontrak pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Lihat Catatan 3g untuk kebijakan pengakuan pendapatan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

a. Financial assets and liabilities (Continued)

a.7. Fair value measurement (continued)

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Company on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

b. Financing Receivables

Subsequent to initial recognition, financing receivables are stated at amortized cost using the effective interest method (see Note 3a.2 and 3a.5).

Unearned financing income represents the difference between total installments to be received from the consumers and the principal amount financed, which is recognized as income over the term of the contract based on effective interest rate of the related financing receivables.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financing contract.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of the existing contract and the resulting gains or losses are recognized in the current year profit or loss.

See Note 3g for revenue recognition policy.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

c. Sewa

Perusahaan sebagai Pesewa

Pada awal, kontrak sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sebaliknya, kontrak akan diperhitungkan sebagai sewa operasi.

Pendapatan dari perjanjian sewa pembiayaan dan sewa kendaraan ditentukan oleh klasifikasi perjanjian sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Pendapatan dari penyewaan kendaraan kepada pelanggan di bawah perjanjian sewa operasi, secara umum untuk jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 4 tahun, diakui dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya transaksi awal ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Pendapatan yang diperoleh dari sewa pembiayaan diakui menggunakan metode suku bunga efektif, yang memberikan tingkat pengembalian periodik yang konstan pada investasi sewa yang belum dilunasi.

Tagihan sewa pembiayaan diakui sebesar nilai yang didiskontokan pada tingkat suku bunga efektif dalam sewa pembiayaan tersebut. Pengukuran awal dari tagihan sewa pembiayaan termasuk biaya awal yang dapat diatribusikan secara langsung untuk negosiasi dan pengaturan sewa. Nilai investasi sewa bruto dalam sewa pembiayaan merupakan penjumlahan agregat dari pembayaran sewa minimum dan nilai residu yang menjadi hak pesewa. Pembayaran sewa minimum termasuk pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh penyewa atau jumlah yang diharuskan oleh pesewa untuk dibayar selama masa sewa, ditambah dengan nilai residu yang dijamin oleh penyewa, pihak terkait dengan penyewa, atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara keuangan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut.

Harga opsi beli atas aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh penyewa termasuk di dalam pembayaran sewa minimum jika hampir dapat dipastikan pada awal sewa bahwa opsi beli tersebut akan dilaksanakan.

Perbedaan antara nilai investasi sewa pembiayaan bruto dan nilai investasi sewa pembiayaan bersih dicatat sebagai pendapatan pembiayaan tangguhan yang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan selama periode sewa pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian yang konstan atas investasi bersih dalam sewa pembiayaan tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Leases

The Company acting as Lessor

At inception, a lease contract is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to the ownership of the leased assets. Otherwise, it is considered an operating lease.

Revenue from finance leases and vehicle rental agreements is driven by the classification of the arrangement as either an operating or finance lease. Revenue earned from renting vehicles to customers under short term operating lease contracts, generally for periods of 1 to 4 years, is recognized on a straight-line basis over the term of the contract. Initial direct transaction costs are deferred and amortized over the term of the lease.

Revenue generated from finance leases is recognized using the effective interest method, which provides a constant periodic rate of return on the outstanding investment on the lease.

Finance lease receivables are recorded at the present value of the gross investment in the lease at the effective interest rate in the lease. The initial measurement of finance lease receivables includes the initial costs that are directly attributable to negotiating and arranging a lease. Gross investment in the lease represents the aggregate sum of the minimum lease payments and any unguaranteed residual value as to which the lessor has rights. Minimum lease payments include those payments that the lessee is, or can be, required to make to the lessor over the lease term plus the residual value guarantees by the lessee, a party related to the lessee, or any third party unrelated to the lessor provided who is financially capable of fulfilling the obligations under the guarantee.

The exercise price of a purchase option over the leased asset held by the lessee is included in the minimum lease payments if it is reasonably certain at inception of the lease that the purchase option will be exercised.

The difference between the gross investment and the net investment in a finance lease is recorded as unearned revenue which is recognized as finance lease income over the lease period at a constant periodic rate of return on the net investment in finance leases.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

c. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Pesewa (Lanjutan)

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Suatu kontrak memberikan hak mengendalikan penggunaan suatu identifikasi jika semua kondisi di terpenuhi:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasi yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

Pada tanggal permulaan sewa atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri dan mengakui jumlah yang dialokasikan sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang sama dengan jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan beserta estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset saat akhir masa sewa pendasar dan untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Leases (Continued)

The Company acting as Lessor (Continued)

Early termination is treated as cancellations of the existing lease contract, and the resulting gains or losses are recognized in current year's profit or loss.

The Company acting as Lessee

At the inception of a contract, the Company determines if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration.

A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;
- the Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and
- the Company has the right to direct the use of the asset: i.e. it has decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.

On the lease commencement date, or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative standalone prices, and recognizes the allocated amounts as a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which equals to the initial amount of the lease liability after adjustments for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred, as well as an estimate of end-of-term costs of dismantling and removing the underlying lease improvements and restoring the site, less any lease incentives received.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

c. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya, dan didepresiasi menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sampai dengan mana yang lebih awal antara masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Jumlah tercatat aset hak-guna di evaluasi jika ada indikasi aset mungkin mengalami penurunan nilai; Jika ada, jumlah tercatat dikurangi dengan estimasi kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat aset hak-guna disesuaikan, dalam situasi tertentu, ketika terjadi pengukuran kembali atas liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Perusahaan cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Perusahaan yakin tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Aset hak-guna Perusahaan disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap", dan liabilitas sewa sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain".

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Leases (Continued)

The Company acting as Lessee (Continued)

After commencement date, right-of-use assets are measured using the cost model, and is depreciated using straight line method from commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of lease term. The carrying amount of the right-of-use assets are evaluated if there is an indication that the asset may have been impaired; if so, the carrying amount reduced by the estimated impairment losses. The right-of-use assets carrying amount is also adjusted, in certain situations, when there is a remeasurement of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

The Company's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented as part of "Other liabilities".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

c. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Perusahaan menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 – 5 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir.

Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi Perusahaan sebelum periode kontrak yang tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, Perusahaan berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Pada permulaan sewa, perpanjangan periode ditambahkan ke masa sewa, jika cukup pasti untuk opsi perpanjangan dieksekusi. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian perusahaan.

Seperti yang diperbolehkan dalam PSAK 116, Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-panjang yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

Nilai tercatat aset hak guna segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

d. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko

Seluruh instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan digunakan untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen derivatif ini digunakan untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang diatribusikan pada risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang Perusahaan dan dapat mempengaruhi laba rugi. Instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajar. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Leases (Continued)

The Company acting as Lessee (Continued)

The Company leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 – 5 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term.

Some leases of office buildings contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide operational flexibility. At the commencement of the lease, the extension period is added to the term of the lease, if it is reasonably certain that the extension options will be exercised. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options in the event that there is a significant change in circumstances within its control.

As allowed under PSAK 116, the Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The right-of-use assets carrying amount are written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

d. Derivative instruments held for risk management

All derivative instruments held by the Company are for risk management purposes. These derivative instruments are used to hedge the Company's exposures to variability in cash flows that is attributable to interest rate risk and currency risk associated with recognized liabilities that could affect profit or loss. Derivative instruments are recognized in the financial statements at fair value. To qualify for hedge accounting, certain criteria are to be met, including formal documentation to be in place at the inception of the hedge.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

d. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko (Lanjutan)

PSAK 109 memperkenalkan ketentuan akuntansi lindung nilai baru yang lebih menyelaraskan akuntansi dengan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan ketika melakukan lindung nilai atas risiko keuangan dan non-keuangan.

Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai. Perusahaan menilai, pada awal hubungan lindung nilai dan juga secara berkesinambungan, apakah instrumen lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindungi nilai sepanjang periode dimana lindung nilai tersebut ditetapkan.

Jika derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai arus kas, bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain ("OCI") dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang diakui di OCI terbatas pada perubahan kumulatif nilai wajar item yang dilindungi nilainya, yang ditentukan berdasarkan nilai sekarang, sejak dimulainya lindung nilai. Setiap bagian yang tidak efektif dari perubahan nilai wajar derivatif langsung diakui dalam laporan laba rugi.

Jika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai atau instrumen lindung nilai dijual, kedaluwarsa, dihentikan atau dilaksanakan, maka akuntansi lindung nilai dihentikan secara prospektif. Jika arus kas masa depan yang dilindungi nilainya tidak diharapkan terjadi lagi, maka jumlah yang telah diakumulasi dalam cadangan lindung nilai dan biaya cadangan lindung nilai segera direklasifikasi ke laba rugi.

e. Aset tetap

Tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") diukur sebesar biaya perolehan (termasuk biaya legal dan administrasi yang timbul dalam transaksi untuk memperoleh tanah) dan tidak diamortisasi.

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Derivative instruments held for risk management (Continued)

PSAK 109 introduced new hedge accounting requirements which more align the accounting with risk management activities undertaken to hedge financial and non-financial risk.

On initial designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, as well as the method to be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. The Company makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, as to whether the hedging instruments are expected to be 'highly effective' in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged items during the period for which the hedge is designated.

When a derivative is designated as a cash flow hedging instruments, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized in other comprehensive income ("OCI") and accumulated in the hedging reserve. The effective portion of changes in the fair value of the derivative that is recognized in OCI is limited to the cumulative change in fair value of the hedged item, determined on a present value basis, from inception of the hedge. Any ineffective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized immediately in profit or loss.

If the hedge no longer meets the criteria for hedged accounting or the hedging instruments is sold, expires, is terminated or is exercised, then hedge accounting is discontinued prospectively. If the hedged future cash flows are no longer expected to occur, then the amounts that have been accumulated in the hedging reserve and the cost of hedging reserve are immediately reclassified to profit or loss.

e. Fixed assets

Land acquired under Hak Guna Bangunan ("HGB") title is measured at acquisition cost (including the legal and administrative costs incurred in the transactions to acquire the land) and is not amortized.

Fixed assets are initially recognized at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured using the cost model, carried at its cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

e. Aset tetap (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	20
Renovasi gedung	3 - 5
Perabotan kantor	3 - 4
Peralatan kantor	3 - 8
Kendaraan	4 - 8

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi selama tahun dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

f. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli oleh Perusahaan.

Perangkat lunak pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah empat tahun.

g. Pengakuan pendapatan dan beban

g.1. Pendapatan pembiayaan, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan metode suku bunga efektif.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Fixed assets (Continued)

Depreciation on fixed assets are calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	%	
	5	Buildings
	20 - 33,3	Leasehold improvements
	25 - 33,3	Office furniture
	12,5 - 33,3	Office equipment
	12,5 - 25	Vehicles

Repairs and maintenance are charged to profit or loss during the year in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalized and depreciated.

When fixed assets are retired or disposed, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statement of financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the current year profit or loss.

f. Intangible assets

Intangible assets consist of software acquired by the Company.

Software is initially recognized at acquisition cost. After initial recognition, intangible assets are measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software assets is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Amortisation is recognized in the statement of profit or loss on a straight-line method over the estimated useful life of the software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is four years.

g. Revenue and expense recognition

g.1. Financing income, finance lease income, interest income and interest expenses

Interest income for financial assets held at amortized cost, and interest expense on financial liabilities held at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest method.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

g.1. Pendapatan pembiayaan, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga (Lanjutan)

Beban provisi yang dibayar dimuka sehubungan dengan pinjaman yang diterima diakui sebagai biaya transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman yang diterima tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi atas aset atau liabilitas keuangan dan alokasi atas pendapatan atau beban bunga pada periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah tingkat bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur yang diekspektasi atas instrumen keuangan, atau periode yang lebih pendek, atas nilai tercatat bruto dari aset keuangan atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan.

Saat menghitung suku bunga efektif instrumen keuangan selain aset yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Perusahaan melakukan estimasi arus kas masa depan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian kontraktual atas instrumen keuangan (antara lain opsi pelunasan dipercepat) tapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan suku bunga efektif termasuk biaya transaksi dan imbalan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Suku bunga efektif aset atau liabilitas keuangan dihitung pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas keuangan tersebut. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau atas biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (aset dalam tahap 3), pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi mengalami penurunan nilai, maka perhitungan pendapatan bunga kembali menggunakan nilai tercatat bruto.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Revenue and expense recognition (Continued)

g.1. Financing income, finance lease income, interest income and interest expenses (Continued)

Upfront fees related to borrowings are recognized as transaction costs associated with the origination of borrowings and are amortized over the terms of the related borrowings using the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortized cost of the financial liability.

When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or originated credit-impaired assets, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options) but does not consider future credit losses. The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

The effective interest rate of a financial assets or financial liability is calculated on initial recognition of a financial asset or financial liability. In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. For financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition (asset in stage 3), interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the gross carrying amount.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

g.1. Pendapatan pembiayaan, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga (Lanjutan)

Saat estimasi arus kas telah direvisi, nilai tercatat atas aset atau liabilitas keuangan disesuaikan untuk merefleksikan arus kas yang aktual dan direvisi, didiskontokan pada suku bunga efektif original. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban bunga pada periode dilakukannya revisi.

g.2. Pendapatan lain-lain

Pendapatan jasa administrasi diakui segera dalam laba rugi sebagai pendapatan sepanjang terkait dengan pengembalian biaya yang terjadi saat perolehan piutang pembiayaan. Marjin yang diperoleh dari pendapatan jasa administrasi ditangguhkan sebagai biaya transaksi dalam piutang pembiayaan. Pendapatan komisi asuransi diakui pada saat perolehan piutang pembiayaan telah terjadi.

Pendapatan denda keterlambatan diakui pada saat terjadinya.

h. Imbalan kerja

h.1. Imbalan pascakerja

Kewajiban imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini estimasi jumlah kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris berkualifikasi dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hal tersebut terjadi. Apabila rencana imbalan pascakerja berubah, bagian atas imbalan sehubungan dengan biaya jasa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi.

h.2. Insentif jangka panjang

Kewajiban Perusahaan terkait insentif jangka panjang merupakan imbalan yang akan diterima di masa mendatang sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dan memenuhi kondisi kinerja selama tiga tahun yang terdiri dari periode sekarang dan periode-periode sebelumnya. Akrua atas insentif jangka panjang diakui sebagai beban selama periode program.

i. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Revenue and expense recognition (Continued)

g.1. Financing income, finance lease income, interest income and interest expenses (Continued)

Where the estimates of cash flows have been revised, the carrying amount of the financial asset or liability is adjusted to reflect the actual and revised cash flows, discounted at the instruments original effective interest rate. The adjustment is recognized as interest income or expense in the period in which the revision is made.

g.2. Other income

Administration fees are recognized directly in profit or loss as revenue to the extent it relates with reimbursement cost incurred at the origination of the financing receivables. The margin derived from administration fees is deferred as transaction cost in financing receivables. Insurance commission income is recognized upon origination of the financing receivables.

Late charges income is recorded as incurred.

h. Employment benefits

h.1. Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefit is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned for their services in the current and prior period. The calculations are performed by a qualified actuary using the projected-unit-credit method.

Actuarial gains or losses are recognized as other comprehensive income in the period in which they arise. When the plan benefits changes, the portion of the benefits that relates to past service by employees is charged or credited immediately to profit or loss.

h.2. Long-term incentive

The Company's obligation in respect of long-term incentive is the amount of the future benefits that employees have earned in return for their services performances in three years which consists of current and prior periods. The accrual on long-term incentives is recognized as an expense over the program period.

i. Income tax

Income tax expense consists of current and deferred income tax. Income tax expense are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain//In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

i. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Beban pajak kini merupakan jumlah atas pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun-tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih atas manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat direalisasi. Pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui apabila sepanjang kemungkinan laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Perusahaan memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti.

Penyesuaian yang mungkin terjadi dari pemeriksaan otoritas pajak atas pengembalian tahun sebelumnya dicatat dalam laba rugi di tahun saat penilaian pajak diterbitkan. Jika manajemen mengajukan keberatan atas penilaian pajak dan memberikan penjelasan untuk mempertahankan posisi Perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pajak yang bersangkutan, penyesuaian yang dihasilkan dibuat pada akhir proses banding.

j. Laba bersih per saham

Sesuai dengan PSAK No. 233, laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Income tax (Continued)

Current tax expenses is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantially enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of their realization through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Adjustments that may arise from the tax authority's examination of previous year's tax return filings are accounted for in profit or loss in the year in which the tax assessment is issued. In the event that management object to the assessment and sets forth a plausible defense to sustain the Company's position as declared in the contested tax return, the resulting adjustments are made at the conclusion of the appeal process.

j. Earnings per share

In accordance with PSAK No. 233, basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to equity holders by the weighted average number of outstanding issued and fully paid-up common shares during the year.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

k. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Perusahaan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Perusahaan meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, serta aset tetap.

l. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang fungsional Perusahaan (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo akhir tahun aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ulang ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Laba atau rugi kurs mata uang asing dari aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal periode, yang disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dengan biaya perolehan diamortisasi dalam mata uang asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing yang berasal dari aktivitas operasi pada umumnya diakui pada laba rugi, kecuali untuk laba dan rugi selisih kurs yang timbul dari penjabaran kembali instrumen derivatif yang memenuhi kriteria lindung nilai arus kas, yang diakui langsung di penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs JISDOR Bank Indonesia (nilai penuh) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2025	2024
1 Dolar Amerika Serikat	16.720	16.157
100 Yen Jepang	10.679	10.343

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a.1 memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - a.2 memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - a.3 merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Operating segment

An operating segment is a component of the Company that engages in business activities, in which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with other components, whose operating results are reviewed regularly by the Company's Board of Directors to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Company's Board of Directors include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, and fixed assets.

l. Foreign currency translation

Transactions in foreign currencies are translated to the Company's functional currency (Rupiah) at the rates prevailing at transaction date. Year end balances of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are retranslated to Rupiah exchange rates as of reporting date.

The foreign exchange gains or losses on monetary items is the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the period, adjusted for effective interest rate and payments during the period, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah at the exchange rate at reporting date.

Foreign currency gains and losses on retranslation of financial assets and liabilities that arise from operating activities are generally recognized in profit or loss, except for the foreign exchange gains and losses arising from the retranslation of a qualifying cash flows hedge, which are recognized directly in other comprehensive income.

As at 31 December 2025 and 2024, the JISDOR rates used were the prevailing Bank Indonesia middle rates (full amount) as follows:

m. Transactions with related parties

Related parties are the persons or entities related to the entity that prepares the financial statements (reporting entity). The related parties are as follows:

- a. The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
 - a.1 has control or joint control over the reporting entity
 - a.2 has a significant influence on the reporting entity; or
 - a.3 is a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(Lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- b.1 Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - b.2 Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - b.3 Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - b.4 Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - b.5 Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, yang dilakukan berdasarkan persyaratan komersial pada umumnya, yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan pada transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
MANAJEMEN MODAL**

Pendahuluan dan gambaran umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Transactions with related parties (Continued)

- b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
- b.1 The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employee of one of the reporting entities or entities associated with the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
 - b.2 Entities controlled or jointly controlled by persons identified in letter (a).
 - b.3 The person identified in the letters (a.1) has a significant influence over the entity or is the key management personnel of the entity (or parent entity of the entity).
 - b.4 Entities controlled or jointly controlled by persons identified in letter (a).
 - b.5 The person identified in the letters (a.1) has a significant influence over the entity or is the key management personnel of the entity (or parent entity of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties, which are made based on commercial terms agreed by the parties, and which may not be the same as those of the transactions with third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL
MANAGEMENT**

Introduction and overview

The Company has exposure to the following risks from financial instruments:

- Credit risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Operational risk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan kecukupan sumber daya keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta mengelola risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi sesuai rumusan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

a. Risiko kredit

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dan dengan demikian menghadapi risiko kegagalan kredit dari pelanggannya. Untuk mengelola risiko ini, Perusahaan menggunakan kebijakan dan prosedur kredit tertulis. Proses persetujuan kredit dimulai dengan analisa tertulis atas kelayakan kredit pelanggan diikuti dengan pemeriksaan fisik aset, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha pelanggan. Pencairan dana tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat bukti bahwa analisa tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh manajer yang berwenang. Untuk kredit dengan nilai yang lebih besar, proses persetujuan kredit membutuhkan penelaahan dan persetujuan dari manajer yang lebih senior.

Setiap piutang pembiayaan dijamin dengan agunan berupa kendaraan bermotor dan barang modal yang menjadi objek pembiayaan tersebut, dimana nilai dari agunan tersebut paling sedikit setara dengan nilai piutang pembiayaan pada tanggal awal pengakuan piutang pembiayaan.

Eksposur kredit Perusahaan dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi konsentrasi dan untuk menjamin diversifikasi pelanggan, sektor usaha, aset dan geografis. Piutang lewat jatuh tempo, status penagihan dan penarikan aset dipantau setiap hari oleh manajemen senior.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

Objectives and policies of financial risk management

The objective of the Company's financial risk management is to ensure the adequacy of financial resources to support business growth and development, while managing exposures to foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Directors.

a. Credit risk

The Company is engaged in financing business and is therefore exposed to credit default risk from its customers. To manage this risk, the Company employs written credit policies and procedures. The credit approval process begins with a written analysis of the customer's creditworthiness followed by a physical inspection of the customer's assets, residence, and/or business premises. Fund disbursements are not permitted unless there is evidence that the aforementioned analysis has been reviewed and approved by authorized managers. For credit in larger amounts, the process requires review and approval from more senior managers.

Each finance receivable are secured by collaterals in the form of motor vehicles and capital goods which become the object of the financing, in which the value of the collaterals was at least equal to the financing receivables at the initial acquisition date of financing receivables.

The Company's credit exposure is continuously monitored to mitigate concentration and to ensure diversification in customers, business sectors, assets, and geography. Past due receivables are monitored on a daily basis by senior management, along with the status of collection and asset repossession.

i. Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the financing receivables and finance lease receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

a. Risiko kredit (Lanjutan)

ii. Analisa risiko kredit

Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit disajikan di bawah ini:

	31 Desember/December 2025			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Kas di bank	131.469	-	-	131.469
Piutang pembiayaan				
Lancar (0-10 hari tunggakan)	3.032.677	3.599	2.074	3.038.350
Dalam perhatian (>10-90 hari tunggakan)	295.311	197.149	7.977	500.437
Kurang lancar (>90-120 hari tunggakan)	-	-	41.411	41.411
Diragukan (>120-180 hari tunggakan)	-	-	65.937	65.937
Macet (>180 hari tunggakan)	-	-	117.054	117.054
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(67.729)	(35.343)	(134.554)	(237.626)
	3.260.259	165.405	99.899	3.525.563
Piutang sewa pembiayaan				
Lancar	94.879	108	487	95.474
Dalam perhatian (>10-90 hari tunggakan)	2.513	4.713	1.262	8.488
Kurang lancar (>90-120 hari tunggakan)	-	-	3.226	3.226
Diragukan (>120-180 hari tunggakan)	-	-	1.935	1.935
Macet (>180 hari tunggakan)	-	-	91.108	91.108
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.301)	(1.050)	(47.040)	(49.391)
	96.091	3.771	50.978	150.840
Aset derivatif untuk tujuan manajemen risiko				
Berdasarkan hari jatuh tempo:				
Lancar	52.671	-	-	52.671
Piutang lain-lain	36.623	-	-	36.623
	36.623	-	-	36.623
	3.577.113	169.176	150.877	3.897.166

	31 Desember/December 2024			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Kas di bank	401.372	-	-	401.372
Piutang pembiayaan				
Lancar (0-10 hari tunggakan)	4.817.982	-	3.382	4.821.364
Dalam perhatian (>10-90 hari tunggakan)	460.844	240.515	30.788	732.147
Kurang lancar (>90-120 hari tunggakan)	-	-	70.625	70.625
Diragukan (>120-180 hari tunggakan)	-	-	96.352	96.352
Macet (>180 hari tunggakan)	-	-	159.511	159.511
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(71.448)	(36.262)	(168.122)	(275.832)
	5.207.378	204.253	192.536	5.604.167
Piutang sewa pembiayaan				
Lancar	348.026	-	1.655	349.681
Dalam perhatian (>10-90 hari tunggakan)	9.980	11.910	2.530	24.420
Kurang lancar (>90-120 hari tunggakan)	-	-	3.694	3.694
Diragukan (>120-180 hari tunggakan)	-	-	4.813	4.813
Macet (>180 hari tunggakan)	-	-	462.068	462.068
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.369)	(1.268)	(354.308)	(356.945)
	356.637	10.642	120.452	487.731
Aset derivatif untuk tujuan manajemen risiko				
Berdasarkan hari jatuh tempo:				
Lancar	84.550	-	-	84.550
Piutang lain-lain				
Berdasarkan hari jatuh tempo:				
Lancar	49.720	-	-	49.720
Lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari	-	-	3.626	3.626
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(2.860)	(2.860)
	49.720	-	766	50.486
	6.099.657	214.895	313.754	6.628.306

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

a. Credit risk (Continued)

ii. Credit risk analysis

Distribution of financial assets by their credit quality was summarized as below:

Cash in banks
Financing receivables
Current
Special mention (>10-90 days past due)
Sub-standard (>90-120 days past due)
Doubtful (>120-180 days past due)
Loss (>180 days past due)
Less: allowance for impairment losses
Finance lease receivables
Current
Special mention (>10-90 days past due)
Sub-standard (>90-120 days past due)
Doubtful (>120-180 days past due)
Loss (>180 days past due)
Less: allowance for impairment losses
Derivative assets held for risk management
Based on days past due:
Current
Other receivables
Based on days past due:
Current
More than 90 days past due
Less: allowance for impairment losses

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

a. Risiko kredit (Lanjutan)

ii. Analisa risiko kredit (Lanjutan)

Eksposur yang lewat jatuh tempo merupakan eksposur dimana pembayaran bunga atau pokok berdasarkan kontraktual telah lewat jatuh tempo, namun Perusahaan berkeyakinan belum terjadi penurunan nilai karena masih ada penagihan bertahap atas piutang yang terhutang.

iii. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan konsentrasi risiko kredit atas piutang pembiayaan dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan berdasarkan wilayah geografis:

31 Desember/December 2025						
	Piutang pembiayaan - bersih/ Financing receivables – net	Piutang sewa pembiayaan - bersih/ Finance lease receivables – net	Jumlah/Total	%Jumlah /Total		
Jawa dan Bali	2.042.545	22.370	2.064.915	56,17	Java and Bali	
Sumatera	625.537	22.361	647.898	17,62	Sumatera	
Jakarta dan sekitarnya	243.512	53.010	296.522	8,07	Jakarta and its surroundings	
Kalimantan	372.817	30.945	403.762	10,98	Kalimantan	
Sulawesi	241.152	22.154	263.306	7,16	Sulawesi	
	3.525.563	150.840	3.676.403	100,00		

31 Desember/December 2024						
	Piutang pembiayaan - bersih/ Financing receivables – net	Piutang sewa pembiayaan - bersih/ Finance lease receivables – net	Jumlah/Total	%Jumlah /Total		
Jawa dan Bali	2.802.308	56.363	2.858.671	37,69	Java and Bali	
Sumatera	1.154.445	97.488	1.251.933	23,70	Sumatera	
Jakarta dan sekitarnya	498.527	118.674	617.201	14,86	Jakarta and its surroundings	
Kalimantan	706.966	117.033	823.999	15,51	Kalimantan	
Sulawesi	441.921	98.173	540.094	8,24	Sulawesi	
	5.604.167	487.731	6.091.898	100,00		

b. Risiko pasar

i. Risiko mata uang asing

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang, yang menimbulkan suatu potensi risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perusahaan mengelola risiko ini melalui kebijakannya untuk menyamakan mata uang yang mendasari aset keuangan terhadap liabilitas keuangan satu sama lain. Misalnya piutang pembiayaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat didanai dengan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

a. Credit risk (Continued)

ii. Credit risk analysis (Continued)

Past due exposures represent exposures which contractual interest or principal payment are past due, but the Company believes that there was no impairment yet on the basis of the stage collection on outstanding receivables.

iii. Concentration of credit risk analysis

Concentration of credit risk arises when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similarly characteristic that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The following table presents the credit risk concentration of the Company's financing receivables and finance lease receivables based on geographic region:

b. Market risk

i. Foreign currency risk

The Company has assets and liabilities denominated in US Dollar and Japanese Yen, creating a potential risk with regards to fluctuation of foreign currency exchange rates. The Company manages this risk through its policy of matching the underlying currencies of its financing assets and liabilities against each other. For example, US Dollar financing receivables are funded by US Dollar denominated loans.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Risiko pasar (Lanjutan)

i. Risiko mata uang asing (Lanjutan)

Pada tanggal, 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas keuangan non-derivatif dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Yen Jepang (JPY) yang dilindungi nilai oleh kontrak *cross currency interest rate swap* sebagai berikut:

Perusahaan melakukan kontrak-kontrak *cross-currency interest rate swap* dengan lindung nilai efektif (Catatan 11) untuk mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing atas pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang.

	31 Desember/December 2025			31 Desember/December 2024		
	JPY	USD	Jumlah/Total ¹⁾	JPY	USD	Jumlah/Total ¹⁾
Kas dan bank	6.510	10.657	179	6.487	24.237	392
Piutang sewa pembiayaan ²⁾	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan	6.510	10.657	179	6.487	24.237	392
Pinjaman yang diterima	(5.645.370.998)	(53.630.705)	(1.499.571)	(10.642.126.705)	(102.827.608)	(2.762.080)
Liabilitas keuangan	(5.645.370.998)	(53.630.705)	(1.499.571)	(10.642.126.705)	(102.827.608)	(2.762.080)
Kontrak <i>cross - currency interest rate swap</i> - jumlah nosional (Catatan 11)	5.642.000.000	53.460.872	1.496.371	10.670.000.000	102.694.960	2.762.820
Eksposur bersih	(3.364.488)	(159.176)	(3.021)	27.879.782	(108.411)	1.132

¹⁾ setara dengan jutaan Rupiah/equivalent to millions of Rupiah

²⁾ sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai/before allowance for impairment losses

Analisis sensitivitas

Penguatan/pelemahan Rupiah, seperti yang diindikasikan berikut ini, terhadap US Dollar dan Yen Jepang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 akan menambah (mengurangi) laba bersih dan ekuitas sebesar jumlah yang tertera di tabel berikut. Analisis ini berdasarkan pertimbangan Perusahaan atas perubahan nilai tukar US Dollar dan Yen Jepang yang wajar terjadi pada saat tanggal pelaporan. Analisis berikut berasumsi bahwa semua variabel lain dianggap tetap:

	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024
10 persen penguatan USD	(208)	(137)
10 persen pelemahan USD	208	137
10 persen penguatan JPY	28	225
10 persen pelemahan JPY	(28)	(225)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

b. Market risk (Continued)

i. Foreign currency risk (Continued)

As of 31 December 2025 and 2024, the Company had non-derivative financial assets and liabilities denominated in US Dollar and Japanese Yen currency which were hedged with cross currency interest swap contracts as follows:

The Company entered into cross-currency interest rate swap contracts with an effective hedge (Note 11) to mitigate the risk of foreign currency fluctuation in respect of US Dollar and Japanese Yen denominated borrowings.

Cash on hand and in banks
Finance lease receivables ²⁾
Financial assets
Borrowings
Financial liabilities
Cross - currency interest rate swap contracts - notional amounts (Note 11)
Net exposure

Sensitivity analysis

A strengthening/weakening of the Rupiah, as indicated below, against the US Dollar and Japanese Yen as of 31 December 2025 and 2024 would have increased (decreased) net income and equity by the amounts shown below. This analysis is based on US Dollar and Japanese Yen rate variances that the Company considered to be reasonably possible at the reporting date. The analysis below assumes that all other variables remain constant:

10 percent strengthening of USD
10 percent weakening of USD
10 percent strengthening of JPY
10 percent weakening of JPY

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Risiko pasar (Lanjutan)

ii. Risiko tingkat bunga

Karena aset dan liabilitas memiliki profil suku bunga yang berbeda (tingkat bunga tetap versus tingkat bunga mengambang) dengan berbagai periode jatuh tempo, Perusahaan menghadapi potensi risiko fluktuasi suku bunga. Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan menggunakan kebijakan untuk menyesuaikan profil suku bunga dan jangka waktu aset dengan liabilitas. Sebagian besar piutang pembiayaan Perusahaan terdiri dari pembiayaan kendaraan periode 3-5 tahun dengan tingkat bunga tetap dan mengambang, yang didanai dengan pinjaman yang diterima periode 3-5 tahun dengan tingkat bunga tetap dan mengambang.

Perusahaan melakukan kontrak *cross currency interest rate swap* dan kontrak *interest rate swap* (Catatan 11) untuk mengatasi risiko fluktuasi tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

b. Market risk (Continued)

ii. Interest rate risk

As assets and liabilities may have different interest rate profiles (fixed versus floating) with various time spans, the Company faces the potential risk from the fluctuation of interest rates. To mitigate this risk, the Company employs a policy of approximately matching the interest rate profile and time span of assets and liabilities. A majority of the Company's financing receivables consist of 3-5 years fixed and floating rate vehicles financing, which are funded by 3-5 years fixed and floating rate borrowings.

The Company entered into cross currency interest rate swap contracts and interest rate swap contracts (Note 11) to mitigate the risk of interest rate fluctuation on borrowings.

The following table describes the Company's details of financial assets and liabilities, classified by the earlier of repricing date and contractual due date, to see the impact of interest rate changes:

31 Desember/ December 2025						
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/Fixed interest rate			
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 - 12 bulan/months	> 1 tahun/ year	Jumlah/Total	
Aset keuangan						Financial assets
Kas di bank	131.469	-	-	-	131.469	Cash in banks
Piutang pembiayaan – bersih	-	500.424	1.279.324	1.745.815	3.525.563	Financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	41.590	64.225	45.025	150.840	Finance lease receivables - net
Jumlah aset keuangan	131.469	542.014	1.343.549	1.790.840	3.807.872	Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang Diterima	(1.499.571)	(114.912)	(304.755)	(394.224)	(2.313.462)	Borrowings
Utang obligasi	-	-	(237.217)	(349.066)	(586.283)	Bonds payable
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(13.098)	(13.098)	Subordinated loan
Jumlah liabilitas keuangan	(1.499.571)	(114.912)	(541.972)	(756.388)	(2.912.843)	Total financial liabilities
Dampak derivatif untuk tujuan manajemen risiko						Effect from derivatives held for risk management
	1.441.256	(165.248)	(907.269)	(368.739)	-	
	73.154	261.854	(105.692)	665.713	895.029	

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Risiko pasar (Lanjutan)

ii. Risiko tingkat bunga (Lanjutan)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

b. Market risk (Continued)

ii. Interest rate risk (Continued)

31 Desember/ December 2024									
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/Fixed interest rate					
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 - 12 bulan/ months	> 1 tahun/ year	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 - 12 bulan/ months	> 1 tahun/ year	Jumlah/ Total		
Aset keuangan								Financial assets	
Kas di bank	401.372	-	-	-	-	-	401.372	Cash in banks	
Piutang pembiayaan - bersih	-	-	-	626.776	1.695.770	3.281.621	5.604.167	Financing receivables - net	
Piutang sewa pembiayaan - bersih	523	2.715	4.218	79.467	199.892	200.916	487.731	Finance lease receivables - net	
Jumlah aset keuangan	401.894	2.715	4.218	706.243	1.895.662	3.482.537	6.493.270	Total financial assets	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Pinjaman yang diterima	(2.762.231)	-	-	(390.476)	(283.056)	(235.728)	(3.671.491)	Borrowings	
Utang obligasi	-	-	-	-	(663.124)	(577.825)	(1.240.949)	Bonds payable	
Surat utang jangka menengah	-	-	-	-	(302.253)	-	(302.253)	Medium term notes	
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	(13.098)	(13.098)	Subordinated loan	
Jumlah liabilitas keuangan	(2.762.231)	-	-	(390.476)	(1.248.422)	(826.651)	(5.227.791)	Total financial Liabilities	
Dampak derivatif untuk tujuan manajemen risiko	2.733.667	-	-	(205.039)	(1.092.474)	(1.436.154)	-	Effect from derivatives held for risk management	
	373.330	2.715	4.218	110.728	(445.245)	1.219.732	1.265.479		

Analisis sensitivitas

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku yang dilakukan setiap bulan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 100 basis point.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap laba setelah pajak dan ekuitas:

	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis point	571	2.908	Increase in interest rate by 100 basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis point	(571)	(2.908)	Decrease in interest rate by 100 basis point

Sensitivity analysis

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 100 basis point (bp) parallel fall or rise in all yield curves.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of income after tax and equity:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dengan profil jatuh tempo berbeda, menimbulkan potensi risiko liabilitas jatuh tempo lebih awal daripada aset. Perusahaan mengelola risiko ini dengan mencocokkan jatuh tempo aset dengan liabilitas, sehingga kas yang dihasilkan dari aset yang jatuh tempo cukup untuk membayar liabilitas yang jatuh tempo pada periode yang sama. Selain itu, risiko likuiditas dikelola secara terus-menerus melalui pengawasan arus kas aktual, perkiraan arus kas masa depan, pengendalian profil jatuh tempo aset dan liabilitas, serta penjagaan kecukupan saldo kas dan fasilitas perbankan. Perusahaan telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas yang bertemu secara bulanan untuk mengawasi dan mengelola risiko likuiditas. Komite ini mencakup semua Direktur Perusahaan.

Sisa umur kontraktual liabilitas keuangan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risk

The Company has assets and liabilities with various maturity profiles, creating a potential risk from liabilities with maturities shorter than assets. The Company manages this risk by matching the maturities of its assets against liabilities, so the cash generated by maturing assets is sufficient to pay maturing liabilities in the same period. In addition, liquidity risk is continuously managed by monitoring actual cash flows, forecasting future cash flows, controlling maturity profiles of assets and liabilities, and maintaining sufficient cash balances and banking facilities. The Company has established an Asset and Liability Committee which regularly meets on a monthly basis to monitor and manage liquidity risk. This committee includes all of the Company's Directors.

Residual contractual maturities of financial liabilities as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

31 Desember/ December 2025						
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas keluar/ Gross nominal outflow	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 3 tahun/ years	>3 tahun/ years	
Liabilitas non-derivatif						Non-derivative liabilities
Utang usaha	(5.007)	(5.007)	(5.007)	-	-	Accounts payable
Liabilitas lain-lain	(59.301)	(61.125)	(47.013)	(3.349)	(9.557)	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	(34.361)	(34.361)	(34.361)	-	-	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	(2.313.462)	(2.494.021)	(456.140)	(1.202.507)	(809.791)	Borrowings
Utang obligasi	(586.283)	(630.138)	(10.369)	(257.081)	(362.688)	Bonds payable
Pinjaman subordinasi	(13.098)	(13.435)	-	(13.435)	-	Subordinated loan
	<u>(3.011.512)</u>	<u>(3.238.087)</u>	<u>(522.890)</u>	<u>(1.476.372)</u>	<u>(1.182.036)</u>	<u>(26.789)</u>
Liabilitas derivatif	(28.647)					Derivative liabilities
Arus kas masuk	-	604.552	127.371	362.759	114.422	Cash inflow
Arus kas keluar	-	(620.048)	(130.848)	(372.860)	(116.340)	Cash outflow
	<u>(28.647)</u>	<u>(15.496)</u>	<u>(3.477)</u>	<u>(10.101)</u>	<u>(1.918)</u>	<u>-</u>
31 Desember/ December 2024						
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas keluar/ Gross nominal outflow	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 3 tahun/ years	>3 tahun/ years	
Liabilitas non-derivatif						Non-derivative liabilities
Utang usaha	(17.646)	(17.646)	(17.646)	-	-	Accounts payable
Liabilitas lain-lain	(51.656)	(54.718)	(36.140)	(3.349)	(9.200)	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	(36.516)	(36.516)	(36.516)	-	-	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	(3.671.491)	(4.007.526)	(794.796)	(1.411.355)	(1.737.660)	Borrowings
Utang obligasi	(1.240.949)	(1.354.388)	(22.131)	(702.119)	(630.138)	Bonds payable
Surat utang jangka menengah	(302.253)	(317.475)	(4.980)	(312.495)	-	Medium term notes
Pinjaman subordinasi	(13.098)	(14.312)	-	(877)	(13.435)	Subordinated loan
	<u>(5.333.609)</u>	<u>(5.802.581)</u>	<u>(912.209)</u>	<u>(2.430.195)</u>	<u>(2.390.433)</u>	<u>(69.744)</u>
Liabilitas derivatif	(81.212)					Derivative liabilities
Arus kas masuk	-	1.180.462	137.697	413.093	629.672	Cash inflow
Arus kas keluar	-	(1.250.214)	(145.705)	(437.113)	(667.396)	Cash outflow
	<u>(81.212)</u>	<u>(69.752)</u>	<u>(8.008)</u>	<u>(24.020)</u>	<u>(37.724)</u>	<u>-</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Tabel di atas menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas atas instrumen keuangan yang diharapkan Perusahaan bervariasi secara signifikan dari analisa ini.

Nilai nominal arus kas keluar yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan.

d. Manajemen modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risk (Continued)

The above table shows the undiscounted cash flows of the Company's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Company's expected cash flows on these instruments vary significantly from this analysis.

The nominal outflow disclosed in the above table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability.

d. Capital management

The Company manages capital risk to ensure that the Company will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

i. Pertimbangan-pertimbangan

Informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan pada catatan berikut:

- Catatan 3a.1: Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan
- Catatan 3a.7: Pengukuran nilai wajar

ii. Asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang tidak pasti

Informasi mengenai asumsi-asumsi dan ketidakpastian estimasi, yang dapat mengakibatkan penyesuaian material pada tahun berikutnya, termasuk dalam catatan berikut:

- Catatan 7 dan 8 - Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.
- Catatan 31 - Pengukuran kewajiban imbalan pascakerja: asumsi-asumsi aktuarial.
- Catatan 32c - Pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Perusahaan melakukan peninjauan kembali atas aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS

i. Judgements

Information about critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements is included in the following notes:

- Note 3a.1: Classification of financial assets and financial liabilities
- Note 3a.7: Fair value measurement

ii. Assumptions and estimation uncertainties

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in a material adjustment within the following year is included in the following notes:

- Notes 7 and 8 - Allowance for impairment losses of financial assets.
- Note 31 - Measurement of post-employment benefits liabilities: actuarial assumptions.
- Note 32c - Deferred Tax for tax loss carry forward.

The Company reviews their financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
(Lanjutan)

ii. Asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang tidak pasti (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Perusahaan mengukur menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- PD merupakan kemungkinan pada suatu waktu (*point in time*) dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal pelaporan (Tahap 1) atau sepanjang umur aset (Tahap 2) dan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki dampak terhadap risiko kredit. PD diestimasi pada suatu waktu berarti PD akan berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.
- LGD merupakan kerugian yang diperkirakan akan timbul dari *debitur* yang gagal bayar, yaitu perbedaan antara arus kas kontraktual yang seharusnya diterima dengan arus kas yang diharapkan Perusahaan untuk diterima. Perusahaan mengestimasi LGD berdasarkan data historis tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan yang relevan.
- EAD merupakan perkiraan nilai eksposur pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan eksposur yang diharapkan selama masa eksposur. EAD memperhitungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka.

Pertimbangan utama dan estimasi yang dibuat oleh Perusahaan meliputi:

- Peningkatan risiko kredit yang signifikan
Dalam pengukuran KKE, pertimbangan diperlukan dalam penerapan aturan untuk menentukan apakah telah terdapat peningkatan signifikan atas risiko kredit (*SICR*) sejak pengakuan awal atas pinjaman yang diberikan, yang mengakibatkan aset keuangan berpindah dari "Tahap 1" ke "Tahap 2".

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)

ii. Assumptions and estimation uncertainties (Continued)

a. Allowance for impairment losses of financial assets

The assessment of credit risk of an asset portfolio entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Company primarily uses sophisticated models that utilize the *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) and *Exposure at Default* (EAD), and macroeconomic variables for forward looking perspective, which are discounted using the effective interest rate, as described as follows:

- PD represents the probability at a point in time that debtor will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the asset (Stage 2) and incorporating the impact of forward looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.
- LGD represents the loss that is expected to arise on default, which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. The Company estimates LGD based on the history of recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions where relevant.
- EAD represents the expected exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principals and interest, amortisation and prepayments.

Key judgment and estimates made by the Company include the following:

- Significant increase in credit risk
In the measurement of ECL, judgment is involved in setting the rules to determine whether there has been a significant increase in credit risk (*SICR*) since initial recognition of a loan, resulting the financial asset moving from "Stage 1" to "Stage 2".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
(Lanjutan)**

ii. Asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang tidak pasti (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan apa yang merupakan SICR, Perusahaan menggunakan informasi tunggakan 30 hari atau lebih untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Ini merupakan hal yang utama dalam pertimbangan karena perpindahan dari Tahap 1 dan Tahap 2 meningkatkan perhitungan KKE atas penyisihan berdasarkan probability of default dalam 12 bulan mendatang, menjadi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Penurunan selanjutnya atas risiko kredit yang digabungkan dengan perpindahan dari Tahap 2 ke Tahap 1 mungkin akan memberikan hasil yang sama atas perubahan signifikan dalam penyisihan KKE. Perusahaan memantau efektivitas kriteria SICR secara berkelanjutan.

• Informasi *forward looking*

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian mencerminkan jumlah rata-rata probabilitas tertimbang yang tidak bias dari rentang hasil akhir masa depan yang mungkin terjadi.

Dalam menetapkan informasi *forward looking* dalam model PSAK 109 Perusahaan menggunakan variabel makroekonomi dalam menentukan KKE. Variabel makroekonomi yang digunakan terdiri dari: Indeks keyakinan konsumen, neraca transaksi berjalan, fiskal, pertumbuhan investasi aset tetap, impor, pertumbuhan produk industri, rata-rata penduduk usia kerja, upah minimum, harga minyak, indeks manajer pembelian, konsumsi pribadi, tingkat pengangguran, indeks harga pasar, dan utang rumah tangga. Untuk perhitungan KKE pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan menggunakan variabel makroekonomi sebagai berikut:

**5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

**ii. Assumptions and estimation uncertainties
(Continued)**

a. Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

In determining what constitutes SICR, the Company uses 30 days or more past due information and recognizes lifetime expected credit losses. This is a key area of judgment as transition from Stage 1 and Stage 2 increases the ECL calculation from an allowance based on the probability of default in the next 12 months, to an allowance for lifetime expected credit losses. Subsequent decreases in credit risk combined with transition from Stage 2 to Stage 1 may similarly result in significant changes in the ECL allowance. The Company monitors the effectiveness of SICR criteria on an ongoing basis

• *Forward looking information*

The measurement of expected credit losses reflects an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes.

In applying forward looking information in the Company's PSAK 109 credit models, the Company uses macroeconomics variables. The macroeconomic variables used, among others, Consumer confident index, current account, fiscal balance, gross fixed capital formation growth, import, industrial production, labor participant rate, minimum wage, oil price, purchasing manager index, private consumption, unemployment rate, consumer price index, household debt to GDP and coal price. In determination of ECL as of 31 December 2025 and 2024, the Company used macroeconomic variables as follows:

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

ii. Asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang tidak pasti (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Scenario		Suku Bunga Bank Indonesia / Bank Indonesia Rate	Pertumbuhan Investasi Aset Tetap / Gross Fixed Capital Formation Growth	Indeks Produk Domestik Bruto (MA12) / Gross Domestic Product Index (MA12)	Indeks Produk Domestik Bruto (MA3) / Gross Domestic Product Index (MA3)	Inflasi / Inflation	Pertumbuhan Produk Industri / Industrial Production Growth	Indeks Harga Saham Gabungan / Jakarta Composite Index	Upah Minimum (MA3) / Minimum Wage (MA3)	Upah Minimum (MA6) / Minimum Wage (MA6)	Harga Minyak / Oil Price	Konsumsi Pribadi / Private Consumption	Indeks Penjualan Ritel / Retail Sales Index	Pergerakan Tingkat Pengangguran / Unemployment Rate Movement	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga / Third Party Fund Growth
Kuat/Strong	2025	6,04%	4,00%	0,05	0,05	2,30%	0,87%	7.043,12	0,03	0,02	78.73	0,05	0,02	-3.40%	1.18%
Normal/Normal	2025	5,09%	6,36%	0,07	0,08	1,32%	3,93%	7.759,76	0,08	0,07	94.72	0,08	0,08	-16,61%	5.25%
Lemah/Weak	2025	6,99%	1,64%	0,03	0,02	3,28%	-2,19%	6.327,49	-0,03	-0,03	62.75	0,02	-0.04	9.81%	-2.90%

Variabel makroekonomi merupakan variable baru pada Desember 2025.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

ii. Assumptions and estimation uncertainties (Continued)

a. Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Macroeconomics variables were newly introduced into the ECL model in December 2025

Skenario/ Scenario	Tingkat pertumbuhan pendapatan bruto nasional (PDB)/ Gross Domestic Products (GDP)	Tingkat pengangguran/ Unemployment rate	Nilai tukar/ Exchange rate (USD/IDR)	Harga minyak mentah/ Crude oil price (USD/Bbl)	Harga batu bara/ Coal price (USD/T)	Tingkat inflasi kumulatif/ Cummulative inflation rate
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Kuat/Strong	5,7%	4,5%	16.157	76,95	136,50	1,5%
Normal/Normal	5,5%	4,8%	16.157	81,00	130,00	2,5%
Lemah/Weak	5,1%	5,0%	16.157	85,05	123,50	3,5%

Dalam menentukan probabilitas tertimbang dari skenario yang akan terjadi di masa depan, Perusahaan telah melakukan analisis berdasarkan informasi historis variabel makroekonomi diatas yang meliputi insiden besar yang terjadi pada rentang waktu 5 tahun terakhir.

Perusahaan menerapkan tiga skenario makroekonomi berikut untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengestimasi ECL:

In determining the probability weighted of each scenario that will occur in the future, the Company has conducted an analysis based on the above macroeconomic variable which includes the major incident that happened in the last 5 years.

The Company applied the following three macroeconomic scenarios to reflect an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes in estimating ECL:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

ii. Asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang tidak pasti (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Skenario normal: Skenario ini mencerminkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini terus berlanjut; dan
- Skenario kuat dan lemah: Skenario ini ditetapkan relatif terhadap skenario dasar; mencerminkan kondisi makroekonomi terbaik dan terburuk berdasarkan kombinasi pendekatan statistik dan penilaian dari *subject matter expert* berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, probabilitas tertimbang skenario normal adalah 50%, skenario kuat sebesar 30% dan skenario lemah sebesar 20%. Asumsi yang mendasari perhitungan KKE akan dipantau dan ditinjau setiap tahun. Manajemen telah melakukan analisis sensitivitas dengan hasil tidak ada dampak material pada laporan keuangan Perseroan.

Jika memungkinkan, penyesuaian dapat dilakukan untuk situasi dimana risiko yang diketahui atau yang diharapkan belum ditangani secara memadai dalam proses permodelan. Divisi Risiko Kredit, *Fraud & Manajemen Risiko Operasional* bertanggungjawab untuk mengusulkan penyesuaian tersebut.

Tingkat keseluruhan kerugian kredit ekspektasian dan area pertimbangan manajemen yang signifikan akan dilaporkan kepada, dan diawasi oleh, Komite Manajemen Risiko Perusahaan.

b. Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 3a.7.

Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 36.

c. Pengukuran atas kewajiban imbalan pascakerja

Kewajiban imbalan pascakerja ditentukan oleh perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

d. Pengukuran aset pajak tangguhan yang berasal dari kerugian fiskal yang dikompensasi

Aset pajak tangguhan yang berasal dari kerugian fiskal yang dikompensasikan diukur sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, berdasarkan laba kena pajak di masa depan dimana menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat pertumbuhan, segmentasi produk, efisiensi biaya, peningkatan kualitas kredit dan strategi pemulihan, dan lain-lain.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

ii. Assumptions and estimation uncertainties (Continued)

a. Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

- *Base normal*: This scenario reflects that current macroeconomic conditions continue to prevail; and
- *Strong and weak scenarios*: These scenarios are set relative to the base scenario; reflecting best and worstcase macroeconomic conditions based on combination of statistical approach and *subject matter expert's* assessment from current economic conditions.

As at 31 December 2025 and 2024, probability – weighting for normal scenario is 50%, strong scenario 30% and weak scenario 20%. The assumptions underlying the ECL scenario are monitored and reviewed on annual basis. Management has performed sensitivity analysis and the assessment do not result a material impact to the Company's financial statements.

Where applicable, adjustments may be made to account for situations where known or expected risks have not been adequately addressed in the modelling process. Credit Risk, *Fraud & Operational Risk Management Division* is responsible for recommending such adjustments.

The overall level of expected credit losses and areas of significant management judgement will be reported to and oversight by, the Company's Risk Management Committee.

b. Determining fair values

The determination of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price requires the use of valuation techniques as described in Note 3a.7.

Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 36.

c. Measurement of obligation for post employment benefits

Obligation for post-employment benefits is determined by actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate on returns on plan assets, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and others.

d. Measurement of deferred tax asset derived from tax loss carry forwards

Deferred tax asset arising from tax loss carry forwards are measured at the amount that is expected to be realized, based on the estimated future taxable profit which involves assumption such as growth rate, product segmentation, cost efficiency, improvement of credit quality & recovery strategy, and others.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

6. KAS DAN BANK

6. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Kas			Cash on hand
Rupiah	1.521	1.801	Rupiah
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	518	207	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	29	100	MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Permata Tbk	102.566	31.672	PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	14.295	331.106	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	11.566	27.900	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	913	1.717	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	692	7.401	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	314	397	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	78	167	PT Bank Mizuho Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100)	321	314	Others (each below Rp 100)
Jumlah - Rupiah	131.292	400.981	Total - Rupiah
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50	48	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	29	48	MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank ANZ Indonesia	42	222	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Permata Tbk	16	16	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mega Tbk	13	14	PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13	14	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	10	15	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank CTBC Indonesia	3	5	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia	1	-	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	-	8	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	177	390	Total - US Dollar
Yen Jepang			Japanese Yen
Pihak ketiga			Third party
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	-	1	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
Jumlah - Yen Jepang	-	1	Total - Japanese Yen
Jumlah kas di bank	131.469	401.372	Total cash in banks
Jumlah kas dan kas di bank	132.990	403.173	Total cash on hand and cash in banks

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tingkat suku bunga kontraktual setahun atas kas di bank adalah sebagai berikut:

For the years ended 31 December 2025 and 2024, the contractual interest rates per annum on cash in banks were as follows:

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas jasa giro:			Contractual interest rates per annum on current accounts:
Rupiah	0% - 4,75%	0% - 6,70%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0% - 2,75%	0% - 4,25%	US Dollar
Yen Jepang	0%	0%	Japanese Yen

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

6. KAS DAN BANK (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat kas dan kas di bank yang digunakan sebagai jaminan.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo kas di bank dengan pihak berelasi.

6. CASH ON HAND AND IN BANKS (Continued)

As of 31 December 2025 and 2024, there was no cash on hand and in banks being pledged as collateral.

Refer to Note 35 for details of balances of cash in banks with related parties.

7. PIUTANG PEMBIAYAAN

- a. Perusahaan memberikan kontrak pembiayaan untuk motor, mobil dan multiguna dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

Rincian piutang pembiayaan pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

7. FINANCING RECEIVABLES

- a. The Company extends consumer financing contracts for motorcycles, cars and multipurpose with terms ranging from 1 year to 5 years.

The details of financing receivables at amortized cost as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Piutang pembiayaan - bruto	4.666.531	7.597.856	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(903.342)	(1.717.857)	Unearned financing income
	3.763.189	5.879.999	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(237.626)	(275.832)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan - neto	3.525.563	5.604.167	Financing receivables - net

Angsuran piutang pembiayaan yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of financing receivables, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	31 Desember/December		
	2025	2024	
< 1 tahun	2.489.939	3.394.759	< 1 year
1 – 2 tahun	1.478.036	1.891.058	1 – 2 years
> 2 tahun	698.556	2.312.039	> 2 years
Jumlah piutang pembiayaan - bruto	4.666.531	7.597.856	Total financing receivables - gross

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga kontraktual piutang pembiayaan per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The weighted average contractual interest rate of financing receivables per annum as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Mobil	16,18%	16,27%	Cars
Motor	26,30%	26,10%	Motorcycles
Multiguna	26,32%	27,53%	Multipurpose

Piutang pembiayaan dijamin oleh Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang dibiayai Perusahaan.

The financing receivables are secured by the related certificates of ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat piutang pembiayaan yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima masing-masing sebesar Rp 2.001.996 dan Rp 2.807.711 (lihat Catatan 18).

As of 31 December 2025 and 2024, there were financing receivables which were pledged as collaterals to borrowings amounting to Rp 2,001,996 and Rp 2,807,711, respectively (see Note 18).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat piutang pembiayaan yang dijadikan jaminan atas utang obligasi masing-masing sebesar Rp 456.149 dan Rp 1.029.800 (lihat Catatan 20).

As of 31 December 2025 and 2024, there were financing receivables which were pledged as collaterals to bonds payable amounting to Rp 456,149 and Rp 1,029,800, respectively (see Note 20).

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

b. Menurut stage

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan yang diberikan (sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian) dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan tahap (stage) adalah sebagai berikut:

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	5.278.826	240.515	360.658	5.879.999
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	13.949	(12.856)	(1.093)	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	(254.977)	256.406	(1.429)	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	(645.621)	(171.297)	816.918	-
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.178.611	-	-	1.178.611
Aset keuangan yang telah dilunasi	(2.242.800)	(112.020)	(349.923)	(2.704.743)
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	(104.365)	(104.365)
Hapus buku	-	-	(486.313)	(486.313)
Saldo akhir tahun 31 Desember 2025	<u>3.327.988</u>	<u>200.748</u>	<u>234.453</u>	<u>3.763.189</u>

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	6.334.668	208.251	357.908	6.900.827
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	312.876	(306.032)	(6.844)	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	(1.609.671)	1.619.920	(10.249)	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	(132.699)	(660.076)	792.775	-
Aset keuangan yang baru diperoleh	2.966.495	-	-	2.966.495
Aset keuangan yang telah dilunasi	(2.592.843)	(621.548)	(121.192)	(3.335.583)
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	(192.124)	(192.124)
Hapus buku	-	-	(459.616)	(459.616)
Saldo akhir tahun 31 Desember 2024	<u>5.278.826</u>	<u>240.515</u>	<u>360.658</u>	<u>5.879.999</u>

c. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan tahap (stage) adalah sebagai berikut:

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	(71.448)	(36.262)	(168.122)	(275.832)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	(2.601)	2.077	524	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	10.550	(11.265)	715	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	29.250	25.268	(54.518)	-
Perubahan pengukuran kembali atas KKE	(3.557)	(22.333)	(516.599)	(542.489)
Aset keuangan yang baru diperoleh	(39.639)	-	-	(39.639)
Aset keuangan yang telah dilunasi	9.716	7.172	12.768	29.656
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	104.365	104.365
Hapus buku	-	-	486.313	486.313
Saldo akhir tahun 31 Desember 2025	<u>(67.729)</u>	<u>(35.343)</u>	<u>(134.554)</u>	<u>(237.626)</u>

7. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

b. By stage

The movement in the carrying amount of financing receivables (before expected credit losses) based on stages was as follows:

Balance, beginning of year	
Transferred to 12-month expected credit losses (Stage 1)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)	
New financial assets originated	
Financial assets that have been repaid	
Realization of loss on sales of financed asset collateral	
Write-off	
Balance, end of year 31 December 2025	

Balance, beginning of year	
Transferred to 12-month expected credit losses (Stage 1)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)	
New financial assets originated	
Financial assets that have been repaid	
Realization of loss on sales of financed assets collateral	
Write-off	
Balance, end of year 31 December 2024	

c. The movement of allowance for impairment losses based on stages was as follows:

Balance, beginning of year	
Transferred to 12-month expected credit losses (Stage 1)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)	
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)	
Net remeasurement of ECL	
New financial assets originated	
Financial assets that have been repaid	
Realization of loss on sales of financed assets collateral	
Write-off	
Balance, end of year 31 December 2025	

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

- c. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan tahap (stage) adalah sebagai berikut (Lanjutan):

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	(68.084)	(27.034)	(167.343)	(262.461)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	(43.702)	40.261	3.441	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	50.798	(55.805)	5.007	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	169	93.227	(93.396)	-
Perubahan pengukuran kembali atas KKE	(7.030)	(104.120)	(634.201)	(745.351)
Aset keuangan yang baru diperoleh	(57.647)	-	-	(57.647)
Aset keuangan yang telah dilunasi	54.048	17.209	66.630	137.887
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	192.124	192.124
Hapus buku	-	-	459.616	459.616
Saldo akhir tahun 31 Desember 2024	(71.448)	(36.262)	(168.122)	(275.832)

Piutang pembiayaan dievaluasi untuk penurunan nilai atas dasar seperti yang dijelaskan di Catatan 3a.6.

Manajemen yakin bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah cukup.

7. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

- c. The movement of allowance for impairment losses based on stages was as follows (Continued):

Balance, beginning of year
Transferred to 12-month expected credit losses (Stage 1)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)
Net remeasurement of ECL
New financial assets originated
Financial assets that have been repaid
Realization of loss on sales of financed assets collateral
Write-off
Balance, end of year 31 December 2024

Financing receivables are evaluated for impairment on the basis described in Note 3a.6.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

- a. Perusahaan memberikan kontrak sewa pembiayaan untuk alat berat, mesin, kapal dan properti dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

Rincian piutang sewa pembiayaan pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Tagihan sewa pembiayaan bruto, jatuh tempo dalam periode:		
Sampai dengan 1 tahun	137.243	459.590
>1 tahun sampai dengan 5 tahun	92.231	539.866
Investasi sewa pembiayaan bruto	229.474	999.454
Dikurangi:		
Pendapatan pembiayaan tangguhan	(29.243)	(154.780)
Investasi neto dalam sewa pembiayaan, sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai	200.231	844.676
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(49.391)	(356.945)
Piutang sewa pembiayaan - net	150.840	487.731

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

- a. The Company extends financing contracts of heavy equipment, machines, vessels and property with terms ranging from 1 year to 5 years.

The details of finance lease receivables at amortized cost as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

Gross finance lease receivables due in periods:
Up to 1 year
> 1 year up to 5 years
Less:
Unearned lease income
Net investment in finance leases, before allowance for impairment losses
Allowance for impairment losses
Finance lease receivables - net

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

- b. Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga kontraktual piutang sewa pembiayaan per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 12.84% dan 12.93%.
- c. Menurut stage

Perubahan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang diberikan (sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian) dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan tahap (stage) adalah sebagai berikut:

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES (Continued)

- b. The weighted average contractual interest rates of finance lease receivables per annum as of 31 December 2025 and 2024 were Rp 12,84% and 12,93%.
- c. By stage

The movement in the carrying amount of finance lease receivables (before expected credit losses) based on stages was as follows:

Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025					
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total		
Saldo awal tahun	358.006	11.911	474.760	844.677	Balance, beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	-	-	-	-	Transferred to 12 months expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	(30.787)	30.787	-	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	-	(23.005)	23.005	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)
Aset keuangan yang telah dilunasi	(229.827)	(14.872)	(16.771)	(261.470)	Financial assets that have been repaid
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	(62.050)	(62.050)	Realization of loss on sales of financed assets collateral
Hapus buku	-	-	(320.926)	(320.926)	Write-off
Saldo akhir tahun 31 Desember 2025	97.392	4.821	98.018	200.231	Balance, end of year 31 December 2025

Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024					
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total		
Saldo awal tahun	715.124	9.207	496.519	1.220.850	Balance, beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	22.666	(4.995)	(17.671)	-	Transferred to 12 months expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	(51.027)	51.027	-	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	(471.486)	(35.833)	507.319	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)
Aset keuangan yang baru diperoleh	164.510	-	-	164.510	New financial assets originated
Aset keuangan yang telah dilunasi	(21.780)	(7.496)	(480.443)	(509.721)	Financial assets that have been repaid
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	(21.749)	(21.749)	Realization on sales of financed assets collateral
Hapus buku	-	-	(9.214)	(9.214)	Write-off
Saldo akhir tahun 31 Desember 2024	358.006	11.910	474.760	844.676	Balance, end of year 31 December 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan tahap (stage) adalah sebagai berikut:

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	(1.369)	(1.268)	(354.307)	(356.944)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	-	-	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	225	(225)	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	-	360	(360)	-
Perubahan pengukuran kembali atas KKE	(357)	(945)	(75.630)	(76.932)
Aset keuangan yang telah dilunasi	200	1.028	281	1.509
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	62.050	62.050
Hapus buku	-	-	320.926	320.926
Saldo akhir tahun 31 Desember 2025	<u>(1.301)</u>	<u>(1.050)</u>	<u>(47.040)</u>	<u>(49.391)</u>

	Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	(2.230)	(675)	(328.168)	(331.073)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)	(1.769)	253	1.516	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 2)	417	(417)	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Tahap 3)	65	2.785	(2.850)	-
Perubahan pengukuran kembali atas KKE	(215)	(3.581)	(58.339)	(62.135)
Aset keuangan yang baru diperoleh	(548)	-	-	(548)
Aset keuangan yang telah dilunasi	2.911	367	2.571	5.849
Realisasi rugi penjualan jaminan aset keuangan	-	-	21.749	21.749
Hapus buku	-	-	9.214	9.214
Saldo akhir tahun 31 Desember 2024	<u>(1.369)</u>	<u>(1.268)</u>	<u>(354.307)</u>	<u>(356.944)</u>

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima masing-masing sebesar Rp 93.320 dan Rp 238.956.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas utang obligasi masing-masing sebesar Rp 36.351 dan Rp 75.200.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada debitur yang memiliki saldo piutang sewa pembiayaan neto di atas 10% dari total piutang sewa pembiayaan neto.

Sejak Mei 2024, Perusahaan telah menghentikan penerimaan aplikasi baru untuk sewa pembiayaan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2025, Perusahaan memutuskan untuk menutup sepenuhnya kegiatan usaha sewa pembiayaan.

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES (Continued)

d. The movement of allowance for impairment losses based on stages was as follows:

Balance, beginning of year
Transferred to 12 months expected credit losses (Stage 1)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)
Net remeasurement of ECL
Financial assets that have been repaid
Realization on sales of financed assets collateral
Write-off
Balance, end of year 31 December 2025

Balance, beginning of year
Transferred to 12 months expected credit losses (Stage 1)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 3)
Net remeasurement of ECL
New financial assets originated
Financial assets that have been repaid
Realization on sales of financed assets collateral
Write-off
Balance, end of year 31 December 2024

As of 31 December 2025 and 2024, finance lease receivables pledged as collaterals to borrowings amounting to Rp 93,320 and Rp 238,956, respectively.

As of 31 December 2025 and 2024, finance lease receivables pledged as collateral for bonds payable amounted to Rp 36,351 and Rp 75,200, respectively.

As of 31 December 2025 and 2024, there was no debtor which has balance of finance lease receivables-net above 10% from total finance lease receivables-net.

Since May 2024, the Company had stopped new account acquisition for finance lease. Furthermore, on 1 January 2025, the Company decided to close its finance lease activity.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Promosi	9.562	16.840	Promotion
Pemeliharaan sistem	3.872	3.180	System maintenance
Sewa	831	-	Rent
Asuransi	252	115	Insurance
Lain-lain	828	630	Others
	<u>15.345</u>	<u>20.765</u>	

10. PIUTANG LAIN-LAIN

10. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang karyawan	10.678	12.088	Employee receivables
Piutang agen pembayaran	10.215	16.394	Payment channel receivables
Akrua denda keterlambatan	9.583	11.979	Accrued late charges
Titipan di <i>dealer</i>	3.061	5.366	Deposit to dealer
Anjak piutang	-	1.690	Factoring*
Lain-lain	2.494	2.287	Others
	<u>36.031</u>	<u>49.804</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Piutang karyawan	592	682	Employee receivables
	<u>36.623</u>	<u>50.486</u>	

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo piutang lain-lain dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of balances of other receivables with related parties.

11. INSTRUMEN DERIVATIF

11. DERIVATIVE INSTRUMENTS

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Aset derivatif			Derivative assets
Kontrak <i>cross currency interest rate swap</i>			Cross currency interest rate swap
Pihak berelasi	19.659	36.354	Contracts
Pihak ketiga	33.012	48.196	Related party
	<u>52.671</u>	<u>84.550</u>	Third parties
Liabilitas derivatif			Derivative liabilities
Kontrak <i>cross currency interest rate swap</i>			Cross currency interest rate swap
Pihak berelasi	11.367	36.203	contracts
Pihak ketiga	17.280	45.009	Related party
	<u>28.647</u>	<u>81.212</u>	Third parties

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian derivatif untuk tujuan lindung nilai risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan tingkat suku bunga mengambang. Perusahaan tidak menggunakan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi.

The Company entered into derivative contracts to hedge the risks of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on its borrowings denominated in foreign currencies which bear floating interest rates. The Company does not use derivative instruments for speculative purpose.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

11. INSTRUMEN DERIVATIF (Lanjutan)

Perubahan kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas yang merupakan bagian efektif atas perubahan bersih kumulatif nilai wajar arus kas instrumen lindung nilai terkait dengan transaksi lindung nilai yang belum berdampak pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Saldo pada awal tahun sebelum pajak penghasilan tangguhan	(20.384)	(40.295)
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	(7.691)	19.910
Total - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(28.075)	(20.385)
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 31c)	6.177	4.485
Saldo pada akhir tahun - bersih	(21.898)	(15.900)

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah nosional dan tingkat suku bunga dari kontrak *cross currency interest rate swap* adalah sebagai berikut:

	Mata uang/ Currency	Jumlah nosional (dalam mata uang asal)/ Notional amounts (in original currency)		Tingkat suku bunga setahun (%)/ Interest rate per annum (%)	
		2025	2024	2025	2024
Kontrak cross currency interest rate swap					
Yang akan diterima	USD	53.460.872	102.694.960	3 bulan/month SOFR compound + 1,65%	3 bulan/month SOFR compound + 1,65%
				3 bulan/month Term SOFR + 1,50%	3 bulan/month Term SOFR + 1,50%
				1M term SOFR +1,11%	1M BTPN COF +1,00%
				1M term SOFR +0,99%	1M term SOFR +1,11%
				3M term SOFR +1,15%	1M term SOFR +0,99%
				3M term SOFR +1,33%	3M term SOFR +1,15%
				3 bulan/month DTIBOR + 0,85%	3 bulan/month DTIBOR + 0,85%
Yang akan dibayar	JPY	5.642.000.000	10.670.000.000	7,65 - 8,38	7,65 - 8,38
	IDR	1.444.271	2.739.097		

Tanggal jatuh tempo dari kontrak derivatif adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kontrak <i>cross-currency interest rate swap</i>	7 November/November 2025 – 25 September/September 2028	25 April/April 2025 – 25 September/September 2028	<i>Cross-currency interest rate swap contracts</i>

11. DERIVATIVE INSTRUMENTS (Continued)

The movement of the cumulative losses on derivative instruments for cash flow hedges which is an effective portion of the cumulative net change in the fair value of cash flows hedging instruments related to hedge transactions that have not yet affected profit or loss was as follows:

	31 Desember/December
	2025
Balance at the beginning of year before deferred income tax	(20.384)
Net amount reclassified to profit or loss	(7.691)
Total - before deferred income tax	(28.075)
Deferred income tax (Note 31c)	6.177
Balance at the end of year - net	(21.898)

Refer to Note 35 for details of balances and transactions with related parties.

As of 31 December 2025 and 2024, the notional amount of cross currency interest rate swap contracts was as follows:

Tingkat suku bunga setahun (%)/ Interest rate per annum (%)		
2025	2024	
Cross currency interest rate swap contracts		
3 bulan/month	3 bulan/month	To be received
SOFR compound + 1,65%	SOFR compound + 1,65%	
3 bulan/month Term SOFR + 1,50%	3 bulan/month Term SOFR + 1,50%	
1M term SOFR +1.11%	1M BTPN COF +1,00%	
1M term SOFR +0.99%	1M term SOFR +1.11%	
3M term SOFR +1.15%	1M term SOFR +0.99%	
3M term SOFR +1.33%	3M term SOFR +1.15%	
	3M term SOFR +1.33%	
3 bulan/month DTIBOR + 0,85%	3 bulan/month DTIBOR + 0,85%	
7.65 - 8.38	7.65 - 8.38	To be paid

The maturity dates of derivative contracts were as follows:

	2025	2024	
Kontrak <i>cross-currency interest rate swap</i>	7 November/November 2025 – 25 September/September 2028	25 April/April 2025 – 25 September/September 2028	<i>Cross-currency interest rate swap contracts</i>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

11. INSTRUMEN DERIVATIF (Lanjutan)

a. Kontrak cross-currency interest rate swap (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki instrumen untuk melindungi eksposur terhadap perubahan tingkat suku bunga dan mata uang asing.

Tahun berakhir 31 Desember 2025/Year ended 31 December 2025					
Jatuh tempo/Maturity					
<1bulan/ month	1 – 3 bulan/ months	3 – 12 bulan/ Months	1 – 3 tahun/years	> 3 tahun/years	
Kontrak cross currency interest swap					
- Nilai nosional dalam USD	2.107.075	7.615.549	26.299.840	17.438.408	-
- Nilai nosional dalam JPY	200.000.000	1.057.000.000	3.446.000.000	939.000.000	-
- Nilai tukar rata - rata USD	15,432	15,482	15,554	15,622	-
- Nilai tukar rata - rata JPY	106,37	109,98	109,53	109,23	-
- Rata - rata suku bunga tetap USD	7,57%	7,68%	7,70%	7,67%	-
- Rata - rata suku bunga tetap JPY	8,02%	7,90%	7,94%	7,81%	-
Tahun berakhir 31 Desember 2024/Year ended 31 December 2024					
Jatuh tempo/Maturity					
<1bulan/ month	1 – 3 bulan/ months	3 – 12 bulan/ Months	1 – 3 tahun/years	> 3 tahun/years	
Kontrak cross currency interest swap					
- Nilai nosional dalam USD	2.494.867	10.356.789	36.817.609	49.228.062	3.797.633
- Nilai nosional dalam JPY	200.000.000	1.057.000.000	3.771.000.000	5.642.000.000	-
- Nilai tukar rata - rata USD	15,106	14,992	15,112	15,550	15,549
- Nilai tukar rata - rata JPY	106,37	109,98	109,25	109,42	-
- Rata - rata suku bunga tetap USD	7,42%	7,35%	7,40%	7,69%	7,62%
- Rata - rata suku bunga tetap JPY	8,02%	7,90%	7,92%	7,92%	-

Cross currency interest swap contracts
- Notional amount in USD
- Notional amount in JPY
- Average USD exchange rate
- Average JPY exchange rate
- Average USD fixed interest rate
- Average JPY fixed interest rate

Cross currency interest swap contracts
- Notional amount in USD
- Notional amount in JPY
- Average USD exchange rate
- Average JPY exchange rate
- Average USD fixed interest rate
- Average JPY fixed interest rate

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 2025	
Harga perolehan:					
Tanah	68	-	-	68	Acquisition cost:
Bangunan	1.019	-	-	1.019	Land
Renovasi gedung	43.952	128	-	44.080	Buildings
Perabot kantor	8.801	6	(300)	8.507	Leasehold improvements
Peralatan kantor	82.344	2.299	(2.175)	82.468	Office furniture
Kendaraan	2.884	-	(1.286)	1.598	Office equipment
Aset hak guna	118.612	3.775	-	122.387	Vehicle
	257.680	6.208	(3.761)	260.127	Right-of-use assets
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	(1.019)	-	-	(1.019)	Accumulated depreciation:
Renovasi gedung	(38.920)	(1.697)	-	(40.617)	Buildings
Perabot kantor	(8.407)	(166)	299	(8.274)	Leasehold improvements
Peralatan kantor	(74.390)	(3.087)	2.143	(75.334)	Office furniture
Kendaraan	(2.840)	(39)	1.279	(1.600)	Office equipment
Aset hak guna	(79.470)	(14.453)	-	(93.923)	Vehicle
	(205.046)	(19.442)	3.721	(220.767)	Right-of-use assets
Nilai buku bersih	52.634			39.360	Net book value
31 Desember/ December 2023					
Penambahan/ Additions					
Pengurangan/ Deductions					
31 Desember/ December 2024					
Harga perolehan:					
Tanah	68	-	-	68	Acquisition cost:
Bangunan	1.019	-	-	1.019	Land
Renovasi gedung	41.649	2.303	-	43.952	Buildings
Perabot kantor	8.758	70	(27)	8.801	Leasehold improvements
Peralatan kantor	76.672	6.712	(1.040)	82.344	Office furniture
Kendaraan	3.774	-	(890)	2.884	Office equipment
Aset hak guna	106.278	12.334	-	118.612	Vehicle
	238.218	21.419	(1.957)	257.680	Right-of-use assets
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	(1.019)	-	-	(1.019)	Accumulated depreciation:
Renovasi gedung	(36.251)	(2.669)	-	(38.920)	Buildings
Perabot kantor	(8.255)	(179)	27	(8.407)	Leasehold improvements
Peralatan kantor	(72.483)	(2.944)	1.037	(74.390)	Office furniture
Kendaraan	(3.441)	(252)	853	(2.840)	Office equipment
Aset hak guna	(64.581)	(14.889)	-	(79.470)	Vehicle
	(186.030)	(20.933)	1.917	(205.046)	Right-of-use assets
Nilai buku bersih	52.188			52.634	Net book value

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Seluruh aset tetap Perusahaan merupakan aset kepemilikan langsung.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.442 dan Rp 20.933 dibebankan pada beban umum dan administrasi (lihat Catatan 30).

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan menjual aset tetap dengan hasil penjualan masing-masing sebesar Rp 1.128 dan Rp 845. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan membukukan keuntungan bersih atas pelepasan aset tetap masing-masing sebesar Rp 1.088 dan Rp 805, yang diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 117.678 dan Rp 117.152 telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki aset tetap yang dijadikan jaminan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak mempunyai utang atas pembelian aset tetap, kecuali atas aset hak guna.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika yang merupakan pihak berelasi Perusahaan masing-masing sebesar Rp 68.789 dan Rp 59.916. Manajemen berpendapat bahwa pertanggungan sudah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

12. FIXED ASSETS (Continued)

All of the Company's fixed asset are direct ownership assets.

Depreciation expense for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 19,442 and Rp 20,933, respectively, was charged to general and administrative expenses (see Note 30).

During the years ended 31 December 2025 and 2024, the Company sold fixed assets with proceeds from sale of fixed assets amounting to Rp 1,128 and Rp 845, respectively. For the years ended 31 December 2025 and 2024, the Company recognized net gains on disposal of fixed assets amounting to Rp 1,088 and Rp 805, respectively, which were recognized in profit or loss.

As of 31 December 2025 and 2024, fixed assets with acquisition cost amounting to Rp 117,678 and Rp 117,152, respectively, have been fully depreciated and are still being used by the Company.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company did not have any fixed assets pledged as collateral.

Management was of the view that there was no indication of impairment in the value of fixed assets owned by the Company as of 31 December 2025 and 2024.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company did not have any payables from purchases of fixed assets, except for right-of-use assets.

As of 31 December 2025 and 2024, all of the Company's fixed assets were insured with PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika which is the Company's related party amounting to Rp 68,789 and Rp 59,916, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the insured fixed assets.

13. ASET TAKBERWUJUD

	31 Desember/ December 2023	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 2024
Harga perolehan: Perangkat lunak	86.573	2.189	88.762
Akumulasi amortisasi: Perangkat lunak	(74.729)	(9.329)	(84.058)
Nilai buku bersih	<u>11.844</u>		<u>4.704</u>

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.818 dan Rp 9.329 dibebankan pada beban umum dan administrasi (lihat Catatan 30).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak mempunyai utang atas pembelian aset takberwujud.

13. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December 2023	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 2025	
				Acquisition cost: Software
				Accumulated amortization: Software
				Net book value

Amortization expense for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 2,818 and Rp 9,329, respectively, was charged to general and administrative expense (see Note 30).

As of 31 December 2025 and 2024, the Company did not have any payables from purchases of intangible assets.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Simpanan jaminan	3.119	3.230	Security deposits
Provisi pinjaman	2.356	3.172	Borrowing provision
Uang muka	472	908	Advance payments
Lain-lain	-	275	Others
	<u>5.947</u>	<u>7.585</u>	

15. UTANG USAHA

15. ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Dealer	4.068	11.532	Dealers
Asuransi	851	2.274	Insurance
Fidusia	80	3.696	Fiducia
Lain-lain	-	134	Others
	<u>4.999</u>	<u>17.636</u>	
Pihak berelasi			Related party
Asuransi	8	10	Insurance
	<u>5.007</u>	<u>17.646</u>	

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo utang usaha dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of balances of accounts payable with related parties.

16. LIABILITAS LAIN-LAIN

16. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Titipan konsumen	45.896	33.907	Customer deposits
Liabilitas sewa	13.405	17.749	Lease liabilities
	<u>59.301</u>	<u>51.656</u>	

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Biaya promosi	22.145	22.588	Promotions
Kompensasi karyawan	4.274	3.817	Employee compensation
Konsultan	2.182	587	Consultant
Telepon, listrik, kirim dan cetakan	1.119	2.054	Telephone, electricity, postage and printing
Sewa perlengkapan kantor dan mobil	1.049	3.416	Rent office supplies and car
Internet	748	180	Internet
Outsourcing	640	912	Outsourcing
Lain-lain	622	886	Others
	<u>32.779</u>	<u>34.440</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Kompensasi karyawan	1.073	2.076	Employee compensation
Biaya garansi	509	-	Guarantee fee
	<u>1.582</u>	<u>2.076</u>	
	<u>34.361</u>	<u>36.516</u>	

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo beban yang masih harus dibayar dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of balances of accrued expenses with related parties.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

18. BORROWINGS

	31 Desember/December		
	2025	2024	
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk (a)	403.046	80.583	PT Bank Central Asia Tbk (a)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (b)	174.263	-	PT Bank JTrust Indonesia Tbk (b)
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk (c)	119.928	276.214	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (c)
PT Bank DKI (d)	62.527	112.369	PT Bank DKI (d)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (e)	54.127	104.091	PT Bank CIMB Niaga Tbk (e)
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (f)	-	200.000	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (f)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (g)	-	67.854	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (g)
PT Bank Mizuho Indonesia (h)	-	36.495	PT Bank Mizuho Indonesia (h)
PT Bank KEB Hana Indonesia (i)	-	23.415	PT Bank KEB Hana Indonesia (i)
PT Bank Shinhan Indonesia (j)	-	4.203	PT Bank Shinhan Indonesia (j)
PT Bank Permata Tbk (k)	-	4.186	PT Bank Permata Tbk (k)
	<u>813.891</u>	<u>909.410</u>	
			
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Pinjaman sindikasi yang dikoordinasi oleh MUFG Bank Ltd. dan Mizuho Bank Ltd. (l)	470.554	856.505	Syndicated loan coordinated by MUFG Bank, Ltd. and Mizuho Bank Ltd. (l)
PT Bank Mizuho Indonesia (h)	196.891	274.832	PT Bank Mizuho Indonesia (h)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (g)	92.521	156.527	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (g)
PT Bank Permata Tbk (k)	91.566	135.892	PT Bank Permata Tbk (k)
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (m)	37.820	88.801	PT Bank SMBC Indonesia Tbk (m)
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (f)	7.355	148.830	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (f)
	<u>896.707</u>	<u>1.661.387</u>	
			
Yen Jepang			Japanese Yen
Pinjaman sindikasi yang dikoordinasi oleh MUFG Bank, Ltd. dan Mizuho Bank Ltd. (l)	602.864	1.100.694	Syndicated loan coordinated by MUFG Bank Ltd. and Mizuho Bank Ltd. (l)
	<u>602.864</u>	<u>1.100.694</u>	
			
Jumlah	<u>2.313.462</u>	<u>3.671.491</u>	Total

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

18. BORROWINGS (Continued)

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding borrowings were as follows:

No.	Pemberi Pinjaman / Lender	Jumlah fasilitas / Facility amount				Jaminan / Collateral	Jatuh Tempo / Maturity	Pembayaran untuk Fasilitas- Fasilitas Jangka Panjang/ Repayment for Long Term Facilities*
		31 Desember / December						
		2025		2024				
a	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	520.000	IDR	1.020.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	27 Maret/March 2028 – 24 Juni/June 2028	2025: IDR 199.118 2024: IDR 179.696
b	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	IDR	200.000	IDR	200.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	30 Juni/June 2029	2025: IDR 31.834 2024: IDR 25.490
c	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IDR	500.000	IDR	500.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7)/Financing receivables (see Note 7)	29 Agustus 2026/August 2026 - 16 Oktober/October 2026	2025: IDR 173.264 2024: IDR 186.058
d	PT Bank DKI	IDR	150.000	IDR	150.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7)/Financing receivables (see Note 7)	19 Maret/March 2027	2025: IDR 57.037 2024: IDR 45.395
e	PT Bank CIMB Niaga Tbk	IDR	100.000	IDR	100.000	Tidak dijamin oleh apapun/ Unsecured	21 November/November 2026	2025: IDR 81.719 2024: IDR 86.435
		IDR	100.000	IDR	300.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	24 Juni/June 2027 - 20 September/September 2027	
f	MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	IDR	200.000**	IDR	700.000**	Jaminan perusahaan dari JACCS Co., Ltd., Jepang / Corporate guarantee from JACCS Co., Ltd., Japan	7 Desember/December 2026	2025: IDR 330.783 2024: IDR 189.475
g	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	IDR	500.000**	IDR	500.000**	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	19 Februari/February 2027 – 24 Juni/June 2027	2025: IDR 145.423 2024: IDR 232.335
		IDR	250.000**	IDR	250.000**	Tidak dijamin oleh apapun/ Unsecured	22 Maret/March 2026	
h	PT Bank Mizuho Indonesia	IDR	400.000**	IDR	400.000**	Jaminan perusahaan dari JACCS Co., Ltd., Jepang / Corporate guarantee from JACCS Co., Ltd., Japan	14 Agustus/August 2028	2025: IDR 137.417 2024: IDR 249.780
i	PT Bank KEB Hana Indonesia	IDR	-	IDR	140.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7)/ Financing receivables (see Note 7)	9 Juni/June 2025	2025: IDR 23.815 2024: IDR 50.127
j	PT Bank Shinhan Indonesia	IDR	-	IDR	50.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	17 Februari/February 2025	2025: IDR 4.246 2024: IDR 13.369

* Fasilitas USD/JPY dalam nilai penuh/*USD/JPY facility in full amount*

** Fasilitas ini diberikan dalam bentuk mata uang USD/IDR/*This facility is provided in USD/IDR*

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

		Jumlah fasilitas/Facility amount						Pembayaran untuk Fasilitas- Fasilitas Jangka Panjang/ Repayment for Long Term
		31 Desember/ December						Facilities*
No.	Pemberi Pinjaman / Lender	2025		2024		Jaminan /Collateral	Jatuh Tempo /Maturity	
k	PT Bank Permata Tbk	IDR	200.000**	IDR	550.000**	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)	26 September/September 2027 – 12 Oktober/October 2027	2025: IDR 58.544 2024: IDR 192.548
		IDR	105.000	IDR	105.000	Tidak dijamin oleh apapun/ Unsecured	31 Maret/March 2026	
l	Pinjaman sindikasi yang dikoordinasi oleh/Syndicated loan coordinated by MUFG Bank, Ltd. dan/and Mizuho Bank Ltd.	USD	100.000.000	USD	100.000.000	Jaminan perusahaan dari JACCS Co., Ltd., Jepang / Corporate guarantee from JACCS Co., Ltd., Japan	21 Juli/July 2026 – 28 Juni /June 2027	2025: IDR 1.058.390 2024: IDR 1.134.848
		JPY	20.112.000.000	JPY	20.112.000.000	Piutang pembiayaan (lihat Catatan 7) dan Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 8)/ Financing receivables (see Note 7) and Finance lease receivables (see Note 8)		
m	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	IDR	250.000**	IDR	250.000**	Jaminan perusahaan dari JACCS Co., Ltd., Jepang / Corporate guarantee from JACCS Co., Ltd., Japan	25 September/September 2028	2025: IDR 51.333 2024: IDR 54.972

* Fasilitas USD/JPY dalam nilai penuh/USD/JPY facility in full amount

** Fasilitas ini diberikan dalam bentuk mata uang USD/IDR/This facility is provided in USD/IDR

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai pinjaman sindikasi sebagai berikut:

18. BORROWINGS (Continued)

As of 31 December 2025 and 2024, the Company had syndicated loans as follows:

	Jumlah terutang/Outstanding amount				Jumlah fasilitas/Facility amount*			
	31 Desember/December				31 Desember/December			
	2025		2024		2025		2024	
Pinjaman sindikasi yang dikoordinasi oleh/Syndicated loan coordinated by MUFG Bank, Ltd. and Mizuho Bank Ltd. (I)								
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura/ Singapore Branch	IDR	94.050	IDR	171.668	USD	20.000.000	USD	20.000.000
The Gunma Bank, Ltd	IDR	70.537	IDR	128.751	USD	15.000.000	USD	15.000.000
Metropolitan Bank & Trust Company, Cabang Tokyo/Tokyo Branch	IDR	70.537	IDR	128.751	USD	15.000.000	USD	15.000.000
Shinsei Bank, Limited	IDR	56.430	IDR	103.001	USD	12.000.000	USD	12.000.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	IDR	54.078	IDR	98.709	USD	11.500.000	USD	11.500.000
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura/ Singapore Branch	IDR	44.674	IDR	81.542	USD	9.500.000	USD	9.500.000
First Commercial Bank, Ltd. Cabang Singapura/Singapore Branch	IDR	32.918	IDR	60.084	USD	7.000.000	USD	7.000.000
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura/Singapore Branch	IDR	23.513	IDR	42.917	USD	5.000.000	USD	5.000.000
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura/ Singapore Branch	IDR	23.513	IDR	42.917	USD	5.000.000	USD	5.000.000
Jumlah biaya up-front fees yang ditangguhkan/Total deferred up-front fees	IDR	(1.993)	IDR	(6.415)		-		-
Jumlah bunga akrual/Total accrued interest	IDR	2.297	IDR	4.580		-		-
Jumlah/Total	IDR	470.554	IDR	856.505	USD	100.000.000	USD	100.000.000
Pinjaman sindikasi yang dikoordinasi oleh/Syndicated loan coordinated by MUFG Bank, Ltd, Mizuho Bank Ltd. (I)								
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	IDR	124.030	IDR	227.179	JPY	4.140.200.000	JPY	4.140.200.000
The Norinchukin Bank, Cabang Singapura/Singapore Branch	IDR	124.030	IDR	227.179	JPY	4.140.200.000	JPY	4.140.200.000
PT Bank Mizuho Indonesia	IDR	80.334	IDR	147.144	JPY	2.681.600.000	JPY	2.681.600.000
Aozora Asia Pacific Finance Limited	IDR	50.928	IDR	93.282	JPY	1.700.000.000	JPY	1.700.000.000
NTT TC Leasing Co., Ltd	IDR	44.936	IDR	82.307	JPY	1.500.000.000	JPY	1.500.000.000
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	IDR	35.949	IDR	65.846	JPY	1.200.000.000	JPY	1.200.000.000
The Shizuoka Bank Limited Cabang Singapura/Singapore Branch	IDR	35.949	IDR	65.846	JPY	1.200.000.000	JPY	1.200.000.000
Taishin International Bank Co., Ltd., Cabang Tokyo/Tokyo Branch	IDR	35.949	IDR	65.846	JPY	1.200.000.000	JPY	1.200.000.000
Fuyo General Lease (Asia) Pte. Ltd.	IDR	29.957	IDR	54.872	JPY	1.000.000.000	JPY	1.000.000.000
The Hyakugo Bank, Ltd.	IDR	25.464	IDR	46.641	JPY	850.000.000	JPY	850.000.000
The Nanto Bank, Ltd.	IDR	14.978	IDR	27.436	JPY	500.000.000	JPY	500.000.000
Jumlah biaya up-front fees yang ditangguhkan/Total deferred up-front fees	IDR	(2.977)	IDR	(9.582)		-		-
Jumlah bunga akrual/Total accrued interest	IDR	3.337	IDR	6.698		-		-
Jumlah/Total	IDR	602.864	IDR	1.100.694	JPY	20.112.000.000	JPY	20.112.000.000

* Fasilitas USD/JPY dalam nilai penuh/USD/JPY facility in full amount

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pinjaman-pinjaman yang diterima ini dijamin dengan piutang pembiayaan dan sewa pembiayaan (Catatan 7 dan 8).

Pada umumnya, fasilitas pinjaman dari semua bank tersebut mensyaratkan Perusahaan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan susunan direksi dan komisaris, dan perolehan pinjaman baru dari bank lain, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari, serta mensyaratkan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal perubahan modal dan pemegang saham, perubahan bisnis utama dan investasi. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi antara lain, batasan rasio keuangan seperti *debt equity ratio*, *non performing financing ratio*, kepemilikan JACCS, ekuitas pemegang saham dan rasio likuiditas. Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat pelanggaran atas pembatasan yaitu menghasilkan laba sebelum pajak untuk setiap tahun periode pelaporan keuangan berakhir. Perusahaan telah menerima *waiver* efektif pada 27 Maret 2025 yang mencakup periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025. Selain itu, Perusahaan telah memperoleh *waiver* dari para kreditur atas pelanggaran pembatasan *non-performing financing ratio*, yang mencakup periode Desember 2025 dan Februari 2026. Beberapa kreditur menyetujui dan mengakui pelanggaran hingga periode September 2025, dengan maksud untuk meninjau kembali *waiver* atas periode Desember 2025 setelah laporan keuangan audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 selesai.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Tingkat suku bunga	6,75% - 8,50%	4,30% - 9,75%

Selama tahun berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, amortisasi biaya *up-front fees* atas semua fasilitas pinjaman yang diterima yang dicatat sebagai beban bunga masing-masing sebesar Rp 18.685 dan Rp 27.115, sedangkan bagian yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp 8.217 dan Rp 18.944, dikurangkan dari jumlah nilai pinjaman yang diterima.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

	31 Desember/December
	2024
Nilai nominal	300.000
Beban emisi yang belum diamortisasi	(110)
Beban bunga yang masih harus dibayar	2.363
Jumlah-neto	302.253

Perusahaan menerbitkan surat utang jangka menengah ("MTN") dengan rincian sebagai berikut:

18. BORROWINGS (Continued)

These borrowings are secured by financing receivables and finance lease receivables (Notes 7 and 8).

In general, the loan facilities from all banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of directors and commissioners, and obtaining new loan facilities from other banks, except in business activities, required the Company to provide a written approval in respect of changes of capital and shareholders and changes of main business and investment. Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with certain financial covenants and other reporting obligations.

The Company is required by the lenders to comply with, among others, financial ratio covenants such as debt equity ratio, non performing financing ratio, JACCS' ownership, shareholder's equity and liquidity ratio. As of 31 December 2025, the Company was in breach of the covenant, which is positive earnings before tax for each financial year end period. The Company obtained waivers from its lenders, effective 27 March 2025, covering the periods ended 31 December 2024 and 31 December 2025. In addition, waivers were obtained for breaches of the non-performing financing ratio covenant, covering the periods December 2025 and February 2026. Certain lenders approved and acknowledged the breach through September 2025, with the intention to reassess the waiver for December 2025 upon completion of the audited financial statements for the year ended 31 December 2025.

The contractual interest rates per annum of borrowings as of 31 December 2025 and 2024 ranged from:

During the year ended 31 December 2025 and 2024, the amortization of up-front fees of all borrowings facilities recognized as interest expense amounting to Rp 18,685 and Rp 27,115, respectively; while the unamortized portion amounted to Rp 8,217 and Rp 18,944, respectively, was deducted from the balance of borrowings.

Refer to Note 35 for details of balances and transactions with related parties.

19. MEDIUM TERM NOTES

	31 Desember/December	
	2024	
Nilai nominal	300.000	Nominal value
Beban emisi yang belum diamortisasi	(110)	Unamortized issuance costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	2.363	Accrued interest
Jumlah-neto	302.253	Total-net

The Company issued medium term notes ("MTN") with the following details:

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH
(Lanjutan)**

19. MEDIUM TERM NOTES (Continued)

Nama efek/ <i>Securities name</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Tanggal penerbitan/ <i>Issuance date</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>
JACCS MPM Finance Indonesia III Tahap/Phase I Tahun/Year 2022	Rp 150.000	28 September/September 2022	28 September/September 2025	6,52%
JACCS MPM Finance Indonesia III Tahap/Phase II Tahun/Year 2022	Rp 150.000	11 Oktober/October 2022	11 Oktober/October 2025	6,76%

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

The proceeds from the issuance of MTN were used to develop the business and working capital.

Berdasarkan perjanjian penerbitan MTN, Perusahaan diharuskan untuk menaati pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

Under the MTN issuance agreement, the Company is required to comply with the covenants, which include the maintenance of certain financial ratios as follows:

- pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 rasio likuiditas lebih dari 1;
- Rasio *gearing* sebesar sama dengan atau kurang dari 8,0.

- as of 31 December 2025 and 31 December 2024 liquidity ratio of more than 1;*
- Gearing ratio were equal to or less than 8.0.*

Selain itu, selama pokok MTN belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, sesuai dengan penjelasan detail didalam perjanjian, untuk melakukan penggabungan usaha, mengubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, mengajukan permohonan pailit, serta mengadakan segala bentuk kerjasama yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perusahaan diatur oleh pihak lain.

Moreover, to the extent that the MTN's principal are still outstanding, the Company is not permitted to, among others, as described in detail in the agreement, conduct a merger, change its main business, decrease the amount of its authorized, issued, and paid up share capital, file for bankruptcy, and enter into any kind of agreements that cause the Company's operations to be controlled by other party.

Pada 31 Desember 2024, MTN tidak dijaminan oleh apapun.

As at 31 December 2024, MTN were unsecured.

Pada tanggal 18 Maret 2025, peringkat MTN Perusahaan yang dibuat oleh PT Fitch Rating Indonesia adalah AA(idn).

On 18 March 2025, the credit ratings given by PT Fitch Rating Indonesia are AA(idn).

Pada tahun 2025, Perusahaan telah melunasi seluruh MTN pada tanggal jatuh tempo.

In 2025, the Company has fully paid MTN at the maturity date.

20. UTANG OBLIGASI

20. BONDS PAYABLE

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo utang obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025 and 2024, the balance of bonds payable issued by the Company was as follows:

	31 Desember/ <i>December 2025</i>	31 Desember/ <i>December 2024</i>	
Obligasi berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022	-	500.000	<i>Shelf registration bonds I JACCS MPM Finance Indonesia Phase I Year 2022</i>
Obligasi berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	350.000	500.000	<i>Shelf registration bonds I JACCS MPM Finance Indonesia Phase III Year 2024</i>
Obligasi berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023	230.000	230.000	<i>Shelf registration bonds I JACCS MPM Finance Indonesia Phase II Year 2023</i>
Obligasi MPM Finance I Tahun 2019	-	-	<i>MPM Finance Bonds I Year 2019</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.285)	(3.713)	<i>Unamortized bonds issuance costs</i>
Beban kupon yang masih harus dibayar	7.568	14.662	<i>Accrued coupon</i>
Jumlah – bersih	<u>586.283</u>	<u>1.240.949</u>	<i>Total - net</i>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

20. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

Beban amortisasi yang dibebankan ke beban keuangan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.428 dan Rp 3.524.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan belum jatuh tempo adalah sebagai berikut:

20. BONDS PAYABLE (Continued)

Amortization costs charged to finance charges in profit or loss for the year ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 2,428 and Rp 3,524, respectively.

Refer to Note 35 for details of balances and transactions with related parties.

As of 31 December 2025, the Company's bonds issued and are not yet matured were as follows:

Nama obligasi/ <i>Bonds Name</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Tingkat suku bunga tetap setahun/ <i>Fixed interest rates per annum</i>	Skedul pembayaran bunga/ <i>Interest payment schedule</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>
Berkelanjutan/ <i>Shelf registration</i> I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap/ <i>Phase II Tahun/Year 2023 Seri/Series B</i>	230.000	7,00%	Triwulan/ <i>Quarterly</i>	11 Agustus/ <i>August 2026</i>
Berkelanjutan/ <i>Shelf registration</i> I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap/ <i>Phase III Tahun/Year 2024 Seri/Series B</i>	350.000	6,70%	Triwulan/ <i>Quarterly</i>	19 April/ <i>April 2027</i>

Obligasi tersebut di atas tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

The above bonds are listed at the Indonesian Stock Exchange with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the trustee.

Kupon bunga obligasi akan dibayarkan pada tanggal pembayaran bunga obligasi, yang jatuh tempo pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

The interest coupons on the bonds are payable in accordance with the interest payment due dates as follows:

Kupon obligasi/ <i>Bonds coupon</i>	Tahun/ <i>Year 2022</i> Obligasi Berkelanjutan/ <i>Shelf Registration Bond I Tahap/Phase I</i> Seri/ <i>Series B</i>	Tahun/ <i>Year 2023</i> Obligasi Berkelanjutan/ <i>Shelf Registration Bond I</i> Tahap/ <i>Phase II Seri/Series</i> B	Tahun/ <i>Year 2024</i> Obligasi Berkelanjutan/ <i>Shelf Registration Bond I</i> Tahap/ <i>Phase III</i> Seri/ <i>Series A</i>	Tahun/ <i>Year 2024</i> Obligasi Berkelanjutan/ <i>Shelf Registration Bond I</i> Tahap/ <i>Phase III Seri/Series</i> B
1	10-Nov-2022	11-Aug-2023	19-Apr-2024	19-Apr-2024
2	10-Feb-2023	11-Nov-2023	19-Jul-2024	19-Jul-2024
3	10-May-2023	11-Feb-2024	19-Oct-2024	19-Oct-2024
4	10-Aug-2023	11-May-2024	19-Jan-2025	19-Jan-2025
5	10-Nov-2023	11-Aug-2024	29-Apr-2025	19-Apr-2025
6	10-Feb-2024	11-Nov-2024		19-Jul-2025
7	10-May-2024	11-Feb-2025		19-Oct-2025
8	10-Aug-2024	11-May-2025		19-Jan-2026
9	10-Nov-2024	11-Aug-2025		19-Apr-2026
10	10-Feb-2025	11-Nov-2025		19-Jul-2026
11	10-May-2025	11-Feb-2026		19-Oct-2026
12	10-Aug-2025	11-May-2026		19-Jan-2027
13		11-Aug-2026		19-Apr-2027

Pada tanggal 4 November 2025, peringkat obligasi Perusahaan yang dibuat oleh PT Fitch Rating Indonesia adalah AA(idn).

On 4 November 2025, the credit ratings given by PT Fitch Rating Indonesia are AA(idn).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

20. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

Perusahaan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan obligasi ini. Obligasi ini dijamin dengan piutang pembiayaan dan sewa pembiayaan dengan nilai jaminan secara agregat tidak boleh kurang dari 100% dari nilai pokok obligasi yang terutang untuk obligasi yang diterbitkan pada tahun 2022 dan 2023 dan 75% dari nilai pokok obligasi yang terutang untuk obligasi yang diterbitkan tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Pembebanan Jaminan Fidusia antara Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia. sebagai wali amanat yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., dan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Perusahaan dapat membeli kembali (*buy back*) atau menjual obligasi baik seluruhnya maupun sebagian di pasar terbuka. Pembelian kembali dapat dilakukan setiap saat setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa pembatasan termasuk pembatasan keuangan (rasio utang terhadap modal) yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yaitu antara lain bahwa sebelum dilunasinya obligasi, Perusahaan tanpa ijin tertulis dari wali amanat, tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar total aset, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar total aset adalah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aset per laporan keuangan Perusahaan yang terakhir;
2. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan, kecuali:
 - (i) merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perusahaan, atau;
 - (ii) akuisisi yang didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perusahaan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, atau;
3. mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan;
4. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mematuhi pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian utang obligasi dan memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

20. BONDS PAYABLE (Continued)

The Company does not put up a sinking fund for the repayment of Bonds. Instead, these Bonds are secured by the designated financing receivable and finance lease receivables that in aggregate amount should not be less than 100% of the outstanding principal for the bonds issued in 2022 and 2023 and 75% for the bonds issued in 2024 as documented in the Deed of Fiduciary Collateral between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., as the trustee which was prepared by Aulia Taufani, S.H., dan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Company can buy back or sell part or all of the Bonds issued in the open market. Buy back can be made at any time after 1 (one) year from the allotment date as mentioned in the prospectus.

The trustee agreement provides several restrictive covenants as well as financial covenant (debt to equity ratio) that should be complied by the Company, that among others, prior to the repayment of the bonds payable, without the written consent from the trustee, the Company is not allowed to:

1. *conduct sale, transfer or in any way release in one or several related transactions, all or most of the total assets, except for the Company's day-to-day business activities; What is meant by the majority of total assets is more than 40% (forty percent) of the total assets per Company's most recent financial statements;*
2. *conduct all forms of merger or acquisition or consolidation, except:*
 - (i) mergers or acquisitions carried out in connection with the Company's business activities, or;*
 - (ii) acquisitions that are funded by additional capital made by the Company's shareholders, and have no negative effect on Company's ability to pay all of its obligations to Bondholders, or;*
3. *change the Company's main business activities;*
4. *reduce the authorized capital and paid up capital of the Company.*

As of 31 December 2025 and 2024, the Company was in compliance with important covenants in relation to the bonds payable agreements and complied with all the requirements stated in the trustee agreement.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

21. PINJAMAN SUBORDINASI

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
Pinjaman subordinasi	13.000	13.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	98	98
Jumlah – bersih	13.098	13.098

*Subordinated loan
Accrued interest
Total - net*

Pada tanggal 7 Mei 2021, Perusahaan dan JACCS Co., Ltd., Jepang (pemegang saham) menandatangani perjanjian utang subordinasi sebesar Rp 13.000 dibawah jumlah plafon pinjaman pemegang saham sebesar JPY 40.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Fasilitas tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan limit pinjaman disesuaikan menjadi JPY 30.000.000.000.

Pinjaman ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2026. Pinjaman ini menggunakan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,65% per tahun.

21. SUBORDINATED LOAN

On 7 May 2021, the Company and JACCS Co., Ltd., Japan (the shareholder) signed a subordinated debt agreement in the amount of Rp 13,000 under shareholder loan facility with total limit of JPY 40,000,000,000 for working capital purposes. The facility has been extended until 31 December 2026 and the loan limit has been adjusted to JPY 30,000,000,000.

This loan has a term of 5 years and will mature on 20 May 2026. This loan bears a fixed interest rate of 6.65% per annum.

22. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.224.475 (1.224.475 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham), dimana seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang saham/Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Paid-up capital
JACCS Co., Ltd., Jepang/Japan	734.685	60,00%	734.685
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	489.790	40,00%	489.790
Jumlah/Total	1.224.475	100,00%	1.224.475

Tidak ada kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

22. SHARE CAPITAL

As of 31 December 2025 and 2024, the Company's authorized share capital amounted to Rp 1,224,475 (1,224,475 shares at par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share), all of which has been issued and fully paid-up by the following shareholders:

There is no ownership of shares by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

23. CADANGAN UMUM

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sejumlah Rp 150.057 (2024: Rp 150.057) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan umum minimum tersebut.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2025, para pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan pembentukan cadangan umum dari saldo rugi tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp 40 dari saldo laba tahun 2023.

23. GENERAL RESERVE

As of 31 December 2025, the Company had a general reserve amounting to Rp 150,057 (2024: Rp 150,057), in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 regarding Limited Liability Company, which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20% of the Company's issued and paid up share capital. There is no definite period of time over which this amount should be provided.

Based on Circular Resolution of the Company's Shareholders in lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated 19 June 2025, the shareholders decided not to make the appropriation of 2024 retained earnings.

Based on Circular Resolution of the Company's Shareholders in lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated 27 June 2024, the shareholders approved the appropriation of 2023 retained earnings amounting of Rp 40.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Merupakan hasil selisih atas penukaran saham antara Perusahaan dan PT Sasana Artha Finance sebesar Rp 49.278 dan kelebihan modal disetor di atas nilai nominal saham yang diterbitkan sebesar Rp 194.411 dari tahun 2000 sampai 2014.

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Represents the difference in the exchange of shares between the Company's and PT Sasana Artha Finance amounted to Rp 49,278 and the excess of par value of the shares issued amounted to Rp 194,411 from 2000 to 2014.

25. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

25. FINANCING INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Pembiayaan			Financing
Pihak ketiga	727.591	934.413	Third Parties
Jumlah	<u>727.591</u>	<u>934.413</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mencatat beban atas pelunasan dipercepat berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan debitur sebesar Rp 7.701 dan Rp 51.771. Nilai pelunasan dipercepat tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company recognized expenses over early termination based agreement between the Company and the debtors were amounting of Rp 7,701 and Rp 51,771, respectively. The amount of early termination prepayment is recorded as part of financing income.

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN

26. OTHER INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Administrasi	129.622	221.182	Administration
Penerimaan dari piutang yang telah dihapus			
bukukan	54.553	48.805	Recoveries from written-off receivables
Denda keterlambatan	32.600	35.520	Late charges
Pendapatan bunga	14.240	8.899	Interest income
Pendapatan admin dari piutang agen pembayaran			Administration from payment channel
	10.423	11.680	receivables
Asuransi – neto	7.634	15.751	Insurance – net
Pelunasan dipercepat	5.743	8.592	Early termination
Aktivitas promosi bersama	1.653	2.997	Joint promo
Keuntungan nilai tukar mata uang asing	298	1.196	Gain on foreign exchange
Lain-lain	4.350	9.644	Other
	<u>261.116</u>	<u>364.266</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Asuransi – neto	9.808	41.150	Insurance - net
	<u>270.924</u>	<u>405.416</u>	

Lihat Catatan 35 untuk rincian pendapatan lain – lain dari transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of other income from transactions with related parties.

27. BEBAN KEUANGAN

27. FINANCING CHARGES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Pinjaman yang diterima	255.695	365.707	Borrowings
Utang obligasi	69.863	89.590	Bonds payable
Surat utang jangka menengah	15.239	20.156	Medium term notes
Bunga atas liabilitas sewa	1.236	788	Interest on lease liabilities
Pinjaman subordinasi	877	879	Subordinated loan
Jumlah	<u>342.910</u>	<u>477.120</u>	Total

Beban keuangan termasuk amortisasi beban provisi yang dibayar dimuka sehubungan dengan pinjaman yang diterima, surat utang jangka menengah dan obligasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 18.686 dan Rp 27.115.

Financing charges included amortization of up-front fees related to the Company's borrowings, medium term notes and bonds payable for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 18,686 and Rp 27,115, respectively.

Lihat Catatan 35 untuk rincian beban keuangan dari transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of financing charges from transactions with related parties.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

28. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

28. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Piutang pembiayaan	552.472	665.111	Financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	76.190	56.834	Finance lease receivables
Kerugian atas modifikasi kontrak	65	6.952	Loss on contract modification
Piutang lain-lain	-	18	Other Receivable
	<u>628.727</u>	<u>728.915</u>	

29. GAJI DAN TUNJANGAN

29. SALARIES AND ALLOWANCES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	214.163	292.208	Salary and allowance
Imbalan pascakerja	7.833	10.998	Post-employment benefits
	<u>221.996</u>	<u>303.206</u>	

Lihat Catatan 35 untuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

Refer to Note 35 for salaries and benefits given to key management personnel.

30. UMUM DAN ADMINISTRASI

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Jasa profesional	51.029	73.569	Professional fees
Pemasaran dan jamuan	30.663	29.177	Marketing and entertainment
Penyusutan aset tetap	19.442	20.933	Depreciation of fixed assets
Perbaikan dan pemeliharaan	13.868	9.537	Repair and maintenance
Telepon, faksimili dan listrik	13.635	19.454	Telephone, fax and electricity
Sewa	12.622	17.004	Rental
Beban outsourcing	9.161	9.161	Outsourcing fees
Beban asuransi kesehatan	8.898	9.234	Health insurance fees
Biaya penyelesaian kontrak	8.689	12.400	Unit redemption expenses
Pelatihan	7.725	7.618	Training
Perjalanan dinas dan transportasi	3.697	4.600	Travelling and transportation
Amortisasi aset tak-berwujud	2.819	9.329	Amortization of intangible assets
Perlengkapan kantor	2.592	3.726	Office supplies
Beban iuran OJK	2.557	3.701	OJK levy fees
Beban fidusia	1.746	1.830	Fiducia fees
Lain-lain	10.949	19.114	Others
	<u>200.092</u>	<u>250.387</u>	

Lihat Catatan 35 untuk rincian beban umum dan administrasi dari transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of general and administrative expenses from transactions with related parties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

31. IMBALAN PASCAKERJA

Sejak tahun 1990, Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Manfaat tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia.

Pada tanggal 1 Desember 2016, Perusahaan telah menunjuk PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, pihak ketiga, dalam mengelola program dana pensiun Perusahaan untuk sebagian karyawan tetap yang telah memenuhi syarat. Luran pensiun yang ditanggung oleh Perusahaan adalah sebesar 8% dari penghasilan tetap karyawan.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan Peraturan Pemerintah No.35/2021 tentang ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, dalam laporannya masing - masing tertanggal 12 Maret 2026 dan 13 Januari 2025 dengan menggunakan metode projected-unit-credit.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat diskonto per tahun	6,25%	7,00%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan pokok per tahun	4,00%	5,00%	Annual basic salary growth rate

Pada tanggal 31 Desember 2025, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban imbalan pascakerja adalah 11.88 tahun (31 Desember 2024: 12.17 tahun).

Tingkat diskonto digunakan dalam penentuan nilai kini dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Pada umumnya, tingkat diskonto berhubungan dengan tingkat suku bunga dari obligasi negara berkualitas tinggi yang diperdagangkan di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi kenaikan penghasilan di masa yang akan datang memproyeksikan kewajiban imbalan kerja dari tanggal penilaian sampai dengan umur pensiun normal. Tingkat kenaikan penghasilan secara umum ditentukan dengan menggunakan penyesuaian inflasi pada tarif gaji, dan dengan mempertimbangkan masa kerja.

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Since 1990, the Company established a defined-benefits pension plan covering all of its qualified permanent employees. This benefits are payable following the employee's retirement, disability or death.

On 1 December 2016, the Company appointed PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, a third party, to manage its retirement plan for certain qualified permanent employees. Contributions are funded by the Company's contributions was 8% of the employees' salaries.

In accordance with Job Creation Law No.11/2020 and The Accompanying Government Regulation No.35/2021 relating to labor regulations and the Company's Collective Labor Agreement, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The obligation for post-employment benefits as of 31 December 2025 and 2024 was calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, in their reports dated 12 March 2026 and 13 January 2025, respectively, using the projected-unit-credit-method.

The major assumptions used by the independent actuary to determine the obligation for post-employment benefits as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

As of 31 December 2025, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 11.88 years (31 December 2024: 12.17 years).

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate correlates with the yield on high quality government bonds that are traded in active capital markets at the reporting date.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date through the normal retirement age. The salary increase rate is generally determined by applying inflation adjustments to pay scales, and by taking account of the length of service.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

31. IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	42.097	51.651
Nilai wajar aset program	(39.386)	(45.776)
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>2.711</u>	<u>5.875</u>

Tabel berikut mencerminkan saldo kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal pelaporan, serta perubahan liabilitas, dan beban yang diakui selama tahun berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
Perubahan kewajiban imbalan pascakerja:		
Kewajiban imbalan pascakerja, awal tahun	5.875	(5.487)
Termasuk dalam laba rugi (lihat Catatan 28):		
- Beban jasa kini	5.688	7.514
- Beban bunga	325	(342)
- Keuntungan atas penyelesaian	1.820	3.826
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain:		
- Kerugian (keuntungan) aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	(1.109)	(1.018)
- Keuntungan (kerugian) aktuarial dari perubahan penyesuaian yang timbul	(3.825)	4.222
- Kerugian aktuarial atas aset program	208	1.671
- Keuntungan aktuarial atas perubahan dampak batas aset	-	(586)
Pembayaran:		
- Iuran	(4.406)	-
- Manfaat	(1.865)	(3.925)
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>2.711</u>	<u>5.875</u>

Tabel berikut mencerminkan saldo kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan, serta perubahan kewajiban, dan beban yang diakui selama tahun berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
Perubahan kewajiban imbalan pasti		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti, awal tahun	51.651	68.555
Termasuk dalam laba rugi:		
- Beban jasa kini	5.688	7.514
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	3.392	4.203
- Kurtailmen	1.820	3.826
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain:		
- Kerugian (keuntungan) aktuarial:		
- Dampak atas perubahan asumsi keuangan	(1.109)	(1.018)
- Penyesuaian atas pengalaman	(3.825)	4.222
Lain-lain:		
- Pembayaran manfaat:		
- Pembayaran manfaat dari aset program	(13.655)	(31.726)
- Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(1.865)	(3.925)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti, akhir tahun	<u>42.097</u>	<u>51.651</u>

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

The amounts recognized in the statement of financial position were determined as follows:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Present value of the defined benefit obligation	42.097	51.651
Fair value of plan assets	(39.386)	(45.776)
Post-employment benefits obligation	<u>2.711</u>	<u>5.875</u>

The following table reflects the balance of the obligation for post-employment benefits as of the reporting dates, as well as the movements in the obligation, and the expense recognized during the years ended 31 December 2025 and 2024:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
The movement in the obligation for post-employment benefits:		
Obligation for post-employment benefits, beginning of the year	5.875	(5.487)
Included in profit or loss (see Note 28):		
- Current service cost	5.688	7.514
- Interest cost	325	(342)
- Gain on settlement	1.820	3.826
Included in other comprehensive income:		
- Actuarial loss (gain) from changes in financial assumptions	(1.109)	(1.018)
- Actuarial losses (gain) from changes in experience adjustment	(3.825)	4.222
- Actuarial loss on plan assets	208	1.671
- Actuarial gain from changes in the effect of the asset ceiling	-	(586)
Payments:		
- Contribution	(4.406)	-
- Benefits	(1.865)	(3.925)
Post-employment benefits obligation	<u>2.711</u>	<u>5.875</u>

The following table reflects the balance of the defined benefits obligation as of the reporting dates, as well as the movements in the obligation, and the expense recognized during the years ended 31 December 2025 and 2024:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
The movement in the defined benefits obligation		
Present value of the defined benefits obligation, beginning of the year	51.651	68.555
Included in profit or loss:		
- Current service cost	5.688	7.514
- Interest on defined benefits obligation	3.392	4.203
- Curtailment	1.820	3.826
Included in other comprehensive income:		
- Actuarial loss (gains):		
- Changes in financial assumption	(1.109)	(1.018)
- Experience adjustment	(3.825)	4.222
Others:		
- Benefits paid:		
- Benefits paid by plan assets	(13.655)	(31.726)
- Benefits paid by employer	(1.865)	(3.925)
Present value of the defined benefit obligation, end of the year	<u>42.097</u>	<u>51.651</u>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

31. IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset program untuk imbalan pensiun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
Nilai wajar aset program, awal tahun	45.776	74.042
Termasuk dalam laba rugi:		
Pendapatan bunga atas aset program	3.067	5.131
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain:		
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas kewajiban imbalan pasti neto	(208)	(1.671)
Lain-lain:		
Pembayaran manfaat dari aset program	(13.655)	(31.726)
Pembayaran manfaat dari aset program	4.406	-
Nilai wajar aset program, akhir tahun	39.386	45.776

Aset program terdiri dari:

	31 Desember/ December 2025		31 Desember/ December 2024		
	Nilai wajar/ Fair value	Persentase/ Percentage	Nilai wajar/ Fair value	Persentase/ Percentage	
Pasar uang	28.705	72,88%	33.709	73,64%	Money market
Pendapatan tetap	10.681	27,12%	12.067	26,36%	Fixed income

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu kepada kebijakan investasi. Hasil yang diharapkan dari investasi dengan bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

The movement in the fair value of plan assets for pension benefits during the years was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Fair value of plan assets, beginning of year	45.776	74.042	
Included in profit or loss:			
Interest income on plan assets	3.067	5.131	
Included in other comprehensive income:			
Return on plan assets, excluding amounts included in net interest on net defined benefit liability	(208)	(1.671)	
Others:			
Benefits paid by plan assets	(13.655)	(31.726)	
Benefits paid by plan assets	4.406	-	
Fair value of plan assets, end of year	39.386	45.776	

Plan assets comprise of the following:

	31 Desember/ December 2025		31 Desember/ December 2024		
	Nilai wajar/ Fair value	Persentase/ Percentage	Nilai wajar/ Fair value	Persentase/ Percentage	
Pasar uang	28.705	72,88%	33.709	73,64%	Money market
Pendapatan tetap	10.681	27,12%	12.067	26,36%	Fixed income

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investments policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date.

Informasi historis

	2025	2024	2023	2022	2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	42.096	51.651	68.555	62.421	60.713
Penyesuaian pengalaman atas liabilitas	(3.825)	4.222	(75)	(22)	(1.604)
Nilai wajar aset program	39.386	45.776	74.042	76.036	76.205
Perubahan estimasi pada aset	(208)	(1.671)	(982)	(3.275)	(2.791)

Present value of the defined benefit obligation
Experience adjustment on liability
Fair value of plan assets
Changes in estimates of assets

Historical information

Analisa sensitivitas

Asumsi aktuarial utama yang diterapkan dalam mengestimasi imbalan pasca kerja mungkin berbeda dengan yang diharapkan. Kisaran variabilitas yang diharapkan secara wajar tersebut akan mempengaruhi kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan dalam jumlah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2025		31 Desember/December 2024	
	Kenaikan/ Increase 1%	Penurunan/ Decrease 1%	Kenaikan/ Increase 1%	Penurunan/ Decrease 1%
Tingkat diskonto	45.648	38.936	46.621	54.668
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	45.899	38.667	54.949	46.316

Analisa ini menggambarkan perkiraan sensitivitas kewajiban imbalan terhadap kemungkinan perubahan asumsi wajar, tetapi tidak memperhitungkan variabilitas dalam waktu distribusi pembayaran imbalan yang diharapkan menurut program.

Sensitivity analysis

It is reasonably possible that the key actuarial assumptions applied in estimating the defined benefits obligation may turn out to be different than expected. The range of such reasonably expected variability would affect the defined benefits obligation at the reporting dates by the following amounts:

This analysis depicts the approximate sensitivity of the defined benefits obligation to a reasonable possible change in assumptions, but does not take account of the variability in the timing of the distribution of benefit payments expected under the plan.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

32. PAJAK PENGHASILAN

32. INCOME TAX

- a. Komponen beban pajak penghasilan diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

- a. *The components of income tax expense recognized in profit or loss were as follows:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Pajak kini	-	-	Current year
	-	-	
Beban pajak tangguhan:			Deferred tax expense:
Pembentukan perbedaan temporer	65.811	(58.283)	Origination of temporary differences
	65.811	(58.283)	
Beban pajak penghasilan	65.811	(58.283)	Income tax expense

- b. Pajak kini

- b. *Current income tax*

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between accounting income before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan	(370.774)	(343.097)	Accounting loss before tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Kewajiban imbalan pascakerja	1.547	7.073	Post-employment benefit obligation
Beban yang masih harus dibayar	929	(2.051)	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap	(3.715)	(1.048)	Depreciation of fixed assets
Aset hak guna	3.775	(32.738)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	(4.345)	34.048	Lease liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(299.004)	34.208	Provision for impairment losses
	(300.813)	39.492	
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Pendapatan bunga	(14.240)	(9.031)	Interest income
Beban gaji dan tunjangan	-	43	Salary and allowance expenses
Beban umum dan administrasi	2.995	4.677	General and administrative expenses
Aset hak guna	(4.466)	31.748	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	5.583	(33.259)	Lease liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	65	6.951	Provision for impairment losses
	(10.063)	1.129	
Rugi fiskal	(681.650)	(302.476)	Taxable loss

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun berakhir 31 Desember 2025 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Perusahaan.

The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2025 was a preliminary estimate made for accounting purposes and it is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Income Tax Return.

Jumlah laba kena pajak Perusahaan untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan.

The Company's taxable income for the year ended 31 December 2024 was in line with Annual Corporate Income Tax Return.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

32. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

c. Pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2024	Diakui pada laba rugi/ Recognized in profit or loss	Diakui pada penghasilan komprehensif lain/Recognized in other comprehensive income	31 Desember/ December 2025	
Kewajiban imbalan pascakerja	1.295	341	(1.039)	597	Post-employment benefit obligation
Beban yang masih harus dibayar	775	204	-	979	Accrued expenses
Aset tetap (termasuk aset hak guna)	494	13	-	507	Fixed asset (include right-of-use asset)
Liabilitas sewa	3.905	(956)	-	2.949	Lease liability
Penyisihan kerugian penurunan nilai	80.974	(65.781)	-	15.193	Allowance for impairment losses
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas	4.485	-	1.692	6.177	Net changes in fair value of cash flows hedges
Kompensasi rugi fiskal	49.594	368	-	49.962	Tax loss carryforward
Aset pajak tangguhan, bersih	141.522	(65.811)	653	76.364	Deferred tax asset, net

	31 Desember/ December 2023	Diakui pada laba rugi/ Recognized in profit or loss	Diakui pada penghasilan komprehensif lain/Recognized in other comprehensive income	31 Desember/ December 2024	
Kewajiban imbalan pascakerja	(1.205)	1.556	944	1.295	Post-employment benefit obligation
Beban yang masih harus dibayar	1.226	(451)	-	775	Accrued expenses
Aset tetap (termasuk aset hak guna)	7.927	(7.433)	-	494	Fixed asset (include right-of-used asset)
Liabilitas sewa	(3.586)	7.491	-	3.905	Lease liability
Penyisihan kerugian penurunan nilai	73.448	7.526	-	80.974	Allowance for impairment losses
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas	8.865	-	(4.380)	4.485	Net changes in fair value of cash flows hedges
Kompensasi rugi fiskal	-	49.594	-	49.594	Tax loss carryforward
Aset pajak tangguhan, bersih	86.675	58.283	(3.436)	141.522	Deferred tax asset, net

Rekonsiliasi antara rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between accounting loss before tax multiplied by the prevailing tax rates and income tax expense was as follows:

	31 Desember/December 2025	2024	
Rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan	(370.774)	(343.097)	Accounting loss before tax
Beban pajak atas dasar tarif pajak yang berlaku (22%)	(81.570)	(75.481)	Income tax expense at prevailing tax rates (22%)
Jumlah	(81.570)	(75.481)	Total
Pengaruh pajak atas perbedaan permanen	(2.214)	248	Tax effect on permanent differences
Beban pajak atas dasar tarif pajak yang berlaku (22%)	(83.784)	(75.233)	Income tax expense at prevailing tax rates (22%)
Rugi fiskal tahun berjalan yang tidak diakui	149.595	16.950	Current year's unrecognized tax loss
Beban (manfaat) pajak penghasilan	65.811	(58.283)	Income tax expense (benefit)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

32. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan

Berikut ini adalah rugi pajak yang belum dikompensasi:

Tahun rincian permulaan/ Year of origination	Tahun Kedaluwarsa/ Year of Expired
2024	2029
2025	2030

Kompensasi rugi fiskal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai dengan tabel di atas, akan kadaluwarsa dalam jumlah yang bervariasi di antara tahun 2029 sampai dengan 2030 jika tidak dimanfaatkan terhadap laba kena pajak di masa mendatang. Aset pajak tangguhan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 telah diakui sejauh kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Perusahaan.

Sebagian porsi dari aset pajak tangguhan belum diakui atas kompensasi rugi fiskal, karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Perusahaan terhadap manfaat tersebut:

	31 Desember/December 2025		31 Desember/December 2024	
	Jumlah bruto/ Gross amount	Dampak pajak/ Tax effect	Jumlah bruto/ Gross amount	Dampak pajak/ Tax effect
Kompensasi rugi fiskal/ Tax loss carryforwards	757.025	166.546	77.050	16.951

- e. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/ menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Posisi pajak Perusahaan mungkin dapat dipertanyakan oleh pengawas pajak. Manajemen mempertahankan posisi pajak Perusahaan berdasarkan landasan teknis yang kuat. Oleh karena itu, manajemen menilai bahwa akrual atas liabilitas pajak telah memadai untuk semua tahun pajak berdasarkan evaluasi atas berbagai faktor, termasuk interpretasi atas undang-undang pajak dan pengalaman sebelumnya. Penilaian didasarkan pada estimasi dan asumsi dan dapat melibatkan pertimbangan mengenai kejadian mendatang. Informasi baru mungkin saja tersedia dapat menyebabkan perubahan keputusan oleh manajemen atas kecukupan dari liabilitas pajak. Perubahan atas liabilitas pajak tersebut akan berdampak pada beban pajak pada periode dimana keputusan itu dibuat.

- f. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Peraturan ini mengadopsi kerangka *Global Anti-Base Erosion (GloBE)* Pilar Dua yang bertujuan untuk memastikan bahwa grup perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

32. INCOME TAX (Continued)

d. Deferred income tax

Below are details of tax loss carry forwards

	31 Desember/ 31 December	
2025	2024	
302.476	302.476	
681.650	-	
984.126	302.476	

Tax loss carryforward as of 31 December 2025 and 31 December 2024 as presented in above table, will expire in varying amounts between 2029 to 2030 if not utilized against future taxable profits. Deferred tax assets as of 31 December 2025 and 31 December 2024, have been recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the Company can utilize the benefits therefrom.

Certain portion of deferred tax assets have not been recognized in respect of the tax loss carryforwards, because it is not probable that future taxable profit will be available against which Company can use the benefits therefrom:

- e. *Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.*

The Company's tax positions may be challenged by the tax authorities. Management vigorously defends the Company's tax position which are believed to be grounded on sound technical basis. Accordingly, management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of various factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such determination is made.

- f. *As of 31 December 2025, the Company is still assessing the impact of the implementation of Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.03.2024 regarding the implementation of Global minimum tax, which is effective from 1 January 2025. This regulation adopts the Global Anti-Base Erosion (GloBE) Pillar two, which aims to ensure that multinational enterprise groups are subject to a minimum effective tax rate of 15% in each jurisdiction where they operate.*

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

33. LABA PER SAHAM

33. EARNINGS PER SHARE

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Rugi bersih	(436.585)	(284.814)	Net loss
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	1.224.475	1.224.475	Weighted average number of outstanding shares
Rugi per saham - dasar (nilai penuh)	(356.547)	(232.600)	Loss per share - basic (full amount)

Perusahaan tidak memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham.

The Company does not have instruments that give impact of dilution effect on basic earnings per share.

34. SEGMENT OPERASI

34. OPERATING SEGMENTS

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments. Information concerning the main segments are set out as follows:

Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025						
Pembiayaan/ Financing						
Sepeda motor/ Motorcycles	Mobil/ Cars	Sewa pembiayaan/ Finance lease	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Pendapatan pembiayaan	326.865	306.769	-	93.957	727.591	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	-	-	24.436	-	24.436	Finance lease income
Pendapatan lain-lain	99.890	144.727	4.817	21.490	270.924	Others income
Beban keuangan	(120.467)	(185.529)	(13.808)	(23.106)	(342.910)	Financing charges
Beban penyusutan dan amortisasi	(711)	(8.555)	-	(2.074)	(11.340)	Depreciation and amortization expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(221.895)	(287.291)	(76.131)	(43.410)	(628.727)	Provision for impairment losses
(Rugi) laba untuk segmen dilaporkan	(73.296)	(175.776)	(67.682)	28.628	(288.126)	(Loss) income for reportable segment
Aset untuk segmen dilaporkan	951.031	2.149.007	495.350	202.026	3.797.414	Assets for reportable segment
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	746.565	1.686.985	388.853	158.592	2.980.995	Liabilities for reportable segment
Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024						
Pembiayaan/ Financing						
Sepeda motor/ Motorcycles	Mobil/ Cars	Sewa pembiayaan/ Finance lease	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Pendapatan pembiayaan	325.514	517.696	-	91.203	934.413	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	-	-	76.702	-	76.702	Finance lease income
Pendapatan lain-lain	136.240	235.120	7.129	26.927	405.416	Others income
Beban keuangan	(119.094)	(269.787)	(64.223)	(24.016)	(477.120)	Financing charges
Beban penyusutan dan amortisasi	(2.066)	(7.423)	(8)	(1.949)	(11.446)	Depreciation and amortization expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(216.790)	(405.657)	(62.546)	(43.922)	(728.915)	Provision for impairment losses
(Rugi) laba untuk segmen dilaporkan	(39.840)	(92.940)	(57.600)	26.320	(164.060)	(Loss) income for reportable segment
Aset untuk segmen dilaporkan	1.572.527	3.553.380	819.060	334.049	6.279.016	Assets for reportable segment
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	1.357.965	3.068.541	707.304	288.470	5.422.280	Liabilities for reportable segment

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

34. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

34. OPERATING SEGMENTS (Continued)

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area:

Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2025							
Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatera	Jakarta dan sekitarnya/ Jakarta and its surroundings	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Jumlah/ Total		
Pendapatan pembiayaan	435.419	123.165	46.405	78.027	44.575	727.591	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	3.364	2.796	5.684	8.007	4.585	24.436	Finance lease income
Pendapatan lain-lain	156.606	45.582	25.175	26.698	16.863	270.924	Others income
Beban keuangan	(196.872)	(56.392)	(29.142)	(36.047)	(24.457)	(342.910)	Financing charges
Beban penyusutan dan amortisasi	(5.823)	(1.930)	(876)	(1.808)	(903)	(11.340)	Depreciation and amortization expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(360.966)	(103.394)	(53.432)	(66.092)	(44.843)	(628.727)	Provision for impairment losses
(Rugi) untuk segmen dilaporkan	(167.293)	(41.969)	(34.992)	(20.099)	(23.773)	(288.126)	(Loss) for reportable segment
Aset untuk segmen dilaporkan	1.331.983	768.703	675.943	377.991	642.794	3.797.414	Asset for reportable segment
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	1.698.358	495.072	254.955	319.545	213.065	2.980.995	Liabilities for reportable segment
Tahun berakhir/Year ended 31 Desember/December 2024							
Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatera	Jakarta dan sekitarnya/ Jakarta and its surroundings	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Jumlah/ Total		
Pendapatan pembiayaan	471.939	190.255	80.934	122.037	69.248	934.413	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	6.034	18.760	17.025	23.979	10.904	76.702	Finance lease income
Pendapatan lain-lain	212.286	80.676	41.279	41.192	29.983	405.416	Others income
Beban keuangan	(217.402)	(91.433)	(48.184)	(59.734)	(60.367)	(477.120)	Financing charges
Beban penyusutan dan amortisasi	(5.880)	(2.089)	(1.082)	(1.591)	(804)	(11.446)	Depreciation and amortization expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(332.134)	(139.685)	(73.613)	(91.258)	(92.225)	(728.915)	Provision for impairment losses
(Rugi) laba untuk segmen dilaporkan	(62.410)	(15.185)	(24.279)	3.542	(65.728)	(164.060)	(Loss) income for reportable segment
Aset untuk segmen dilaporkan	1.551.516	1.626.299	1.102.597	1.032.526	966.078	6.279.016	Asset for reportable segment
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	2.447.902	1.056.036	551.024	686.669	680.649	5.422.280	Liabilities for reportable segment

Berikut adalah rekonsiliasi laba neto, aset dan liabilitas untuk segmen dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis:

The reconciliation of net income, assets and liabilities for reportable segments based on product categories and geographic categories as follows:

Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December			
	2025	2024	
Rugi untuk segmen dilaporkan	(288.126)	(164.060)	Loss for reportable segment
Jumlah yang tidak dialokasikan	(148.459)	(120.754)	Unallocated amount
Rugi tahun berjalan	(436.585)	(284.814)	Loss for the year
Aset untuk segmen dilaporkan	3.797.414	6.279.016	Assets for reportable segment
Jumlah yang tidak dialokasikan	242.966	578.301	Unallocated amount
Aset	4.040.380	6.857.317	Assets
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	2.980.995	5.422.280	Liabilities for reportable segment
Jumlah yang tidak dialokasikan	63.848	603	Unallocated amount
Liabilitas	3.044.843	5.422.883	Liabilities

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

35. PIHAK-PIHAK BERELASI

35. RELATED PARTIES

Pihak berelasi/ <i>Related party</i>	Jenis hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of transactions</i>
JACCS Co., Ltd., Jepang/ <i>Japan</i>	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Pinjaman subordinasi dan beban keuangan/ <i>Subordinated loan and financial charges</i>
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	-
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Entitas anak dari pemegang saham nonpengendali/ <i>Subsidiary of non-controlling shareholder</i>	Utang usaha, utang obligasi, beban keuangan, beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain/ <i>Accounts payable, bonds payable, financial charges, general and administrative expenses and other income</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ <i>Jakarta Branch</i>	Mempunyai kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya) dengan Perusahaan/ <i>Have the same business group (meaning the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiary) with those of the Company</i>	Kas di bank, aset derivatif untuk tujuan manajemen resiko, liabilitas derivatif untuk tujuan manajemen resiko, pinjaman yang diterima, liabilitas derivatif dan beban keuangan/ <i>Cash in banks, derivative assets held for risk management, derivative liabilities held for risk management, borrowings, derivative liability and financial charges</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Mempunyai kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya) dengan Perusahaan/ <i>Have the same business group (meaning the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiary) with those of the Company</i>	Kas di bank, aset derivatif untuk tujuan manajemen resiko, pinjaman yang diterima, liabilitas derivatif dan beban keuangan/ <i>Cash in banks, derivative assets held for risk management, borrowings, derivative liability and financial charges</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen inti/ <i>Key management personnel</i>	Beban yang masih harus dibayar, gaji dan tunjangan dan imbalan pascakerja/ <i>Accrued expenses, salaries and allowances and post-employment benefits</i>

Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Transactions with related parties

The details of significant balances and transactions with related parties as of and for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	Jumlah/ <i>Total</i>		Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ <i>Percentage to total assets or liabilities</i>		
	2025	2024	2025	2024	
Aset					Assets
Kas di bank					<i>Cash in banks</i>
Bank					<i>Cash in bank</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	568	255	0,01	0,00	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	58	148	0,00	0,00	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch</i>
Jumlah	626	403	0,01	0,00	<i>Total</i>
Piutang lain-lain					<i>Other receivables</i>
Personil manajemen kunci	592	682	0,01	0,01	<i>Key management personnel</i>
Jumlah	592	682	0,01	0,01	<i>Total</i>
Aset derivatif untuk tujuan manajemen risiko					<i>Derivative assets held for risk management</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	19.659	36.354	0,49	0,53	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch</i>
Jumlah	19.659	36.354	0,49	0,53	<i>Total</i>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

35. PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ Percentage to total assets or liabilities	
	2025	2024	2025	2024
Liabilitas				
Utang usaha				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	8	10	0,00	0,00
Jumlah	8	10	0,00	0,00
Pinjaman yang diterima				
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	131.458	575.416	4,32	10,61
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	92.521	224.381	3,04	4,14
Jumlah	223.979	799.797	7,26	14,75
Utang obligasi				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	-	30.267	0,00	0,56
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	100.890	0,00	1,86
Jumlah	-	131.157	0,00	2,42
Beban yang masih harus dibayar				
JACCS Co., Ltd., Jepang	509	-	0,02	0,00
Personil manajemen kunci	1.073	2.076	0,04	0,04
Jumlah	1.582	2.076	0,06	0,04
Liabilitas derivatif untuk tujuan manajemen risiko				
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	11.367	36.203	0,37	0,67
Jumlah	11.367	36.203	0,37	0,67
Pinjaman subordinasi				
JACCS Co., Ltd., Jepang	13.098	13.098	0,43	0,24
Jumlah	13.098	13.098	0,43	0,24
Pendapatan				
Pendapatan lain-lain				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	9.808	41.150	0,96	2,91
Jumlah	9.808	41.150	0,96	2,91
Beban				
Beban keuangan				
Pinjaman yang diterima				
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	21.475	40.444	1,54	2,30
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.852	18.875	0,42	1,07
JACCS Co., Ltd., Jepang	1.846	-	0,13	-
Jumlah	29.173	59.319	2,09	3,37
Utang obligasi				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.152	10.085	0,37	0,57
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	1.665	2.185	0,12	0,12
Jumlah	6.817	12.270	0,49	0,69
Pinjaman subordinasi				
JACCS Co., Ltd., Jepang	877	879	0,06	0,05
Jumlah	877	879	0,06	0,05
Beban umum dan administrasi				
Asuransi				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	403	452	0,03	0,03
Jumlah	403	452	0,03	0,03

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai yang dibukukan atas piutang pembiayaan dan piutang lain-lain yang diberikan dari personil manajemen kunci.

35. RELATED PARTIES (Continued)

Transactions with related parties (Continued)

Liabilities				
Accounts payable				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika				
Total				
Borrowings				
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
Total				
Bonds payable				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
Total				
Accrued Expenses				
Guarantee Fee				
Key management personnel				
Total				
Derivative liabilities held for risk Management				
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch				
Total				
Subordinated loan				
JACCS Co., Ltd., Japan				
Total				
Income				
Other income				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika				
Total				
Expenses				
Financial charges				
Borrowings				
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
JACCS Co., Ltd., Japan				
Total				
Bonds payable				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika				
Total				
Subordinated Loan				
JACCS Co., Ltd., Japan				
Total				
General and administrative expenses				
Insurance				
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika				
Total				

As of 31 December 2025 and 2024, there was no allowance for impairment losses that have been recorded against financing receivables and other receivables from key management personnel.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

35. PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)

Kompensasi personil manajemen inti untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2025	2024
Imbalan kerja jangka pendek	16.644	13.729
Imbalan pascakerja	216	174
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	410	1.000

35. RELATED PARTIES (Continued)

Transactions with related parties (Continued)

Key management personnel compensation for the years ended 31 December 2025 and 2024 comprised of:

Short-term employment benefits
Post-employment benefits
Other long-term employment benefits

36. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan utama Perusahaan berdasarkan kategori masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS

a. Classification of financial assets and liabilities

The following table sets out the carrying amounts and the fair values of the Company's main financial assets and liabilities based on their respective category as of 31 December 2025 and 2024.

31 Desember/ December 2025				
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Total carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan bank	-	131.469	131.469	131.469
Piutang pembiayaan - bersih	-	3.525.563	3.525.563	3.618.928
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	150.840	150.840	150.840
Piutang lain-lain	-	36.623	36.623	36.623
Aset derivatif	52.671	-	52.671	52.671
Jumlah	52.671	3.844.495	3.897.166	3.990.531
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	-	5.007	5.007	5.007
Liabilitas lain-lain	-	59.301	59.301	59.301
Beban yang masih harus dibayar	-	31.928	31.928	31.928
Pinjaman yang diterima	-	2.313.462	2.313.462	2.315.556
Utang obligasi	-	586.283	586.283	595.957
Pinjaman subordinasi	-	13.098	13.098	13.098
Liabilitas derivatif	28.647	-	28.647	28.647
Jumlah	28.647	3.009.079	3.037.726	3.049.494
31 Desember/ December 2024				
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Total carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan bank	-	403.173	403.173	403.173
Piutang pembiayaan - bersih	-	5.574.544	5.574.544	5.387.905
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	378.940	378.940	378.940
Piutang lain-lain	-	188.900	188.900	188.900
Aset derivatif	84.550	-	84.550	84.550
Jumlah	84.550	6.545.557	6.630.107	6.443.468
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	-	17.645	17.645	17.645
Liabilitas lain-lain	-	51.656	51.656	51.656
Beban yang masih harus dibayar	-	36.516	36.516	36.516
Pinjaman yang diterima	-	3.671.491	3.671.491	3.693.557
Surat utang jangka menengah	-	302.253	302.253	302.253
Utang obligasi	-	1.240.949	1.240.949	1.256.110
Pinjaman subordinasi	-	13.098	13.098	13.098
Liabilitas derivatif	81.212	-	81.212	81.212
Jumlah	81.212	5.333.608	5.414.820	5.452.047

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**b. Nilai wajar instrumen keuangan****Model penilaian**

Perusahaan mengukur nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar dengan menggunakan tingkat hirarki berikut ini:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2: *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau tidak langsung (yaitu ditentukan dari harga).
- Level 3: *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Teknik penilaian mencakup model nilai kini bersih dan arus kas yang didiskontokan, perbandingan dengan instrumen sejenis yang harga pasarnya tersedia, serta dapat diobservasi, serta model penilaian lainnya. Asumsi dan *input* yang digunakan dalam teknik penilaian meliputi suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan serta *credit spreads* yang digunakan untuk mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi dan nilai tukar mata uang asing.

Tujuan dari teknik penilaian adalah untuk pengukuran nilai wajar yang mencerminkan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transactions*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran.

Pertimbangan dan estimasi manajemen biasanya memerlukan pemilihan model yang sesuai untuk digunakan, penentuan arus kas masa depan yang diharapkan pada instrumen keuangan yang dinilai, penentuan probabilitas kegagalan pihak lawan dan pembayaran dimuka dan pemilihan tingkat diskonto yang tepat.

Estimasi nilai wajar yang diperoleh dari model disesuaikan dengan faktor-faktor lain, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model, sepanjang Perusahaan berkeyakinan bahwa pelaku pasar pihak ketiga akan memperhitungkan mereka dalam menentukan harga transaksi. Nilai wajar mencerminkan risiko kredit instrumen termasuk penyesuaian untuk memperhitungkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan. Untuk mengukur derivatif yang klasifikasinya mungkin berubah dari aset menjadi liabilitas atau sebaliknya seperti swap suku bunga, nilai wajar memperhitungkan *Credit Valuation Adjustment* ("CVA") dan *Debit Valuation Adjustment* ("DVA") ketika pelaku pasar mempertimbangkan hal ini dalam harga derivatif.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**b. Fair values of financial instrument****Valuation models**

The Company measures fair value for financial instrument recognized at fair values using the following hierarchy level:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison with similar instruments for which market observable prices exist and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates and credit spreads used in estimating discount rates, bond prices and foreign currency exchange rates.

The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value measurement that reflects the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Management judgment and estimation are usually required for selection of the appropriate valuation model to be used, determination of expected future cash flows on the financial instrument being valued, determination of the probability of counterparty default and prepayments and selection of appropriate discount rates.

Fair values estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or model uncertainties, to the extent that the Company believes that a third party market participants would take them into account in pricing a transaction. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include adjustments to take account of the credit risk of the Company and the counterparty where appropriate. For measuring derivatives that might change classification from being an asset to a liability or vice versa such as interest rate swaps, fair values take into account both credit valuation adjustment (CVA) and debit valuation adjustment (DVA) when market participants take this into consideration in pricing the derivatives.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**b. Nilai wajar instrumen keuangan (Lanjutan)****Kerangka Penilaian**

Penilaian aset keuangan dan liabilitas keuangan dikaji secara independen dari bisnis oleh Direktur Keuangan. Direktur Keuangan terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyesuaian penilaian telah dilakukan secara tepat. Validasi harga secara independen dilakukan untuk memastikan bahwa Perusahaan menggunakan data pasar yang dapat diandalkan dari sumber-sumber independen (misalnya harga perdagangan dan kuotasi pialang) berdasarkan konsensus sumber data. Pengkajian tahunan terhadap model penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian mencerminkan harga pasar.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar yaitu aset dan liabilitas derivatif. Instrumen keuangan tersebut diukur dengan menggunakan hirarki level 2. Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar yang diukur berdasarkan hirarki level 1 dan 3 serta tidak ada perpindahan diantaranya. Nilai wajar derivatif ditentukan dengan teknik penilaian berdasarkan *input* yang dapat diobservasi.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menyajikan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar dan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing level pada hirarki nilai wajar.

31 Desember/ December 2025				
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/Fair value		
		Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	Jumlah/ Total
Aset keuangan				
Piutang pembiayaan - bersih	3.525.563	-	3.618.928	3.618.928
Piutang sewa pembiayaan - bersih	150.840	-	150.840	150.840
	<u>3.692.632</u>	<u>-</u>	<u>3.769.768</u>	<u>3.769.768</u>
Liabilitas keuangan				
Pinjaman yang diterima	2.313.462	-	2.315.556	2.315.556
Utang obligasi	586.283	595.957	-	595.957
Liabilitas sewa (bagian dari liabilitas lain-lain)	13.404	13.404	-	13.404
Pinjaman subordinasi	13.098	-	13.098	13.098
	<u>2.926.247</u>	<u>609.361</u>	<u>2.328.654</u>	<u>2.938.015</u>
31 Desember/ December 2024				
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/Fair value		
		Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	Jumlah/ Total
Aset keuangan				
Piutang pembiayaan - bersih	5.574.544	-	5.387.905	5.387.905
Piutang sewa pembiayaan - bersih	378.940	-	378.940	378.940
	<u>5.953.484</u>	<u>-</u>	<u>5.766.845</u>	<u>5.766.845</u>
Liabilitas keuangan				
Pinjaman yang diterima	3.671.491	-	3.693.557	3.693.557
Surat utang jangka menengah	302.253	-	302.253	302.253
Utang obligasi	1.240.949	1.256.110	-	1.256.110
Liabilitas sewa (bagian dari liabilitas lain-lain)	17.749	17.749	-	17.749
Pinjaman subordinasi	13.098	-	13.098	13.098
	<u>5.245.540</u>	<u>1.273.859</u>	<u>4.008.908</u>	<u>5.282.767</u>

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**b. Fair values of financial instrument (Continued)****Valuation Framework**

Valuation of financial assets and financial liabilities are subject to an independent review of the business, by Finance Director. Finance Director is primarily responsible for ensuring that valuation adjustments have been properly accounted for. An independent price validation was performed to ensure that the Company uses reliable market data from independent sources (e.g. traded prices and broker quotes) based on consensus data sources. Annual review on the valuation model was done to ensure that the result of the valuation reflects the market prices.

Financial instruments measured at fair values

As of 31 December 2025 and 2024, the Company had financial instruments recognized at fair value which are derivative assets and liabilities. Those financial instruments are measured at hierarchy level 2. The Company does not have any financial instruments recognized at fair value that measurement uses hierarchy level 1 and 3 and there was no reclassification between them. Fair value of derivatives was determined using valuation techniques based on observable inputs.

Financial instruments not measured at fair values

The following table sets out the fair values of financial instruments not measured at fair value and analysis on those financial instruments by level in the fair value hierarchy.

Financial assets

Financing receivables - net
Finance lease receivables - net

Financial liabilities

Borrowings
Bonds payable
Lease liabilities (part of other liabilities)
Subordinated loan

Financial assets

Financing receivables - net
Finance lease receivables - net

Financial liabilities

Borrowings
Medium term notes
Bonds payable
Lease liabilities (part of other liabilities)
Subordinated loan

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

37. KOMITMEN

Pada tanggal 23 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa yang tidak dapat dibatalkan dengan PT Mitra Wijaya Wisesa sebagai kantor komersial Perusahaan di Lippo Kuningan, Jakarta. Periode sewa adalah 5 tahun sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2019. Perusahaan telah memperpanjang periode masa sewa melalui Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Ref. No. 007/LK.ADD02/XII/2018 untuk periode 5 tahun sejak 23 Juni 2019 sampai 22 Juni 2024. Pembayaran sewa dibayarkan di muka setiap triwulanan. Perusahaan telah memperpanjang kembali periode masa sewa melalui Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ref. No. 007/LK.ADD03/IX/2020 untuk satu bulan 23 Juni 2024 sampai 22 Juli 2024. Perusahaan telah memperpanjang kembali periode masa sewa melalui Addendum IV Perjanjian Sewa Menyewa Ref. No. 007/LK.ADD04/XII/2023 untuk periode 5 tahun sejak 23 Juli 2024 sampai 22 Juli 2029. Pembayaran sewa dibayarkan di muka setiap triwulanan.

Untuk periode sewa dari tanggal 23 Juli 2024 sampai 22 Juli 2029, Perusahaan telah membayar di muka uang jaminan sebesar Rp 1.754 serta pembayaran tersebut disajikan sebagai "aset lain-lain" pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah pembayaran sewa di masa depan terkait dengan perjanjian sewa sebesar Rp 16.621.

37. COMMITMENT

On 23 June 2014, the Company entered into a non-cancellable lease agreement with PT Mitra Wijaya Wisesa as the Company's commercial office at Lippo Kuningan, Jakarta. The lease period covers 5 years beginning from 23 June 2014 to 22 June 2019. The Company had been extended the lease period with Addendum II of the Lease Agreement with Ref. No. 007/LK.ADD.02/XII/2018 that covers 5 years beginning from 23 June 2019 to 22 June 2024. Rental payments are paid in advance on a quarterly basis. The Company had been extended the lease period with Addendum III of the Lease Agreement with Ref. No. 007/LK.ADD03/IX/2020 that cover 1 month beginning from 23 June 2024 to 22 July 2024. The Company had been extended the lease period with Addendum IV of the Lease Agreement with Ref. No. 007/LK.ADD04/XII/2023 that covers 5 years beginning from 23 July 2024 to 22 July 2029. Rental payments are paid in advance on a quarterly basis.

For the rental period from 23 July 2024 to 22 July 2029, the Company has paid in advance security deposits amounting to Rp 1,754 and presented the payments as "other assets" on the statements of financial position as of 31 December 2025.

As of 31 December 2025, the total future lease payments related to the lease agreement amounted to Rp 16,621.

38. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

38. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION

Reconciliation from financing activities are as follows:

Tahun berakhir 31 Desember/Year ended 31 December 2025						
	31 December/ December 2024	Arus kas masuk (keluar) bersih/Net cash in (out)- flow	Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange movement	Pergerakan beban transaksi/ Transaction cost movement	Pergerakan utang bunga/ Interest payable movement	31 Desember/ December 2025
Pinjaman yang diterima	3.671.491	(1.388.748)	28.378	10.728	(8.387)	2.313.462
Surat utang jangka menengah	302.253	(300.000)	-	110	(2.363)	-
Utang obligasi	1.240.949	(650.000)	-	2.428	(7.094)	586.283
Liabilitas sewa	17.749	(5.582)	-	-	1.145	13.312
Pinjaman subordinasi	13.098	-	-	-	-	13.098
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	5.245.540	(2.344.330)	28.378	13.266	(16.699)	2.926.155
						<i>Borrowings</i>
						<i>Medium term notes</i>
						<i>Bonds payables</i>
						<i>Lease liabilities</i>
						<i>Subordinated loan</i>
						<i>Total liabilities from</i>

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

38. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH
(Lanjutan)

38. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION
(Continued)

Tahun berakhir 31 Desember/Year ended 31 December 2024						
	31 Desember/ December 2023	Arus kas masuk (keluar) bersih/Net cash in (out)- flow	Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange movement	Pergerakan beban transaksi/ Transaction cost movement	Pergerakan utang bunga/ Interest payable movement	31 Desember/ December 2024
Pinjaman yang diterima	4.972.981	(1.308.636)	(5.884)	20.516	(7.486)	3.671.491
Surat utang jangka menengah	302.098	-	-	155	-	302.253
Utang obligasi	922.521	312.000	-	754	5.674	1.240.949
Liabilitas sewa	21.452	(4.492)	-	-	789	17.749
Pinjaman subordinasi	13.096	-	-	-	2	13.098
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	6.232.148	(1.001.128)	(5.884)	21.425	(1.021)	5.245.540

Borrowings

Medium term notes

Bonds payables

Lease liabilities

Subordinated loan

Total liabilities from financing activities

39. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM EFEKTIF

39. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) but not yet effective for the Company's financial statements for the year ended 31 December 2025 are as follows:

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026:

PSAK that will become effective on 1 January 2026:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan";
- Amendemen Tahunan 2024 "Amendemen PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207";

- Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 "Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments";
- Annual Improvements 2024 "Amendments to PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, and PSAK 207";

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027:

PSAK that will become effective on 1 January 2027:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan";

- PSAK 118 "Presentation and Disclosures in Financial Statements";

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

As at the authorization date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the new standard to the financial statements.

40. REKLASIFIKASI AKUN

40. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Laporan posisi keuangan Perusahaan periode 31 Desember 2024 yang telah direklasifikasi adalah sebagai berikut:

The statement of financial position as of 31 December 2024 has been reclassified as follow:

Tahun berakhir 31 Desember 2024 / Year Ended 31 December 2024				
	Dilaporkan sebelumnya / As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassified	Setelah reklasifikasi / After reclassified	
Piutang pembiayaan – bersih	5.574.544	29.623	5.604.167	Financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan – bersih	378.940	108.791	487.731	Finance lease receivables – net
Piutang lain-lain	188.900	(138.414)	50.486	Other Receivable

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

40. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

Reklasifikasi terhadap informasi keuangan komparatif tahun 2024 untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan tahun berjalan. Reklasifikasi piutang dari jaminan aset keuangan dari piutang lain-lain menjadi piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan.

Reklasifikasi ini tidak berdampak terhadap total aset, total liabilitas, ekuitas, maupun laba rugi perusahaan dan hanya mempengaruhi penyajian dan klasifikasi akun dalam laporan posisi keuangan.

40. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (Continued)

Certain reclassifications have been made to the 2024 comparative financial information to improve comparability with the current year's financial statements. These reclassification relates to receivables from financed asset from other receivables to financing receivables and lease receivables.

This reclassification has no impact on the Company's total assets, total liabilities, equity or statement of profit or loss and other comprehensive income.

41. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (TIDAK DIAUDIT)**a. Rasio - Rasio Keuangan Otoritas Jasa Keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Rasio yang telah dihitung Perusahaan antara lain:

	31 Desember/December	
	2025	2024
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	90,99%	86,82%
Rasio Modal inti terhadap Modal Disetor	81,30%	117,15%
Rasio <i>Gearing</i>	2,89x	3,61x
<i>Return on assets</i>	(6,70%)	(4,55%)
<i>Return on equity</i>	(33,55%)	(17,90%)
Rasio piutang pembiayaan terhadap pinjaman	126,21%	113,88%
Rasio piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total piutang pembiayaan	15,96%	24,89%
Rasio permodalan	41,08%	32,52%
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	2,38%	2,54%
Rasio piutang sewa pembiayaan bermasalah	1,25%	1,73%

Beberapa rasio yang digunakan Perusahaan untuk memonitor permodalan antara lain rasio imbal hasil ekuitas dan rasio solvabilitas. Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki.

41. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (UNAUDITED)**a. Financial Ratios of Financial Service Authority**

As of 31 December 2025 and 2024, the Company has complied all ratios which required from Regulation of Financial Services Authority Republic of Indonesia No. 35/POJK.05/2018 regarding Implementation of Multifinance Company Operation. Ratios calculated by the Company among others:

Financing to asset ratio (FAR)
Modal Inti terhadap Modal Disetor ratio
Gearing ratio
Return on assets
Return on equity
Financing to funding ratio
Receivable for investment financing and working capital financing to total financing receivable ratio
Capital ratio
Non-performing financing consumer ratio
Non-performing finance lease ratio

Several ratios used by the Company to monitor capital are return on equity ratio and solvency ratio. Return on equity ratio is used to identify the Company's capability to earn profit from the invested equity and is reflected through the comparison between net income to equity.

Solvency ratio is used to identify the Company's capability to fulfill the Company's obligation through utilizing its own capital.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

41. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (TIDAK DIAUDIT) (Lanjutan)

a. Informasi Umum

Berdasarkan Surat Keputusan No. Ref: 0855/MPMF/HRM/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, Perusahaan mengangkat Suviana sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak tanggal 1 April 2019. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.

Pembentukan divisi Audit Internal Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 dan No. 56/POJK.04/2015.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai masing-masing 952 dan 1.035 karyawan tetap.

b. Manajemen Modal

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti peraturan OJK yang berlaku tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp 100.000;
- Rasio piutang pembiayaan neto terhadap jumlah aset (*financing to asset/ FAR ratio*) paling rendah 40%;
- Modal sendiri Perusahaan minimum sebesar 50% dari modal disetor (Rasio Modal Sendiri Modal Disetor/ rasio MSMD);
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) maksimum 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

41. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (UNAUDITED) (Continued)

a. General Information

Based on Decision Letter No. Ref: 0855/MPMF/HRM/03/2019 dated 28 March 2019, the Company appointed Suviana as Corporate Secretary, effective since 1 April 2019. The Corporate Secretary's appointment has complied with the requirements of OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014.

The establishment of the Company's Internal Audit Division has complied with the requirements of OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 and No. 56/POJK.04/2015.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company had 952 and 1,035 permanent employees, respectively.

b. Capital Management

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the prevailing regulation of OJK regarding conducting the business of Multi-Finance Companies which have some provisions as follows:

- The Company's paid-up capital of minimum Rp 100,000;
- Net financing receivables to total assets (*financing to asset/ FAR ratio*) at minimum 40%;
- The Company's equity amounting to minimum 50% of paid-up capital (*MSMD ratio*);
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (*gearing ratio*) is maximum 10 times, both for foreign and domestic loans.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**41. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA (TIDAK DIAUDIT) (Lanjutan)**

c. Risiko operasional

Risiko operasional biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem maupun hal-hal yang lain yang dapat berdampak pada operasional Perusahaan. Untuk mencegah timbulnya risiko operasional, Perusahaan melakukan beberapa hal:

- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksanaan dan kontrol, sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* ("SOP") baku Perusahaan. Sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang sudah digariskan oleh SOP.
- Perusahaan menggunakan Sistem Confins agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perusahaan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.
- Perusahaan juga sudah memiliki unit kerja yang melakukan tinjauan dan evaluasi periodik terhadap kebijakan-kebijakan dan SOP secara berkala.
- Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut.

**41. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (UNAUDITED)
(Continued)**

c. Operational risk

Operational risk is usually caused by lack or failure of internal process, human errors, system failure or others that may impact the Company's operation. The Company implements the followings to prevent operational risk:

- *A clear segregation of duties between implementation and controls, as executors, activities based on Standard Operating Procedures ("SOP") of the Company. Whereas the control function ensures that the activities comply with the requirements that have been outlined by the SOP.*
- *The Company uses Confins system to guarantee the continuity of operating system. The Company implemented on-line and real time system so the management can directly monitor all activities, and take the right decision in a timely manner to mitigate any possible risks that may occur due to negligence, system malfunction, or deviation from SOP implementation and/or the Company's policies.*
- *The Company also has a working unit to perform periodic review and evaluation of policies and SOPs on a regular basis.*
- *The Company continuously develops the skills and knowledge of its employees through a variety of trainings to suppress the frequency of human and operational system errors and the impact of financial losses caused by it to a minimum level.*



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00107/2.1005/AU.1/09/1212-2/1/III/2026

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ("Perseroan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No.: 00107/2.1005/AU.1/09/1212-2/1/III/2026

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia:

Opinion

We have audited the financial statements of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2025, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan (Kerugian Kredit Ekspektasian “KKE”)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pembiayaan sebesar Rp 237.626 juta (Lihat Catatan 7 - Piutang pembiayaan).

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan merupakan estimasi terbaik manajemen pada tanggal pelaporan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan sebagai hal audit utama karena penentuan atas KKE memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan KKE, Perseroan mengadopsi model yang kompleks, menggunakan sejumlah asumsi, dan mengandalkan input data internal dan eksternal (Lihat Catatan 5 - Penggunaan estimasi dan pertimbangan).

Pengukuran KKE melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KKE;
- Segmentasi portfolio yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa;
- Penentuan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan (perpindahan dari Tahap 1 ke tahap 2) atau gagal bayar (perpindahan dari Tahap 2 ke Tahap 3) di dalam klasifikasi piutang pembiayaan ke dalam Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3;
- Penentuan variabel makroekonomi untuk perkiraan masa depan, penerapan skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas tertimbang setiap skenario.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung KKE untuk piutang pembiayaan untuk menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran KKE untuk piutang pembiayaan, termasuk antara lain:

- Penilaian dan persetujuan pemilihan model, asumsi, dan data yang digunakan dalam model KKE;

Allowance for impairment losses of financing receivables (Expected Credit Losses “ECL”)

As of 31 December 2025, the Company reported allowance for impairment losses for financing receivables of Rp 237,626 million (Refer to Note 7 - Financing receivables).

The allowance for impairment losses of financing receivables represents management's best estimate at the reporting date in accordance with the applicable accounting standard.

We identified allowance for impairment losses of financing receivables as a key audit matter because the determination of ECL requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the ECL, the Company adopted complex models, using various assumptions, and relied on internal and external data inputs (Refer to Note 5 - Use of estimates and judgments).

The measurement of ECL involves significant management judgement, including, among others:

- *Selection of models, data and assumptions used in the ECL calculation;*
- *Segmentation of portfolios sharing similar credit risk characteristics;*
- *Determination of whether or not there was a significant increase in credit risk (transfer from Stage 1 to Stage 2) or a default (transfer from Stage 2 to Stage 3) in the classification of financing receivables into Stage 1, Stage 2 and Stage 3;*
- *Determination of macroeconomic variables for forward-looking measurement, application of economic scenarios and its probability weightings*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We obtained an understanding of management's key controls and approach in the ECL calculation for financing receivables to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to ECL measurement for financing receivables, including, among others:

- *Assessment and approval of the selection of model, assumption, data used in ECL models;*

- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi atas pemasukan data kritikal ke dalam sistem sumber dan perpindahan data kritikal dari sistem sumber ke dalam sistem perhitungan KKE;
- Rekonsiliasi dan analisis atas kelengkapan perhitungan KKE terhadap seluruh piutang pembiayaan;
- Konfigurasi sistem untuk perhitungan *Days Past Due* (DPD) di dalam sistem.
- Penelaahan dan persetujuan manajemen atas hasil KKE.

Kami juga menguji efektivitas operasi pengendalian atas konfigurasi sistem untuk perhitungan *Days Past Due* (DPD) di dalam sistem.

Selain itu, prosedur audit kami mencakup:

- Melibatkan spesialis *financial risk modelling* internal kami untuk mengevaluasi model, asumsi (termasuk variabel makroekonomi) dan *input* yang digunakan untuk menghitung KKE apakah telah memadai, menilai apakah perubahan yang dilakukan atas model, asumsi dan input yang digunakan didukung dengan justifikasi yang memadai, dan melakukan perhitungan ulang KKE atas sampel yang dipilih;
- Membandingkan variabel makroekonomi dan asumsi lainnya yang digunakan dengan sumber informasi eksternal maupun internal, dan mengidentifikasi apakah ada indikator yang berlawanan;
- Pengujian relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan KKE terhadap sistem sumber;
- Pengujian ketepatan pengelompokan piutang pembiayaan ke dalam Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3. Kami melakukan pengujian akurasi perhitungan jumlah hari tunggakan yang menjadi basis penentuan tahap KKE;
- Mengevaluasi analisis *back-testing* yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan KKE;
- Pengujian ketepatan pengelompokan segmentasi piutang pembiayaan. Kami melakukan pengecekan akurasi tipe produk ke dalam perhitungan KKE;
- Melakukan *stand-back assessment* atas jumlah KKE untuk menentukan apakah KKE memadai dengan mempertimbangkan kualitas piutang pembiayaan secara keseluruhan, profil risiko, kondisi makroekonomi dan faktor lainnya;

- *Controls over completeness and accuracy of the input of critical data into source system and the transfer of critical data from source system to ECL calculation system;*
- *Reconciliation and analysis on completeness of ECL calculation over all of financing receivables;*
- *System configuration for calculating Days Past Due (DPD) within the system.*
- *Management's review and approval over the ECL results.*

We also tested the operating effectiveness of system configuration for calculating Days Past Due (DPD) within the system.

In addition, our audit procedures included:

- *Involved our internal financial risk modelling specialists to evaluate models, assumptions (including macroeconomic variables) and input used in ECL calculation as to whether they are appropriate, assess whether the changes of model, assumptions and input used are supported with appropriate justification, and reperform the ECL calculation on selected samples;*
- *Compared the macroeconomic variables and other assumptions used with external and internal information sources, and identify contradictory indicators;*
- *Tested the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating ECL to the source system;*
- *Tested the appropriateness of financing receivables classification into Stage 1, Stage 2 and Stage 3. We tested the accuracy of days past due which are used as the basis for determining ECL staging;*
- *Evaluated back-testing analysis by the management to assess the sufficiency of ECL;*
- *Tested the appropriateness of financing receivables segmentation classification. We check the accuracy of product type for ECL calculation;*
- *Performed stand-back assessment of the ECL amount to determine whether the ECL was reasonable by considering the overall financing receivables quality, risk profile, macroeconomic condition and other factors;*

- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pengakuan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan melaporkan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp 49.962 juta (Lihat Catatan 32 – Pajak Penghasilan).

Pengakuan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal merupakan estimasi terbaik manajemen pada tanggal pelaporan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Kami mengidentifikasi pengakuan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal sebagai hal audit utama karena penentuan atas pengakuan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan pengakuan aset pajak tangguhan, Manajemen menggunakan sejumlah asumsi berkaitan dengan perkiraan laba kena pajak di masa yang akan datang (Lihat Catatan 5 - Penggunaan estimasi dan pertimbangan).

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memperoleh pemahaman mengenai pendekatan manajemen dalam pengakuan aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian fiskal untuk menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya.

Prosedur audit kami mencakup:

- Mengevaluasi proyeksi manajemen terhadap laba atau rugi kena pajak Perseroan untuk tahun pajak 2026 sampai dengan 2030.
- Mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari asumsi dan data mendasar yang digunakan dalam proyeksi.
- Melakukan *corroborative inquiries* untuk menentukan kewajaran penilaian manajemen dan mengidentifikasi bukti yang bertentangan.
- Melakukan analisis sensitivitas pada asumsi Perseroan perihal proyeksi laba kena pajak untuk tahun pajak 2026-2030.
- Mengevaluasi analisis uji-balik (*back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kewajaran proyeksi Perseroan atas pendapatan kena pajak.

- *Evaluated the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

Recognition of deferred tax asset from tax loss carry forward

As of 31 December 2025, the Company reported deferred tax asset from tax loss carry forward of Rp 49,962 million (Refer to Note 32 – Income Tax).

Recognition of deferred tax asset from tax loss carry forward represents management's best estimate at the reporting date in accordance with the applicable accounting standard.

We identified recognition of deferred tax asset from tax loss carry forward as a key audit matter because the determination of recognition of deferred tax asset from tax loss carry forward requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the recognition of deferred tax asset, the management used various assumptions, in relation to future taxable profit forecasts (Refer to Note 5 - Use of estimates and judgments).

How our audit addressed the Key Audit Matter

We obtained an understanding of management's approach in the recognition of deferred tax assets from tax loss carry forward to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks

Our audit procedures included:

- *Evaluated management's projections of the Company's taxable income or loss for fiscal years 2026 through 2030.*
- *Evaluated the validity and reliability of the assumptions and underlying data used in the projections*
- *Performed corroborative inquiries to determine the reasonableness of management's assessment and identify any contradictory evidence*
- *Performed sensitivity analysis on the Company's assumptions related to projected taxable income for FY2026-2030*
- *Evaluated back-testing analysis by the management to assess the reasonableness of the Company's taxable income projections.*



Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan 2025 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan 2025 Perseroan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2025 Annual Report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The 2025 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Company's 2025 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it



berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, action taken to eliminate threats or safeguards applied.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Novie, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1212

27 Maret 2026

27 March 2026



00107/2.1005/AU.1/09/1212-2/1/RI/2026

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

Lippo Kuningan, Lantai 23 & 25/23rd & 25th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Kuningan, Jakarta 12940
Indonesia

T. 1500309

www.jaccs-mpmfinance.com